

MARC EDELMAN & SATURNINO M. BORRAS JR.

DINAMIKA POLITIK GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria



DINAMIKA POLITIK GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

MARC EDELMAN

Guru Besar Antropologi di Hunter College
dan Graduate Center, City University of New York
(CUNY), Amerika Serikat.

SATURNINO M. BORRAS JR.

Guru Besar Kajian Agraria di International Institute
of Social Studies (ISS), Den Haag, Belanda; guru besar tamu
di China Agricultural University (CAU), Beijing, Tiongkok;
peneliti di Transnational Institute, Amsterdam, Belanda
dan di Food First, California, Amerika Serikat.

Edelman dan Borras tidak hanya berupaya menyuguhkan informasi terperinci tentang beragam gerakan agraria transnasional yang tidak banyak kita pahami, tetapi juga menelusuri akar-akar domestik dari banyak gerakan itu, menelaah komposisi kewilayahan, kelas, dan ideologi masing-masing gerakan, hubungan mereka dengan LSM maupun lembaga internasional, serta strategi mereka menghadapi neoliberalisme global. Tak kalah penting, untuk sebuah buku dengan bahasan yang luas, buku ini juga sangat enak dibaca.

*Sidney Tarrow, Cornell University;
penulis buku The New Transnational Activism*

Bagi kita yang bersemangat membangun gerakan agraria transnasional (GAT) radikal, penting sekali memahami dengan jernih ruang-ruang di mana GAT sudah hadir atau bisa tumbuh, untuk mengembangkan telaah yang tajam serta kreatif atas berbagai persoalan yang dihadapi GAT, dan juga untuk bersikap jujur tentang keterbatasan mereka. Buku ini menyuguhkan pandangan yang luas tentang GAT, memetakan dilema dan kekuatan mereka serta jalur-jalur yang menjanjikan untuk mereka tempuh, menantang intuisi kita dan memantik kita untuk berpikir kritis.

Sofía Monsalve Suárez, FIAN International

Bertumpu pada pengamalan puluhan tahun dalam penelitian terlibat, Edelman dan Borras menghadirkan pemetaan yang amat kaya tentang perubahan medan gerakan agraria transnasional. Mereka menyoroti persoalan-persoalan pokok terkait beragam organisasi gerakan, LSM, lembaga donor, gangguan politik, klaim-klaim representasi, perubahan pola bantuan pembangunan, serta arena politik kaum tani yang berlapis dan terus bergeser. Sebuah sumbangsih yang sangat berarti, dan seharusnya dibaca oleh cendekiawan maupun praktisi.

*Margaret Keck, John Hopkins University;
salah satu penulis buku Activists Beyond Borders*

Harapan kita yang sudah sekian lama menantikan sebuah uraian komprehensif, kaya secara historis, mendalam secara intelektual, dan mudah dipahami tentang gerakan agraria transnasional akhirnya terjawab sepenuhnya. Kita akan berutang lama pada Edelman dan Borras atas sumbangsih mereka yang luar biasa dan langgeng bagi keilmuan agraria ini.

*James C. Scott, pendiri Program Kajian Agraria Yale University,
Amerika Serikat; penulis buku The Art of Not Being Governed*

BUKU-BUKU SERI KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi) (2019), terjemahan dari *Class Dynamics of Agrarian Change* (2010) karya Henry Bernstein

Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian (2020), terjemahan dari *Peasants and The Art of Farming: A Chayanovian Manifesto* (2013) karya Jan Douwe van der Ploeg

Rezim Pangan dan Masalah Agraria (2021), terjemahan dari *Food Regimes and Agrarian Questions* (2013) karya Philip McMichael

Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan (2021), terjemahan dari *Sustainable Livelihoods and Rural Development* (2015) karya Ian Scoones

Pertanian dan Masalah Generasi (2026), terjemahan dari *Agriculture and the Generation Problem* (2020) karya Ben White

Aktivisme Cendekia dan Perjuangan Agraria (2026), terjemahan dari *Scholar-Activism and Land Struggles* (2023) karya Saturnino M. Borras Jr. dan Jennifer C. Franco

KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

Edisi Indonesia dari *Agrarian Change and Peasant Studies Series*, buku-buku kecil dengan isu besar, yang dikelola oleh jaringan internasional cendekiawan-aktivis agraria dalam wadah Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS).

EDITOR SERI

Saturnino M. Borras Jr., International Institute of Social Studies (ISS),
Den Haag, Belanda

Sergio Coronado, Center for Research and Popular Education (CINEP),
Kolombia

Ruth Hall, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS),
Universitas of the Western Cape, Afrika Selatan

Max Spoor, ISS, Den Haag, Belanda

Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko

Jingzhong Ye, College of Humanities and Development Studies (COHD),
China Agricultural University, Tiongkok

KOMITE PENASIHAT EDITORIAL INTERNASIONAL

Duygu Avci, Sabanci Üniversitesi, Turki

Gonzalo Colque, Fundación Tierra, Bolivia

Alessandra Corrado, Università della Calabria, Italia

Raúl Delgado-Wise, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko

Bernardo Mançano Fernandes, Universidade Estadual Paulista,
Presidente Prudente (UNESP), Brasil

Sayaka Funada-Classen, Jepang

Hamza Hamouchene, SIYADA Network dan Transnational Institute (TNI)
MENA Programmes

Shuji Hisano, Kyoto University, Jepang

Umut Kocagöz, International Institute of Social Studies (ISS), Belanda

Koichi Ikegami, Kindai University, Jepang

Alexander Nikulin, Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA), Rusia

Fatih Özden, Ege Üniversitesi, Turki

Laksmi Adriani Savitri, FIAN, Indonesia

Sergio Schneider, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Brasil

Wonkyu Song, Research Institute of Agriculture and Peasant Policy,
Korea Selatan

Chayan Vaddhanaphuti, Regional Center for Social Science and Sustainable
Development (RCSD), University of Chiang Mai, Thailand

DINAMIKA POLITIK GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

MARC EDELMAN & SATURNINO M. BORRAS JR.

PENERJEMAH
Lubabun Ni'am

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria





Anggota Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)

Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional

© Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr.

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris dengan judul *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements* pada 2016 oleh Practical Action Publishing, Inggris (www.practicalactionpublishing.com) dan Fernwood Publishing, Kanada (www.fernwoodpublishing.ca), sebagai buku No. 5 dalam *Agrarian Change and Peasant Studies Series* (Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria).

Diterbitkan INSISTPress atas kerjasama dengan Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS) serta dukungan dari International Institute of Social Studies (ISS)/Erasmus University Rotterdam (EUR), Belanda; PLAAS (Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies), University of Western Cape (UWC), Afrika Selatan; dan College of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University (CAU), Tiongkok.



International
Institute of
Social Studies



COHD 人文与发展学院

College of Humanities and Development Studies (COHD)

Penerjemah: Lubabun Ni'am

Penyunting Ahli: Laksmi A. Savitri dan Ben White

Penyunting: Achmad Choirudin dan Yudi Bachrioktora

Perwajahan Isi: Damar N. Sosodoro

Ilustrasi Sampul: Muhammad Yusuf (Ucup) (lukisan berjudul "Reforma Agraria")

xxxii + 220 halaman/14 x 20 cm

ISBN: 978-623-6179-16-1 [cetak]

ISBN: 978-623-6179-34-5 [PDF]

Cetakan pertama, Februari 2026

INSISTPress

Kampus Perdikan-INSIST, Jl. Kaliurang Km. 18,
Padukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582

Telepon: +6285102594244 | Surat-el: redaksi@insistpress.id

Tapakmaya: www.insistpress.id

DAFTAR ISI

AKRONIM & SINGKATAN — xi

PENGANTAR ISS/EUR — xxi

PENGANTAR EDITOR ICAS — xxvii

PRAKATA PENULIS — xxxi

PENDAHULUAN	Kerangka untuk Memahami Gerakan Agraria Transnasional — 1
BAB 1	Gerakan Agraria Transnasional: Sejarah & Keberagamannya — 13
BAB 2	Diferensiasi Internal Gerakan Agraria Transnasional: Pertarungan Kelas, Identitas, & Ideologi — 41
BAB 3	Perbedaan Kelas, Identitas, & Ideologi Antar-Gerakan Agraria Transnasional — 69
BAB 4	Menghubungkan Ranah Internasional, Nasional, & Lokal dalam Gerakan Agraria Transnasional — 99
BAB 5	“Bukan tentang Kami kalau Tanpa Kami”: Gerakan Agraria Transnasional, LSM, & Lembaga Donor — 117
BAB 6	Gerakan Agraria Transnasional & Lembaga Antarpemerintah — 145
BAB 7	Tantangan — 171

PUSTAKA — 179

INDEKS — 209

AKRONIM & SINGKATAN

ACWW	Associated Country Women of the World (Persatuan Perempuan Desa Sedunia)
AFASA	African Farmers Association of South Africa (Asosiasi Petani Afrika di Afrika Selatan)
AFSA	Australian Food Sovereignty Alliance (Aliansi Kedaulatan Pangan Australia)
AGRA	Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Indonesia
AgriSA	Rumah Petani Afrika Selatan
Amihan	Federasi Nasional Perempuan Tani, Filipina
ANACH	Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Serikat Petani Nasional Honduras)
ANFS	Arab Network for Food Sovereignty (Jaringan Kedaulatan Pangan Arab)
ANPF	All Nepal Peasants Federation (Federasi Petani Seluruh Nepal)
APC	Asian Peasant Coalition (Koalisi Petani Asia)
APMW	Andhra Pradesh Migrants Workers Union (Serikat Pekerja Migran Andhra Pradesh), India
ARWC	Asian Rural Women's Coalition (Koalisi Perempuan Pedesaan Asia)
ASOCODE	Asociación Centroamericana de Organizaciones Campesinas para la Cooperación y el Desarrollo (Asosiasi Organisasi Tani Amerika Tengah untuk Kerjasama dan Pembangunan)
ATC	Asociación de Trabajadores del Campo (Asosiasi Pekerja Tani Pedesaan), Nikaragua

BKF	Bangladesh Krishok Federation (Federasi Petani Bangladesh)
BKS	Bangladesh Kishani Sabha (Serikat Perempuan Tani Bangladesh)
BKU	Bharatiya Kisan Union (Serikat Petani India, nasional dan cabang-cabang daerah), India
CAOI	Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Koordinator Organisasi Masyarakat Adat Andes)
CCODP	Canadian Catholic Organization for Development and Peace (Organisasi Katolik Kanada untuk Pembangunan dan Perdamaian)
CCP (PKT)	Chinese Communist Party (Partai Komunis Tiongkok)
CENESTA	Centre for Sustainable Development and Environment (Pusat Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup), Iran
CETIM	Centre Europe-Tiers Monde (Pusat Kajian Eropa-Dunia Ketiga), Swiss
CFA	Canadian Federation of Agriculture (Federasi Pertanian Kanada)
CFS	Committee on World Food Security (Komite Ketahanan Pangan Dunia), PBB
CFU	Commercial Farmers Union (Serikat Petani Komersial), Zimbabwe
CIDA	Canadian International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Kanada)
CILSS	Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (Komite Antarnegara untuk Penanggulangan Kekeringan di Sahel)
CLOC	Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Koordinator Organisasi Pedesaan Amerika Latin)

CNA	Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (Konfederasi Pertanian dan Peternakan Brasil)
CNCR	Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux du Sénégal (Dewan Nasional untuk Kerjasama Rakyat Pedesaan), Senegal
CNTC	Central Nacional de Trabajadores del Campo (Sentral Pekerja Pedesaan Nasional), Honduras
COATI	Colectivo para la Autogestión de Tecnologías para la Interpretación (Kolektif Swakelola Teknologi Penerjemahan Lisan)
COCOCH	Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Dewan Koordinasi Organisasi Petani Honduras)
CONAMPRO	Coordinadora Nacional de Pequeños y Medianos Productores de Guatemala (Koordinator Nasional Petani Kecil dan Menengah Guatemala)
CONTAG	Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian), Brasil
COPA	Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union (Komite Organisasi Pertanian Profesional Uni Eropa)
COPROFAM	Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiars del Mercosur (Konfederasi Produsen Berkbasis Keluarga untuk Pasar Bersama Amerika Selatan)
CPE	Coordination Paysanne Européenne (Koordinasi Petani Eropa)
CSD	Commission on Sustainable Development (Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB)
CSO (OMS)	<i>civil society organization</i> (organisasi masyarakat sipil)

ETC Group	Erosion, Technology and Concentration Group (Kelompok Kajian dan Advokasi tentang Erosi, Teknologi, dan Konsentrasi Kekuasaan), Kanada
FAO	Food and Agricultural Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB)
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Tentara Revolusioner Kolombia)
FIAN	Foodfirst Information and Action Network (Jaringan Informasi dan Aksi untuk Kedaulatan Pangan)
FIMARC	Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques (Federasi Internasional Gerakan Umat Katolik Pedesaan)
GAT	gerakan agraria transnasional
GATT	General Agreement of Tariffs and Trade (Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan)
GCAR	Global Campaign on Agrarian Reform (Kampanye Global untuk Reforma Agraria)
GMO	<i>genetically modified organism</i> (organisme rekayasa genetika)
GNI (PNB)	<i>gross national income</i> (pendapatan nasional bruto)
GRAIN	Genetic Resources and Action International (Aksi Internasional untuk Sumberdaya Genetika), Spanyol
HIC	Habitat International Coalition
HIPC	<i>heavily indebted poor countries</i> (negara-negara miskin yang paling banyak berutang)
HIVOS	Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Institut Humanis untuk Kerjasama dengan Negara-Negara Berkembang), Belanda

IAASTD	International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Kajian Internasional tentang Pengetahuan, Sains, dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan)
IALA	Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología “Paulo Freire” (Institut Universitas Agroekologi Amerika Latin “Paulo Freire”)
ICA	International Commission of Agriculture (Komisi Pertanian Internasional), Paris
ICARRD	International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (Konferensi Internasional untuk Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan)
ICC	International Coordinating Committee (Komite Koordinasi Internasional Vía Campesina)
ICCO	Interchurch Organization for Development Cooperation (Organisasi Antargereja untuk Kerjasama Pembangunan), Belanda
ICSF	International Collective in Support of Fishworkers (Kolektif Internasional untuk Penguatan Pekerja Perikanan), India dan Belgia
ICW	International Council of Women (Dewan Perempuan Internasional)
IFAD	International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian)
IFAP	International Federation of Agricultural Producers (Federasi Internasional Produsen Pertanian)
IFC	International Finance Corporation (Korporasi Keuangan Internasional)

IFIS	<i>international financial institutions</i> (lembaga keuangan internasional)
IIA	International Institute of Agriculture (Institut Pertanian Internasional), Roma
ILC	International Land Coalition (Koalisi Internasional untuk Akses Tanah)
IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
IPC	International Planning Committee for Food Sovereignty (Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan)
IUF	International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco & Allied Workers' Associations (Serikat Pekerja Internasional untuk Sektor Pangan, Pertanian, Hotel, Restoran, Katering, Tembakau, dan Sektor Terkait)
IWW	Industrial Workers of The World (Buruh Industri Sedunia)
KMP	Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Gerakan Petani Filipina)
KMT	Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok)
KRRS	Karnataka Rajya Raitha Sangha (Serikat Petani Karnataka), India
KT	Konferensi Tingkat Tinggi
LPM	Landless People's Movement (Gerakan Rakyat Tunakisma), Afrika Selatan
LRAN	Land Research and Action Network (Jaringan Penelitian dan Aksi untuk Reforma Agraria)
LSM	lembaga swadaya masyarakat
LTO	Land- en Tuinbouw Organisatie (Asosiasi Pertanian dan Hortikultura), Belanda
LVC	La Vía Campesina

MIJARC	Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (Gerakan Internasional Pemuda Katolik Pertanian dan Pedesaan)
MLAR	<i>market-led agrarian reform</i> (reforma agraria berbasis pasar)
MOCASE	Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Gerakan Petani Santiago del Estero), Argentina
MONLAR	Movement for National Land and Agricultural Reform (Gerakan Reforma Agraria), Sri Lanka
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Gerakan Pekerja Tunakisma), Brasil
NAFTA	North American Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara)
NAV	Nederlandse Akkerbouw Vakbond (Serikat Petani Tanaman Pangan), Belanda
NEP	New Economic Policy (Kebijakan Ekonomi Baru), Uni Soviet
NFFC	National Family Farm Coalition (Koalisi Nasional Pertanian Keluarga), Amerika Serikat
NFU	National Farmers Union (Serikat Petani Nasional), Kanada
NGO (ornop/LSM)	<i>non-governmental organization</i> (organisasi nonpemerintahan/lembaga swadaya masyarakat)
NLC	National Land Committee (Komite Nasional Reforma Agraria), Afrika Selatan
NRSAP	Nandya Raita Samakya (Serikat Petani Nandya), Andhra Pradesh, India
ODA	<i>overseas development assistance</i> (bantuan luar negeri untuk pembangunan)
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi)

OEWG	Open-Ended Working Group (Kelompok Kerja Terbuka)
OWINFS	Our World Is Not For Sale (Dunia Kita Tidak Dijual)
PAFO	Pan-African Farmers' Organization (Organisasi Petani Pan-Afrika)
Pamalakaya	National Federation of Small Fisherfolk Organization in the Philippines (Gerakan Nasional Nelayan Filipina)
PAN-AP	Pesticides Action Network Asia Pacific (Jaringan Antipestisida Asia dan Pasifik)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PFS	Paulo Freire Stitching (Yayasan Paulo Freire), Belanda
PKT	Partai Komunis Tiongkok
PROPAC	Plateforme Sous-Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centrale (Wahana Regional Organisasi Petani Afrika Tengah)
RAI	<i>responsible agricultural investment</i> (investasi pertanian yang bertanggung jawab)
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
ROPPA	Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de L'Afrique de L'Ouest (Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat)
SACAU	Southern African Confederation of Agricultural Unions
SOC	Sindicato Obrero del Campo (Serikat Pekerja Pedesaan), Andalusia

SRA	Sociedad Rural Argentina (Masyarakat Pedesaan Argentina)
SPI	Serikat Petani Indonesia
TGs	Tenure Guidelines (Pedoman Tenurial)
TNC	<i>transnational corporation</i> (korporasi/perusahaan transnasional)
TNI	Transnational Institute
UNAG	Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (Serikat Petani dan Peternak Nasional), Nikaragua
UNDRIP	United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)
UNHRC	United Nations Human Rights Council (Dewan HAM PBB)
UPANACIONAL	Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Serikat Petani Kecil dan Menengah), Kosta Rika
UPPA	Union Provisoire des Paysans Africains (Persatuan Sementara Petani Afrika)
USFSA	U.S. Food Sovereignty Alliance (Aliansi Kedaulatan Pangan Amerika Serikat)
VGs	Voluntary Guidelines (Pedoman Sukarela)
WAMIP	World Alliance of Mobile Indigenous People (Aliansi Masyarakat Adat dan Penggembala Berpindah Sedunia)
WFF	World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (Forum Pekerja Perikanan Dunia)
WFFP	World Forum of Fisher Peoples (Forum Rakyat Nelayan Dunia)
WFO	World Farmers' Organisation (Organisasi Petani Dunia)

WSF	World Social Forum (Forum Sosial Dunia)
WTO	World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)
WWOOF	World Wide Opportunities on Organic Farms (Wahana Pertanian Organik Sedunia)
ZANU	Zimbabwe African National Union (Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe)
ZIMSOFF	Zimbabwe Small Organic Smallholder Farmers Forum (Forum Petani Organik Zimbabwe)
ZNFU	Zambia National Farmers Union (Serikat Petani Nasional Zambia)

PENGANTAR ISS/EUR

Gagasan-gagasan yang membebaskan bisa saja lahir dari rahim politik pengetahuan yang sangat tidak demokratis—yaitu soal siapa yang berhak memproduksi dan menggunakan pengetahuan, sejauh mana, bagaimana caranya, dan untuk tujuan apa? Pengetahuan siapa yang dianggap absah? Di tingkat global, sirkulasi pengetahuan—bagaimana pengetahuan dihasilkan, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, dan dimanfaatkan—mirip seperti barang dagangan lain dalam kehidupan sehari-hari: dikuasai segelintir pihak, dimonopoli, dan diperjualbelikan demi keuntungan. Di dunia sekarang ini, setidaknya di bidang ilmu sosial, sirkulasi pengetahuan terpusat di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang kaya sumberdaya di negara-negara Utara, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan. Untuk bisa mengikuti perkembangan mutakhir dunia akademik—yang menjadi prasyarat agar seseorang bisa menghasilkan ide penelitian, proposal, atau publikasi yang dianggap “orisinal”—seorang peneliti harus punya akses ke berbagai hal: pendanaan penelitian, kesempatan menulis untuk jurnal dan penerbit buku bergengsi, langganan jurnal akademik, biaya penerbitan tulisan dalam skema akses terbuka/gratis (*open access*), dan perpustakaan dengan koleksi lengkap.

Namun, berbagai syarat keuangan dan logistik semacam itu jelas jauh di luar jangkauan banyak pemerintah, perguruan tinggi, maupun peneliti di Selatan Global. Pada 2024, biaya langganan tahunan untuk salah satu jurnal ilmu sosial papan atas mencapai US\$6.500 (sekitar Rp110 juta)—dengan jumlah artikel per edisi yang lebih banyak dibandingkan jurnal pada umumnya. Jurnal lain dari penerbit yang sama, yang juga tergolong “papan atas” tapi lebih rata-rata, mematok biaya langganan tahunan sebesar US\$2.700 (sekitar Rp45 juta). Dengan langganan jur-

nal, masyarakat luas bisa mengakses artikel-artikel di balik “gerbang berbayar”. Penulis bisa memilih skema Akses Terbuka agar tulisannya dapat diakses secara gratis, tapi dia harus membayar penerbitnya. Biaya penerbitan artikel berskema Akses Terbuka dikenal dengan istilah *Article Publishing Charge* (APC); di jurnal yang pertama tadi itu, misalnya, APC satu artikel bisa mencapai US\$4.300 (sekitar Rp70 juta) belum termasuk pajak. Bandingkan dengan gaji dosen-tetap perguruan tinggi negeri di banyak negara berpendapatan rendah—menengah di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia, yang mungkin hanya sekitar US\$300 (sekitar Rp5 juta) per bulan. Gambaran ini menunjukkan betapa tidak demokratisnya struktur global dalam politik pengetahuan. Dari struktur timpang ini, muncul berbagai pandangan menyimpang tentang dunia beserta kehidupan di dalamnya. Dan dunia akademik bisa dan memang pernah dimanfaatkan untuk memproduksi pengetahuan yang justru membenarkan eksploitasi, penindasan, dan perusakan ekologi.

Tidak ada yang alamiah dari struktur politik pengetahuan global yang tidak demokratis ini. Ia merupakan perpanjangan dari logika kapital—dari perkembangan kapitalisme global yang penuh ketimpangan. Perguruan tinggi di seluruh dunia telah mengalami neoliberalisasi dalam berbagai bentuk, di mana keberhasilan peneliti dan lembaga secara individual lebih dihargai ketimbang etika moral komunitas akademik secara kolektif.

Para peneliti dan aktivis di balik serial buku kecil *Kajian Petani dan Perubahan Agraria* (yang tergabung dalam Initiatives in Critical Agrarian Studies [ICAS]), yang mulai digagas pada 2008, tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang turut melegitimasi *status quo* politik pengetahuan global. Mereka ingin memberikan sumbangsih kecil untuk mempertanyakan watak tidak demokratis dan struktur tak adil dari sirkulasi pengetahuan yang berlaku saat ini. Mereka ingin ikut membongkar struktur tersebut—dari cara pengetahuan diproduksi, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, hingga digunakan—seraya membangun

alternatifnya. Demokratisasi politik pengetahuan hanya bisa terwujud melalui banyak prakarsa serupa di berbagai penjuru dunia, dan melalui gerakan massa. Para peneliti akademik yang menempati posisi bawah dalam piramida politik pengetahuan global yang tak adil ini mesti mengambil peran penting dalam upaya membongkar sistem yang berlaku sekaligus merintis jalan baru. Inilah yang mendasari terbentuknya *Collective of Agrarian Scholar-Activists in the South* (CASAS, Kolektif Cendekiawan-Aktivistis di Selatan Global) sebagai sesuatu yang menjanjikan, menggugah, dan menginspirasi.

Struktur politik pengetahuan global yang timpang tidak hanya berlaku dalam dunia akademik. Dalam ilmu-ilmu sosial—khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis—setidaknya ada tiga ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kelahiran dan penggunaan pengetahuan yang membebaskan, yakni dunia akademik, komunitas lokal beserta basis rakyat gerakan sosialnya, dan lembaga penelitian serta pengembangan yang bercorak otonom. Komunitas ICAS memandang ketiganya sebagai komunitas-komunitas horizontal yang saling beririsan, bukan sebagai struktur hierarkis dengan para akademika di puncaknya. Para pengorganisir dan pemimpin serikat tani, misalnya, punya pengetahuan sangat mendalam tentang kehidupan petani—pengetahuan yang bahkan tidak bisa digapai oleh kalangan akademika atau peneliti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi nonpemerintahan (ornop), meskipun mereka bisa menghasilkan pengetahuan tersendiri dari mempelajari kondisi produksi dan reproduksi sosial kalangan petani yang sama. Dunia akademik memang kerap memegang peranan dominan, dan tak jarang juga secara sadar dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan ilmiah yang absah. Anggapan seperti ini layak dipertanyakan, karena komunitas ICAS memandang pengetahuan yang lahir dari luar dunia akademik juga sama pentingnya. Yang tak kalah penting ialah kemungkinan sinergi dari pertemuan tiga lingkaran penghasil pengetahuan yang berlainan ini. Inilah bagian dari proses demokratisasi politik pengetahuan.

Serial buku kecil ICAS merupakan suatu prakarsa yang bertujuan memberikan sumbangsih kecil dalam upaya demokratisasi politik pengetahuan. Edisi Indonesia ini kami anggap sangat penting dalam serial ini. Buku-buku ICAS—meskipun penyebarannya kami sadari belumah merata—telah tersedia dalam belasan bahasa, antara lain Inggris, Spanyol, Portugis, Mandarin, Jepang, Thai, Korea, Italia, Rusia, Arab, dan Burma. Tidak semua buku edisi awal bahasa Inggris seri ini diterjemahkan ke tiap bahasa tersebut, karena masing-masing tim penerjemah kolega kami di setiap bahasa memilih sendiri judul-judul yang mereka terjemahkan, dan mereka tidak punya sumberdaya logistik yang memadai untuk menerjemahkan dan menerbitkan semua volume secara bersamaan.

Dengan hadirnya edisi Indonesia serial buku kecil ICAS, kami berharap prakarsa sederhana ini dapat membantu membuka ruang-ruang interaksi dalam politik pengetahuan, khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis, dan secara lebih luas dalam kajian pembangunan. Kami berharap edisi Indonesia ini bisa memberikan dorongan tambahan bagi para peneliti dan aktivis di Indonesia untuk terlibat lebih aktif dan berkesinambungan dengan rekan-rekan mereka di mancanegara. Dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks inilah Erasmus University Professor Programme (demi dampak sosial yang positif) dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, melalui sub-program khusus bertajuk “Democratizing Knowledge Politics Initiative” (Prakarsa Demokratisasi Politik Pengetahuan), memberikan dukungan pendanaan sederhana untuk menjadikan edisi Indonesia ini tersedia secara Akses Terbuka (untuk format buku-el). Prakarsa dari universitas ini mendukung pendekatan kerja bergaya cendekiawan-aktivis, yang berupaya membangun ruang-ruang interaksi antara komunitas penghasil dan pengguna pengetahuan—baik dari dalam maupun luar dunia akademik. Perluasan serial buku kecil ICAS ke

dalam bahasa Indonesia merupakan langkah besar dalam proses demokratisasi politik pengetahuan.

Saturnino M. Borras Jr.

Guru Besar Kajian Agraria, International Institute of Social Studies (ISS)

Erasmus Professor, Erasmus University Rotterdam, Belanda

5 Mei 2025

PENGANTAR PENYUNTING ICAS

Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional karya Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr. adalah buku kelima dalam Seri Kajian Petani Perubahan Agraria oleh ICAS (Initiatives in Critical Agrarian Studies). Buku pertama dari Henry Bernstein berjudul *Class Dynamics of Agrarian Change* (edisi Indonesia: *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*), diikuti buku Jan Douwe van der Ploeg berjudul *Peasants and the Art of Farming: Chayanovian Manifesto* (edisi Indonesia: *Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian*), Philip McMichael dengan *Food Regimes and Agrarian Questions* (edisi Indonesia: *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*), dan Ian Scoones dengan *Sustainable Livelihoods and Rural Development* (edisi Indonesia: *Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan*). Kelima buku luar biasa tersebut menegaskan kembali betapa penting dan relevannya pendekatan ekonomi-politik agraria sebagai lensa analisis dalam kajian agraria dewasa ini. Kelimanya juga memberi isyarat bahwa buku-buku berikutnya dalam seri ini akan terus menjaga keketatan ilmiah sekaligus relevansi politiknya.

Uraian singkat tentang Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria bisa membantu menempatkan buku Edelman dan Borras ini dalam perspektif yang selaras dengan kerja intelektual serta politik ICAS. Dewasa ini, kemiskinan global masih menjadi fenomena mendesak pedesaan, dengan tiga perempat kaum miskin dunia merupakan penduduk desa. Karena itu, persoalan kemiskinan global dan tantangan untuk mengakhirinya, sebagai isu multidimensi (ekonomi, politik, sosial, kultural, gender, lingkungan, dsb.), berkaitan erat dengan dua hal: perlawanan rakyat pekerja di pedesaan terhadap sistem yang melahirkan dan melanggengkan kemiskinan itu, serta dengan perjuangan mereka untuk mewujudkan penghidupan berkelanjutan. Maka, pembangunan

pedesaan tetap menjadi kunci dalam kajian pembangunan. Namun, perhatian dan fokus pada desa ini bukan berarti memisahkan persoalan pedesaan dari perkotaan. Tantangannya justru bagaimana memahami keterkaitan erat antara keduanya, sebagiannya karena langkah-langkah pengentasan kemiskinan pedesaan yang dipandu kebijakan neoliberal serta program “perang melawan kemiskinan global” yang dipimpin lembaga keuangan dan pembangunan internasional arus utama, dalam banyak hal, hanya menggeser kemiskinan pedesaan menjadi bentuk baru kemiskinan perkotaan.

Pemikiran arus utama dalam kajian agraria mendapat pembiayaan yang melimpah, sehingga berhasil mendominasi produksi serta penerbitan penelitian dan kajian tentang isu-isu agraria. Banyak lembaga yang mendukung pengarusutamaan pemikiran itu (seperti Bank Dunia) juga sangat terampil memproduksi serta menyemaikan terbitan yang sangat mudah diakses dan berorientasi kebijakan. Terbitan-terbitan semacam itulah yang tersebar luas seantero dunia. Para pemikir kritis di lembaga-lembaga akademik terkemuka pada dasarnya mampu menantang pendekatan arus utama itu, tapi sayangnya karya-karya mereka umumnya hanya beredar di lingkaran akademik, dengan jangkauan dan dampak yang terbatas ke masyarakat luas.

Situasi ini meninggalkan lubang besar untuk memenuhi kebutuhan para akademia (dosen, peneliti, dan mahasiswa), pegiat gerakan sosial, dan praktisi pembangunan di Selatan maupun Utara Global untuk bisa mengakses buku kajian agraria kritis yang kokoh secara ilmiah tapi mudah dibaca, relevan secara politis, berorientasi kebijakan, dan murah. Untuk merespons kebutuhan ini, ICAS meluncurkan serial buku ini. Gagasan utamanya adalah menerbitkan “buku-buku ringkas andalan” yang bisa menjelaskan satu isu pembangunan tertentu dengan dasar beberapa pertanyaan: Apa perdebatan dan isu mutakhir dalam topik ini? Siapa ilmuwan, pemikir/cendekiawan kunci, dan praktisi kebijakan yang berpengaruh? Bagaimana posisi-posisi semacam itu bisa berkembang seiring waktu? Jalur-jalur apa yang mungkin terbentuk pada masa depan?

Kepustakaan kunci macam apa yang menjadi bahannya? Bagaimana dan mengapa penting bagi kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS), aktivis gerakan sosial, lembaga donor pembangunan, lembaga donor non-pemerintah, mahasiswa, academia, peneliti, dan pengamat kebijakan untuk secara kritis terlibat dengan beberapa poin utama yang dijelaskan dalam buku ini? Setiap buku dalam seri ini memadukan pembahasan teoretis dan yang berorientasi kebijakan dengan disertai contoh-contoh empiris dari pelbagai konteks nasional dan lokal.

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria tersedia dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, yakni bahasa Tiongkok, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thai, Jepang, Korea, Italia, Rusia, Turki, dan Arab. Edisi Tiongkok diterbitkan melalui kerjasama dengan College of Humanities and Development, China Agricultural University, di Beijing, yang dikoordinasikan Jingzhong Ye; edisi Spanyol dengan Program Doktor Kajian Pembangunan, Autonomous University of Zacatecas, di Meksiko, dikoordinasikan Raúl Delgado Wise, dengan EHNE Bizkaia di daerah Basque, dikoordinasikan Xarles Iturbe, dan dengan Fundación Tierra di Bolivia, dikoordinasikan Gonzalo Colque; edisi Portugis dengan Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (UNESP), di Brasil, dikoordinasikan Bernardo Mançano Fernandes, dengan Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) di Brasil, dikoordinasikan Sergio Schneider, dan dengan ISEG University of Lisbon dikoordinasikan Joanna Pereira Leite; edisi Indonesia dengan INSISTPress, dikoordinasikan Laksmi A. Savitri; edisi Thai dengan RCSD of University of Chiang Mai, dikoordinasikan Chayan Vaddhanaphuti; edisi Italia dikoordinasikan oleh Alessandra Corrado di University of Calabria; edisi Jepang dikoordinasikan oleh Shuji Hisano di Kyoto University, Koichi Ikegami di Kindai University, serta Sayaka-Funada-Classen; edisi Korea dengan Research Institute of Agriculture and Peasant Policy, dikoordinasikan oleh Wonkyu Song; edisi Rusia dengan Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), dikoordinasikan oleh Alexander Nikulin;

edisi Turki dikoordinasikan oleh Umut Kocagöz dan Duygu Avcı; dan edisi Arab dikoordinasikan oleh Hamza Manouchene di Transnational Institute.

Melihat tujuan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria, sudah jelas mengapa kami merasa antusias bisa menerbitkan buku Edelman dan Borras ini. Buku-buku yang sudah diterbitkan dalam seri ini saling melengkapi dalam hal tema, keterbacaan, relevansi politik maupun akademik, dan keketatan ilmiah. Kami pun menantikan dengan antusias kelanjutan seri penting ini di masa datang.

*Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall,
Christina Schiavoni, Max Spoor, dan Henry Veltmeyer
Editor Seri Buku ICAS*

PRAKATA PENULIS

Buku kecil ini adalah sari pati dari bertahun-tahun pengalaman kami baik dalam penelitian maupun kolaborasi dengan gerakan-gerakan agraria (dan, belakangan ini, kolaborasi antara kami berdua). Terlalu banyak untuk disebutkan peran para aktivis pedesaan dan aliansi-aliansi gerakan yang telah memberi ilham, dukungan, dan wawasan yang mendasar selama proses penulisan buku ini. Bersama para kolega dan mahasiswa, mereka telah membantu mempertajam analisis kami, baik melalui seminar dan konferensi, dalam perbincangan spontan, maupun sebagai kritikus terhadap karya tulis kami. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami tujukan kepada mereka semua.

Kami juga berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang telah mendukung, sekali lagi, selama bertahun-tahun penelitian dan penulisan buku ini. Edelman menghaturkan terima kasih kepada Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, National Science Foundation (Amerika Serikat), American Philosophical Society, Professional Staff Congress-City University of New York (PSC-CUNY) Research Award Program, dan Center on Philanthropy and Civil Society dan Advanced Research Collaborative, keduanya di CUNY Graduate Center. Borrás menghaturkan terima kasih kepada Transnational Institute, Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO), dan Political Economy of Resources, Environment, and Population (PER) Research Group di International Institute of Social Studies (ISS). Terima kasih banyak juga kepada Errol Sharpe atas dorongan semangat buat kami sepanjang penulisan buku ini, dan juga kepada Brenda Conroy atas penyuntingan naskah yang teliti. Terakhir, kami berterima kasih kepada Nara Roberta da Silva yang telah mendesain grafik-grafik di buku ini, juga untuk Christian Pacheco dan Paloma Rodrigo yang telah menyusun indeks buku ini (edisi bahasa Inggris).

PENDAHULUAN

Kerangka untuk Memahami Gerakan Agraria Transnasional

Gerakan agraria transnasional (GAT) dapat dipahami sebagai organisasi, jaringan, koalisi, dan ikatan solidaritas lintas negara-bangsa yang dijalin petani dan para sekutu mereka yang berupaya memengaruhi kebijakan di tingkat nasional dan internasional.¹ GAT radikal hari ini turut membingkai ulang berbagai ketentuan dan tolok ukur serangkai-an praktik dan debat di bidang pembangunan internasional. Beberapa praktik dan debat tersebut meliputi keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim, hak atas tanah dan reforma agraria redistributif, kedaulatan pangan, pengaturan perdagangan global dan ekonomi neoliberal, penguasaan korporasi atas plasma nutfah tanaman dan berbagai teknologi lain dalam pertanian, hak asasi petani, serta keadilan gender. Bagi para pembuat kebijakan, ilmuwan, aktivis, dan praktisi pembangunan yang hirau pada isu-isu tersebut, pemahaman tentang GAT beserta pengaruh yang ditimbulkannya sangat penting untuk mengurai temu simpul antartopik dan antara topik-topik tersebut dengan “gambaran besar” yang melingkupinya.

Banyak pembaca, terutama di negara-negara maju, mungkin perlu diingatkan bahwa jumlah petani saat ini justru lebih banyak dibandingkan pada masa-masa sebelumnya di sepanjang sejarah umat manusia (van der Ploeg 2008). Para ilmuwan dan aktivis agraria boleh berdebat soal bagaimana mendefinisikan “petani” atau seberapa relevan kategori ini; namun, terlepas dari perbedaan definisinya, yang jelas jumlah petani masih mencakup hampir dua per lima dari seluruh populasi dunia (lihat Tabel 1). Secara proporsional, jumlah mereka dalam populasi global memang menurun seiring urbanisasi dan industrialisasi; namun, dalam angka ab-

solut, tetap saja petani menjadi kelompok yang sangat besar. Yang lebih penting, dalam konteks pembahasan buku ini, kendati kaum elite dan warga perkotaan sejak lama memandang rendah kaum tani sebagai kelompok terbelakang, tak efisien, dan berpikiran sempit, kenyataannya petani kerap berhasil mengorganisir diri dan tampil sebagai pelaku sejarah yang berpengaruh, bahkan di tingkat transnasional.

TABEL 0.1

Populasi Pertanian Dunia, Populasi Pedesaan,
dan Populasi yang Aktif dalam Ekonomi Pertanian, 2013

	DALAM RIBUAN	% POPULASI DUNIA
Populasi dunia	7.130.012	100%
Populasi pertanian	2.621.360	37%
Populasi pedesaan	3.445.843	48%
Populasi yang aktif dalam ekonomi pertanian	1.320.181	19%

* *Populasi yang aktif dalam ekonomi pertanian termasuk kepala rumah tangga yang menanggung sejumlah besar anggota keluarga yang tak aktif.*

Sumber: FAO Faostat Database (21 Juni 2013).

Buku ini membahas beberapa hal: keberagaman GAT di berbagai tempat dan waktu; krisis pangan dan pertanian yang telah mendorong menguatnya peran GAT di tingkat internasional; serta dinamika politik yang berlangsung di dalam GAT sendiri, antar-GAT, dan antara GAT dengan organisasi nonpemerintah (ornop) serta lembaga-lembaga pengaturan nasional dan internasional. Selain menyoroti GAT yang radikal—yang menjadi fokus utama analisis kami—buku ini juga mencatat adanya GAT lain yang mengusung haluan lebih konvensional, yang menekankan penggunaan pertanian industri untuk menggenjot produksi pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang terus bertambah.

Buku ini juga memberi tilikan apa arti penting kebangkitan (dan sesekali kemunduran) GAT bagi kajian agraria kritis serta bagi teori-teori tentang gerakan sosial.

Kami melihat GAT melalui pendekatan historis, yang berarti bukan sekadar menelusuri perjalanan panjangnya dalam rentang waktu tertentu. Ketimbang menjelaskan kemunculan GAT hanya sebagai tanggapan terhadap menguatnya pengaruh lembaga tata kelola global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau melemahnya peran negara akibat globalisasi neoliberal, kami justru menekankan hal lain. Menurut kami, pengalaman di tingkat regional dan nasional, budaya politik, serta ingatan kolektif yang menyejarah juga berperan penting dalam membentuk aliansi-aliansi transnasional yang ada sekarang. Gagasan tentang solidaritas yang melampaui batas-batas negara-bangsa sudah ada sejak lama, sebagaimana kami tunjukkan di bab berikutnya. Di Eropa Tengah, misalnya, partai-partai politik yang propetani pernah membentuk “Green International” pada awal abad XX. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya membangun gerakan lintas batas di berbagai wilayah—seperti Eropa Barat, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara—berakar pada tradisi kewilayahan yang kuat, yang kemudian berkembang menjadi koalisi lebih luas seperti La Vía Campesina. Keberhasilan Gerakan Pekerja Tunakisma (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST]) di Brasil dalam membangun organisasi yang berpengaruh serta mengorganisir aksi pendudukan tanah telah mengilhami gerakan di banyak tempat dan kini mendorong pertukaran pengalaman antara aktivis di Brasil dan di berbagai belahan dunia. Seiring menguatnya GAT sejak 1990-an, khazanah gerakan protes dan praktik organisasi yang dulunya berskala lokal atau nasional kini menyebar seantero dunia, yang sering kali berkembang serta mengalami transformasi di sepanjang perjalanannya.

Kami juga menilik keterkaitan antara kemunculan GAT pada 1980-an dan 1990-an dengan perdebatan klasik tentang “masalah agraria”. Sejak akhir abad XIX, para sarjana dan kaum revolusioner—termasuk

V.I. Lenin, Karl Kautsky, dan A.V. Chayanov—telah memperdebatkan dampak kapitalisme terhadap pedesaan dan sejauh mana tanah, pertanian, serta struktur-struktur agraria yang sebelumnya sudah ada bisa menghambat akumulasi kapital dan perkembangan sempurna hubungan sosial kapitalis (Akram-Lodhi dan Kay 2010; Bernstein 2010 [2019]; Hussain dan Tribe 1981). Meski buku ini tidak membahas polemik tersebut secara mendalam, kami mencatat bahwa menguatnya gerakan tani di berbagai negara pada akhir abad XX menunjukkan bahwa peralihan menuju kapitalisme di sektor pertanian masih belum sepenuhnya tuntas. Buktinya, dorongan untuk membangun gerakan yang kemudian menjalin ikatan lintas batas justru berasal dari wilayah-wilayah yang masih dipenuhi kaum tani dan pertanian skala kecil, di mana pertanian industrial skala besar gagal—atau memang tidak berupaya—untuk benar-benar menaklukkan atau menghapus mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ilmuwan/cendekiawan berpendapat bahwa di bawah kapitalisme-lanjut, kepemilikan tanah makin tak penting karena terlalu berjayanya kapital keuangan. Namun, kami berargumen sebaliknya: krisis energi dan pangan yang makin mengancam—dengan melonjaknya permintaan atas tanaman pangan pokok dan bahan bakar nabati—serta munculnya mekanisme investasi dalam “penyerapan” karbon untuk mengatasi perubahan iklim, ditambah kerawanan dan naik-turunnya pasar keuangan, justru telah membangkitkan kembali minat kaum kapitalis pada tanah; dalam hal ini, tanah dipandang tidak hanya sebagai aset investasi yang bisa mendatangkan laba, tetapi juga sebagai instrumen lindung-nilai dalam menghadapi risiko. Meluasnya “perampasan tanah” serta makin kerasnya tuntutan atas kebijakan redistribusi tanah di Selatan Global akan terus menjadikan “masalah agraria” sebagai perdebatan pokok dalam kajian pembangunan dan kebijakan publik.

Sebagai gerakan sosial, GAT menantang para analis untuk mengembangkan peranti konseptual yang baru. Tantangan pertama berasal dari para ahli teori aksi kolektif, seperti Charles Tilly (1986: 392), yang berpandangan bahwa istilah “gerakan sosial” sebenarnya hanya dapat di-

gunakan setelah 1848, ketika negara-bangsa di Eropa mulai terkonso-lidasi. Dalam pandangan ini, “gerakan sosial” berbeda dengan bentuk aksi kolektif yang lebih “defensif” pada masa sebelumnya, dan muncul terutama sebagai penentang negara. Bahkan, dalam kajian-kajian ter-kini tentang gerakan keadilan global, pendekatan “nasionalisme meto-dologis” masih sangat kuat, dengan fokus utama pada dinamika inter-nal masing-masing negara (Beck 2004; della Porta 2007). Paradoksnya, penekanan yang masih berfokus pada negara tunggal ini juga banyak ditemukan dalam gerakan sosial transnasional, termasuk yang dibahas dalam buku ini. La Vía Campesina, misalnya, sebagian besar terdiri atas organisasi di tingkat nasional dan hingga kini belum memiliki meka-nisme untuk merangkul gerakan di wilayah-wilayah yang tak punya ru-ang politik memadai guna membentuk organisasi formal yang langgeng (terutama di Tiongkok). Lantas, bagaimana sebaiknya kita memahami gerakan yang melampaui batas nasional, yang mengajukan tuntutan ke-pada negara maupun lembaga-lembaga supranasional, tetapi di saat yang sama masih terkungkung asumsi-asumsi “nasional”?

Kedua, sejak 1980-an, para teoretikus telah banyak berdebat tentang perbedaan antara gerakan sosial yang berbasis kelas dan yang berbasis identitas (atau antara gerakan “lama” dan “baru”), serta antara “gerak-an untuk redistribusi” dan “gerakan untuk pengakuan” (Calhoun 1993; Fraser 2003). Namun, GAT masa kini justru melampaui dikotomi terse-but. Mereka memanfaatkan—atau dalam beberapa kasus, membangkit-kan lagi—identitas yang telah lama melekat guna mengajukan tuntutan ekonomi; mereka menuntut redistribusi, terutama tanah, sekaligus me-nuntut pengakuan, baik sebagai warga negara seutuhnya, sebagai ke-lompok dengan identitas budaya yang khas, maupun sebagai masyarakat rentan agar dilindungi hukum internasional.

Ketiga, Sidney Tarrow (2005) berpendapat bahwa menggalang sum-berdaya, mengenali serta menangkap peluang politik, dan merumuskan tuntutan dengan cara yang memungkinkan aktivis bersatu merupakan tantangan yang lebih berat bagi gerakan sosial transnasional, ketimbang

bagi gerakan sosial nasional. Namun, menurut kami, situasinya jauh lebih rumit. Dalam kasus gerakan agraria, aksi dan aliansi transnasional justru kerap memperlancar, bukannya menghambat, penggalangan sumberdaya serta pengenalan peluang politik. Dengan demikian, aktivisme transnasional pada dasarnya merupakan peluang politik itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus, organisasi nasional yang menjadi bagian GAT justru sengaja didirikan untuk memanfaatkan arus sumberdaya, baik manusia maupun materiel, yang tersedia melalui jaringan internasional dan kampanye global.² LSM pemberi dana sering kali mendukung kegiatan-kegiatan internasional, sementara LSM advokasi menyediakan sumberdaya intelektual dan wawasan politik yang sangat berharga bagi GAT. Namun, akses atas berbagai sumberdaya ini juga bisa menjelma pedang bermata dua. Di satu sisi, akses itu dapat meningkatkan pengaruh internasional suatu gerakan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketegangan dan kerentanan baru; dalam beberapa kasus, tekanan ini bahkan menyebabkan bubarnya suatu GAT atau penarikan diri organisasi nasional dari jaringan kerja transnasional. Sayangnya, mungkin karena “bias perkotaan”, para pengkaji gerakan sosial transnasional (Keck dan Sikkink 1998; Smith dan Johnston 2002; Tarrow 2005; della Porta 2007; Moghadam 2012; Juris dan Khasnabish 2013) cenderung kurang memperhatikan GAT, padahal saat ini GAT merupakan salah satu gerakan sosial terbesar di dunia (lihat Bab 3 dan 4).³ Menurut kami, upaya mempelajari pengalaman serta tantangan yang dihadapi GAT dapat memperkaya wawasan dalam kajian aktivisme transnasional secara lebih luas.

Hal ini membawa kita ke poin keempat yang penting dalam memahami GAT dan teori gerakan sosial. Organisasi petani, baik transnasional maupun bukan, sering kali menggambarkan diri sebagai gerakan yang tumbuh murni dari prakarsa dan perjuangan kaum tani sendiri. Kami tentu mengakui kecakapan luar biasa para pemimpin akar-rumput dalam mengorganisir dan merumuskan strategi politik gerakan. Namun, perlu disadari bahwa kaum tani masa kini tidak seperti kaum

tani pada satu atau dua dasawarsa silam. Banyak aktivis pedesaan kini punya wawasan lebih luas berkat pelatihan, jaringan internasional, serta keterlibatan mereka dalam forum-forum masyarakat sipil global dan lembaga pemerintahan nasional maupun internasional. Banyak pula yang berhasil meraih gelar pendidikan tinggi. Ada juga yang berpaling dari dunia pertanian dan aktivisme untuk terjun ke dunia akademik, yang kerap menghasilkan tulisan serta penelitian yang memberi legitimasi dan memperjelas tuntutan gerakan tani (Desmarais 2007). Di sisi lain, hubungan antara LSM dan gerakan petani memang kerap penuh ketegangan, tetapi batas antara keduanya kadang kabur. Dalam banyak kasus, aliansi dengan segelintir LSM penelitian dan advokasi justru memudahkan GAT untuk mengakses sumberdaya pengetahuan serta lembaga internasional yang berpengaruh.

Kelima, yang mengejutkan banyak pihak, GAT telah menempati garda depan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal, bahkan jauh sebelum “Battle of Seattle” pada 1999 melawan WTO, yang oleh sebagian akademisi dan aktivis dianggap sebagai awal kelahiran gerakan keadilan global. Kejutan ini muncul karena dua kekeliruan cara pandang. Di tengah dunia yang makin urban, terutama di Utara Global, petani acap dipandang sebelah mata—dianggap sebagai orang desa yang polos atau sisa masa lalu yang akan lekas lenyap. Padahal, seperti disinggung sebelumnya, kaum tani saat ini cukup beragam dan kerap amat canggih. Anggapan lain yang keliru dan bikin terkejut banyak pihak berkaitan dengan peran serikat buruh dalam perlawanan terhadap neoliberalisme. Sejak akhir 1970-an, globalisasi neoliberal menghantamkan pukulan berat terhadap serikat buruh di berbagai negara, karena banyak industri gulung tikar atau diprivatisasi, alokasi sektor publik menciut, dan persaingan global kian ketat. Di Seattle, Amerika Serikat, barisan supir truk memang bergandengan tangan dengan aktivis lingkungan yang berdandan seperti kura-kura; namun, secara umum, serikat buruh di negara-negara maju maupun berkembang kesulitan mempertahankan diri sebagai lawan yang sepadan terhadap gempuran neoliberalisme.

Di pedesaan, situasinya berbeda. Kebijakan liberalisasi ekonomi memang juga menggelingding bak roda penghancur bagi masyarakat agraris, seperti yang dibahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Namun, karena kapital belum menembus pedesaan sepenuhnya, masih ada ruang yang cukup leluasa bagi upaya pengorganisasian dan perlawanan di banyak tempat. Pada akhirnya, GAT berhasil membuka dan mengisi ruang perlawanan yang dibiarkan kosong oleh gerakan buruh.

Keenam, kasus GAT menunjukkan betapa pentingnya pendekatan ekonomi-politik dalam kajian gerakan sosial. Analisis isi atas judul dan intisari artikel-artikel di *Mobilization* dan *Social Movement Studies*—dua jurnal terkemuka dalam kajian gerakan sosial—menunjukkan bahwa istilah “*capitalism*” (kapitalisme) dan “*economy*” (ekonomi) hampir tidak pernah muncul, sementara istilah “*class struggle*” (perjuangan kelas) dan “*class conflict*” (pertentangan kelas) sama sekali absen (Hetland dan Goodwin 2014). Konteks ekonomi-politik yang melahirkan GAT, terutama globalisasi neoliberal sejak 1980-an, menjadi bagian sentral dalam pembahasan di halaman-halaman berikutnya. Kami berargumen bahwa politik gerakan pedesaan tidak mungkin dapat dipahami tanpa melihat basis sosialnya—apakah petani komersial skala besar, petani kaya, petani kecil, atau buruh tak bertanah (tunakisma)—dan bagaimana aliansi kelas terbentuk di dalam organisasi agraris. Gerakan sosial jarang seutuh dan sekohesif seperti yang kerap digambarkan oleh para pemimpin dan pendukungnya; faktanya, gerakan sosial lebih sering menjadi “arena adu pendapat”. Seperti ditegaskan Colin Barker, “Perjuangan kelas’ tidak hanya terjadi antara gerakan dan lawan mereka, tetapi juga *di dalam* tubuh gerakan itu sendiri: seluruh gagasan, bentuk organisasi, dan strategi perjuangan mereka selalu berada dalam ‘radar strategis’ pihak musuh” (2014: 48, cetak miring sesuai aslinya). Pada saat yang sama, seperti dibahas di Bab 2, meski kelas merupakan kategori analisis yang mendasar dalam politik agraria, kita juga perlu memahami bagaimana kelas beririsan dengan identitas sosial lain, seperti ras, etnis, gender, generasi, kebangsaan, wilayah, dan tempat tinggal.

Poin ketujuh berkaitan dengan pasang surut gerakan sosial dari waktu ke waktu serta kerentanan perpecahan mereka. Para pengkaji gerakan sosial telah lama mengamati bahwa berbagai gerakan mengikuti pola “siklus protes”—misalnya, masa pergolakan 1930-an dan 1960-an (Tarrow 1994; McAdam 1995). Sederhananya, gerakan sosial bisa mengalami “hidup dan mati” (Castells 2012). Selain itu, meski para aktivis kerap menggambarkan gerakan mereka sebagai sesuatu yang utuh dan padu serta melebihi-lebihkan tingkat dukungan yang mereka miliki, banyak pengamat mencatat bahwa organisasi petani (dan organisasi lainnya) kerap diwarnai perpecahan internal, dan bahwa para pemimpinnya tak jarang memanfaatkan faksi-faksi perpecahan itu sebagai batu loncatan untuk kepentingan pribadi dan mobilitas sosial mereka sendiri (Landsberger dan Hewitt 1970). Fenomena seperti “organisasi fiktif” (Tilly 1984) dan—di era internet—“*dot-causes*” (Anheier dan Themudo 2002), yakni kelompok kecil yang berupaya menciptakan kesan seolah-olah memiliki pengaruh besar, juga kerap muncul dalam kajian GAT mutakhir. Di buku ini, kami menyoroti beberapa contoh di mana GAT dan gerakan-gerakan nasional afiliasinya mengalami perpecahan atau bahkan hancur lebur. Ketimbang menghadirkan narasi yang hanya merayakan kejayaan, kami berupaya menyajikan analisis yang lebih jernih mengenai berbagai kerentanan dan tantangan yang dihadapi gerakan agraria transnasional.

Terakhir, kami menyadari bahwa mencerna buku yang mencakup gerakan agraria skala global dan berfokus pada organisasi yang terstruktur secara formal merupakan tantangan buat pembaca sekalian. Jika kami menuliskan nama lengkap setiap organisasi atau gerakan setiap kali menyebutnya, “buku ringkas” ini akan jadi jauh lebih panjang. Karena itu, kami menggunakan singkatan untuk menyederhanakan penyampaian—meski bagi sebagian pembaca, hal ini justru terasa membingungkan. Nama lengkap (nyaris semua) organisasi kami sebutkan (utamanya terjemahannya) saat pertama kali muncul, sementara singkatan yang sering digunakan (misalnya, “LVC” untuk “La Vía Campesina”) akan

banyak ditemui sesudah membaca beberapa halaman. Namun, pembaca mungkin tetap perlu sesekali melihat daftar singkatan yang disediakan, yang memuat nama lengkap organisasi dalam bahasa aslinya serta terjemahannya.⁴ Dan kalau Anda, pembaca yang budiman, merasa kewalahan dengan banyaknya singkatan dalam daftar urut abjad yang kami bikin, kami ingatkan Anda bahwa di balik setiap singkatan itu ada lembaga serta orang-orang yang nyata, masing-masing dengan sejarah, agenda, praktik, dan aliansi yang berbeda. Kami juga menyadari (dan membahasnya lebih lanjut di Bab 4) bahwa memprioritaskan organisasi formal dalam analisis ini memiliki keterbatasan. Sebab, pendekatan ini kerap mengaburkan berbagai bentuk aktivitas politik yang berlangsung di luar struktur formal organisasi dan fakta bahwa sebagian besar gerakan sosial hanya mencakup sebagian kecil dari kelompok yang mereka klaim wakili. Namun, untuk mengulik lebih jauh persoalan ini, yang dibutuhkan tentu bukan “buku kecil”, melainkan buku yang jauh lebih besar dan dengan pendekatan berbeda.

CATATAN

- 1 Kami mengakui bahwa perbedaan konseptual antara istilah “gerakan”, “koalisi”, dan “jaringan” (Fox 2009) bisa berguna sebagai alat analisis. Namun, sejak awal, kami juga ingin menekankan bahwa banyak ikatan solidaritas yang dibahas dalam buku ini memiliki ciri ketiga kategori tersebut sekaligus, atau bergeser-geser di antara kategori-kategori itu dari waktu ke waktu.
- 2 Kasus ini terjadi, misalnya, pada organisasi tani tingkat nasional di Guatemala, CONAMPRO, yang didirikan pada 1992 untuk mewakili negara itu dalam koalisi ASOCODE yang mencakup seluruh Amerika Tengah (Edelman 1998). Hal serupa juga terjadi pada Serikat Petani Indonesia (SPI), yang dibentuk untuk bergabung dengan La Vía Campesina (seperti dibahas di Bab 5), atau belakangan ini beberapa organisasi didirikan di India untuk berafiliasi dengan gerakan transnasional nelayan tradisional (Sinha 2012).
- 3 Pengecualian khusus untuk von Bülow (2010).
- 4 Catatan penerjemah: terjemahan nama organisasi dalam bahasa Inggris dari bahasa asli selain Inggris yang disediakan penulis tidak lagi disertakan di sini; sebagai gantinya, nama-nama itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baik di badan tulisan maupun di halaman daftar singkatan dan akronim. Nyaris semua nama asli organisasi yang bukan bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris, kami terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan langsung menyebutkan nama terjemahan tanpa nama aslinya di tubuh teks tetapi tetap menggunakan singkatan/akronim sesuai bahasa aslinya (tidak seperti penulisan PBB untuk singkatan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai terjemahan dari nama asli United Nations).

BAB 1

Gerakan Agraria Transnasional: Sejarah & Keberagamannya

Jaringan dan gerakan agraria transnasional masa kini sangat beragam, meski perhatian kerap hanya tertuju pada gerakan yang paling menonjol dan “vokal” seperti La Vía Campesina (LVC, dalam bahasa Indonesia berarti Jalan Petani). Banyak akademika dan peneliti beranggapan—dan para aktivis agraria juga sering mendaku—bahwa GAT masa kini merupakan fenomena baru yang lahir akibat globalisasi neoliberal serta dimungkinkan oleh teknologi komunikasi baru dan biaya transportasi udara yang makin terjangkau. Namun, gagasan tentang solidaritas internasional sudah ada sebelum era internet, bahkan lebih dari seabad lalu, sehingga GAT sesungguhnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Sebagian gerakan terbentuk pada akhir abad XIX dan awal abad XX, sementara yang lain muncul setelah Perang Dunia II, serta banyak lagi yang berkembang pada 1980-an dan 1990-an. Ada pula jaringan dan gerakan yang sudah berkiprah selama puluhan tahun, seperti Campesino a Campesino (Petani ke Petani), suatu gerakan penyuluhan pertanian secara horizontal antarpetani di Amerika Tengah dan Meksiko yang dimulai sejak 1960-an (Boyer 2010; Bunch 1982; Holt-Giménez 2006). Selain itu, banyak gerakan dan jaringan transnasional masa kini sebenarnya dibangun atas dasar ikatan lama lintas bangsa yang telah terjalin jauh sebelum gempuran neoliberal sejak awal 1980-an (Edelman 2003). Selama 1970-an dan 1980-an, misalnya, jaringan solidaritas di Eropa dan Amerika Utara berkembang pesat untuk mendukung gerakan pembebasan nasional dan perlawanan terhadap rezim diktator di berbagai negara berkembang seperti Chile, Nikaragua, Afrika Selatan, dan Filipina. Namun, upaya membangun aliansi kaum tani lintas bangsa sesungguhnya

sudah berlangsung jauh lebih awal. Memahami keberagaman dan dinamika gerakan agraria transnasional dewasa ini akan lebih kaya jika kita juga menelusuri sejarah gerakan-gerakan sebelumnya—dan dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat menjelaskan kemunculan berbagai gerakan serta jaringan yang ada di masa kini.

JEJAK SEJARAH

Sejumlah GAT, baik di masa silam maupun masa kini, masih jarang mendapat perhatian secara akademik. Meski pembentukan aliansi transnasional oleh organisasi-organisasi petani makin berkembang sejak akhir 1980-an, akarnya sebenarnya sudah muncul sejak akhir abad XIX. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme lintas bangsa bukan sekadar dampak dari perkembangan komputer dan internet, murahnya transportasi udara, menguatnya pengaruh lembaga pengaturan supranasional, atau melemahnya negara di masa globalisasi neoliberal. Sejak awal, organisasi agraria transnasional kerap mengusung beragam haluan, dari populisme agraria, komunisme, reformisme yang dipimpin elite, hingga amal kewajiban sebagai bangsawan (*noblesse oblige*)*, pasifisme, dan feminisme. Seperti halnya “gerakan sosial baru” pasaca-1960-an, para aktivis yang terus bergerak dari satu perjuangan ke perjuangan lain menjadikan pengalaman mereka sebagai bekal untuk merumuskan tuntutan baru sesuai konteks zaman.

Persatuan Perempuan Desa Sedunia

Jaringan lintas isu dan generasi mengemuka pada terbentuknya Persatuan Perempuan Desa Sedunia (Associated Country Women of the World [ACWW]), sebuah organisasi agraria transnasional yang mulai terbentuk pada akhir 1920-an.¹ Asal-usulnya dari pertemuan antara para pemimpin

* *Catatan terjemahan*: Frase dalam bahasa Prancis yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh harus menggunakan posisi sosial mereka untuk membantu orang lain.

Dewan Perempuan Internasional (ICW)—didirikan di Washington, D.C., 1888—dengan Institut Perempuan (Women's Institute), yang bermula di Kanada pada 1890-an sebelum menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, dan berbagai koloni Inggris (Davies tanpa tahun). ICW sendiri didirikan oleh para aktivis Amerika Serikat (bersama utusan dari delapan negara lain) yang sebelumnya terlibat dalam gerakan antiperbudakan (abolisionisme), hak pilih perempuan, dan antimiras (Rupp 1997).² Sementara itu, Women's Institute dirintis oleh pimpinan cabang ICW di Kanada yang bekerja mendampingi Institut Petani (Farmers' Institute), sebuah program penyuluhan pertanian yang juga ada di Amerika Serikat (Moss dan Lass 1988; McNabb dan Neabel 2001). Pada 1913, aktivis asal Kanada bernama Madge Watt pindah ke Inggris dan membantu mendirikan ratusan Women's Institute di sana; dia juga menarik perhatian Ishbel Gordon Aberdeen—presiden ICW yang telah lama menjabat—untuk membentuk sebuah federasi internasional. Waat, bersama Lady Aberdeen, seorang feminis aristokrat yang suaminya pernah menjabat Gubernur Jenderal Kanada jajahan Inggris, mengadakan sebuah pertemuan di London pada 1929; dihadiri perempuan dari 23 negara, pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan komite ICW untuk perempuan pedesaan (Drage 1961). Komite ini menerbitkan buku tahunan (*What the Country Women of the World Are Doing* [Apa yang Dilakukan Perempuan Desa Sedunia]), jurnal (*The Country Woman* [Perempuan Desa]), dan buletin (*Links of Friendship* [Jalin Perkawanan]); mereka juga mengedarkan selebaran yang ditulis dalam tiga bahasa untuk mengajak lebih banyak asosiasi tingkat nasional bergabung (Meier 1958). Pada 1933, dalam suatu pertemuan di Stockholm, Swedia, organisasi ini secara resmi menjadi Associated Country Women of the World.

Pada tahun-tahun awalnya, ACWW didominasi oleh perempuan dari kalangan bangsawan Inggris, Belgia, Rumania, Jerman, dan Swedia; bahkan, hingga 2012, salah satu anggota dewan pengurusnya adalah seorang putri bangsawan Malaysia (ACWW 2012; Meier 1958; Drage 1961; *London Times* 1946a). Pada 1936, Konferensi Tiga Tahunan ACWW

yang pertama di luar Eropa diadakan di Washington, D.C. dan dihadiri sekitar 7.000 perempuan petani, sebagian besarnya dari Amerika (Meier 1958). Organisasi ini mendirikan sekolah juru bicara bagi para penggerak dan meneliti isu-isu seperti gizi serta pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Sebelum Perang Dunia II, ACWW bekerjasama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Selama perang, kantor pusatnya pindah dari London ke Universitas Cornell di New York, sebuah pusat penelitian pertanian terkemuka di Amerika Serikat. Sesudah perang, ACWW meraih status konsultatif di beberapa badan PBB (Meier 1958). Dalam perkembangannya, ACWW mendukung program-program peningkatan pendapatan skala kecil, seperti kebun sawit, serta mengadvokasi hak-hak perempuan di forum internasional, meski masih kurang memberi perhatian kritis pada masalah pertanian, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Walaupun partisipasi perempuan dari negara-negara berkembang makin meningkat dan pendekatan atas isu gender kian matang, ACWW tetap tidak pernah sepenuhnya lepas dari akarnya sebagai organisasi elite orang Inggris. Konvensi-konvensinya tetap digelar di Inggris, tanpa layanan terjemahan, sehingga partisipasi perempuan dari luar dunia berbahasa Inggris terbatas pada kalangan terdidik dari kelas atas dan menengah, yang kebanyakan berasal dari LSM/OMS/ornop, bukan petani pedesaan (Edelman 2003). Meski demikian, saat ini ACWW mengeklaim keanggotaannya mencapai 9 juta orang dari 450 kelompok masyarakat di lebih dari 70 negara (ACWW 2012).

Green International

Dalam dasawarsa sesudah Perang Dunia I, dua gerakan internasional bersaing memperebutkan dukungan kaum tani di Eropa Timur dan Eropa Tengah: organisasi agraris Green International, yang akhirnya bermarkas di Praha, dan Petani Internasional (Krestintern) yang berpusat di Moskow (Jackson 1966).³ Sesudah perang, partai-partai berbasis agraria atau yang dimotori petani mulai berkuasa di Bulgaria dan Yugoslavia, serta punya pengaruh besar di Cekoslowakia, Polandia, Rumania,

Hungaria, Austria, dan Belanda. Meski setiap partai mengusung ideologi dan praktik berbeda—serta kerap terpecah karena sengitnya persaingan internal—sebagian besar mengusung tujuan yang sama: memperjuangkan kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan wilayah pedesaan, mendorong redistribusi tanah, dan merontokkan dominasi kelompok tuan tanah tradisional. Dua agenda terakhir ini juga menjadi fokus perjuangan kaum Komunis, sehingga hubungan kaum Agraria dengan partai-partai komunis jadi rumit, kadang saling mendukung, tetapi lebih sering bersitegang dan saling bersaing antarnegara.

Pemerintahan agraris yang paling kuat saat itu terbentuk di Bulgaria, ketika pada 1919, setelah melewati masa kekerasan dan pergolakan, Serikat Agraria Bulgaria pimpinan Aleksander Stamboliyski memenangkan pemilu pertama pascaperang (Jackson 1966; Bell 1977). Stamboliyski menjalankan berbagai reformasi sosial, terutama merombak sistem perpajakan agar lebih berpihak pada rakyat miskin pedesaan serta membagikan tanah dari segelintir tuan tanah kepada kaum tani. Dalam empat tahun berikutnya, dukungan elektoral bagi Serikat Agraria terus meningkat—begitu pula dukungan untuk Partai Komunis Bulgaria, partai terbesar kedua. Dikenal karena sikapnya yang terang-terangan menentang kota dan kaum urban—yang sering dia sebut sebagai “parasit”—Stamboliyski bercita-cita menjadikan Bulgaria sebagai “negara agraris percontohan” dalam waktu dua puluh tahun (Jackson 1966; Pundeff 1992).

Stamboliyski memerintah Bulgaria dengan dukungan Garda Oranye, kelompok milisi petani yang dipersenjatai pentungan; milisi ini dia gunakan untuk menghadapi ancaman terhadap pemerintahannya, terutama dari kaum Komunis dan nasionalis sayap kanan Makedonia (Pundeff 1992). Dalam kebijakan luar negeri, Stamboliyski berupaya membangun aliansi dengan partai-partai agraria di Polandia, Cekoslowakia, dan negara lain guna mendirikan sebuah liga pertanian internasional. Liga inilah yang diharapkan menjadi lawan sepadan bagi kelompok reaksioner “White International” yang berisi bangsawan dan tuan tanah

konservatif, serta “Red International” yang dimotori kaum Bolshevik (Colby 1922; Gianaris 1996; Alforde 2013).

Green International mulai terbentuk pada 1920 ketika partai-partai agraria dari Bulgaria, Yugoslavia, Austria, Hungaria, Rumania, Belanda, dan Swiss saling bertukar utusan dan membentuk semacam “liga” yang masih bersifat longgar. Organisasi ini berada di bawah arahan Dr. Georg Heim, seorang dokter asal Bavaria berpaham monarki yang juga pemimpin petani (Duranty 1920). Setahun kemudian, Green International secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Biro Agraria Internasional dan mendirikan markas pusat di Praha (Bell 1977). Upaya ini berhasil terutama karena merupakan gagasan Stamboliyski, meski tidak begitu berkembang dalam tiga tahun pertama, karena pemimpin Bulgaria tersebut diserang berbagai masalah diplomatis serta menghadapi banyak kelompok oposisi di dalam negeri, mulai dari kaum Komunis, elite perkotaan yang kecewa, perwira militer nasionalis dan royalis, pengungsi “White International” dari perang sipil di Uni Soviet, hingga kelompok ekstremis sayap kanan Makedonia.

Pada 1923, Stamboliyski dibunuh oleh para musuh politiknya dalam sebuah kudeta berdarah oleh sayap kanan, yang kemudian mengantarkan Bulgaria pada lebih dari dua dasawarsa kediktatoran militer dan monarki.⁴ Mereka dengan cepat menumpas perlawanan sporadis dari kaum tani, dan dalam beberapa pekan berikutnya, puluhan pendukung Serikat Agrari dibantai. Beberapa bulan setelah kudeta, mantan anggota Serikat Agraria yang diasingkan sempat membentuk aliansi berumur pendek dan rapuh dengan kaum Komunis, yang kemudian melancarkan pemberontakan yang dipimpin kelompok Komunis. Namun, gerakan ini cepat dilindas, dengan jumlah korban jiwa dari pihak pemberontak diperkirakan mencapai 5.000 orang (Pundeff 1992; Carr 1964).

Petani Merah Internasional

Kemelut di Bulgaria telah membuka jalan bagi Komunis Internasional (Komintern) pada 1923 untuk mendirikan Petani Merah Internasional,

julukan Krestintern, dan mempererat hubungan dengan partai-partai agraria. Beberapa faktor di Uni Soviet dan di internal gerakan Komunis internasional turut mendorong langkah ini. Pengenalan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy [NEP]) pada 1921 di Uni Soviet—yang memberikan kelonggaran bagi pasar pertanian dan kepemilikan tanah skala kecil—menandai periode yang cukup propetani dalam sejarah Soviet. Namun, kebijakan ini hanya bertahan sampai 1929, ketika Stalin mulai memperkuat kekuasaannya dan mengambil langkah awal menuju kolektivisasi pertanian serta “pembubaran kulaks sebagai kelas”. Selain itu, kegagalan pemberontakan Komunis pada 1919 di Jerman dan Hungaria, serta kekalahan invasi Soviet ke Polandia pada 1920, membuat Moskow mengalihkan fokusnya ke wilayah timur, di mana mereka melihat peluang revolusi yang lebih besar. Namun, masyarakat-masyarakat di wilayah ini memiliki kelas proletar industri yang tidak besar, dan mayoritas penduduknya merupakan kaum tani. Saat Krestintern menggelar kongres pendiriannya pada 1923, mereka memikat “kaum tani pekerja di negara-negara jajahan” (Carr 1964: 615). Edisi pertama jurnal mereka bahkan memuat artikel karya Nguyen Ai-quoc (nama samaran Ho Chi Minh) dan Sen Katayama, seorang kader Komintern asal Jepang yang aktivitasnya menjangkau berbagai wilayah Asia hingga ke Meksiko dan Amerika Tengah (Edelman 1987).

Krestintern hanya berhasil menarik beberapa gerakan agraria non-komunis untuk bergabung, dan itu pun pada kesempatan yang terbatas. Pada 1924, organisasi ini sempat merekrut Partai Rakyat Petani Kroasia pimpinan Stjepan Radić. Seperti halnya Moskow, Radić sangat menentang gagasan federasi Yugoslavia, yang menurutnya hanya akan menjadi “kedok imperialisme Serbia Raya” (Biondich 2000: 198). Namun, keterlibatan Radić lebih bersifat strategis ketimbang ideologis. Dia berharap afiliasi ini bisa digunakan untuk menekan Beograd agar memberikan otonomi lebih besar bagi Kroasia. Radić sendiri punya kecenderungan pasifis dan sulit bekerjasama dengan Komunis Yugoslavia. Dia bahkan tidak pernah benar-benar mengikuti kegiatan Krestintern, dan

keputusannya untuk segera menarik diri makin melemahkan legitimasi organisasi yang sejak awal sudah rapuh (Carr 1964; Jackson 1966).

Partai Nasionalis Tiongkok Kuomintang (KMT) juga sempat menjalin hubungan dengan Krestintern pada pertengahan 1920-an, sebagai bagian dari aliansinya dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Beberapa pemimpin KMT mengunjungi Moskow, sementara para kader Krestintern dan Komintern—termasuk Ho Chi Minh serta banyak militan Vietnam—mendapat pelatihan di Institut Pelatihan Gerakan Petani milik PKT, di mana Mao Tse-tung menjadi salah satu pengajarnya (Quinn-Judge 2003). Namun, hubungan ini segera terputus pada 1927, ketika KMT membantai sekutu Komunisnya di Shanghai. Serangan mendadak ini mengejutkan para pemimpin Soviet yang, pada malam sebelum kudeta, masih sempat memerintahkan PKT agar mengubur senjata mereka, sebagai bentuk kepercayaan pada KMT (Cohen 1975).

Krestintern tak pernah mencapai pengaruh sebesar “organisasi-organisasi pembantu” lainnya di bawah Komintern, seperti Serikat Buruh Merah Internasional (Profintern) atau Organisasi Internasional untuk Bantuan Revolusi (juga dikenal sebagai Red Aid atau MOPR, singkatannya dalam bahasa Rusia). Menyusul kongres Komintern pada 1925, Krestintern menggelar pleno yang dihadiri 78 delegasi dari 39 negara. Sidang ini menyarankan agar para kader militan Krestintern bergabung dengan organisasi-organisasi petani yang sudah ada dan mencoba mengarahkan mereka ke garis politik Komunis (Carr 1964). Namun, strategi ini justru turut membawa kemelut politik di Shanghai dua tahun kemudian. Selain beberapa keberhasilan singkat dalam pengorganisasian, Krestintern praktis tidak lagi berfungsi pada akhir 1920-an. Para tokoh Partai Soviet yang propetani, khususnya Nikolai Bukharin, makin dipaksa untuk menerima visi Stalin tentang pedesaan; pada akhirnya, sebagian besar dari mereka menjadi korban pembersihan politik pada 1930-an (Cohen 1975). Satu-satunya capaian jangka panjang Krestintern adalah pendirian Institut Agraria Internasional di Moskow, yang sengaja dibentuk sebagai tandingan Institut Pertanian Internasional (IIA) yang

berbasis di Roma. IIA, yang didirikan pada 1950 dengan dukungan Yayasan Rockefeller, kemudian menjadi cikal bakal FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Carr 1964; Jackson 1966).

Hijau versus Merah, 1920-an

Dari luar, Petani Merah Internasional tidak terlihat lemah. Pada 1926–1927, sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dianggap bersumber dari Krestintern, berbagai koalisi pesaingnya berupaya membentuk badan koordinasi internasional untuk organisasi-organisasi tani. Inisiatif awal datang dari Dr. Ernst Laur, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Swiss, yang berupaya menyatukan Komisi Internasional Pertanian (ICA) yang berbasis di Paris dan IIA di Roma yang punya hubungan erat dengan Liga Bangsa-Bangsa.⁵ Laur merancang rencana untuk mempererat hubungan organisasi petani nasional dengan kedua badan kebijakan tersebut. Namun, upayanya gagal ketika ICA dan IIA justru membentuk kelompok koordinasi internasionalnya sendiri untuk organisasi petani. Selain itu, partai-partai agraria di Eropa timur tetap menjaga jarak, karena curiga terhadap sikap Laur yang menolak pengambilalihan tanah milik tuan tanah besar serta menentang intervensi negara di sektor pertanian (Jackson 1966).

Pada 1926, Biro Agraria Internasional Praha—dikenal sebagai Green International—melepas haluan awalnya yang berfokus pada Pan-Slavisme dan mulai merangkul organisasi petani di berbagai negara Eropa, termasuk Prancis, Rumania, dan Finlandia. Di bawah kepemimpinan Karel Mečír, mantan duta besar Cekoslowakia untuk Yunani, Green International menyebut dirinya sebagai pusat pertukaran pengalaman, dukungan moral, dan solidaritas bagi kaum tani serta partai-partai agraria. Organisasi ini juga berperan sebagai lawan tanding internasional terhadap pemerintah-pemerintah nasional yang dianggap mengancam kepentingan petani. Namun, kegiatan utama Green International hanya menerbitkan buletin triwulanan dalam berbagai bahasa dan mengadakan konvensi tahunan. Ketika pengaruhnya mencapai puncak pada 1929,

organisasi ini memiliki tujuh belas partai anggota yang, dalam kata-kata Mečír, membentang “dari Samudera Atlantik hingga Laut Hitam, dari Samudra Arktik hingga Laut Aegea” (Jackson 1966: 149).

Krisis ekonomi dunia pada 1929, kegagalan berbagai partai agraria nasional, serta bangkitnya fasisme menjadi faktor utama yang melatari runtuhnya Green International. Meski sempat bergandeng mesra dengan partai-partai agraria, kaum Komunis secara tegas mengecam Green International dan upaya Dr. Ernst Laur untuk menyatukan ICA Paris dan IIA Roma. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah yang makin terbelah, ruang politik gerakan petani makin menyempit. Karena itu, gagasan untuk membentuk organisasi petani internasional baru muncul lagi sesudah Perang Dunia II, ketika Federasi Internasional Produsen Pertanian (International Federation of Agricultural Producers [IFAP]) didirikan.

Federasi Internasional Produsen Pertanian

IFAP lahir di tengah optimisme pasca-Perang Dunia II mengenai kerjasama global sekaligus kekhawatiran parah terhadap kelangkaan pangan dan kemungkinan terulangnya kemerosotan pertanian seperti yang terjadi pada 1930-an. Begitu perang usai, Inggris masih menerapkan sistem penjataan pangan selama hampir satu dasawarsa, bahkan makin ketat untuk beberapa bahan pangan pokok seperti kentang. Sebagai gambaran situasi saat itu, sebuah warta di *London Times* yang mengabarkan pendirian IFAP pada 1946 juga menyambut kedatangan “215.181 kotak apel dari Australia” serta “pengiriman pertama tomat dari Kepulauan Channel” (1946b).

Pada 1946, Himpunan Pengusana Tani Nasional Inggris mengundang perwakilan sektor pertanian dari tiga puluh negara untuk berkumpul di London. Tujuannya adalah membentuk koalisi transnasional guna mendukung badan baru PBB, yakni FAO, sekaligus menjembatani perbedaan antar-kelompok kepentingan berbasis komoditas di sektor pertanian—misalnya antara petani gandum dan peternak penggemukan sapi (*London Times* 1946a, 1946b). Organisasi-organisasi pertanian Eropa

Utara, yang kemudian menguasai IFAP, sebenarnya sudah punya sejarah panjang dalam mengadakan kongres internasional; banyak dari mereka berasal dari kelompok koperasi dan asosiasi petani Kristen yang mulai berkembang pada awal abad XX (ICA dan IFAP 1967; IFAP 1957). Meski bersikap ambigu terhadap liberalisme pasar, organisasi-organisasi ini umumnya mendukung partai-partai politik berhaluan kanan-tengah. Sebelum Perang Dunia II, mereka bekerjasama dengan IIA di Roma (lihat di atas), yang menggeluti penelitian agronomi, kampanye standar-disasi sistem statistik pertanian, serta kerjasama dengan Liga Bangsa-Bangsa. FAO, yang didirikan pada 1945, terang-terangan mencontoh pengalaman dan model kerja IIA, sementara IFAP dirancang sebagai mitra atau perwakilan swasta bagi FAO dalam urusan pertanian dunia.

Situasi kelangkaan pangan-pasa-Perang Dunia II menjadi faktor kunci dalam memahami mengapa organisasi petani di Inggris dan Eropa, serta FAO dan IFAP, menempatkan peningkatan produksi pertanian sebagai prioritas utama. Pada konvensi pendirian IFAP, beberapa utusan dari luar Eropa, terutama Kanada, mengusulkan mekanisme pemasaran internasional dan tata kelola pasokan yang diharapkan “bisa mengatur dan mendistribusikan kelimpahan produksi (surplus) secara efisien sehingga surplus itu justru tidak merugikan petani” (*London Times* 1946b). Namun, pandangan yang berorientasi pada peningkatan produksi (*productivist*) tetap menjadi arus utama di IFAP. Padangan ini belakangan menjadi titik perdebatan utama dengan organisasi agraria lebih radikal yang muncul setelah 1980-an, yang lebih menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Di tahun-tahun awalnya, IFAP didominasi oleh para pemimpin dari dari negara maju, yang kerap menjadi delegasi pemerintah dalam konferensi FAO; mereka bahkan punya pengaruh besar terhadap kebijakan FAO pada masanya (IFAP 1952). Berkat koneksinya dengan lembaga-lembaga tata kelola global dan organisasi pelaku pertanian arus utama di Utara Global, IFAP perlahan berhasil menarik makin banyak organisasi petani dari Selatan Global. Struktur internal IFAP dirancang untuk

mencakup berbagai wilayah dan sektor komoditas, agar memungkinkan keterwakilan yang lebih luas. Selama beberapa dasawarsa, IFAP menjadi salah satu gerakan agraria transnasional yang paling berpengaruh. Namun, posisinya pelan-pelan tergeser dengan munculnya kelompok-kelompok yang lebih radikal, khususnya LVC (dibahas lebih lanjut di bab berikutnya). Krisis internal yang melanda IFAP pada 2010 akhirnya membuat organisasi ini bangkrut dan bubar (dibahas di Bab 3).

Federasi Internasional Gerakan Umat Katolik Pedesaan

FIMARC didirikan di Portugal pada 1964 dan bermarkas di Belgia. Federasi ini lahir dari semangat Konsili Vatikan II yang menekankan kembali ajaran sosial Gereja, terutama konsep “keberpihakan pada kaum miskin” yang menjadi inti teologi pembebasan. Bersama kelompok pemudanya, Gerakan Internasional Pemuda Katolik Pertanian dan Pedesaan (MIJARC), FIMARC mengidentifikasi diri sebagai “gerakan kaum Katolik awam yang berkomitmen pada solidaritas dan pembangunan pedesaan beserta penduduknya, termasuk petani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta semua kelompok terpinggirkan lainnya” (FIMARC 2014b). Tujuan utama FIMARC adalah

penginjilan sejati di pedesaan sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di seluruh dunia—sebagian besar dari mereka kehilangan segala yang dibutuhkan sebagai seorang manusia yang bermartabat. Gerakan-gerakan yang membentuk Federasi ini menegaskan komitmen untuk membangun sebuah masyarakat yang berlandaskan solidaritas di mana ... setiap individu dan komunitas dihormati dalam segala aspek, termasuk jenis kelamin, ras, budaya, dan keyakinan agama. (Pontifical Council 2014)

FIMARC memiliki 65 organisasi anggota yang tersebar di berbagai belahan dunia: 16 di Afrika, 10 di Asia, 8 di Eropa, 2 di Timur Tengah, dan 21 di Amerika Latin, dengan total keanggotaan yang diklaim men-

capai 1,5 juta orang. (Perlu dicatat bahwa klaim jumlah ini lebih kecil dibandingkan klaim keanggotaan LVC, yang pada 2014 memiliki 164 gerakan afiliasi dan mengaku mewakili sekitar 200 juta petani.) Majalah FIMARC *Voice of the Rural World* (Suara dari Desa) diterbitkan dalam empat bahasa. Organisasi ini melihat PBB sebagai lembaga strategis, dan secara aktif mendukung Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan (International Planning Committee [IPC] for Food Sovereignty) serta kampanye LVC yang mendorong PBB mengesahkan deklarasi hak asasi petani (lihat Bab 6). FIMARC memberi perhatian khusus pada penyebaran informasi, pelatihan, dan apa yang disebutnya “kesadaran warga negara” untuk lebih aktif dalam upaya advokasi dan kampanye (FIMARC 2014a). Beberapa isu utama yang diperjuangkan FIMARC mencakup “ekonomi solidaritas”, perdagangan adil (*fair trade*), “keuangan berbasis solidaritas”, kedaulatan pangan, perampasan tanah, serta perlindungan martabat manusia.

Jaringan WWOOF

Jaringan WWOOF (Wahana Pertanian Organik Sedunia) kerap luput dari perhatian akademika dan aktivis yang lebih tertarik pada organisasi dengan agenda politik yang eksplisit. Padahal WWOOF berupaya memecahkan dua masalah krusial yang dihadapi dunia pedesaan: kurangnya alternatif terhadap pertanian industri dan kesulitan yang dihadapi kaum muda dalam mempelajari pertanian dan menjadi petani ahli (agrikulturalis). Awalnya jaringan ini bertujuan menghubungkan konsumen perkotaan yang menggemari pangan organik dengan produsen yang menanam. Seiring waktu, misinya berkembang menjadi program magang dan kerja sukarela jangka panjang di usaha tani organik. Dari Inggris, jaringan ini meluas ke Eropa dan Selandia Baru, lalu ke Kanada dan Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an. Saat ini, WWOOF memiliki tanah pertanian di lebih dari seratus negara. Di banyak negara, jaringan ini punya organisasi nasional; tetapi, di tempat yang belum memiliki struktur resmi organisasi pun, usaha tani afliasinya, yang dinamakan WWOOF

Independents, tetap berhasil menarik banyak relawan. Konferensi internasional jaringan WWOOF telah diselenggarakan di Inggris (2000), Jepang (2006), dan Korea Selatan (2011) (Bunn 2011). Kajian akademik tentang WWOOF, yang tidak begitu banyak, umumnya membahasnya dalam konteks pariwisata alternatif atau kesukarelawanan, padahal perannya makin penting dalam menopang kelangsungan pertanian kecil organik, dengan menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah. Selain itu, WWOOF juga menjadi jalur bagi generasi muda di negara maju yang ingin terjun ke pertanian tapi memiliki sedikit kesempatan untuk memulainya (Hyde 2014; Yamamoto dan Engelsted 2014). Banyak petani yang menjadi tuan rumah peserta WWOOF merasa bahwa mereka adalah bagian dalam “ekonomi sosial” di tingkat lokal, yang punya kesamaan dengan konsep “ekonomi solidaritas” ala FIMARC maupun visi “keadilan pangan” yang dikenal luas.

Keunikan WWOOF tercermin pada bagaimana makna singkatannya berganti dari tahun ke tahun. Saat pertama kali didirikan di London pada 1971, WWOOF adalah kependekan dari “Working Weekends on Organic Farms” (Kerja Akhir Pekan di Kebun Organik). Pada awal 1980-an, kepanjangannya berganti “Willing Workers on Organic Farms” (Pekerja Sukarela di Kebun Organik), tetapi kata “*workers*” (pekerja) menimbulkan masalah dengan otoritas imigrasi bagi para *WWOOFers* yang ingin menjadi relawan di luar negeri. Untuk mengatasinya, jaringan ini mengganti namanya lagi menjadi “World Wide Opportunities on Organic Farms” (Wahana Pertanian Organik Sedunia). Nama WWOOF tidak hanya menjadi identitas jaringan ini, tetapi juga melahirkan istilah baru: pada peserta/relawannya disebut *WWOOFers*, dan kegiatan mereka dikenal dengan kata kerja “*to WWOOF*”, yakni bekerja di sebuah usaha tani melalui jaringan WWOOF (Bunn 2011).

ROPPA di Afrika Barat

Pada 1973–1974, kekeringan dahsyat melanda wilayah Sahel dan Afrika Barat. “Bencana alam” seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya “alami”,

karena sering kali berkiatan erat dengan faktor sosial dan ekonomi yang memperburuk situasi. Salah satu penyebab utama kelaparan di Sahel saat itu adalah penggurunan (*desertification*), yang diperparah oleh praktik pertanian tanaman dagang untuk ekspor seperti kapas dan kacang tanah. Tanaman-tanaman ini menguras sumber air tanah, menggusur kaum tani dari tanah mereka, dan memaksa penggembala nomaden untuk bertahan di area gembala yang makin menyempit (Franke dan Chasin 1980). Sebagai respons terhadap krisis ini, negara-negara di Sahel membentuk Komite Antarnegara untuk Penanggulangan Kekeringan di Sahel (CILSS,) pada 1973. Sementara itu, para donor dari Utara Global mendirikan Club du Sahel untuk mengoordinasikan program-program bantuan. Dua tahun kemudian, negara-negara di Afrika Barat membentuk kelompok ekonomi ECOWAS dengan tujuan utama memperkuat keterpaduan ekonomi dan menjaga stabilitas wilayah (Cissokho 2008, 2011).

Proses integrasi searah-dari-atas (*top-down*) tersebut memiliki cerminan dalam bentuk diskusi rakyat yang makin berkembang seputar pengelolaan sumberdaya, kelangsungan hidup secara fisik dan ekonomi, serta perjuangan kolektif. Kontak lintas batas di antara gerakan petani yang tengah bermunculan berlangsung pada 1976, dalam konteks program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM lokal maupun internasional. Dari interaksi ini, terbentuklah Persatuan Sementara Petani Afrika (UPPA), meski berumur pendek. Ketika kekeringan kembali melanda pada 1984–1985, negara-negara dalam CILSS berupaya melibatkan gerakan petani dalam perencanaan agenda penanganan krisis. Menjelang pertengahan 1990-an, donor-donor bilateral dari Eropa mulai mengalihkan prioritas dukungan, dari yang awalnya untuk program nasional ke inisiatif regional dan transnasional. Seperti yang terjadi di Amerika Tengah dengan jaringan ASOCODE (lihat bagian berikutnya), beberapa organisasi di Afrika Barat membentuk Platform Petani Sahel guna menyatukan suara mereka ketika bernegosiasi dengan lembaga keuangan internasional, lembaga donor, serta pemerintah ma-

sing-masing. Pada 1999, Club du Sahel menyetujui tuntutan Platform Petani Sahel dengan mengalokasikan dana untuk program penguatan kapasitas dan pertukaran pengalaman antar-gerakan petani di Afrika Barat (Cissokho 2008, 2011; Lecomte 2008).

Didirikan pada 2000, ROPPA (Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat) mempersatukan berbagai platform yang sudah ada di sepuluh negara berbahasa Prancis dan membuka kantor wilayah di Burkina Faso. Dalam beberapa tahun, jaringan ini berkembang hingga mencakup organisasi di Nigeria, Sierra Leone, Liberia, dan Guinea Bissau. Sejak awal, ROPPA bersikap sangat kritis terhadap program-program penyesuaian struktural neoliberal serta kebijakan dagang dan integrasi wilayah. ROPPA aktif dalam gerakan kedaulatan pangan, terutama dalam konferensi global di Nyéléni, Mali, pada 2007. Namun, tidak seperti LVC, ROPPA bersedia berdialog dengan Bank Dunia, ikut serta dalam negosiasi tiga-pihak bersama pemerintah dan OMS lainnya, serta bekerjasama dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia (Cissokho 2008). Pada 2007, anggota ROPPA juga terlibat sebagai “mitra perunding” (*co-negotiators*) dalam pembahasan dagang antara pemerintah negara-negara Afrika Barat, lembaga-lembaga tingkat regional, dan WTO (Lecomte 2008).

TIGA PULUH TAHUN KEJAYAAN?

Orang Prancis menyebut tiga dekade setelah Perang Dunia II sebagai “*les trente glorieuses*” (tiga puluh tahun kejayaan)—suatu era pembangunan yang dipandu negara, peningkatan upah riil dan standar hidup, serta perluasan perlindungan sosial secara besar-besaran. Meski kemungkinan besar tidak banyak orang di Prancis yang menganggap situasi mereka pada 1945–1975 sebagai “kejayaan” (terutama mereka yang berada di tanah jajahan dan bekas jajahan Prancis atau tempat lain di Selatan Global), pandangan nostalgia masa kini pada periode tersebut menarik ditilik. Hal ini mengarah pada pemahaman tentang struktur dan di-

namika lebih luas yang kelak berperan membidani lahirnya neoliberalisme serta bangkitnya generasi baru organisasi tani yang lebih militan.

Pembangunan Nasional

Konferensi Bretton Woods, yang digelar di New Hampshire, Amerika Serikat, pada Juli 1944 oleh negara-negara Sekutu, berlangsung saat akhir perang di Eropa sudah mulai menyingsing. Pertemuan ini melahirkan sistem keuangan internasional berupa nilai-tukar-tetap (*fixed exchange rates*) dan pengendalian arus modal yang bertahan hingga 1970-an. Yang terpenting, selama kurang lebih tiga dekade setelahnya, para ekonom dan pembuat kebijakan di negara-negara kapitalis meyakini bahwa peran negara dan pasar dalam pembangunan saling melengkapi dan menguatkan. John Maynard Keynes, ketua delegasi Inggris di Bretton Woods, adalah salah satu tokoh utama yang mendorong penggunaan dana negara sebagai stimulus penyangga saat krisis dan pencipta lapangan kerja. Kebijakan Keynesian, yang sudah diterapkan di Amerika Serikat serta beberapa negara lain selama Depresi Besar 1930-an, diyakini turut membantu memulihkan ekonomi negara-negara kapitalis utama (meski belanja militer menjelang Perang Dunia II juga berperan besar). Setelah 1944, pendekatan Keynesian dalam pembangunan nasional mulai diterapkan di banyak negara berkembang. Lembaga-lembaga yang lahir dari Bretton Woods (seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional [IMF]), bersama badan-badan khusus PBB lainnya, awalnya dibentuk untuk mempercepat pemulihan ekonomi Eropa pasca-perang. Namun, dalam perkembangannya, lembaga-lembaga tersebut menggeser fokus ke negara-negara berkembang, dengan mendukung kebijakan pembangunan yang melibatkan peran negara; pendekatan ini biasanya mencakup investasi di sektor-sektor tertentu, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Kalau setelah 1980 Bank Dunia dan IMF menganjurkan penghematan ala pasar-bebas, pada periode tersebut Bank Dunia dan IMF

cenderung mendukung campur tangan negara dalam perekonomian. Bentuk intervensi ini sering kali mencakup industrialisasi substitusi impor dengan perlindungan tarif tinggi, pengendalian nilai tukar, subsidi untuk investasi dan konsumsi, serta pembiayaan proyek-proyek besar seperti bendungan, irigasi, jalan, dan pelabuhan (Helleiner 1994). Di sektor pertanian, selain mendorong modernisasi teknologi (lihat di bawah), Bank Dunia umumnya mendukung pembentukan badan komoditas yang membeli hasil panen petani dengan harga yang dijamin (harga dasar), serta subsidi bagi konsumen agar bahan pangan pokok tetap terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Bahkan negara-negara otoriter pada masa itu umumnya membangun setidaknya cikal bakal sistem kesejahteraan sosial—mulai dari rumah sakit dan puskesmas, perumahan bersubsidi, hingga skema jaminan sosial dan pensiun bagi pekerja sektor formal di perkotaan. Jangkauan program-program ini tentu saja tidak menyeluruh dan tidak merata; penduduk pedesaan hampir selalu menjadi kelompok terakhir yang merasakan manfaatnya, terutama di negara-negara yang lebih miskin. Namun, meski periode 1945–1975 jauh dari kata “kejayaan”, di banyak belahan dunia masa itu terjadi peningkatan taraf hidup dan, meski masih timpang, kesetaraan sosial secara keseluruhan, setidaknya jika dibandingkan dengan masa sebelum perang.

Revolusi Hijau

“Revolusi hijau” dalam pertanian, yang dimulai pada akhir 1940-an, pada dasarnya merupakan perluasan dari revolusi benih hibrida yang berlangsung satu dekade sebelumnya di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis, yang kemudian diperkenalkan ke negara-negara berkembang. Prakarsa ini awalnya didanai oleh Yayasan Rockefeller, yang sejak lama punya perhatian pada pertanian dan kesehatan masyarakat. Kerangka kelembagaan “revolusi” ini adalah serangkaian pusat penelitian tanaman (yang saat ini mungkin dikenal sebagai “kemitraan publik-swasta”). Ketika kelaparan di Meksiko, India,

Filipina, dan berbagai tempat lain masih meluas, “revolusi hijau” digalakkan dengan dasar keyakinan bahwa penerapan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dapat menggenjot hasil panen sekaligus mencegah revolusi komunis berbasis petani. Program perbaikan gandum di Meksiko serta peningkatan hasil panen padi di Filipina menghasilkan varietas unggul baru yang dirancang untuk menghasilkan panen maksimal dengan penggunaan pupuk kimia dan insektisida dalam jumlah besar. Kedua program ini terbukti sangat berhasil dalam menggenjot hasil panen sekaligus mengurangi kelaparan. Namun, sebagaimana sudah banyak dikaji, revolusi hijau juga mempertajam diferensiasi kelas di pedesaan, karena sebagian besar manfaat dari teknologi baru ini hanya dinikmati oleh kelompok petani lebih kaya—mereka yang lebih dulu punya akses atas irigasi, kredit, transportasi, dan layanan penyuluhan pertanian (Hewitt de Alcántara 1976). “Revolusi” ini juga membawa pelbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran akibat bahan kimia pertanian, pemanfaatan sumber air secara berlebihan, serta tergerusnya keanekaragaman hayati akibat penggunaan varietas tanaman yang seragam secara genetik.

Upaya untuk merevolusi hijaukan tanaman jagung kurang berhasil, sebagiannya karena program penyuluhan sulit menjangkau jutaan petani kecil yang menggarap lahan tadah hujan di perbukitan Amerika Latin dan wilayah lainnya (Paré 1972). Jagung juga sangat sensitif terhadap panjang siang hari (durasi paparan sinar matahari dalam sehari), sehingga benih hibrida dari Amerika Serikat tidak bisa begitu saja ditanam di Amerika Latin. Sebaliknya, penyebaran varietas gandum dan padi hasil revolusi hijau berlangsung pesat. Gandum yang dikembangkan di Meksiko menjadi pemicu ledakan produksi gandum di wilayah Punjab, baik yang tercakup India maupun Pakistan; sementara varietas padi dari Filipina terus dikembangkan di seluruh Asia Tenggara dan Amerika Latin. Di berbagai belahan dunia, banyak petani kecil mulai memadukan unsur-unsur paket revolusi hijau—terutama pupuk kimia buatan—dengan benih dan teknik budidaya tradisional. Seperti yang

terjadi pada para pengguna awal teknologi ini, bahkan ketergantungan yang sebagian saja pada teknologi baru sudah membuat para petani kecil makin terikat dalam jaringan pasar; hal ini kadang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan risiko jeratan utang dan kerentanan petani kecil. Dengan kata lain, solusi teknis untuk krisis sosial yang kompleks kadang justru memperparah masalah yang justru sejak awal ingin diselesaikan.

Reforma Agraria Redistributif yang Dipandu Negara

Ketakutan terhadap komunisme selama Perang Dingin serta gelombang gerakan antikolonial pascaperang telah mendorong sejumlah negara di berbagai belahan dunia untuk menjalankan program reforma agraria redistributif yang radikal dan dipandu negara. Di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat justru mendorong pelaksanaan reforma agraria redistributif dalam rangka melemahkan elite tuan tanah yang reaksioner sekaligus meredakan ketegangan sosial. Di ketiga negara Asia Timur ini, reforma agraria—yang dijalankan di bawah perlindungan besar terhadap industri dalam negeri—berhasil mencetak kelas menengah pedesaan dan pasar domestik yang kuat untuk barang-barang pabrikan (manufaktur). Keberhasilan ketiga “Macan Asia” ini berakar pada serangkaian tahapan penting: dimulai dari demokratisasi kepemilikan tanah, diikuti pertumbuhan pasar domestik, industrialisasi yang dilindungi dari persaingan global, hingga akhirnya beralih ke strategi industrialisasi berorientasi ekspor.

Di Amerika Latin, pelaksanaan reforma agraria berlangsung lebih tidak merata. Meksiko melakukan redistribusi tanah secara besar-besaran pada 1930-an, yang diikuti oleh Bolivia setelah revolusi 1952. Kemudian, menyusul pertemuan di Punta del Este, Uruguay, pada 1961 yang melahirkan Alliance for Progress pimpinan Amerika Serikat—saat kekhawatiran terhadap penyebaran revolusi dari Kuba memuncak—setiap negara Amerika Latin, termasuk negara diktator yang paling konservatif sekalipun, memasukkan reforma agraria ke dalam agenda mereka

(Dorner 1992; Thiesenhusen 1995). Namun, dalam praktiknya, reforma agraria kerap tidak benar-benar menyentuh inti masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Beberapa program hanya membagikan tanah tandus atau mendorong kolonisasi kawasan pinggir/rintisan (*frontier*) di pedalaman sebagai pengganti redistribusi tanah sejati. Di tempat lain, badan usaha negara memang mengambil alih tanah-tanah luas yang kurang dimanfaatkan, lalu membentuk koperasi petani atau membagikan bidang-bidang tanah untuk penerima perorangan. Di hampir setiap kasus, para penerima tanah itu harus menanggung utang besar untuk menebus tanah tersebut. Meski demikian, reforma agraria ini berhasil memperkuat kontrak sosial antara petani dan negara, yang pada gilirannya memengaruhi cara kaum tani berorganisasi dan melancarkan aksi bersama. Namun, banyak reforma agraria berakhir kandas karena negara tidak mampu—atau bahkan berhenti—menyediakan sumberdaya pendukung yang memadai, seperti akses kredit, pendampingan teknis dan pelatihan, irigasi, serta sarana transportasi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran hasil pertanian.

Negara & Organisasi Tani

Reforma agraria yang dipandu negara umumnya dijalankan searah-dari-atas, yang mensyaratkan berurusan dengan banyak sekali lembaga birokrasi, seperti badan reforma agraria, kantor urusan sertifikasi dan pengukuran tanah, bank pembangunan negara, layanan penyuluhan, perusahaan asuransi, serta dewan komoditas. Karakteristik ini mendorong kemunculan suatu jenis organisasi tani yang berperan sebagai perantara (*broker*). Organisasi tani jenis ini umumnya bersikap korporatis dan/atau dikendalikan partai politik tradisional yang memanfaatkan distribusi tanah dan sarana produksi lain dari program reforma agraria sebagai bentuk patronase politik, untuk menukarnya dengan dukungan suara serta loyalitas politik. Organisasi ini juga cenderung bersifat hierarkis, di mana kekuasaan dan pengetahuan kelembagaan terpusat di tangan segelintir pimpinan yang telah lama menjabat; sementara sebagian

besar anggota hanya punya sedikit ruang untuk bersuara dan diharapkan hanya mengikuti arahan dari atas. Hubungan vertikal semacam ini tidak hanya menundukkan kepentingan petani di bawah kepentingan partai politik atau birokrasi negara, tetapi juga sangat membatasi kemungkinan petani untuk membangun organisasi dan melancarkan aksi secara mandiri.

Pada 1980-an dan 1990-an, kebijakan pengetatan anggaran sektor publik membuat negara dan partai politik makin sulit mempertahankan aliran sumberdaya patronase. Di berbagai belahan dunia, para pemilih makin kehilangan kepercayaan pada partai politik tradisional, terutama akibat skandal korupsi dan kebijakan penghematan. Di kalangan kaum tani yang tergabung organisasi, berkurangnya manfaat dari hubungan patronase berbasis pertukaran sumberdaya dengan loyalitas ini memicu kekecewaan yang terus meningkat terhadap politisi, kebijakan negara, dan bahkan terhadap para pemimpin mereka sendiri.

Pemangkasan sektor publik membawa pukulan bertubi-tubi terhadap penghidupan di pedesaan, terutama melalui program penyesuaian struktural ekonomi. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengurangan atau penghapusan kredit untuk tanaman pangan petani dari bank-bank milik negara, pelemahan atau pembubaran dewan komoditas, serta pemutusan layanan penyuluhan pemerintah dan subsidi untuk sarana produksi serta mesin pertanian. Pembukaan (liberalisasi) pasar yang bersifat sepihak makin memperburuk keadaan, karena sektor pertanian dimasukkan ke dalam Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT)/WTO dan berbagai perjanjian dagang bilateral. Akibatnya, petani di negara-negara berkembang dipaksa bersaing di pasar global. Mereka tidak hanya berhadapan dengan petani di negara-negara maju yang punya modal besar dan tetap dilindungi dari persaingan luar negeri, tetapi juga dengan kekuatan anggaran negara-negara maju yang terus mengucurkan subsidi, baik untuk ekspor maupun untuk komoditas utama mereka, sehingga posisi petani di negara-negara berkembang makin terdesak. Sebagai contoh, praktik dumping jagung Amerika Serikat dengan harga di ba-

wah ongkos produksi telah menyebabkan turunnya harga yang merugikan petani di Amerika Latin dan Afrika. Sementara itu, masuknya gandum “murah” (bersubsidi) turut mendorong pergeseran pola makan dari biji-bijian tradisional ke roti, pasta, dan makanan ringan murah. Pergeseran ini meningkatkan ketergantungan pada impor pangan.

PERANG PETANI DI AKHIR ABAD XX

“Tiga puluh tahun kejayaan”, selain ditandai dengan berkembangnya negara kesejahteraan serta perlindungan sosial di negara maju dan beberapa negara berpendapatan menengah, juga merupakan masa penuh pemberontakan besar yang dipimpin kaum tani (Wolf 1969). Revolusi di Tiongkok (1949), Bolivia (1952), dan Kuba (1959); perang anti-kolonialisme dan antiimperialisme di Vietnam, Afrika jajahan Portugis, dan Rhodesia-Zimbabwe; serta kemunculan gerakan gerilya di Malaya, Filipina, dan Kolombia, semuanya memperkuat pandangan—yang hampir diterima secara luas di seluruh spektrum politik—bahwa kaum tani adalah aktor sejarah yang penting sekaligus sasaran utama berbagai prakarsa pembangunan. Gejolak ini secara langsung memantik ketertarikan yang luar biasa besar terhadap “kajian petani” pada akhir 1960-an dan 1970-an (Shanin 1990).

Namun, pada 1980-an dan 1990-an, banyak sarjana mengalihkan pandangan dari dunia pedesaan. Keterlibatan kaum tani dalam genosida (di Kamboja dan Rwanda) serta dalam perang ugul-ugalan perebutan sumberdaya alam (di Liberia dan Burma), ditambah depolitisasi atau tindakan meragukan dari beberapa kelompok revolusioner sebelumnya (misalnya, FARC di Kolombia dan ZANU di Zimbabwe), semuanya telah menumbuhkan kekecewaan di kalangan akademik kiri dan aktivis solidaritas (Buijtenhuijs 2000). Menurunnya romantisisme akan perjuangan bersenjata, baik di kalangan aktivis petani maupun akademik, membuka ruang bagi bentuk politik baru yang fokus merespons ancaman-ancaman baru terhadap sumber-sumber penghidupan di pedesaan. Salah satu perubahan besar terjadi ketika sektor pertanian un-

tuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam negosiasi perdagangan global melalui Putaran Uruguay GATT (1986–1993), yang menandai dimulainya liberalisasi perdagangan yang lebih kencang.

GAT & BANGKITNYA NEOLIBERALISME

Sejarah awal GAT yang muncul pada 1980-an terkait erat dengan program penghematan dan penyesuaian struktural ekonomi yang didukung IMF dan Bank Dunia serta berbagai perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) 1994, negosiasi Putaran Uruguay GATT yang mencapai puncaknya pada pembentukan WTO pada 1995 (Edelman 2003; Heller 2013), dan perombakan rezim pangan global secara menyeluruh (McMichael 2008, 2009). Bentuk-bentuk baru tata kelola neoliberal ini tidak hanya menandai berakhirnya negara kesejahteraan ala Keynesian, tetapi juga, yang berlangsung lebih luas, runtuhnya proyek-proyek pembangunan nasional. Dalam konteks ini, petani skala kecil menghadapi ancaman tidak hanya berupa hilangnya dukungan dari sektor publik, tetapi juga meningkatnya kerentanan akibat keterbukaan pasar dan perdagangan yang mengglobal.

Gerakan-gerakan agraria ini didirikan oleh “kaum kosmopolit yang mengakar” (Tarrow 2005), yang berupaya membendung serangan hebat ekonomi neoliberal yang makin menguat selama kurang lebih dua dekade. Sistem Bretton Woods, yang sebelumnya memungkinkan berlangsungnya “tiga puluh tahun kejayaan” melalui rezim nilai-tukar-tetap dan pengendalian nasional atas arus modal, mulai tergerus dan akhirnya runtuh pada 1970-an. Resesi, “stagflasi”, melonjaknya harga minyak bumi, berakhirnya standar emas, serta meningkatnya defisit fiskal, semuanya memberi celah bagi kaum radikal pasar-bebas untuk masuk ke ranah politik dan kebijakan; sebelumnya, gagasan mereka tidak diperhatikan secara serius, karena dianggap tidak masuk akal, bahkan terlalu ekstrem (Boas dan Gans-Morse 2009). Meski banyak sarjana menandai awal neoliberalisme dengan terpilihnya Margaret Thatcher di Inggris

pada 1979, Ronald Reagan di Amerika Serikat pada 1980, dan Brian Mulroney di Kanada pada 1984, perlu diingat bahwa upaya pertama penerapan paradigma ini justru berlangsung di masa kediktatoran negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia di bawah Soeharto dan Cile di bawah Pinochet (Ffrench-Davis 2003; Simpson 2008).

“Neoliberalisme”—yang pada 1980-an menjadi istilah bernada peyoratif di banyak negara berkembang serta di kalangan akademika dan aktivis progresif—adalah kategori luas yang mengandung empat unsur utama: (1) liberalisasi perdagangan, (2) jaminan bagi investor, (3) arus modal yang lebih bebas, dan (4) penghematan anggaran negara melalui pemecatan pekerja sektor publik, pengurangan atau penghapusan layanan pokok, serta privatisasi perusahaan milik negara. Negara-negara yang menerapkan kebijakan semacam ini pada 1980-an dan 1990-an—kecuali beberapa kasus yang menyimpang (seperti Taiwan dan Korea Selatan)—mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta masifnya informalisasi ekonomi (Chang dan Grabel 2004; Kohli 2009; Wade 2003). Di sektor pertanian, neoliberalisme berarti penurunan tajam tarif impor yang membuka lebar masuknya produk-produk pangan murah, pemangkasan subsidi langsung maupun tak langsung bagi produsen (kecuali di beberapa negara maju yang mendapat kelonggaran khusus, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat), serta penyesuaian regulasi sanitasi (terkait kehidupan atau kesehatan manusia dan hewan) dan fitosanitasi (terkait kehidupan atau kesehatan tumbuhan) yang dapat menjadi hambatan nontarif dalam perdagangan. Kaum tani makin menyadari betapa besar dampak yang bakal dan sedang dibawa oleh neoliberalisme global terhadap usaha tani dan sumber-sumber kehidupan mereka.

Neoliberalisme juga mencakup meningkatnya komodifikasi dan privatisasi biosfer, termasuk pengambilalihan plasma nutfah tanaman melalui hak pemulia dan paten; pemberlakuan hak paten ini memungkinkan perusahaan memperoleh untung besar dari benih-benih yang sebelumnya telah dikembangkan secara selektif oleh kaum tani se-

lama ribuan tahun. Undang-undang sertifikasi benih di hampir setiap negara makin membatasi jenis benih yang boleh ditanam oleh petani; pembatasan ini tidak hanya mencerminkan tetapi juga mendorong proses konsentrasi kepemilikan di antara perusahaan-perusahaan besar penghasil benih (Howard 2009), yang berlangsung pesat dan dalam skala ekstrem. Bentuk lain komodifikasi biosfer ialah munculnya pasar baru yang memperlakukan hutan dan tanaman perkebunan sebagai “penyerap” CO₂, sehingga pemiliknya bisa untung dari skema perdagangan “kredit karbon”.

Namun, neoliberalisme bukanlah doktrin yang kaku, monolitik, atau abadi. Pada pertengahan 1990-an, krisis keuangan yang terus berulang memaksa Bank Dunia dan kelompok negara G-7—di bawah tekanan gerakan Jubilee 2000—untuk mengembangkan program keringanan utang bagi negara-negara yang mereka kategorikan sebagai “*heavily indebted poor countries*” (HIPC), negara miskin yang paling banyak berutang. Seiring waktu, kekolotan yang sebelumnya meliputi lembaga keuangan internasional dan banyak pemerintahan negara berkembang mulai bergeser menuju neoliberalisme yang lebih “pragmatis” dengan penekanan pada peningkatan “kemampuan” perseorangan (Sen 2000). Hegemoni Konsensus Washington runtuh pada pertengahan hingga akhir 1990-an, tatkala beberapa perancang utamanya sendiri melontarkan kritik tajam atas dampak kebijakan penyesuaian struktural terhadap perekonomian serta taraf hidup negara-negara miskin (Stiglitz 2002; Sachs 1999; Soros 2002).

Para penggerak awal GAT yang berupaya membendung arus neoliberalisme berasal dari latar belakang politik yang beragam, termasuk kaum anarkis Spanyol, sosial demokrat Eropa dan Kanada, petani kecil yang peduli lingkungan dan bertekad memperkuat alternatif terhadap pertanian industrial, serta veteran dan aktivis militan gerakan revolusioner dan partai politik Marxis (kendati Marxisme sendiri memiliki sikap ambivalen terhadap kaum tani, di satu sisi memandang mereka sebagai kekuatan revolusioner, tetapi di sisi lain meremehkan mereka sebagai

para borjuis kecil). Basis massa mereka pun beragam, mulai dari petani gurem penghasil jagung di Amerika Tengah dan penduduk tunakisma di hunian “liar” di Brasil, hingga petani makmur di India selatan dan petani gandum yang termekanisasi di sabana Kanada. Di beberapa wilayah—Eropa Barat, Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Barat—GAT pertama kali muncul sebagai aliansi lintas batas di tingkat regional. Sebelum organisasi GAT secara resmi dibentuk dengan keanggotaan formal, beberapa organisasi tani nasional seperti Serikat Petani Nasional (NFU) di Kanada dan gerakan pekerja tunakisma di Brasil (MST) sudah menjalin jaringan solidaritas internasional yang aktif serta hubungan erat dengan para aktivis di negara-negara jiran. Yang terpenting, berbeda dengan organisasi tani di masa sebelumnya, GAT yang baru muncul ini memiliki keberagaman politik dan budaya yang luar biasa; kesamaan visi untuk melawan WTO, raksasa industri benih, dan taipan biji-bijian global telah melampaui hampir setiap perbedaan yang berpotensi memecah belah mereka. Salah satu ciri menonjol dari para penggerak awal GAT adalah banyaknya individu yang—akibat pengasingan, migrasi, atau pergolakan hidup lainnya—menguasai lebih dari satu bahasa dan dapat berperan sebagai penerjemah bagi para aktivis dari berbagai negara dan kelompok bahasa.⁶

Di bab-bab berikutnya, kami menganalisis politik GAT yang paling menonjol saat ini, dengan menelaah aspek kelas sosial, identitas budaya, dan ideologi, serta hubungan mereka satu sama lain maupun dengan LSM, lembaga donor, dan lembaga-lembaga antarpemerintah. Kami menyadari bahwa dengan fokus utama pada gerakan *agraria*, kami hanya menyinggung secara singkat hubungan solidaritas transnasional di sektor-sektor terkait, seperti nelayan tradisional (WFF dan WFFP) dan penggembala/peternak-masyarakat adat yang hidup berpindah (WAMIP). Kami terdorong oleh para peneliti lain (Ratner *et al.* 2014; Sinha 2012; Upton 2014) yang mulai memasukkan gerakan-gerakan tersebut dalam agenda penelitian.

CATATAN

- 1 Sebagian pembahasan tentang ACWW dan IFAP didasarkan pada Edelman (2003) dan sebagian pembahasan tentang Green Internasional didasarkan pada Borras, Edelman, dan Kay (2008).
- 2 Keck dan Sikkink (1998: 41) menganggap gerakan penghapusan perbudakan sebagai pelopor gerakan-gerakan sosial transnasional berikutnya.
- 3 “Krestentin” adalah singkatan dari frase bahasa Rusia “Krest’yanskii Internatsional” (Petani Internasional). Bagian tentang Red International dan Green International diambil dari Borras, Edelman, dan Kay (2008).
- 4 Selama kudeta, kaum komunis menyatakan netralitas atas apa yang mereka lihat sebagai perselisihan biasa antara kaum borjuis perkotaan dan pedesaan (Bell 1977).
- 5 ICA dibentuk pada 1889 oleh Menteri Pertanian Prancis Jules Melin. ICA berusaha menyelenggarakan kongres internasional secara berkala tentang masalah-masalah teknis dalam dunia pertanian (Jackson 1966).
- 6 Kira-kira setelah 2000, gerakan-gerakan seperti LVC makin bergantung pada jasa penerjemah profesional yang bekerja secara sukarela, seperti para penerjemah dari jaringan internasional penerjemah dan juru bahasa sukarela Babels (Boéri 2012) dan Kolektif Swakelola Teknologi Penerjemahan Lisan (COATI).

BAB 2

Diferensiasi Internal Gerakan Agraria Transnasional: Pertarungan Kelas, Identitas, & Ideologi

Kemunculan kelas kaya dan miskin di kalangan kaum tani—yang biasa disebut diferensiasi—sejak lama menjadi topik yang paling hangat dalam kajian agraria (Akram-Lodhi dan Kay 2010; Bernstein 2010). Fokus utama kami di sini ialah dampak diferensiasi kelas terhadap politik GAT; misalnya, kami ingin lebih memahami perbedaan antara isu dan kampanye yang berorientasi pada tanah versus yang berorientasi pada tenaga kerja, alih-alih membahas perdebatan teoretis itu sendiri. Namun, penting untuk menguraikan garis besar perdebatan ini karena keterkaitannya yang erat dengan politik beragam kelas di kalangan kaum tani. Pemahaman ini juga berguna untuk menjelaskan bangkitnya populisme agraria radikal dalam LVC, yang pada akhirnya meminggirkan golongan Marxis ortodoks dalam gerakan agraria global. Perbedaan kelas di antara petani dan dalam gerakan agraria juga membantu menjelaskan mengapa LVC dan kelompok anggotanya lebih menekankan kampanye terkait isu pertanahan, perdagangan, iklim, lingkungan, benih, dan gender, ketimbang hak-hak tenaga kerja—yang mungkin lebih relevan bagi sebagian besar penduduk miskin pedesaan yang bekerja sebagai buruh tani tak bertanah.

DEBAT TENTANG DIFERENSIASI & PETANI MENENGAH

Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, Rusia menjadi pusat perdebatan seputar diferensiasi dalam masyarakat tani. Salah satu alasannya adalah karena saat itu pemerintah Tsar menghimpun data sensus pertanian dan anggaran rumah tangga, dalam skala yang belum pernah ada

sebelumnya di belahan dunia mana pun; data ini memungkinkan para ekonom dan sosiolog untuk melakukan berbagai penelitian inovatif berbasis data empiris, baik secara historis (diakronis) maupun dalam potret waktu tertentu (sinkronis) (Shanin 1972). Atmosfer revolusi yang menyelimuti Rusia waktu itu juga sangat memengaruhi jalannya diskusi itu. Lenin (1964)—dan kemudian para Marxis ortodoks lainnya—melihat berkembangnya kapitalisme di pedesaan sebagai kekuatan utama yang membelah kaum tani menjadi petani miskin, menengah, dan kaya. Semenetera itu, ekonom A.V. Chayanov, yang sering dikaitkan dengan gerakan populis Rusia, berpendapat bahwa siklus kehidupan rumah tangga adalah mesin utama yang menggerakkan diferensiasi kelas; menurutnya, rumah tangga lebih tua, dengan tenaga kerja anak yang sudah dewasa, umumnya lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga lebih muda, dengan tanggungan anak-anak kecil yang belum produktif. Perdebatan utama antara pandangan Marxis dan populis terletak pada apakah kelas sosial di pedesaan bersifat tetap atau berubah, serta apakah diferensiasi terutama disebabkan oleh kapitalisme atau faktor siklus generasi. Kedua kutub perdebatan ini telah mendapat sambutan hangat sekaligus kritik tajam (van der Ploeg 2013; Vilar 1998). Dalam kenyataannya, hampir semua kasus menyejarah tentang diferensiasi di masyarakat tani kemungkinan besar melibatkan perpaduan antara faktor kelas dan dinamika generasi.

Gema perdebatan di Rusia tersebut terus terdengar dalam historiografi yang ditulis berikutnya serta di wilayah dunia lainnya (dan bahkan dalam politik kaum tani masa kini—lihat Bab 3). Sejarawan Fernand Braudel (1982), misalnya, menegaskan bahwa di Eropa, pasar itu sendiri bukanlah penyebab utama lenyapnya kaum tani; sebaliknya, proses proletarianisasi lebih sering terjadi akibat paksaan di luar mekanisme ekonomi atau melalui kekerasan langsung. Di Amerika Latin, khususnya Meksiko, perdebatan antara Marxis ortodoks dan Marxis agraria—yang terbagi menjadi kubu *descampesinistas* dan *campesinistas*—mencerminkan perbedaan pandangan antara garis Leninis dan Chayanovian tentang

apakah kaum tani dapat bertahan dalam sistem kapitalisme (Esteve 1983; Feder 1978; Roseberry 1993). Kelompok *descampesinistas* yang berhaluan Leninis beranggapan bahwa kaum tani pada akhirnya akan lenyap, sebab mereka meyakini bahwa kaum tani secara bertahap akan mengembangkan kesadaran proletariat yang “sejati”. Sementara itu, kelompok *campesinistas* menekankan daya lenting/ketahanan kaum tani, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang makin sulit serta untuk membangun kesadaran bersama dalam perjuangan atas tanah. Banyak *campesinistas* meyakini bahwa kaum tani—atau setidaknya sebagian kelas di dalamnya—memiliki potensi luar biasa untuk bertindak revolusioner (Huizer 1972).

Diferensiasi juga biasa terjadi di internal gerakan agraria transnasional yang besar, baik dalam hal kelas dan ideologi maupun dalam dimensi identitas lainnya, seperti ras, etnis, gender, dan generasi. Salah satu aspek paling mencolok dari GAT masa kini adalah tingginya tingkat diferensiasi di antara para anggotanya seturut garis-garis pembeda tersebut; meski demikian, mereka tetap mampu bersatu dan bergerak dalam berbagai kampanye bersama serta mempertahankan komitmen pada gerakan transnasional, baik selama puncak kampanye maupun di masa-masa antarkampanye. Para aktivis gerakan merayakan hal ini dengan slogan “persatuan dalam keberagaman”—sebuah bingkai induk naratif yang mendasari politik identitas mereka. Dalam berbagai spektrum politik—baik radikal, liberal, maupun konservatif—GAT umumnya membingkai wacana di sekitar gagasan bahwa “kita semua adalah para pemilik negeri.” Slogan ini kemudian dikembangkan menjadi kategori ekonomi-politik dengan merujuk pada konsep “kaum tani” (“kita semua adalah kaum tani”) bagi LVC, atau “petani keluarga” bagi IFAP yang kini sudah tidak aktif.

Kedua rumusan tersebut berkaitan erat dengan konsep “petani menengah” (*middle peasant*), sebuah kategori yang memiliki sejarah panjang dan penuh perdebatan dalam politik dan kajian pedesaan. Di Rusia sebelum revolusi, misalnya, Chayanov menggambarkan “petani

menengah” sebagai produsen pertanian yang tidak mempekerjakan buruh upahan maupun menyewakan tenaga kerja keluarganya, tetapi mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga serta mengakumulasi hasil produksi dalam jumlah yang cukup. Di sisi lain, kaum Marxis—dari Lenin hingga Mao—juga menaruh perhatian besar pada kategori “petani menengah”, sekalipun mereka tidak sependapat dengan Chayanov mengenai faktor siklus generasi sebagai akar diferensiasi kelas agraria pedesaan. Secara umum, golongan Marxis melihat bahwa kaum tani miskin lebih berpotensi mendukung revolusi bersenjata dan sosialisme (Paige 1975; Cabarrús 1983); tetapi mereka juga mengakui bahwa “petani menengah”—kelompok yang dibedakan dari “petani kaya” (atau “kulaks” di Rusia)—bisa menjadi sekutu yang bisa diandalkan dalam perjuangan.

Buku Eric Wolf berjudul *Peasant Wars of the Twentieth Century* (1969), salah satu karya utama dalam tradisi kajian petani dekade 1960-an, juga menyoroti peran “petani menengah”. Menurut Wolf, “petani menengah” berada dalam posisi yang unik—mereka tidak begitu miskin hingga hanya fokus bertahan hidup, tetapi juga tidak cukup kaya untuk mendapat manfaat berarti dari *status quo*; kondisi ini memberi mereka ruang gerak yang cukup memadai dan memungkinkan mereka menjadi aktor kunci dalam berbagai revolusi yang mengubah Meksiko, Aljazair, Tiongkok, dan Vietnam, di antara negara-negara lainnya. Wolf juga mengembangkan tipe ideal kaum tani yang memiliki ciri khas “petani menengah”; mereka harus menghasilkan “ongkos penggantian” untuk memastikan reproduksi biologis, “biaya seremonial” untuk mendukung pernikahan, festival atau pesta komunitas, dan kewajiban sosial lainnya, serta “biaya rente” berupa harta benda yang diserahkan kepada tuan tanah, rentenir, makelar, pemuka agama, dan pemungut pajak (Wolf 1966). Dengan kata lain, “petani menengah” dalam perspektif Wolf adalah kelompok yang dieksploitasi, tetapi tidak dalam tingkat yang ekstrem atau total, dan jika mereka sendiri mengeksploitasi orang lain, itu dilakukan dalam skala kecil dan tidak sistematis.

Upaya apa pun untuk membangun dan memperkuat gerakan sosial skala besar pada akhirnya membutuhkan narasi yang “menyederhanakan” realitas, yang kerap menekankan persatuan *daripada* keberagaman. Para peneliti yang terlibat secara langsung dalam gerakan (*engaged researcher*) memahami pentingnya tugas politik ini, dan kami mendukung kebutuhan tersebut. Namun, secara politik dan analitis, *terlalu* menekankan persatuan tanpa melihat keberagaman serta akar dan implikasinya juga tidak produktif. Sebagai “peneliti yang terlibat”, kami tidak menganggap ini semata-mata sebagai persoalan akademik; terlalu mudah bagi para akademika untuk sekadar menjadi “pencemooh gerakan” dari kejauhan. Sebaliknya, kami percaya bahwa mengakui adanya diferensiasi internal yang signifikan dalam suatu gerakan membantu memahami tidak hanya isu-isu politik yang krusial, seperti pembentukan aliansi strategis, tetapi juga dinamika internal dalam upaya mempertahankan persatuan di tengah segala perbedaan. Dengan semangat inilah kami menyusun gagasan dalam bab ini, dengan fokus pada LVC serta tinjauan singkat pada Koalisi Petani Asia (APC) dan IFAP.

Sebagai aktor di panggung dunia, LVC telah diakui sebagai suara utama orang-orang pedesaan yang terpinggirkan, dari sektor yang terorganisir, terutama petani kecil. Bahkan sebelum bubarnya IFAP pada 2010, LVC makin dikenal sebagai alternatif yang sah dan layak, yang pada akhirnya turut mengikis hegemoni IFAP. Namun, seperti halnya entitas lain yang berusaha mengakomodir, mengorganisir, dan mewakili beragam identitas dan kepentingan, LVC juga merupakan sebuah “arena aksi” yang terus berkembang, di mana karakter dan strategi gerakan bisa diperdebatkan dan dinegosiasikan (kembali) seiring waktu. Sifat ganda ini—sebagai “aktor tunggal” sekaligus “arena aksi”—menjadikan LVC sebagai lembaga penting bagi gerakan-gerakan agraria di tingkat lokal maupun nasional. Pada saat yang sama, kompleksitas internal LVC seiring kali menjadi tantangan bagi gerakan sosial transnasional lainnya, jaringan LSM, lembaga internasional, dan akademika dalam memahami dan berinteraksi dengan organisasi ini. Konsep tentang karakter ganda

LVC sebagai “arena” dan “aktor” ini punya kemiripan dengan gagasan “jaringan sebagai aktor” (*network as actor*) dan “jaringan sebagai struktur” (*network as structure*) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1998:7) dalam kajian utama mereka tentang aktivisme transnasional.

DIFERENSIASI KELAS SOSIAL

Baik aktivis maupun akademika kerap melontarkan istilah-istilah kunci yang sarat makna, tetapi tidak selalu berguna untuk memahami politik agraria. Beberapa istilah itu mencakup “masyarakat lokal”, “komunitas setempat”, “para pemilik negeri”, “kaum miskin pedesaan”, dan bahkan “petani” atau “kaum tani”. Pada kenyataannya, kelas pekerja berbasis tanah memiliki karakter yang beragam. Diferensiasi ini terutama, meski tidak sepenuhnya, bergantung pada perbedaan posisi mereka yang saling bertentangan dalam hubungan sosial yang terkait dengan kepemilikan dan/atau kontrol atas sarana produksi utama—terutama tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Walaupun kelompok-kelompok ini secara umum bisa dikategorikan sebagai kelas pekerja, akses mereka atas sumberdaya berbeda-beda: ada yang memiliki tanah, ada yang tidak; beberapa mungkin mendapat saluran irigasi, sementara yang lain sepenuhnya bergantung pada hujan musiman. Kepemilikan dan akses atas tanah menjadi faktor utama yang membedakan kelas-kelas dan kelompok-kelompok pekerja berbasis tanah di pedesaan.

Sebagai contoh, petani yang memiliki tanah lebih luas daripada yang bisa dikerjakan rumah tangganya sendiri cenderung tidak akan menyewakan tenaga kerja keluarganya kepada orang lain, dan justru akan mempekerjakan buruh tani. Mereka mampu menghasilkan surplus lebih besar, yang memungkinkan mereka memperluas tanah; membeli ternak, mesin, dan sarana produksi lainnya; berspekulasi di pasar; atau bahkan meminjamkan uang. Namun, mereka tetap tidak sama dengan tuan tanah. Meski punya sumberdaya lebih besar, mereka masih bekerja di lahan sendiri, dan pendapatan utama mereka berasal dari hasil kerja serta aktivitas produktif lainnya—berbeda dengan tuan tanah yang ti-

dak menggarap tanahnya secara langsung serta memperoleh pendapatan utama dari menyewakan tanah atau meminjamkan uang. Jika mereka perlu membeli hasil bumi atau ternak di pasar, mereka punya daya beli yang cukup untuk mendapatkannya. Sebagai contoh konkret, petani padi kaya di Filipina biasanya menyimpan hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun dan menjual sisanya. Mereka jarang harus membeli beras untuk kebutuhan sendiri.

Petani kaya, meski jumlahnya sedikit di banyak masyarakat, umumnya punya pengaruh besar secara ekonomi dan politik. Namun, gambaran tentang mereka bisa sangat berbeda bergantung konteksnya. Di Jawa, misalnya, petani kaya mungkin memiliki 3 hektare sawah beririgasi dan sebuah truk kecil untuk mengangkut pupuk, traktor, buruh tani, dan hasil panen. Sementara itu, di sabana Kanada, satu keluarga petani kaya bisa saja memiliki 10.000 hektare ladang gandum serta beberapa mesin pemanen bernilai mahal. Lenin (1964) pernah menyebut “kulaks”—petani kaya di Rusia pada akhir abad XIX—sebagai “penguasa pedesaan sesungguhnya.” Namun, di banyak tempat, kekayaan petani kaya sering kali masih kalah dibandingkan para tuan tanah dan rentenir, yang punya kendali lebih besar atas sumberdaya.

Sebaliknya, petani miskin—bukan petani menengah—hidup dalam kondisi yang jauh lebih susah. Mereka mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghasilan, tetapi tanah yang mereka garap bisa saja sewaan, tidak selalu milik sendiri. Mereka mengalami situasi paling sulit ketika harus menyewa tanah, terutama kalau luasnya terlalu kecil dan/atau tanahnya tandus. Mereka mengerahkan tenaga kerja yang tersedia di rumah tangga untuk mengerjakan lahan, tetapi hasil panennya kerap tidak mencukupi untuk menopang hidup. Sebagai contoh, seorang petani padi yang miskin di Filipina mungkin hanya memiliki 1 hektare sawah tadah hujan. Dia harus menjual sebagian besar panenannya untuk mendapatkan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar. Jika beruntung, dia mungkin bisa menyisihkan sedikit panenannya untuk

dimakan sendiri, tetapi biasanya hanya cukup untuk beberapa bulan. Setelah itu, dia harus membeli beras di pasar. Tidak seperti petani kaya, petani miskin jarang mempekerjakan buruh; justru merekalah yang biasanya menjual tenaga kepada orang lain, biasanya petani kaya dan menengah atau majikan di kota-kota sekitar. Di seluruh dunia hari ini, kelompok petani miskin inilah yang paling banyak jumlahnya.

Dari segi definisi, “petani menengah” berada di posisi antara. Mereka umumnya memiliki tanah yang cukup untuk bertahan hidup dan jarang sekali menjual tenaga atau mempekerjakan orang lain. Namun, posisi mereka tetap rentan—di satu sisi, mereka berusaha meningkatkan taraf hidup agar menjadi petani yang lebih sejahtera, sementara di sisi lain mereka harus bersusah payah agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

Kategori-kategori di atas sebaiknya dipahami sebagai panduan konseptual, bukan klasifikasi kaku dan mutlak. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan silang sengkabut ketimbang kategorisasi rapi yang diuraikan di sini. Batas antara kelompok-kelompok tersebut juga sering kabur. Seperti disebutkan sebelumnya, Chayanov berpendapat bahwa diferensiasi kelas di pedesaan tidak permanen dan sangat berkaitan dengan siklus usia rumah tangga—satu dari sejumlah pandangan yang dianggap sesat dan turut menyebabkan penghapusan jejak serta kematiannya di bawah rezim Stalin (lihat Shanin 2009). Dalam kajian yang lebih baru, van der Ploeg (2008) menekankan bahwa pertanian yang berbasis petani kecil dan yang bersifat “kewirausahaan” sebenarnya berada dalam satu spektrum yang terus berkembang. Di dalamnya terdapat perpaduan antara orientasi subsistensi dan pasar, serta antara teknologi tradisional dan “modern”. Dengan demikian, kategori-kategori itu bersifat dinamis dan terus berubah, serta perlu dipahami sebagai bagian dari proses diferensiasi sosial petani, seiring makin dalamnya penetrasi kapital tanpa henti di pedesaan, yang mengubah tanah, tenaga kerja, dan benih menjadi barang dagangan. Meski begitu, untuk memahami politik agraria serta dinamika yang menyatukan *dan* membelah kelas-kelas pekerja ag-

raria, tipologi kelas yang ringkas dan sederhana seperti ini tetap berguna sebagai pijakan awal.

Petani kaya lebih hirau pada masalah-masalah yang terkait khusus dengan kelas mereka. Karena pendapatan mereka berasal dari penjualan surplus hasil panen, mereka cenderung mendukung kebijakan pemerintah yang memungkinkan mereka terus menumpuk keuntungan. Kebijakan yang mereka anggap menguntungkan biasanya mencakup “harga di tingkat petani” yang lebih tinggi serta perlindungan dari impor pangan murah, baik yang masuk melalui mekanisme pasar maupun dalam bentuk bantuan. Petani kaya juga menginginkan kebijakan yang meringankan biaya produksi, seperti subsidi bahan bakar dan pupuk, suku bunga utang yang lebih rendah untuk pembelian alat atau modal produksi, serta peningkatan infrastruktur irigasi dan pascapanen, misalnya gudang penyimpanan dan jalan penghubung dari lahan ke pasar. Secara umum, harga bahan pangan yang tinggi menguntungkan petani kaya, karena mereka adalah produsen surplus pangan yang bisa menyimpan persediaan untuk kebutuhan sendiri, dan mereka bukan pembeli utama bahan pokok. Mereka biasanya menaruh syak terhadap dua kebijakan: pertama, peningkatan upah dan tunjangan bagi buruh tani; kedua, reforma pertanahan/agraria (meski di banyak negara, petani kaya justru mampu mengakali celah hukum dan birokrasi untuk tetap bisa menjadi penerima manfaat dari program reforma agraria).

Petani miskin cenderung mengutamakan isu-isu kebijakan yang sama sekali berbeda. Pertama, mereka sangat berkepentingan untuk mendapat kepastian akses tanah, baik melalui reforma agraria, program permukiman baru atau realokasi tanah, maupun melalui skema sewa. Kedua, sebagai pembeli bahan pokok setidaknya di musim tertentu, mereka cenderung mendukung kebijakan penetapan pangan dengan harga terjangkau, baik melalui skema subsidi universal atau yang tertarget maupun melalui program pembagian bahan pangan. Selain itu, meski sebagian besar hasil panen mereka dibawa pulang untuk konsumsi sen-

diri, petani miskin juga bisa saja menjual kelebihan produksi dalam jumlah yang cukup signifikan. Karena itu, mereka kemungkin besar akan mendukung kebijakan pemerintah yang menetapkan harga dasar yang menguntungkan petani, misalnya dengan skema “beli mahal, jual murah”—di mana pemerintah membeli hasil panen dengan harga tinggi dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga terjangkau. Skema seperti ini pernah menjadi pilar utama dewan komoditas yang pembentukannya dibantu Bank Dunia di berbagai negara pada 1960-an, tetapi kemudian justru didorong untuk dihapus pada 1980-an karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar pasar-bebas dan memperbesar defisit fiskal. Ketiga, petani miskin umumnya senang dengan kebijakan yang mendorong peningkatan upah dan tunjangan bagi buruh tani.

Sementara itu, petani menengah berada di posisi yang lebih luwes di antara dua kategori tersebut—kadang mendukung kebijakan yang menguntungkan petani kaya, kadang berpihak pada kepentingan petani miskin. Sikap mereka bergantung pada kondisi masing-masing, misalnya apakah mereka memiliki kepastian akses dan/atau kepemilikan tanah yang mereka garap, atau sedang berada dalam posisi lebih rentan. Namun, secara umum, mereka cenderung mendukung kebijakan yang menekan harga input pertanian dan meningkatkan hasil panen, sejalan dengan aspirasi mereka untuk naik kelas menjadi petani kaya.

Kami menyadari bahwa realitas sosial yang ada di lapangan tidak selalu bisa secara saklek dimasukkan ke dalam kategori-kategori skematik tersebut. Banyak rumah tangga atau individu yang sulit ditempatkan dalam satu kategori tertentu, karena mereka menjalankan ragam mata pencaharian sepanjang tahun—misalnya sebagai petani miskin, buruh tani, pedagang kaki lima, atau buruh bangunan, tergantung musim dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, ada juga petani kaya yang lebih menyerupai pengusaha agrobisnis dengan modal besar, atau yang lebih berperan sebagai pedagang atau rentenir ketimbang sebagai petani. Pergeseran cepat di antara kategori-kategori tersebut—yang didorong

oleh dinamika akumulasi, perubahan demografi, serta fluktuasi ekonomi makro—makin menunjukkan bahwa kategori tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan tetap. Namun demikian, meski kategori seperti petani kaya, petani menengah, dan petani miskin tidak boleh digunakan secara kaku dan statis, kami tetap berpendapat bahwa kerangka ini berguna untuk memahami bagaimana masing-masing kelompok mendefinisikan kepentingan mereka dan bagaimana mereka memperjuangkannya. Perbedaan politik di antara kelompok-kelompok tersebut—misalnya dalam isu reforma agraria atau harga bahan pangan—sering kali tidak hanya signifikan, tetapi juga bisa memicu pertentangan tajam. Dengan cara pandang ini, kita kini akan melihat bagaimana GAT berinteraksi dengan dinamika tersebut.

POLITIK KELAS DALAM GAT

Basis kelas sosial dalam LVC sangat beragam. Berdasarkan pemetaan kasar yang disusun dari pengalaman kami tentang gerakan ini, dapat diidentifikasi beberapa kelas utama dalam LVC: (1) petani tak bertanah, petani penyewa, petani penyakap (penggarap bagi-hasil), dan pekerja pedesaan, terutama di Amerika Latin dan Asia; (2) petani keluarga skala kecil hingga menengah yang bekerja paruh-waktu, umumnya di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan Korea Selatan; (3) petani keluarga, baik yang bersifat subsisten maupun yang berorientasi wirausaha, terutama di Selatan Global, termasuk di Afrika, serta mereka yang mendapatkan tanah melalui program reforma agraria di Brasil dan Meksiko; (4) petani menengah hingga kaya, yang dominan di India, Amerika Serikat, dan Kanada, meski juga ada di negara lain; (5) masyarakat adat yang menjalankan beragam jenis mata pencaharian produktif, terutama di Amerika Latin; dan (6) kelas semiproletar yang tinggal di perkotaan dan pinggiran kota di beberapa negara, seperti Brasil dan Afrika Selatan.

Meski ada kelas-kelas dan kelompok sosial lain di pedesaan yang juga tergabung dalam LVC, suara dan basis mereka dalam gerakan cenderung kecil. Kelompok-kelompok ini mencakup nelayan tradisional skala

kecil dan pekerja perikanan, penggembala nomaden, buruh tani tunakisma, pekerja migran/perantauan, dan masyarakat yang bergatung pada hutan. Kehadiran kelompok-kelompok ini, serta bobot nisbi mereka dibandingkan organisasi petani yang lebih besar, sangat memengaruhi cara LVC membingkai isu dan kampanye serta membangun sekutu dengan gerakan kelas pekerja lainnya. Aspek ini dibahas lebih mendalam di bab berikutnya.

ISU PERTANAHAN & PENJAGA GERBANG DI LVC

LVC selalu membingkai isu pertanahan sebagai perjuangan melawan *latifundia* atau penguasaan tanah skala besar. Reforma agraria—redistribusi tanah skala luas milik swasta kepada petani tak bertanah dan petani berlahan sempit—telah menjadi kerangka utama dalam kampanye pertanahan LVC, dengan tujuan menciptakan kelas petani menengah yang tangguh dan produktif.

Di dalam LVC, kelompok petani tunakisma dan petani berlahan sempit di Amerika Latin dan Asia termasuk yang paling vokal memperjuangkan isu pertanahan. LVC mengorganisir kampanye-kampanye tematik melalui berbagai komisi, salah satunya bertanggung jawab memimpin gerakan reforma agraria. Sekitar 1999–2000, LVC meluncurkan Kampanye Global untuk Reforma Agraria (GCAR), saat Bank Dunia sedang gencar-gencarnya mendorong program “reforma agraria berbasis pasar” (*market-led agrarian reform* [MLAR]) yang berhaluan neoliberal. Sejumlah organisasi lain bergabung dengan LVC dalam membingkai, meluncurkan, dan melaksanakan GCAR: Jaringan Informasi dan Aksi untuk Kedaulatan Pangan (FoodFirst Information and Action Network [FIAN]), Focus on the Global South, dan Rede Social di Brasil dalam konteks Jaringan Penelitian dan Aksi untuk Reforma Agraria (Land Research Action Network [LRAN]). Penolakan terhadap MLAR dan kebijakan Bank Dunia secara lebih luas sejalan dengan sikap antineoliberal yang menjadi pijakan utama LVC. Melalui GCAR serta berbagai upayanya, LVC berhasil mengembalikan isu reforma agraria ke dalam

agenda pembangunan arus utama, meski mereka belum mampu benar-benar memengaruhi arah kebijakan di negara-negara kunci. Di Brasil, misalnya—salah satu basis utama LVC—program MLAR justru makin berkembang pada masa ketika GCAR sedang aktif (Borras 2008).

Di dalam LVC, GCAR dikelola oleh sebuah “komisi reforma agraria”. Setiap komisi di LVC dikoordinasikan oleh organisasi anggota, dan dalam hal ini, tugas tersebut dipegang oleh Dewan Koordinasi Organisasi Petani Honduras (COCOCH) pimpinan Rafael Alegría—tokoh penting yang juga menjabat koordinator umum LVC selama 1996–2004.¹ Di Amerika Latin, suara yang paling berpengaruh dalam LVC berasal dari MST di Brasil; perwakilan MST terus menduduki posisi kepemimpinan penting dalam gerakan global ini. Sementara itu, di Asia, gerakan tani dari Filipina dan Indonesia—terutama saat sekretariat global LVC bertempat di Indonesia selama 2004–2013—serta beberapa kelompok dari Asia Selatan (terutama di Bangladesh dan Nepal), memang memainkan peran penting, tetapi belum sekuat blok Amerika Latin. Namun, justru gerakan petani tunakisma dan pekerja pedesaan di Amerika Latin dan Asia (termasuk gerakan rakyat tunakisma LPM di Afrika Selatan sebelum akhirnya bubar) yang menjadi pendorong utama agar LVC meluncurkan kampanye global reforma agraria. Belakangan, pada 2014, isu reforma pertanahan tampaknya mendapat sokongan baru setelah sekretariat internasional LVC dipindahkan ke Harare, Zimbabwe; di sana, sekretariat LVC bernaung di bawah ZIMSOFF (Forum Petani Organik Zimbabwe). Salah satu pimpinan ZIMSOFF, Elizabeth Mpofu—yang merupakan penerima manfaat program reforma agraria jalur cepat di negaranya—kemudian terpiih sebagai koordinator umum LVC.²

Kekuatan organisasi-organisasi Amerika Latin dan Asia begitu besar hingga berhasil mendorong reforma agraria sebagai kampanye utama LVC, meski ada perlawanan dari suara berpengaruh lainnya dalam gerakan ini, yaitu Serikat Petani Karnataka (KRRS) di India, yang basis massanya terutama petani menengah dan kaya di negara bagian Karnata-

taka. Awalnya, KRRS enggan menjadikan reforma pertanahan sebagai agenda utama LVC, tapi akhirnya mereka kalah dalam perdebatan ini.

Apa yang membuat KRRS menolak? Sejak 1980-an, kelompok ini terkenal dengan kampanye teatrical melawan perusahaan multinasional dan tanaman rekayasa genetika, yang membetot perhatian media (Gupta 1998). Kampanye anti-rekayasa genetika mereka terhubung erat dengan gerakan advokasi yang bertujuan sama di Utara Global. Berkat kampanye ini, KRRS menjadi salah satu pemain utama dalam perjuangan global LVC menentang rekayasa genetika dan perusahaan multinasional. (Ironisnya, banyak anggota KRRS sendiri yang justru menanam tanaman rekayasa genetika dan tidak begitu keberatan terhadap teknologi ini [Pattenden 2005].)

Selain itu, KRRS memainkan peran sebagai “penjaga gerbang” informal di Asia Selatan. Mereka punya pengaruh besar dalam menentukan organisasi mana yang bisa diterima sebagai anggota LVC—dan yang lebih sering, siapa yang tidak boleh masuk. Akibatnya, banyak organisasi petani miskin dan kelompok rakyat pedesaan tertindas di India serta wilayah lain di Asia Selatan terpinggirkan dari LVC, baik karena KRRS secara aktif menghalangi mereka ataupun karena mereka sendiri enggan bergabung dalam gerakan yang dikendalikan KRRS. Seorang sekutu dekat LVC pernah berkomentar, “Di India, yang bergabung dengan *Vía Campesina* ialah petani dari kasta lebih tinggi, sementara petani dari kasta lebih rendah dibiarkan di luar. Bagaimana cara memperbaikinya?” (dikutip oleh Rosset dan Martínez-Torres 2005: 37). Beberapa organisasi petani miskin akhirnya bergabung dengan LVC. Namun, hingga kini, banyak serikat petani miskin tak bertanah di pedesaan India tetap berada di luar gerakan ini. Salah satu alasannya adalah bercokolnya pengaruh KRRS di LVC, selain karena perpecahan ideologis yang melemahkan KRRS pada akhir 1990-an juga membuat organisasi ini kurang menarik sebagai sekutu bagi serikat petani miskin.

Meski kerap menggunakan retorika yang terdengar radikal, KRRS sengaja mengabaikan isu-isu kelas. Pendiri sekaligus pemimpin lama-

nya, M.D. Nanjundaswamy (mendiang), pernah menjelaskan: “Kami tidak bisa membelah diri menjadi tuan tanah dan petani tak bertanah, lalu berjuang secara terpisah, karena perjuangan itu tidak akan punya kekuatan, juga tidak akan memberi pengaruh apa pun” (Assadi 1994: 215). Tidak mengherankan kalau KRRS menolak pembatasan kepemilikan tanah melalui kerangka hukum, meski pada saat yang sama mereka justru mendukung pembatasan kepemilikan dalam industri properti di perkotaan. Selain itu, “baik gerakan Shetkari Sanghatana di negara bagian Maharashtra maupun KRRS tidak hanya gagal mengecam kekerasan terhadap kaum adivasi dan dalit, tetapi dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan tersebut justru anggota mereka sendiri” (Assadi 1994: 213–215).³ Kasus KRRS menunjukkan bahwa perbedaan kelas dalam gerakan-gerakan yang tergabung LVC memang sangat serius. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi senarai organisasi yang menjadi bagian LVC, tetapi juga membentuk cara LVC merancang tuntutan kampanye, menetapkan tujuan, dan menyusun representasi gerakannya.

KRRS bukanlah satu-satunya organisasi petani kaya yang mencoba memengaruhi arah gerakan LVC. Salah satu konflik besar pertama dalam LVC melibatkan UNAG, Serikat Petani dan Peternak Nasional Nikaragua. UNAG menjadi tuan rumah konferensi solidaritas global di Managua pada 1992, yang kemudian melahirkan ide untuk membentuk LVC—menjadikannya salah satu pendiri utama LVC. UNAG juga menjadi pilar koalisi regional ASOCODE di Amerika Tengah dan sekitarnya, yang berkembang menjadi salah satu kelompok regional paling dinamis pada tahun-tahun awal LVC. Meski punya kedekatan dengan Front Sandinista yang radikal di Nikaragua, UNAG tetap menjadi anggota IFAP, jaringan transnasional yang menaungi organisasi-organisasi petani kaya dan menengah. Perhatian utama UNAG berkisar pada isu-isu produksi dan perdagangan, pengelolaan dewan komoditas negara yang didirikan oleh pemerintahan Sandinista pertama, serta upaya mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah dalam bentuk

layanan dan fasilitas kredit yang didanai lembaga donor bilateral maupun multilateral (Blokland 1992).

Organisasi lain dari Nikaragua yang turut berperan dalam pendirian LVC, yaitu Asosiasi Pekerja Tani Pedesaan (Asociación de Trabajadores del Campo [ATC]), memberi pengaruh yang berkebalikan dengan UNAG. Padahal keduanya punya sejarah kedekatan dengan Sandinista, dan UNAG sendiri awalnya merupakan pecahan dari ATC yang mewakili petani kaya. Berbeda dengan UNAG, ATC lebih fokus pada isu-isu dan tuntutan kelompok tak bertanah, seperti upah dan akses atas tanah. Organisasi ini mengorganisir buruh perkebunan, buruh musiman, serta anggota koperasi dan usaha tani milik negara, juga berafiliasi dengan federasi buruh regional dan internasional. Dalam sebuah wawancara pada 1994, seorang pemimpin ATC pernah menyindir: ketika para pemimpin UNAG bisa bepergian ke negara-negara tetangga dengan pesawat, dia dan aktivis ATC lainnya hanya mampu naik bus.⁴

Perbedaan kelas semacam ini mencuat dalam pertemuan pendirian LVC pada 1993, ketika para pemimpin LVC yang sedang naik daun bersitegang dengan sebuah LSM Belanda, Yayasan Paulo Freire (PFS), penggagas acaranya. Perdebatan utama mereka adalah apakah LVC sebaiknya menjadi “forum” yang memungkinkan organisasi-organisasi anggotanya juga tergabung dalam IFAP, ataukah menjadi organisasi yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari IFAP.⁵ PFS mendorong pilihan pertama, sedangkan para pemimpin gerakan agraria seperti Paul Nicholson dari Basque (saat itu bagian dari Koordinasi Petani Eropa [CPE]) menentang gagasan tersebut dan mendesak agar LVC berdiri sebagai organisasi otonom. Situasi ini makin rumit karena UNAG sendiri merupakan anggota IFAP. Akhirnya, UNAG (yang menjadi tempat kerja koordinator PFS selama beberapa tahun sebagai mitra kerjasama Belanda) membela kubu PFS, yakni tetap di IFAP, dan memilih keluar dari LVC. Sekilas, peristiwa ini tampak seperti perebutan pengaruh yang biasa terjadi dalam gerakan, tetapi bagi banyak aktivis dan akademika,

peristiwa ini dipandang sebagai momen penting dalam sejarah LVC. Jika ditelaah lebih dalam, konflik tersebut mencerminkan garis pemisah berbasis kelas antara kelompok yang pro- dan yang anti-IFAP.

Kampanye global reforma agraria yang dijalankan LVC mendapat sambutan di Amerika Latin dan beberapa negara Asia. Namun, di India—tempat reforma pertanahan merupakan isu politik yang mendesak—kampanye global LVC justru tidak pernah benar-benar dilaksanakan sebagai program prioritas. Keheningan ini sebenarnya tidak mengejutkan jika dilihat dari perspektif kelas dalam basis massa LVC di India, yang didominasi petani kaya dari KRRS (dan kemudian dari BKU [Serikat Petani India]).

Lensa analisis kelas juga membantu menjelaskan mengapa ada beberapa isu yang tampaknya diabaikan dalam kampanye reforma agraria LVC. Salah satu sektor terbesar dari kaum miskin pedesaan adalah pekerja tunakisma, seperti buruh potong tebu di Brasil, buruh perkebunan pisang di Ekuador, buruh perkebunan nanas di Filipina, serta pekerja migran di kebun anggur dan ladang stroberi di Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok tunakisma juga mencakup mereka yang bekerja untuk petani kaya maupun skala kecil. Banyak dari mereka, terutama buruh perkebunan milik perusahaan besar, tidak punya keinginan untuk menjadi petani kecil. Tuntutan utama mereka lebih berfokus pada keadilan ketenagakerjaan: upah layak, tunjangan dan kondisi kerja yang baik, serta hak untuk perundingan bersama. Meski mendaku mewakili “kaum miskin pedesaan” seluruh dunia, LVC belum pernah meluncurkan kampanye sistematis terkait keadilan ketenagakerjaan—isu yang sebenarnya paling mendesak bagi mayoritas kaum miskin pedesaan. Memang, LVC pernah menyelenggarakan pertemuan mengenai pekerja migran sektor pertanian di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi inisiatif ini tidak mendapat perhatian sebesar kampanye mereka melawan WTO, rekayasa genetika, serta kampanye terkait tanah, perubahan iklim, dan benih.

POLITIK IDENTITAS LAINNYA

Kami telah mengangkat isu kelas secara hati-hati. Kelas sosial jelas merupakan faktor penting yang membentuk dinamika politik GAT, tetapi bukan satu-satunya (seperti yang telah disinggung di Pendahuluan). Kelas beririsan dengan berbagai identitas sosial lainnya, yang makin memperumit karakter politik gerakan. Akan keliru jika kita menganggap ada korelasi sederhana antara posisi sosial-ekonomi seseorang dengan bagaimana dia menggunakan agensi politiknya. Peralihan dari sekadar “kelas dalam dirinya sendiri” menjadi “kelas untuk dirinya sendiri”—kalau memang terjadi—sering diperantarai oleh identitas sosial lain yang beririsan, seperti ras, etnis, gender, dan generasi.

Ras/Etnis

Persinggungan antara kelas dengan ras dan etnis sering kali rumit, sehingga politik kaum pekerja menjadi berpalis-lapis dan jauh dari sederhana. Misalnya, rumah tangga tak bertanah mungkin berasal dari kelompok etnis yang berbeda dan merumuskan perjuangan politiknya dengan cara yang berlainan pula. Seorang pekerja migran Cebuano, Ilonggo, atau Tagalog (yang beragama Kristen) di sebuah perkebunan karet di Filipina bagian barat-daya mungkin memandang dirinya dari sudut pandang kelas sebagai tunakisma. Sementara tak jauh darinya, seorang pemukim Yakan tunakisma yang menganggur (yang beragama Islam) mungkin mengalami pengusiran paksa oleh pemilik perkebunan dari komunitas asalnya setengah abad sebelumnya. Keduanya sama-sama punya kepentingan kelas sebagai tunakisma—mendapatkan tanah untuk digarap atau pekerjaan tetap di perkebunan. Namun, hubungan mereka dengan sebidang tanah dan dengan perkebunan itu sangatlah berbeda, sehingga sikap mereka terhadap isu tanah dan perkebunan juga tidak sama. Pekerja migran nasrani mungkin berharap memperoleh sebidang tanah pribadi melalui program reforma agraria, sementara pemukim muslim yang pernah terusir dari tanah asalnya mungkin lebih menginginkan pemulihan hak melalui mekanisme ganti rugi (restitusi).

Persilangan antara identitas kelas, etnis, dan agama inilah yang makin memperumit politik agraria yang sudah kompleks. Kelas memang faktor penting, tapi tidak bisa dipahami sebagai kategori tunggal yang terpisah dari dimensi identitas lainnya.

Ketegangan seperti ini juga banyak dijumpai dalam berbagai gerakan agraria yang terhubung dengan GAT dewasa ini. Contohnya bisa kita lihat pada hubungan antara keturunan Eropa dan keturunan Afrika yang sama-sama tak bertanah di Brasil dan Kolombia; antara buruh tani migran asal Afrika Selatan, Zimbabwe, serta Mozambik di Afrika Selatan; atau antara petani menetap dan penggembala nomaden di Namibia. Hubungan etnis atau kebangsaan yang saling bertentangan semacam ini kerap memperlambat atau bahkan menggerogoti upaya membangun gerakan bersama.

Gender

Persinggungan antara gender dan kelas merupakan salah satu dimensi identitas yang paling sering muncul dan berpengaruh. Dalam pembentukan LVC dan pelaksanaan mandatnya, kesetaraan gender menjadi salah satu agenda utama politik internal. Namun, pada pertemuan pembentukan LVC di Mons, Belgia, pada 1993, hanya sekitar seperlima delegasi yang hadir adalah perempuan. Situasi serupa kembali menjadi isu besar dalam konferensi kedua LVC 1996 di Tlaxcala, Meksiko, ketika seluruh anggota Komite Koordinasi Internasional (ICC) yang terpilih adalah laki-laki. Para delegasi perempuan pun memprotes keras keputusan ini dan berhasil memaksa pemilihan ulang, yang akhirnya menghasilkan keterwakilan perempuan dengan terpilihnya Nattie Wiebe dari NFU Kanada sebagai anggota ICC (Wiebe 2013).

Dalam sejarahnya, masyarakat pedesaan Amerika Latin dikenal sangat patriarkal. Namun, justru dari kawasan inilah lahir gerakan-gerakan yang memelopori model kesetaraan gender yang lebih maju. Pada dasawarsa 1980-an, banyak organisasi di Amerika Latin—menanggapi desakan dari perempuan maupun lembaga donor Eropa—mendirikan sekreta-

riat dan komisi perempuan. Dalam beberapa kasus, unit-unit ini kemudian memisahkan diri dan menjadi organisasi perempuan tani yang otonom, yang kerap berafiliasi dengan berbagai aliran feminisme (Deere dan Royce 2009). Koordinator Organisasi Pedesaan Amerika Latin (CLOC), yang menaungi sebagian besar anggota LVC di kawasan ini, sedari awal menerapkan tradisi pertemuan khusus perempuan sebelum konferensi besar. Tujuannya memastikan suara perempuan terdengar dan terwakili secara memadai. LVC kemudian mengadopsi praktik ini; dalam konferensi ketiganya di Bangalore, India, pada 2000, LVC merombak struktur ICC dengan aturan baru: setiap wilayah harus diwakili oleh satu laki-laki dan satu perempuan. Meningkatnya partisipasi perempuan ini, menurut Deere dan Royce (2009:16)

membuka ruang bagi wacana gender dalam gerakan pedesaan yang bercampuran-jenis-kelamin, sebagian karena organisasi perempuan tani pedesaan yang otonom dan organisasi tani yang bercampuran-jenis-kelamin sering bersaing mendapatkan anggota; hal ini mendorong organisasi tani yang bercampuran-jenis-kelamin menjadi jauh lebih menerima perempuan beserta tuntutan mereka.

Yang tak kalah penting, “gender” atau “isu perempuan” kini tidak lagi dianggap sebagai urusan perempuan semata. Upaya untuk menggugah kepekaan laki-laki dalam isu ini terus bergulir, termasuk melalui prakarsa besar seperti Kampanye Global LVC untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan (LVC 2012). Kampanye ini mendorong organisasi anggota LVC untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan antikekerasan, baik dalam kelompok kecil maupun aksi massa.

Namun, masih menjadi pertanyaan apakah meningkatnya kesadaran dan kesetaraan perwakilan secara formal ini benar-benar mengubah hubungan kekuasaan. Seperti dikatakan Bina Agarwal (2015), yang menelaah kasus komite pengelolaan hutan di Asia Selatan, “massa kritis dari ‘perempuan dalam kelompok mereka sendiri’ dapat membawa perubahan-

an yang berarti, bahkan tanpa adanya kesadaran sosial ‘perempuan untuk kelompok mereka’.”

Generasi

“Siapa yang akan mewarisi pedesaan?” tanya Ben White (2011) seraya menganjurkan pemaduan yang lebih sistematis antara kajian agraria dan kajian generasi. Dimensi generasi dalam politik dan perubahan agraria kini kembali mengemuka (meski dalam bentuk yang berbeda dibandingkan pada masa Chayanov), tetapi belum mendapat perhatian yang semestinya. Salah satu alasannya adalah adanya anggapan bahwa kaum muda pedesaan saat ini tidak berminat bertani. Hal ini mungkin benar di banyak tempat. Namun, bagaimana dengan pemuda pedesaan yang sesungguhnya ingin bertani tapi tidak dapat mengakses tanah karena kendala keuangan? Seiring kian langka dan mahalnya tanah di seluruh dunia, makin banyak anak muda yang ingin bertani tak sanggup membeli atau mendapatkan tanah. Pertanyaannya, apakah mereka mengalami kesulitan ini karena mereka masih muda, atau karena posisi kelas mereka? Secara umum, anak-anak dari keluarga berada yang ingin bertani menghadapi tantangan yang lebih ringan dibandingkan mereka yang berasal dari latar belakang kelas pekerja atau keluarga miskin. Di sinilah persinggungan antara kelas dan generasi menjadi faktor penting.⁶

Banyak yang beranggapan bahwa bertani paruh-waktu menandakan ekonomi sedang sulit, sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga yang menjalankannya sedang mengalami diferensiasi sosial (tersisih) akibat dinamika pasar. Seruan untuk memperbaiki situasi ini biasanya didasarkan pada gambaran ideal tentang “petani menengah”, dengan gagasan bahwa kebijakan harus diarahkan untuk membantu petani paruh-waktu beralih menjadi petani menengah penuh-waktu yang dianggap lebih layak dan berkelanjutan. Memang benar bahwa bertani paruh-waktu acap menjadi satu tahapan dalam proses diferensiasi sosial yang bisa membuat petani kehilangan tanah. Tetapi tidak selalu demikian; bertani paruh-waktu kadang tidak menandakan kondisi sedang susah. Bagi sebagian rumah

tangga, bertani paruh-waktu menjadi siasat yang sudah diperhitungkan untuk tetap bertahan di sektor pertanian melalui penggabungan usaha tani dengan pekerjaan lain—apa yang oleh ilmuwan sosial disebut sebagai “kerja majemuk” (*pluriactivity*) atau “pedesaan baru” (*new rurality*) (Kay 2008). Di Utara Global, sebagian petani dan calon petani, terutama yang muda, melihat bertani paruh-waktu sebagai pilihan alternatif yang layak ditempuh. Kebijakan yang mendukung jenis penghidupan ini tentu berbeda dengan kebijakan yang ditujukan untuk petani menengah penuh-waktu. Generasi baru petani paruh-waktu ini kemungkinan besar akan menempuh pendekatan politik dan advokasi secara berbeda dibandingkan dengan petani muda penuh-waktu maupun petani paruh-waktu dari generasi lebih tua yang sedang tersisih secara sosial.

Tempat

Isu tentang ruang dan tempat, serta bagaimana keduanya beririsan dengan kelas, sangat penting dalam fase kapitalisme global saat ini, di mana kapital secara agresif memburu ruang-ruang yang bisa diduduki demi akumulasi lebih lanjut. Identitas berbasis tempat—baik dalam skala regional, nasional, maupun lokal—selalu memainkan peran penting, terkadang sejalan dengan hierarki kelas, tetapi di lain waktu melintasi batas-batas kelas. Ketika korporasi merampas tanah secara besar-besaran untuk pertambangan terbuka, pariwisata, atau proyek-proyek mitigasi perubahan iklim seperti penurunan emisi gas rumah kaca (REDD+), mereka biasanya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja; akibatnya, penyingkiran penduduk setempat menjadi hal yang umum terjadi. Proses semacam itu berdampak secara berbeda pada berbagai kelompok sosial; tetapi, dalam situasi pengusiran massal, berbagai sektor masyarakat cenderung mengalami dampak yang sama. Pengusiran adalah pengalaman traumatis, baik bagi petani miskin maupun kaya, tunakisma, atau peternak/penggembala. Meski mereka berasal dari latar belakang kelas yang berlainan, dalam situasi seperti ini, perbedaan tersebut jadi kurang penting, dibandingkan dengan nasib yang mereka alami bersama sebagai

“orang-orang tergusur”. Karena itu, gerakan atau tuntutan politik yang mengemuka dalam konteks ini cenderung berfokus pada perjuangan melawan pengusiran dan mempertahankan hak atas tanah, ketimbang menonjolkan perbedaan kelas di antara mereka.

Singkatnya, meski kelas merupakan unsur mendasar dalam analisis politik agraria, memahami bagaimana kelas beririsan dengan identitas sosial lainnya menjadi hal yang tak kalah penting. Hanya dengan cara ini kita dapat melihat bagaimana dan mengapa jenis-jenis politik tertentu mengemuka.

DIFERENSIASI IDEOLOGIS

Gerakan sosial transnasional yang besar seperti LVC umumnya memiliki keberagaman ideologi yang merentang luas. Perbedaan ideologi yang dimaksud sebagiannya berkaitan dengan perbedaan kelas, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada kelas, sebagaimana dijelaskan di atas. Misalnya, ada gerakan-gerakan petani tunakisma yang radikal, tetapi memiliki pandangan ideologis yang sangat berlainan satu sama lain. Ada pula gerakan sosial yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang kelas, generasi, etnis, dan gender, tetapi tetap mengusung ideologi yang sama. Setiap gerakan sosial biasanya mempertanyakan: “Bagaimana kita sampai pada situasi sekarang ini? Sistem alternatif seperti apa yang kita inginkan? Strategi apa yang mesti kita tempuh untuk mencapai visi alternatif itu?” Pertanyaan-pertanyaan ini secara inheren bersifat ideologis, karena jawaban yang diberikan bergantung pada cara pandang tertentu. Kaum Marxis, misalnya, punya jawaban yang berbeda dengan kelompok populis agraria radikal non-Marxis; gerakan yang diilhami oleh anarkisme akan memiliki perbedaan mendasar dengan yang berhaluan Leninis; kelompok liberal-progresif cenderung lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan gerakan ekofeminis, tetapi kubu Marxis yang punya sejarah persaingan ideologis, seperti kaum Maois dan Trotskyis, bisa saja mengalami kesulitan untuk bekerjasama dalam sebuah koalisi besar. Ideologi tidak selalu diterapkan dengan cara yang

seragam dan rapi di semua organisasi yang tergabung dalam sebuah GAT. Ada kelompok yang memegang komitmen kuat pada satu ideologi tertentu, sementara yang lain mungkin lebih luwes meski cenderung condong ke haluan tertentu.

Memahami konfigurasi ideologis dalam GAT besar dan bagaimana hal itu berkaitan dengan basis kelasnya dapat membantu menjelaskan bagaimana gerakan tersebut menganalisis suatu isu dan menyusun tuntutan. Hal ini juga bisa menunjukkan celah dalam basis massa dan politik gerakan tersebut, juga mengungkap bagaimana GAT itu sendiri merupakan arena pertarungan bagi para aktor di dalamnya. Ringkasnya, dengan menelusuri bagaimana konfigurasi ideologis beririsan dengan kelas dan identitas lain dalam sebuah GAT, kita bisa memahami dengan lebih baik mengapa gerakan itu bertindak dengan cara tertentu (atau malah tidak bertindak) dalam momen-momen sejarah yang menentukan.

LVC merupakan sebuah GAT besar yang terdiri atas gerakan-gerakan nasional dengan komitmen kuat pada posisi ideologis tertentu atau setidaknya condong ke arah perspektif ideologis tertentu. Seperti perbedaan kelas, perbedaan ideologis jarang dibicarakan secara terbuka, baik di dalam LVC maupun di antara pengamat luar yang bersimpati pada gerakan ini. Dalam LVC, terdapat beragam orientasi ideologis: (1) berbagai aliran populisme agraria radikal; (2) Marxis ortodoks, beberapa di antaranya berhaluan Maois; (3) kelompok radikal dengan pengaruh anarkisme; (4) aktivis lingkungan radikal; dan (5) aktivis feminis. Banyak kelompok dan individu berada di antara kategori-kategori ini atau memiliki haluan yang saling tumpang tindih, seperti feminis-populis-agraria-radikal atau Marxis-populis-agraria-radikal. Sementara itu, ada pula anggota yang tidak menduduki posisi ideologis yang jelas atau belum memapankan posisi ideologis tertentu. Keberagaman ideologi ini sangat mencolok di dalam LVC; misalnya, jika dibandingkan, Federasi Petani Bangladesh (BKF) mengusung pandangan Marxis ortodoks yang berbeda dengan Serikat Pekerja Pedesaan (SOC) di Andalusia, Spanyol,

yang berpandangan radikal heterodoks, atau dengan Serikat Petani Nasional (NFU) di Kanada, ataupun dengan KRRS di India.

Penting untuk membedakan antara konfigurasi kelas dalam sebuah GAT dengan kerangka ideologis yang dominan dalam gerakan global seperti LVC. Tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Sejak awal 1990-an, kepemimpinan LVC didominasi oleh kubu populis agraria radikal, yang berhasil menggeser kaum Marxis ortodoks. Kubu ini—yang sebenarnya merupakan koalisi beberapa kubu kecil—bersikap anti-kapitalis, tetapi ingin membayangkan kembali suatu bentuk modernitas yang menempatkan “petani menengah” di pusat visi alternatif mereka. Kepemimpinan ini tidak hanya memengaruhi perumusan kampanye politik LVC, tetapi juga menentukan bagaimana LVC membentuk dirinya sebagai sebuah gerakan global.

ONGKOS KEORGANISASIAN DARI PERPECAHAN IDEOLOGIS

Di Asia Selatan, orientasi KRRS yang lebih mewakili kepentingan petani kaya serta dominasinya dalam LVC telah mendorong kelompok-kelompok petani sayap kiri lainnya di India untuk membentuk gerakan transnasional tandingan, yakni Koalisi Petani Asia (APC), yang secara ideologis umumnya berpaham Marxis ortodoks atau Maois. APC punya basis kalangan petani miskin dan buruh tani yang paling rentan. Dibandingkan LVC, jaringan APC lebih konsisten dalam mengorganisir petani miskin dan pekerja pedesaan. Jika kedua gerakan ini bisa bekerjasama, APC sebenarnya berpeluang mempertajam analisis dan tuntutan berbasis kelas dalam LVC, memperluas representasi di Asia, serta memperkuat perjuangan atas tanah di kawasan ini. Namun, haluan ideologis APC yang cenderung kaku justru menghambat upaya membangun aliansi lintas kelas. Alhasil, bukannya saling melengkapi, hubungan antara APC dan LVC malah makin renggang.

Ketegangan ideologis berpengaruh pada strategi politik, sebagaimana kami perlihatkan di sepanjang bab ini. Di Meksiko, misalnya,

ketegangan ideologis tercermin pada perbedaan pandangan di antara dan di dalam anggota LVC terkait diinginkan atau tidaknya aliansi—baik di masa lalu maupun saat ini—dengan sesama anggota, negara, ataupun partai politik (Bartra dan Otero 2005). Dalam beberapa kasus, organisasi yang sangat kecil atau faksi-faksi organisasi yang mengalami perpecahan justru berupaya menjalin atau memperkuat hubungan dengan GAT agar memperoleh legitimasi serta akses atas sumberdaya materiel.⁷ Terkadang, jurang ideologis dialami organisasi-organisasi dari negara-negara berbeda, ketimbang di satu negara. MST di Brasil dan CNCR (Dewan Nasional untuk Kerjasama Rakyat Pedesaan) di Senegal, misalnya, punya padangan berbeda dalam menjalin hubungan dengan negara dan lembaga pembangunan internasional. MST memilih bekerjasama dengan lembaga negara untuk masalah pertanahan, tetapi tetap menjaga otonominya dan bersikap konfrontatif terhadap Bank Dunia—sejalan dengan sikap LVC secara umum. Sebaliknya, CNCR, yang beranggotakan beberapa organisasi yang mendapat dukungan pemerintah dan juga anggota koalisi ROPPA (lihat Bab 1) sekaligus LVC, lebih memilih strategi gabungan: negosiasi, konfrontasi sesekali, namun tetap mempertahankan hubungan kerjasama dengan Bank Dunia. Perbedaan strategi semacam ini tentu tidak lepas dari sejarah sosial dan politik basis kelas serta masyarakat yang berlainan dari masing-masing organisasi anggota LVC.

SIMPULAN

Gerakan agraria transnasional yang besar seperti LVC umumnya merupakan aliansi lintas kelas. Aliansi semacam ini menjadi rumit—atau justru makin kaya—karena keberagaman dan luasnya basis massa mereka. Namun, aliansi lintas kelas juga tidak hanya mencakup beragam kepentingan kelas, tetapi, lebih dari itu, sering kali menampung kepentingan dan perspektif kelas-kelas yang saling bertentangan. Kenyataan ini sering tersamarkan oleh satu identitas bersama, yakni sebagai “kaum pemilik negeri” atau bahkan “kaum pekerja agraris”. Misalnya, tuntutan untuk

meningkatkan harga jual hasil panen di tingkat petani bisa berdampak berlainan bagi beragam kelompok dalam gerakan ini—produsen pangan skala kecil (petani kecil) bisa diuntungkan, tetapi kelompok yang harus membeli pangan justru bisa jatuh lapar. Isu-isu kelas yang berpotensi memecah belah, seperti yang dibahas di atas, sering kali diperantarai oleh identitas sosial lain (etnis, generasi, dan gender). Karena itu, gerakan seperti LVC sebaiknya dipahami sebagai aliansi yang tidak hanya lintas kelas, tetapi juga lintas identitas.

Ideologi memainkan peran sangat penting dalam memahami isu kelas dan identitas yang bisa menyatukan dan membelah gerakan. Gerakan agraria transnasional besar memiliki beragam posisi, kecenderungan, dan pengaruh ideologis. Sama seperti masalah kelas, tantangan utama dari keberagaman ideologis ini bukan sekadar soal kemajemukan, tetapi juga fakta bahwa ideologi-ideologi tersebut saling bersaing. Dengan menyadari bahwa berbagai ideologi dalam gerakan ini tidak hanya berdampingan tetapi juga bertarung, kita bisa melihat lebih dalam bagaimana hubungan antarorganisasi dalam gerakan global ini terbentuk. Mereka bukan sekadar kelompok-kelompok yang bekerja secara paralel, tetapi juga saling bekerjasama sekaligus bersaing. Dari sudut pandang ini, kita dapat memahami GAT sebagai entitas ganda—“aktor tunggal” sekaligus “arena perjuangan”, dan juga bagaimana dua aspek ini saling membentuk dan memengaruhi karakter GAT itu sendiri (Borras 2004).

CATATAN

- 1 Pada 2010, COCOCH mengalami perpecahan internal yang hebat, Alegría disingkirkan dari organisasi, dan segera setelah itu COCOCH menjadi anggota LVC (meski sebagai akibatnya, dua organisasi anggota COCOCH, yakni Serikat Petani Nasional Honduras [ANACH] dan Sentral Pekerja Pedesaan Nasional [CNTC], menjadi anggota LVC). Lihat Honduras Laboral (2010) dan Junta Directiva Nacional Auténtica del COCOCH (2010).
- 2 Tentang reforma agraria yang kontroversial di Zimbabwe, lihat Scoones (2010).
- 3 Kaum adivasi dianggap sebagai masyarakat asli “tribal” (suku). Dalit adalah bagian dari kasta-kasta yang sebelumnya mendapat stigma “tak terjamah”.
- 4 Wawancara Marc Edelman dengan José Adán Rivera Castillo, Sekretaris Organisasi dan Keuangan ATC, di Managua, Nikaragua, 29 Juni 1994.
- 5 Dibentuk pada 1983, Yayasan Paulo Freire (PFS) awalnya dimaksudkan untuk memberi kursus tentang isu-isu internasional bagi para murid sekolah menengah pertanian di Belanda, lalu digunakan untuk menghubungkan organisasi tani di berbagai belahan dunia dengan sumber-sumber kerjasama keuangan di Eropa. Paulo Freire, pendidik pembaharu asal Brasil, baru mendapati keberadaan PFS pada 1988, tetapi dikabarkan senang organisasi ini menggunakan namanya. Pada 1997, PFS, bersama empat organisasi lain asal Belanda, mendirikan LSM baru bernama Agriterra. PFS kemudian berhenti; kantor dan perlengkapan mereka dialihkan ke Agriterra. Wawancara Marc Edelman dengan Kees Blokland di Arnhem, Belanda, 24 April 1998.
- 6 Mills (2013) menyodorkan masalah teoretis yang sama dan mengkaji kasus Kanada. Bunn (2011) dan Hyde (2014) menganalisis cara-cara yang digunakan kaum muda di Amerika Utara dan berbagai tempat lain yang berhasil memasuki dunia pertanian.
- 7 Hal ini bisa dikatakan juga dialami sejumlah gerakan di Meksiko, Honduras, dan Afrika Selatan sebagaimana dibahas di atas.

BAB 3

Perbedaan Kelas, Identitas, & Ideologi Antar-Gerakan Agraria Transnasional

Diferensiasi yang terjadi dalam GAT besar telah dibahas di Bab 2. Di bab ini, kami melangkah lebih jauh dengan menyelidik perbedaan yang terjadi *antar*-GAT besar, dengan menggunakan analisis politik kelas yang sebelumnya digunakan untuk memahami diferensiasi di dalam GAT.

Selama dua dasawarsa terakhir, LVC telah menjadi GAT radikal yang paling dikenal dalam gerakan keadilan sosial global. Namun, LVC bukanlah satu-satunya GAT yang penting. Beberapa GAT memang lebih dikenal ketimbang yang lain, dan ada pula yang lebih radikal secara politik dibanding yang lain. Hubungan antar-GAT sangat beragam dan dipengaruhi oleh basis kelas, identitas, serta ideologi yang mereka anut—faktor-faktor yang juga membentuk perbedaan internal dalam masing-masing GAT besar. Hubungan ini bersifat dinamis dan selalu mengalami negosiasi serta ketegangan yang terus berubah.

Sebagian besar kajian tentang GAT cenderung hanya berfokus pada LVC, sementara hanya sedikit kajian yang secara sistematis menelaah dinamika politik antar-GAT besar.¹ Padahal, mengkaji satu GAT secara terpisah dari yang lain, atau dari gerakan keadilan global lainnya, memiliki keterbatasan analitis, sebab GAT dan gerakan sosial lainnya saling memengaruhi. Karena itu, memahami hubungan antar-GAT menjadi penting, terutama dalam hal representasi, peran sebagai perantara (*intermediasi*), dan strategi mobilisasi. Di bab ini, LVC tetap menjadi titik acuan utama, tetapi kami juga membandingkannya dengan beberapa organisasi GAT kunci lainnya: Federasi Internasional Produsen Pertanian (IFAP), Organisasi Petani Dunia (WFO), Koalisi Internasional untuk Akses Tanah (ILC), IPC untuk Kedaulatan Pangan, dan Koalisi Petani Asia

(APC). Kami juga memperlebar pembahasan dengan memasukkan organisasi GAT lainnya. Dengan menelaah bagaimana kelas, identitas, dan ideologi beririsan dalam gerakan-gerakan ini, kita bisa lebih memahami perbedaan antara LVC dan GAT lainnya.

Semua GAT yang kami kaji di buku ini berkomitmen pada gagasan “keadilan sosial”, dengan caranya masing-masing. Namun, cara mereka menerjemahkan dan mewujudkan keadilan sosial berlainan antar-GAT. Dalam tulisannya tentang gerakan keadilan lingkungan, Anna Tsing (2005: 13–14) mengamati:

Kemampuan untuk berpikir secara global telah mengilhami berbagai jenis gerakan sosial untuk membayangkan pergerakan yang berskala global. Namun, politik global membawa tantangan tersendiri. Tujuan keadilan sosial harus dinegosiasikan tidak hanya lintas kelas, ras, gender, kebangsaan, budaya, dan agama, tetapi juga antara selatan global dan utara global, serta antara kota-kota besar dunia dengan daerah pedesaan dan provinsi yang mengelilinginya. Model solidaritas berbasis kelas yang berkembang pada abad XX mengasumsikan bahwa sekutu dalam koalisi akan berbaris sejajar dan bergerak ke arah yang sama. Namun, dalam kenyataannya, jarang sekali sekutu bisa berbaris serapi itu. Tanpa bermaksud memecah barisan sekalipun, mereka toh mendorong ke arah berbeda, menciptakan gesekan yang mengubah arah juang semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami faktor-faktor yang menyatukan dan membedakan GAT, serta dinamika hubungan antar-GAT, kita dapat memperoleh wawasan lebih jelas mengapa gerakan-gerakan ini membingkai isu dan tuntutan dengan cara tertentu, bagaimana mereka memilih strategi aksi bersama, serta dengan siapa mereka berinteraksi—baik dengan negara maupun aktor bukan-negara. Kami juga berharap analisis ini dapat memberi penawar racun terhadap tiga kecenderungan umum di kalangan praktisi pembangunan: (1) menganggap GAT sebagai entitas yang se-

ragam, sehingga keberadaan mereka di suatu ranah geografis, politik, atau kebijakan hanya dilihat “sebatas hadir atau absen”; (2) meremehkan perbedaan yang muncul dalam GAT, dengan menganggapnya sebagai sekadar persaingan memperebutkan dana atau persoalan ego dan kepemimpinan; dan (3) meromantisasi persatuan dalam koalisi, seolah-olah ketegangan dan perbedaan yang muncul selalu bersifat negatif.

DIFERENSIASI KELAS & POLITIK IDENTITAS

LVC, IFAP, dan WFO

LVC didirikan oleh berbagai gerakan agraria tingkat nasional dan regional sebagai bentuk perlawanan terhadap Federasi Internasional Produsen Pertanian (IFAP) yang kini sudah bubar. Pada akhir 1980-an, para aktivis gerakan agraria nasional merasa bahwa IFAP telah terlalu lama bercokol dalam tata kelola pertanian internasional. Namun, alih-alih mewakili kelas pekerja terpinggirkan dan kaum miskin di pedesaan, IFAP lebih banyak mewakili kelompok petani kaya, dengan kantor pusatnya di Paris, ibukota negara yang sangat maju. Seperti diuraikan di Bab 2, LVC lahir pada Mei 1993 di Mons, Belgia, dari pertentangan antara dua kelompok utama: organisasi agraria nasional yang menginginkan gerakan mandiri versus LSM PFS yang mensponsori pertemuan tersebut serta berharap memasukkan organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam pertemuan itu ke dalam IFAP.

Ketegangan antara IFAP dan gerakan-gerakan agraria non-IFAP mengemuka selama Putaran Uruguay GATT (1986–1994), terutama di Amerika Utara dan Eropa. Saat itu, organisasi agraria dominan seperti American Farm Bureau (Biro Pertanian Amerika), Federasi Pertanian Kanada (CFA), dan Komite Organisasi Pertanian Profesional Uni Eropa (COPA) punya pengaruh politik yang sangat kuat. Sebagai respons terhadap dominasi IFAP, berbagai organisasi yang memiliki pandangan alternatif di Amerika Utara dan Eropa memutuskan membentuk LVC. Beberapa pendiri utamanya adalah Koalisi Nasional Pertanian Keluarga

(NFFC) di Amerika Serikat, Serikat Petani Nasional (NFU) di Kanada, dan Koordinasi Petani Eropa (CPE). Bagi mereka, pembentukan LVC merupakan penjabaran perjuangan untuk menciptakan ruang gerakan yang independen dan berada di luar pengaruh IFAP. Melalui tilikan ringkas atas perbedaan antara LVC dan IFAP, kita bisa melihat betapa pentingnya politik kelas dan identitas dalam memahami dinamika GAT.

Dulu IFAP secara resmi mendau diri sebagai “organisasi petani dunia yang mewakili lebih dari 600 juta keluarga petani dalam 120 organisasi nasional di 79 negara.” Organisasi ini juga mengklaim telah memperjuangkan “kepentingan petani di tingkat internasional sejak 1946” (IFAP 2009). Basis utama IFAP mencakup organisasi petani kecil, menengah, dan besar di negara-negara selatan dan utara, tetapi lebih didominasi oleh kelompok dari negara-negara maju. Di negara berkembang, banyak anggota IFAP berasal dari organisasi petani menengah dan kaya, yang kebanyakan dipimpin oleh pengusaha kelas menengah yang berhaluan agrobisnis. Sejak didirikan pada 1946, IFAP menjadi organisasi utama di bidang pertanian yang mendapatkan tempat resmi di lembaga-lembaga antarpemerintah.

Meski IFAP bukan jaringan yang sepenuhnya homogen secara politik, arah politiknya sangat dipengaruhi oleh anggota yang secara ekonomi paling kuat. Dari 1946 hingga 2008, semua presiden dan sekretaris jenderal IFAP adalah laki-laki kulit putih dari negara industri. Baru pada 2008, setelah lebih dari enam puluh tahun berdiri, IFAP akhirnya memilih presidennya dari negara berkembang, Zambia. Politik kelas dan identitas yang dianut IFAP sangat memengaruhi posisi politiknya. Meski memiliki sikap yang agak ambivalen terhadap liberalisme pasar, kelompok-kelompok yang terhubung dengan IFAP umumnya mendukung partai politik yang berhaluan kanan-tengah (Edelman 2003). Dalam banyak kesempatan, IFAP melihat neoliberalisme sebagai peluang, dan secara khusus mendukung kebijakan neoliberal, meski kerap mendorong modifikasi kecil yang dianggap dapat menguntungkan sektor pertanian (Desmarais 2007).

Kecenderungan IFAP mengusung “solusi” berbasis pasar mungkin menjelaskan mengapa organisasi ini tidak pernah benar-benar mendorong atau menggerakkan isu-isu agraria yang paling mendesak bagi kelompok paling miskin di pedesaan, seperti upah dan redistribusi tanah. Jika kita membaca dengan cermat dokumen-dokumen utama IFAP, terlihat bahwa agenda utamanya lebih berfokus pada isu komoditas dan perdagangan. Ini sangat kontras dengan dokumen-dokumen kunci LVC, yang menitikberatkan perjuangan politik seputar kepemilikan dan akses atas tanah. Dalam hal strategi, IFAP lebih memilih jalur negosiasi, kerjasama, dan kemitraan resmi dengan lembaga-lembaga antarpemerintah seperti FAO dan Bank Dunia. Sementara itu, LVC juga menggunakan pendekatan negosiasi, kemitraan, dan kerjasama, tetapi dengan tetap mempertahankan strategi lain, seperti konfrontasi, demonstrasi massa, pembangkangan sipil, okupasi tanah ekstralégal, serta penghancuran ladang tanaman rekayasa genetika. Pandangan IFAP terkait peran dan posisinya dalam diskusi kebijakan pertanian global terangkum dengan jelas dalam pernyataan Jack Wilkinson, mantan presiden IFAP sekaligus pemimpin CFA: “IFAP telah mendapatkan posisi sebagai organisasi pertanian rujukan bagi lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, PBB, IMF, dan FAO ketika mereka membahas kebijakan pangan dan membutuhkan pandangan dari pihak petani” (*Western Producer* 2011).

Ketika harga komoditas pertanian meroket pada 2008, yang memicu gejolak pangan di puluhan negara, berbagai organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial meluncurkan kampanye menentang produksi bahan bakar nabati (BBN, *biofuel*), yang dianggap sebagai salah satu pemicu utama lonjakan harga pangan dan, pada akhirnya, meningkatkan angka kelaparan. Namun, sikap IFAP terhadap BBN pada puncak krisis pangan global 2008 justru menunjukkan perspektif berbeda. Dalam pernyataannya, IFAP menegaskan:

Produksi pangan dan pakan tetap menjadi prioritas utama bagi para petani IFAP; namun, bahan bakar nabati membuka peluang pasar

baru, membantu untuk memberagamkan risiko, serta mendorong pembangunan pedesaan. Saat ini, BBN adalah pilihan terbaik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, dan dengan demikian membantu mengatasi perubahan iklim. ... Baru-baru ini, BBN disalahkan sebagai penyebab melonjaknya harga pangan. Padahal, ada banyak faktor lain, termasuk kelangkaan pasokan akibat cuaca buruk dan perubahan pola makan yang mendorong tingginya permintaan. ... Kesalahpahaman seputar BBN perlu diluruskan, terutama bagi masyarakat tani yang selama ini menderita akibat rendahnya pendapatan. Bioenergi (energi hayati) merupakan peluang besar untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dan mengurangi kemiskinan, asalkan produksinya memenuhi kriteria keberlanjutan. Produksi BBN berkelanjutan oleh petani keluarga bukanlah ancaman bagi produksi pangan, melainkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan menghidupkan kembali masyarakat pedesaan. (Dikutip dalam FAO 2008: 97)

Sebaliknya, LVC menentang BBN, yang dianggapnya sebagai salah satu pemicu utama perampasan tanah global serta solusi palsu untuk perubahan iklim—pandangan yang kemudian diperkuat oleh laporan dari berbagai organisasi lingkungan arus utama (Searchinger dan Heimlich 2015). Meski IFAP dalam pernyataannya menyinggung “petani keluarga” dan pengentasan kemiskinan, posisi sebenarnya lebih mencerminkan kepentingan petani komersial kaya.

Yang mengejutkan banyak pihak, IFAP bubar pada 2010, padahal sebelumnya dianggap sebagai organisasi yang kuat, terkonsolidasi, dan berpengaruh. Penyebab kejatuhannya bukan faktor eksternal, melainkan masalah keuangan dan tata kelola internal. Akta resmi pembubaran IFAP yang dikeluarkan oleh Tribunal de Grande Instance de Paris (Pengadilan Tingkat Pertama Paris) mengungkapkan bahwa organisasi ini terlalu bergantung pada pendanaan program dari sumber tunggal,

yakni LSM Agriterra asal Belanda; IFAP dan Agriterra awalnya berenana menjalankan program bersama bertajuk “Farmers Programme Against Poverty 2007–2010” (Program Petani Memerangi Kemiskinan), tetapi proyek ini justru berujung pada kebangkrutan IFAP (Tribunal de Grande Instance de Paris 2010). Menurut Jack Wilkinson, IFAP “mulai mengalami krisis keuangan setelah [Agriterra] gagal memenuhi janji untuk mengganti biaya beberapa proyek pembangunan kepada IFAP” (*Western Producer* 2011). Dokumen pengadilan Paris mengungkapkan bahwa Agriterra menolak membayar dana yang dijanjikan untuk tahun 2008 serta seluruh komitmen tahun 2009, sehingga IFAP mengalami defisit sebesar €500.000 (Tribunal de Grande Instance de Paris 2010: 3). Sungguh ironis menyaksikan Agriterra berbuat demikian, mengingat organisasi pendahulunya, PFS, justru memainkan peran penting dalam pertemuan pendirian LVC pada 1993; saat itu, PFS berusaha mengarahkan gerakan-gerakan tani yang hadir dalam pertemuan untuk merapat ke IFAP (lihat Bab 2).²

Sengketa keuangan antara IFAP dan Agriterra bergulir bersamaan dengan konflik internal yang bernuansa rasial dan regional yang cukup kental. Pada 2008, Ajay Vashee dari Zambia terpilih sebagai sekretaris jenderal, menjadikannya orang non-kulit putih pertama yang pernah memimpin IFAP. Dalam dokumen pengadilan Prancis disebutkan bahwa

ada masalah dalam “tata kelola” organisasi, terutama akibat kepemimpinan presiden yang dianggap kontroversial oleh banyak anggota IFAP, serta konflik antara presiden dan sekretaris jenderal IFAP. Pergantian kepemimpinan, yang hanya bisa dilakukan melalui rapat umum, tidak memungkinkan karena biayanya terlalu mahal. (Tribunal de Grande Instance de Paris 2010: 3)

Wilkinson mengungkapkan pernyataan yang lebih blak-blakan:

Gaya kepemimpinan Vashee justru memperburuk keadaan. ... Organisasi-organisasi yang ingin membantu [IFAP] mencoba mengatur pertemuan, tetapi dia sering tidak hadir, dan ini bukanlah cara yang tepat untuk bekerjasama dengan mitra. ... Dia juga sering menganggap saran sebagai ancaman terhadap kewenangannya. (*Western Producer* 2011)

Setahun setelah pembubaran IFAP, muncul sebuah organisasi baru dengan keanggotaan dan ideologi yang mencerminkan IFAP. Didirikan di Stellenbosch, Afrika Selatan, Organisasi Petani Dunia (WFO) kerap dianggap sebagai penerus IFAP. Pernyataan misinya:

Mandat WFO adalah menghimpun organisasi petani dan koperasi pertanian dari seluruh dunia, mewakili komunitas petani global: mulai dari petani skala nano, kecil, menengah, hingga besar. ... Tujuannya memperkuat posisi petani dalam rantai nilai, dengan perhatian khusus pada petani kecil. Dengan melakukan advokasi atas nama petani dan mewakili kepentingan mereka di forum-forum kebijakan internasional, WFO mendukung petani dalam mengelola ketidakpastian harga yang ekstrem, memanfaatkan peluang pasar, dan memperoleh akses informasi pasar secara tepat waktu. (WFO 2014)

WFO berfokus pada enam bidang utama: ketahanan pangan, perubahan iklim, rantai nilai, perempuan dalam pertanian, perdagangan, dan pertanian kontrak. Keenam bidang ini sangat mirip dengan tema-tema kunci IFAP. Sebagai perbandingan, isu-isu utama yang diperjuangkan LVC meliputi reforma agraria dan akses air; keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika, kedaulatan pangan dan perdagangan, perempuan, hak asasi manusia (HAM), migrasi dan pekerja pedesaan, pertanian kecil berkelanjutan, serta pemuda.

Di berbagai negara, organisasi anggota WFO dan LVC memiliki basis massa yang sama sekali berbeda. Beberapa contoh berikut dapat mem-

perjelas perbedaannya: di Afrika Selatan, ada AFASA (Asosiasi Petani Afrika di Afrika Selatan) dan AgriSA (Rumah Petani Afrika Selatan) yang berlawanan dengan Gerakan Rakyat Tunakisma (LPM); di Belanda, terdapat Asosiasi Pertanian dan Hortikultura (LTO) yang berseberangan dengan Serikat Petani Tanaman Pangan (NAV); di Argentina, Masyarakat Pedesaan Argentina (SRA) bersaing dengan Gerakan Petani Santiago del Estero (MOCASE); sementara di Zimbabwe, Serikat Petani Komersial (CFU) bertolak belakang dengan Forum Petani Organik Zimbabwe (ZIMSOFF). Di tingkat regional, misalnya di Eropa, terdapat perbedaan serupa antara COPA—koalisi organisasi petani skala besar tingkat nasional—dan Koordinasi Via Campesina Eropa (ECVC). Semua ini adalah contoh klasik pertentangan antara kelompok petani kaya versus petani miskin.

Dengan demikian, terdapat dua jaringan global yang berbeda, masing-masing berakar pada kelas sosial yang berlainan pula—tetapi keduanya sama-sama mendaku mewakili petani skala kecil di seluruh dunia. Menariknya, ada satu frasa yang tampaknya mencerminkan visi tentang “kaum pemilik negeri” atau “masyarakat agraris” sebagaimana disodorkan oleh LVC dan sekutunya: “memajukan kesejahteraan semua orang yang menggantungkan hidup pada tanah serta menjamin mereka pendapatan yang layak dan stabil.” Namun, frasa ini sebenarnya merupakan pasal pertama dalam anggaran dasar IFAP. Dinamika politik yang membedakan LVC dari IFAP/WFO berpotensi membawa dampak besar terhadap kebijakan pembangunan global. Tanpa analisis kelas, sulit untuk memahami perbedaan antara LVC dan IFAP/WFO, apalagi menjelaskan mengapa dan bagaimana perbedaan itu menjadi penting. Istilah seperti “kaum pemilik negeri”, “masyarakat agraris”, “masyarakat lokal”, “suara petani”, dan “komunitas lokal” yang sering digunakan oleh LVC dan organisasi-organisasi anggotanya, tanpa disadari, justru dapat menyamarkan perbedaan penting berbasis kelas di antara berbagai gerakan. Oleh karenanya, istilah-istilah tersebut tidak selalu berguna sebagai alat analisis.

Gerakan dari Berbagai Gerakan: LVC dan IPC

LVC sering disebut sebagai “gerakan dari berbagai gerakan”. Dalam dunia agraria, gagasan ini merujuk pada pertemuan berbagai kekuatan dengan dinamika politik kelas dan identitas yang beragam. Kelas-kelas pekerja agraria memiliki keberagaman yang rumit, yang dipengaruhi oleh politik identitas berbasis etnis, gender, kewilayahan, dan generasi, sebagaimana dibahas di Bab 2.

Jika “gerakan dari berbagai gerakan” cocok untuk LVC, maka istilah ini juga lebih cocok bagi IPC, jaringan gerakan sosial internasional terbesar yang bekerja di bidang kebijakan pangan, politik pangan, dan isu kedaulatan pangan. Jaringan ini merupakan persekutuan lintas sektor yang mencakup kelompok pedesaan maupun perkotaan, serta kalangan petani maupun bukan—meski sektor pedesaan tetap lebih dominan. Didirikan pada 1996 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Ketahanan Pangan di Roma, Italia, IPC menyediakan ruang untuk membangun jaringan serta koordinasi politik di antara berbagai gerakan ini (lihat Tabel 3.1). Sejumlah LSM berperan penting dalam pendirian dan penguatan IPC: Crocevia, Kolektif Internasional untuk Penguatan Pekerja Perikanan (ICSF), dan Pusat Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup (CENESTA); ICSF dan CENESTA masing-masing membawa dua kelompok penting ke dalam IPC, yakni peternak dan nelayan tradisional. Dibandingkan organisasi anggotanya seperti LVC, IPC memiliki struktur organisasi lebih longgar. IPC mengorganisir kegiatannya melalui kelompok-kelompok tematik. Pada 2013, IPC memiliki kelompok kerja aktif yang berfokus pada isu-isu pertanian, keanekaragaman hayati pertanian, masyarakat nelayan, “investasi pertanian yang bertanggung jawab” (*responsible agricultural investment* [RAI]), agro-ekologi, masyarakat adat, dan komunitas pastoral.

TABEL 3.1
Anggota Gerakan Sosial IPC untuk Kedaulatan Pangan

GERAKAN INTERNASIONAL
La Vía Campesina (LVC)
Forum Rakyat Nelayan Dunia (WFFP)
Forum Pekerja Perikanan Dunia (WFF)
Aliansi Masyarakat Adat dan Penggembala Berpindah Sedunia (WAMIP)
Serikat Pekerja Internasional untuk Sektor Pangan, Pertanian, Hotel, Restoran, Katering, Tembakau, dan Sektor Terkait (IUF)
Dewan Perjanjian Internasional untuk Masyarakat Indian (IITC)
Koalisi Habitat Internasional (HIC)
Gerakan Perempuan Sedunia (WMW)
Federasi Gerakan Umat Katolik Pedesaan Internasional (FIMARC)
Gerakan Petani Muda Katolik Internasional (MIJARC)
GERAKAN REGIONAL
Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat (ROPPA)
Wahana Regional Organisasi Petani Afrika Tengah (PROPAC)
Koalisi Perempuan Pedesaan Asia (ARWC)
Koalisi Pekerja Pertanian Internasional (CAWI)
Jaringan Kedaulatan Pangan Arab (ANFS)
Gerakan Agroekologi Amerika Latin dan Karibia (MAELA)
Jaringan Perempuan Adat (ECMI)
Koordinator Organisasi Masyarakat Adat Andes (CAOI)
Konfederasi Produsen Berbasis Keluarga untuk Pasar Bersama Amerika Selatan (COPROFAM)
Aliansi Kedaulatan Pangan Australia (AFSA)
Aliansi Kedaulatan Pangan Amerika Serikat (USFSA)

IPC sebenarnya layak mendapat kajian khusus yang lebih mendalam, bahkan dalam sebuah buku tersendiri. Tujuan kami di sini bukan untuk membahasnya secara rinci, melainkan menjadikannya sebagai contoh kasus yang memberi wawasan penting dalam mempelajari GAT. Ada beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan.

Pertama, gerakan sosial transnasional yang berkaitan dengan politik pangan dan pertanian—bukan hanya bersifat agraris—memiliki keberagaman dalam hal asal-usul kelas, basis massa, dan orientasi ideologis. Basis massa IPC terutama adalah petani kecil dan menengah, pekerja pedesaan tunakisma, nelayan tradisional, serta penggembala. Yang menarik, hampir semua gerakan sosial pedesaan tingkat nasional yang radikal dan punya pengaruh politik penting di seluruh dunia terhubung dengan IPC, baik langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, sebagian besar organisasi petani menengah dan skala besar yang lebih sejahtera (termasuk yang dulu berafiliasi dengan IFAP dan kini dengan WFO) tidak punya keterkaitan dengan IPC. Solidaritas politik di antara kelas pekerja pedesaan yang lebih miskin menjadi perekat utama yang menyatukan gerakan-gerakan ini dalam satu jaringan global, sekaligus membedakannya dari jaringan sektor pedesaan yang lebih makmur, seperti IFAP dan WFO.

Kedua, kesamaan umum dalam hal identitas dan kepentingan antara produsen pangan dan konsumen mendorong berbagai gerakan sosial yang awalnya berlainan untuk membentuk IPC pada 1996. Organisasi-organisasi anggota IPC umumnya melihat globalisasi neoliberal sebagai ancaman bagi kepentingan basis massa mereka; mereka memandang sistem pangan global saat ini tidak memberi imbalan yang layak bagi para produsen pangan, sekaligus gagal memenuhi kebutuhan pangan warga dunia yang kelaparan. Konsensus dalam IPC ini, yang berakar pada kepentingan kelas dan ideologi, telah membentuk politik identitas IPC seputar platform alternatif bernama “kedaulatan pangan”.

IPC, bersama LVC dan berbagai gerakan lainnya, mulai mendorong konsep kedaulatan pangan pada KTT Pangan Dunia 1996, dengan ar-

gumen bahwa kedaulatan pangan adalah paradigma alternatif terhadap “ketahanan pangan” yang menjadi fokus FAO dan pemerintah negara-negara peserta. Seiring waktu, IPC berkembang dan makin kokoh melalui kerja-kerja advokasinya, terutama pada setidaknya tiga momentum politik penting berikut: (1) protes terhadap perundingan WTO sejak 1999; (2) menjelang Konferensi Internasional untuk Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) FAO pada 2006 (Monsalve 2013); (3) selama dan setelah lonjakan harga pangan global pada 2008–2009, serta dalam perundingan di Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) terkait Pedoman Sukarela untuk Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Kepemilikan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (Seufert 2013). Di setiap momen kunci ini, diperlukan sebuah koalisi besar yang secara keorganisasian mencakup berbagai kelompok, tetapi tetap memiliki keselarasan ideologis, agar advokasi berjalan mangkus serta mampu merumuskan dan memperjuangkan kebijakan alternatif. Dalam konteks ini, IPC berkembang menjadi aktor gerakan sosial internasional yang dinamis—mungkin tidak setenar LVC, tetapi kemungkinan besar sama pentingnya dalam hal strategi gerakan.

Ketiga, salah satu alasan utama IPC didirikan di Roma pada akhir 1996, dalam konteks KTT Pangan Dunia, adalah untuk menandingi dominasi IFAP. Sejak 1946, IFAP memonopoli keterwakilan petani keluarga dalam forum-forum resmi PBB. Seperti dibahas di Bab 2, salah satu pemicu lahirnya LVC adalah besarnya ketakpuasan banyak gerakan agraria nasional terhadap IFAP, yang mereka anggap lebih mewakili kepentingan petani kaya di negara-negara maju. Namun, sebelum KTT Pangan Dunia 1996, LVC belum cukup dikenal atau tidak cukup kuat untuk menandingi IFAP di arena global. Gerakan-gerakan sektor lain, seperti WFF, yang dibentuk setahun sebelum KTT Pangan Dunia, ikut berkontribusi dalam membangun platform lebih besar untuk menandingi IFAP. Lebih dari sekadar menandingi IFAP, IPC dan gerakan-gerakan anggotanya juga berhasil menggugat konvensi-

konvensi yang berlaku terkait keterwakilan akar rumput dalam ruang-ruang pengaturan internasional, termasuk monopoli LSM atas partisipasi semacam itu (dibahas di Bab 4). Dalam praktiknya, mereka berhasil menciptakan ruang otonom bagi gerakan sosial kelas pekerja agraria, memperluas pengaruh, dan menggalang kekuatan politik dari berbagai gerakan yang sebelumnya terpencar-pencar. IPC telah berhasil menandingi dan bersaing dengan IFAP—dan kemudian WFO—dalam ruang-ruang perwakilan resmi di badan serta lembaga-lembaga PBB. Namun, kehadiran dalam lembaga pengaturan internasional ini juga memaksa IPC untuk melakukan apa yang dulu dilakukan IFAP, yakni bernegosiasi dan melobi dalam apa yang disebut Gaventa dan Tandon (2010) sebagai “*invited space*”, ruang yang disediakan oleh lembaga resmi. Meski begitu, berbeda dengan IFAP, IPC dan gerakan-gerakan anggotanya menganggap arena utama perjuangan mereka justru berada di luar forum-forum resmi semacam itu.

Terakhir, GAT raksasa seperti IPC, meski mengusung haluan kelas serta ideologi yang cukup selaras, pada dasarnya merupakan arena interaksi antara anggota-anggota koalisi yang bisa menjadi rival ataupun rekan gerakan, di mana masing-masing pihak terus berupaya memengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam perkembangan cara LVC menangani isu pertanahan. Sejak didirikan pada 1993 hingga awal 2000, kampanye pertanahan LVC difokuskan secara sempit pada reforma pertanahan, dengan advokasi khusus menentang reforma agraria berbasis pasar yang didorong Bank Dunia. Namun, dalam penyelenggaraan ICARRD 2006, IPC—bukan LVC—yang mengambil alih kemudi dalam mewakili gerakan agraria di forum resmi PBB. Hal ini turut memperluas pemahaman seputar isu pertanahan, dengan penekanan khusus pada tanah sebagai “teritori” dan bukan sekadar sebagai lahan pertanian (Monsalve 2013). Konsep “teritori” ini penting karena mengandung makna hak kolektif dan penguasaan eksklusif. Perbedaan pendekatan antara “tanah” dan “teritori” ini berkaitan dengan dinamika politik kelas dan identitas yang beragam. Misalnya, petani kecil, kaum

tunakisma, masyarakat adat, dan penggembala memiliki cara pandang berbeda dalam mamaknai “tanah” dan “teritori”; dalam sejarahnya, masyarakat adat dan penggembala cenderung lebih skeptis terhadap reforma agraria. Dalam perkembangannya, LVC pun mulai mengadaptasi konsep “tanah dan teritori” dalam kampanye globalnya seputar reforma agraria (Martínez-Torres dan Rosset 2014).

IDEOLOGI

LVC, IFAP, dan WFO

Secara ideologis, WFO (dan sebelumnya IFAP) berkepentingan membuat sistem kapitalisme global bekerja dengan baik bagi petani komersial skala kecil, menengah, dan besar. Seperti pendahulunya (IFAP), WFO menjalin kemitraan dengan Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation [IFC]), Bank Dunia, dan WTO. Sebaliknya, bagi LVC, lembaga-lembaga internasional tersebut justru dianggap sebagai musuh utama petani skala kecil. Selain itu, seperti halnya IFAP, WFO juga bertujuan “memperkuat posisi petani dalam rantai nilai. ... [dengan] mendukung petani agar lebih mampu mengelola ketidakpastian harga yang ekstrem, memanfaatkan peluang pasar, dan mendapatkan akses informasi pasar secara tepat waktu” (WFO 2014).

Misi utama WFO adalah menghubungkan petani dengan pasar dan perdagangan global. Sebaliknya, LVC selalu menekankan kemandirian pertanian skala kecil dari cengkeraman korporasi; LVC juga secara tegas menentang pertanian yang dikendalikan perusahaan besar serta menolak kehadiran korporasi transnasional yang dianggap merusak lingkungan dan kehidupan komunitas (LVC 2011). Salah satu perbedaan mencolok antara kedua organisasi ini tampak dalam sikap masing-masing terhadap organisme hasil rekayasa genetika (GMO). LVC terkenal vokal menentang GMO, sedangkan sejumlah organisasi kunci yang dulu menjadi bagian IFAP dan kini tergabung dalam WFO justru mendukung penggunaan GMO. Sebagai contoh, Jarvis Zimba, pemimpin Serikat Petani Nasional

Zambia (ZNFU) sekaligus wakil presiden WFO, pada 2010 menyarankan agar pemerintah Zambia mencabut keputusan larangan terhadap GMO. Menurutnya, GMO bisa meningkatkan produktivitas pertanian skala kecil dan menjadi jalan keluar dari kemiskinan:

Di negara-negara lain yang telah menerapkan bioteknologi, terutama untuk kapas, petani kecil mampu meningkatkan produksi hingga sepuluh kali lipat dibandingkan tingkat produksi saat ini, dengan input yang lebih sedikit. Artinya, biaya produksi yang lebih rendah berdampak pada keuntungan yang lebih besar bagi petani kecil. (AgBioWorld 2010)

ZNFU adalah organisasi yang sebelumnya dikepalai oleh Ajay Vashee, presiden IFAP sebelum bubar pada 2010.

Perbedaan kelas dan ideologi antara LVC di satu sisi dengan IFAP dan WFO di sisi lain tampak lebih jelas jika dilihat dari perspektif nasional dan regional. Di Afrika Selatan, misalnya, anggota LVC adalah Gerakan Rakyat Tunakisma (LPM). Gerakan ini masih terhitung baru dan sejak awal telah mengalami berbagai kendala baik secara keorganisasian maupun politik (lihat Bab 4). Basis massanya yang sudah tipis, yakni kaum tunakisma di pedesaan maupun di pinggiran kota, makin menyusut (Baletti *et al.* 2008). LPM hampir tidak punya dukungan dari petani komersial yang secara ekonomi lebih stabil, baik skala kecil maupun besar. Anggota mayoritasnya adalah warga kulit hitam Afrika Selatan yang kehilangan tanah akibat politik apartheid.

Sebaliknya, anggota IFAP di Afrika Selatan adalah AgriSA, organisasi penerus Himpunan Pertanian Afrika Selatan (SAAU), yang dibentuk pada 1904 untuk mewadahi petani komersial kulit putih. Pada 1999, organisasi ini berganti nama menjadi AgriSA sebagai bagian dari upaya penghapusan diskriminasi ras dalam organisasi petani pascaapartheid. Mereka pun mulai merangkul petani komersial kulit hitam menjadi anggota. Pada masa perebutan tanah global pasca-2008, AgriSA justru

melihat peluang bisnis menguntungkan dalam transaksi tanah berskala besar di berbagai negara Afrika. Mereka beralasan bahwa “petani komersial Afrika Selatan ingin memperluas lahan ke wilayah Afrika lain akibat kelangkaan sumberdaya alam dan kebijakan redistribusi tanah di dalam negeri” (Hall 2012: 827). Hingga akhir 2010, AgriSA telah menjalin negosiasi dengan 22 pemerintah di Afrika untuk proyek akuisisi tanah skala besar yang ditujukan untuk produksi komersial pangan dan BBN. Di Republik Demokratik Kongo saja, AgriSA mendapatkan alokasi 200.000 hektare tanah, dengan opsi untuk memperluas hingga 10 juta hektare tanah negara. Singkatnya, AgriSA adalah bagian dari kelompok yang oleh media kerap disebut sebagai “perampas tanah” (*land grabbers*) (Hall 2012). Organisasi ini dulunya adalah anggota utama IFAP dan kini menjadi salah satu anggota terpenting WFO. AgriSA bahkan menjadi tuan rumah kongres pendirian WFO pada 2011. Baik AgriSA maupun WFO melihat transaksi tanah skala besar sebagai peluang investasi bagi petani komersial, sedangkan LVC menganggapnya sebagai perampasan tanah yang menggusur petani kecil dan rakyat pedesaan lainnya.

LVC dan ILC

Sejak lonjakan harga pangan global pada 2008–2009, muncul prakarsa baru dalam advokasi kebijakan pertanian, yakni International Land Coalition (ILC, Koalisi Internasional untuk Akses Tanah). Organisasi ini didirikan pada 1996 dengan nama awal Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty (Koalisi Kerakyatan untuk Memerangi Kelaparan dan Kemiskinan), sebelum berganti menjadi ILC pada 2003. ILC merupakan aliansi global yang beranggotakan lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia dan IFAD), lembaga antarpemerintah (seperti Komisi Eropa dan FAO), dan beberapa LSM (seperti World Wildlife Fund). IFAP sendiri pernah menjadi anggota ILC dan terlibat dalam dewan pengurusnya. ILC dikelola oleh profesional kelas menengah yang bernaung di sekretariat globalnya di Roma, yang pendanaannya berasal dari Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD).

Komposisi keanggotaannya membuat ILC menjadi lembaga yang relevan bagi banyak aktor dalam kebijakan pertanian global, tetapi juga menjadi masalah bagi sebagian pihak. Meski merupakan koalisi bauran, ILC dekat dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (yang justru menjadi sasaran utama kampanye “bongkar dan lawan” dari LVC). Seorang mantan direktur ILC pernah memuji proses “demokratis” di balik kebijakan pertanian baru Bank Dunia yang diluncurkan pada 2003 (World Bank 2003). Bank Dunia sendiri bangga dengan pengaruhnya pada ILC, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Evaluasi Independen Bank Dunia 2008, yang menyebutkan “bukti ... bahwa staf Bank Dunia memainkan peran penting dalam mendorong analisis jitu sebagai basis kebijakan [ILC] ... dan telah memberi banyak masukan berarti melalui Kelompok Tematik Pertanian serta kertas-kertas kerja Bank Dunia terkait isu pertanian” (World Bank–IEG 2008: xx). Namun, tidak semua anggota ILC mendukung kebijakan pertanian Bank Dunia; LVC, misalnya, menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritiknya.³

Sikap ILC sendiri berubah seiring makin pesatnya gelombang pengambilalihan tanah global pasca-2008. Seturut basis kelas dan ideologi koalisinya, ILC kini sesekali mengecam praktik perampasan tanah, tetapi hanya jika dilakukan secara tidak transparan atau menyebabkan pelanggaran HAM.⁴ Sikap ini tentu berbeda dengan seruan radikal LVC yang menuntut penghentian dan pembatalan perampasan tanah; tuntutan LVC ini lebih menekankan pada persoalan ekonomi-politik dan sosial dari praktik transaksi tanah tersebut, ketimbang sekadar soal prosedurnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ILC berhasil merekrut beberapa organisasi petani sebagai anggota, meski jumlahnya belum cukup untuk mengimbangi dominasi LSM, lembaga donor, serta lembaga keuangan internasional dan antarpemerintah. Yang menarik, sejauh ini hampir tidak ada tumpang tindih keanggotaan antara LVC dan ILC; penyebab utamanya adalah perbedaan kelembagaan dan ideologis: LVC meru-

pakan koalisi gerakan sosial akar-rumput radikal, sementara ILC adalah koalisi “progresif-konservatif” yang berisi lembaga-lembaga keuangan internasional dan LSM.

LVC dan IPC

Di Bab 2, kami membahas bagaimana organisasi anggota LVC memiliki banyak posisi ideologis yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Keberagaman ini makin kompleks kalau kita menengok hubungan LVC dengan IPC. Jaringan yang begitu luas seperti ini pastinya mempertemukan berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda-beda.

Meski terdapat ketegangan ideologis antara LVC dan IPC, secara umum kedua jaringan ini punya tingkat kesatuan ideologis yang cukup tinggi. Sikap mereka terhadap isu-isu besar seperti kapitalisme memang berlainan, tetapi ada komitmen bersama untuk mengedepankan “perjuangan melawan perampasan”—baik melalui gerakan yang terang-terangan antikapitalisme, kampanye menentang korporasi multinasional, maupun perjuangan melawan penyingkiran dari tanah serta penguasaan atas benih, teknologi, dan keanekaragaman hayati. Di dalam IPC dan LVC sendiri terdapat kecenderungan kuat—meski tidak merata—ke arah narasi antikapitalis. Secara keseluruhan, IPC adalah contoh luar biasa dari sebuah aliansi multikelas dengan cakupan anggota yang luas, yang mampu menjembatani berbagai perbedaan baik dari segi hubungan desa-kota, belahan bumi, maupun spektrum ideologis.

Ketegangan ideologis yang muncul antara IPC dan LVC sebagian besar berakar pada perbedaan latar belakang kelas. Selain itu, isu identitas juga makin memperumit hubungan antara keduanya. Wacana agraria populis yang radikal, konfrontatif, dan antikapitalis yang diusung LVC kerap bertentangan dengan pendekatan lebih liberal-progresif yang dianut gerakan petani Katolik seperti FIMARC (lihat Tabel 3.1). Selain itu, komitmen ideologis LVC pada “petani menengah” sebagai satu-satunya jalan menuju masa depan alternatif juga menjadi sumber

ketegangan. Salah satu pemain penting dalam IPC adalah serikat buruh Brasil CONTAG (Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian), anggota IUF (lihat Tabel 3.1). Awalnya, CONTAG menentang reforma agraria berbasis pasar di Brasil, tetapi kemudian mendukungnya.⁵ Isu inilah yang dari dulu menjadi sumber ketegangan dengan MST (anggota LVC), karena keduanya mengusung pendekatan berlainan dalam perjuangan di pedesaan Brasil. MST lebih memprioritaskan reforma pertanahan untuk membangun pertanian keluarga, sedangkan CONTAG lebih menekankan isu keadilan ketenagakerjaan. Di sisi lain, persinggungan LVC dengan kelompok penduduk asli/masyarakat adat juga memunculkan ketegangan. Beberapa organisasi masyarakat asli/adat—bahkan yang secara resmi menjadi anggota LVC—merasa bahwa LVC terasa “lebih sebagai ruang bagi gerakan petani dibanding sebagai ruang masyarakat asli/adat” (Rosset dan Martínez-Torres 2005: 16, catatan kaki 9). Ketegangan ini berakar pada kontradiksi mendasar antara penerapan reforma pertanahan dan upaya masyarakat asli/adat mempertahankan atau merebut kembali wilayah adat. Ketegangan di dalam LVC maupun dengan IPC ini kemungkinan akan tetap menjadi salah satu tantangan paling sulit bagi GAT, baik secara internal GAT tertentu maupun antar-GAT; sekalipun LVC dalam beberapa tahun belakangan telah menyesuaikan cara mereka merancang kampanye global seputar pertanahan (Rosset 2013).

LVC dan APC

Salah satu perbedaan ideologis paling tajam dan pelik yang melibatkan LVC—selain jurang pemisah antara LVC dan para rivalnya seperti IFAP dan WFO—adalah perbedaannya dengan APC. Ketegangan ini mencerminkan salah satu perdebatan klasik dalam kajian agraria, yakni perbedaan pandangan antara kaum Marxis ortodoks dan agraris populis radikal seputar diferensiasi petani dan perubahan agraria (lihat Bab 2 tentang pemahaman Leninis versus Chayanovian dalam melihat diferensiasi kelas di kalangan petani). Situasi ini makin rumit karena dinamika

LVC-APC melibatkan beberapa organisasi yang menjadi anggota kedua jaringan ini.

Secara resmi didirikan pada 2003, APC merupakan koalisi yang terdiri atas petani, buruh tunakisma, nelayan tradisional, pekerja pertanian, kaum dalit, masyarakat asli/adat, penggembala, peternak nomaden, perempuan tani, serta pemuda pedesaan dari sembilan negara (lihat Tabel 3.2). Platformnya secara tersurat antiimperialisme, dengan menekankan pembangunan gerakan dan perlawanan, reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan, perjuangan melawan korporasi, pertanian ekologis, perubahan iklim, serta solidaritas sesama rakyat (APC 2014). Fokus ini sangat kontras dengan agenda kunci IFAP dan WFO, tetapi secara garis besar sejalan dengan visi LVC dan IPC.

TABEL 3.2

Anggota APC dan Keanggotaan Masing-Masing di dalam LVC

ANGGOTA APC	KEANGGOTAAN DALAM LVC
KMP, Gerakan Petani Filipina	Ya
VNWF, Federasi Nasional Perempuan Vikalpani (Sri Lanka)	Tidak
PKMT, Gerakan Buruh dan Petani Pakistan	Tidak
APMU, Serikat Nelayan Andhra Pradesh (India)	Tidak
Tenaganita (Malaysia)	Tidak
PAN-AP, Jaringan Antipestisida Asia dan Pasifik (Malaysia)	Tidak
Roots for Equity (Pakistan)	Tidak
ALPF, Front Petani Lanka (Sri Lanka)	Tidak
APMW, Serikat Pekerja Migran Andhra Pradesh (India)	Tidak
APTFPU, Serikat Nelayan Tradisional Andhra Pradesh (India)	Tidak

ANGGOTA APC	KEANGGOTAAN DALAM LVC
TNDWM, Gerakan Perempuan Dalit Tamil Nadu (India)	Tidak
KGSSS, Persatuan Seluruh Pekerja Pedesaan Karnataka (India)	Tidak
UMA, Serikat Buruh Pertanian (Filipina)	Tidak
NFSW, Federasi Buruh Gula Nasional (Filipina)	Tidak
NFA, Dewan Nasional Petani (Sri Lanka)	Tidak
IFTOP, Federasi Petani Penggarap (India)	Tidak
BKF, Federasi Petani Bangladesh	Ya
BKS, Serikat Perempuan Tani Bangladesh	Ya
BBS, Perhimpunan Tunakisma Bangladesh	Tidak
BALU, Serikat Buruh Pertanian Bangladesh (Bangladesh)	Tidak
Amihan, Federasi Nasional Perempuan Tani (Filipina)	Tidak
BAFLF, Federasi Buruh Pertanian Bangladesh	Tidak
AGRA, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Indonesia)	Tidak
APM, Aliansi Gerakan Rakyat (India)	Tidak
ANWA, Asosiasi Perempuan se-Nepal	Tidak
Koalisi Petani Asia Selatan	Tidak
Pamalakaya, Gerakan Nasional Nelayan Filipina	Tidak
MONLAR, Gerakan Reforma Agraria (Sri Lanka)	Ya
FAD, Yayasan Pengembangan Pertanian (Mongolia)	Tidak
ANPF, Federasi Petani Seluruh Nepal	Ya
APVVU, Serikat Pekerja Pertanian Andhra Pradesh (India)	Tidak
TNWF, Forum Perempuan Tamil Nadu (India)	Tidak

Jika karakter kelas pekerja menjadi kriteria utama bagi suatu gerakan nasional atau subnasional untuk bergabung LVC, maka hampir semua organisasi anggota APC seharusnya menjadi bagian LVC, sebab mereka mewakili lapisan termiskin di kalangan petani dan proletariat pedesaan, serta hampir semuanya merupakan gerakan agraria militan yang absah (kecuali LSM PAN-AP, yang lebih berorientasi pada penelitian dan pelayanan). Selain itu, gerakan-gerakan ini memiliki sikap anti-imperialisme yang secara politis dekat dengan LVC. Namun, perbedaan ideologis antara kepemimpinan dominan di LVC dan sebagian besar anggota APC—yang condong ke Marxis ortodoks (dalam banyak kasus lebih Maois)—membuat sebagian besar organisasi dalam APC tidak bisa bergabung LVC (dengan pengecualian KMP, MONLAR, ANPE, BKS, dan BKF). Perbedaan ideologis yang begitu tajam ini tidak ditemukan di wilayah lain basis kerja LVC. Di Amerika Latin dan Karibia, hampir semua gerakan agraria militan tergabung dalam LVC, kecuali segelintir kasus di Meksiko, Kolombia, Brasil, dan Amerika Tengah.

TABEL 3.3
Anggota LVC dan Hubungannya dengan APC

ANGGOTA LVC	KEANGGOTAAN DALAM APC
ANPE, Federasi Petani Seluruh Nepal	Ya
NALA, Perhimpunan Buruh Pertanian Nepal	Tidak
NNFFA, Perhimpunan Nasional Pembudidaya Perikanan Nepal	Tidak
NNPWA, Perhimpunan Nasional Perempuan Tani Nepal	Tidak
BAS, Perhimpunan Masyarakat Adat Bangladesh	Tidak
BKS, Serikat Perempuan Tani Bangladesh	Ya
BKF, Federasi Petani Bangladesh	Ya

ANGGOTA LVC	KEANGGOTAAN DALAM APC
BKU, Serikat Petani India, Madhya Pradesh (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Haryana (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Maharashtra (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, New Delhi (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Punjab (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Rajasthan (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Uttaranchal (India)	Tidak
BKU, Serikat Petani India, Uttar Pradesh (India)	Tidak
KRRS, Serikat Petani Karnataka (India)	Tidak
KCFA, Perhimpunan Petani Kelapa Kerala (India)	Tidak
NRSAP, Serikat Petani Nandya, Andra Pradesh (India)	Tidak
TNFA, Perhimpunan Petani Tamil Nadu (India)	Tidak
AGMK, Keluarga Masyarakat Suku Kerala (India)	Tidak
MONLAR, Gerakan Reforma Agraria dan Per-tanahan Nasional (Sri Lanka)	Ya

Masalah tidak terhimpunnya beberapa gerakan agraria militan di Asia Selatan secara umum, dan di India secara khusus, dalam LVC makin diperburuk oleh dominasi organisasi-organisasi dalam LVC yang sebagian besar berbasiskan petani menengah dan kaya atau yang mengejawantahkan ideologi petani menengah dan kaya dengan haluan komersial (Pattenden 2005; Assadi 1994). Gerakan-gerakan semacam itu mencakup KRRS di Karnataka serta organisasi BKU yang tersebar di sekitar sepuluh negara bagian di India. Tuntutan utama mereka berkisar pada isu peningkatan harga jual hasil panen di tingkat petani. Bandingkan Tabel 3.2 dan 3.3 yang masing-masing merinci anggota APC dan LVC di Asia Selatan. Dilema terbesar bagi LVC di Asia Selatan ialah bagaimana

menjaga posisi ideologisnya secara global sekaligus inklusivitasnya sebagai “payung besar”, yang akan bermasalah jika kelompok-kelompok yang terhubung dengan APC—beberapa dikenal dengan politik sektarian—diperbolehkan bergabung LVC. Sulit membayangkan bagaimana “Jalan Petani” (LVC) bisa tetap membela petani menengah dan petani kecil jika dipimpin oleh kelompok berideologi Marxis ortodoks yang utamanya memperjuangkan kepentingan proletariat pedesaan.

LVC dan Gerakan (Kedaulatan) Pangan

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai jenis gerakan pangan bermunculan, melintasi batas kelas, wilayah pedesaan-perkotaan, hubungan produsen-konsumen, serta pembagian global Utara-Selatan. Beberapa berskala sangat kecil dan berbasis lokal, sementara yang lain lebih besar dan memiliki jaringan luas—dari Nyéléni hingga New York, sebagaimana diuraikan Schiavoni (2009). Gerakan-gerakan ini umumnya mengusung kritik senada terhadap sistem pangan dominan, terutama terkait akses, kesesuaian budaya, keberlanjutan, serta kesehatan manusia dan hewan. Namun, cara pandang mereka sangat beragam: ada yang menyerukan pembongkaran total sistem pangan berbasis pertanian industri, sementara yang lain mengusulkan reformasi pada berbagai taraf. Beberapa sistem pangan lokal lebih dekat dengan gagasan kedaulatan pangan, sementara yang lain masih berada dalam kerangka model industri (Robbins 2015). Sebagian gerakan ini mengidentifikasi diri dengan kerangka kedaulatan pangan, sementara sebagian lainnya tidak. Holt-Giménez dan Shattuck (2011) memberikan tinjauan sangat baik tentang dinamika gerakan pangan yang sangat beragam ini.

Bangkitnya gerakan pangan yang luas dan lintas kelas ini membawa setidaknya dua dampak politik bagi LVC. Di satu sisi, hal ini memperluas perjuangan politik seputar pangan, memperlebar jangkauan politik kampanye LVC untuk kedaulatan pangan, serta memperkuat spektrum politik progresif hingga radikal dalam mengusung keadilan pangan atau alternatif kedaulatan pangan di tingkat global. Luasnya basis kelas dan

penyebaran geografis gerakan pangan telah melahirkan banyak sekali aliansi gerakan pangan yang berlapis-lapis (Brent *et al.* 2015; Shattuck, Schiavoni, dan VanGelder 2015; Alonso-Fradejas *et al.* 2015). Di sisi lain, berkembangnya gerakan pangan menempatkan LVC hanya sebagai salah satu dari banyak pelaku dalam upaya menandingi sistem pangan dominan dan membangun alternatifnya. Gerakan pangan ini mempertanyakan “waralaba politik” LVC atas kedaulatan pangan serta klaimnya sebagai satu-satunya arsitek yang paling cakap dalam membangun sistem pangan alternatif. Kini, kedaulatan pangan hanyalah salah satu dari berbagai pendekatan, sejajar dengan konsep hak atas pangan, keadilan pangan, dan paradigma terkait lainnya. Bahkan, definisi kedaulatan pangan versi LVC (Patel 2009) kini hanya salah satu dari berbagai tafsir tentang makna dan praktik kedaulatan pangan. Bangkitnya gerakan pangan yang berbasis luas, beragam secara ideologis, dan multikelas telah menggeser wacana seputar sistem pangan alternatif dari konsep ideal LVC yang “berpusat pada petani menengah” (Edelman *et al.* 2014).

SIMPULAN

Kelas, identitas, dan ideologi membentuk aliansi yang menyatukan gerakan agraria transnasional sekaligus menciptakan celah yang memisahkan mereka. Gerakan-gerakan ini kadang mengusung wacana, ideologi, dan program yang tumpang tindih, tetapi tetap saling memperebutkan anggota dan pengaruh. Karena itu, GAT sebaiknya dipahami dalam perspektif *relasional*, bukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri atau terpisah dari komunitas gerakan sosial yang lebih luas. Lebih buruk lagi kalau para akademika dan aktivis menganggap GAT sebagai komunitas yang segaram tanpa perbedaan. Penyederhanaan semacam ini cenderung naif dan justru meremehkan ketegangan serta perpecahan di antara gerakan, dengan menganggapnya sekadar sebagai persoalan keorganisasian, perebutan pengaruh, atau konflik pribadi. Analisis semacam ini cenderung melihat perpecahan dalam gerakan agraria sebagai sesuatu

yang melulu negatif. Padahal, sebagaimana telah dibahas di bab ini, hal tersebut tidak selalu demikian.

Seperti dikemukakan Anna Tsing dalam kutipan di awal bab ini, dinamika politik dalam gerakan sosial transnasional memang cenderung berubah-ubah—koalisi bisa muncul dan menghilang, bangkit dan runtuh, serta mengalami pasang surut, terutama di zaman koalisi luas yang bersifat nonpartai dan nonhierarkis, seperti Forum Sosial Dunia (WSF) (Santos 2006). Karena itu, ketegangan dan perpecahan antara GAT dan organisasi gerakan sosial lainnya tidak selalu berdampak negatif. Justru, dalam beberapa kasus, perbedaan itu dapat membantu mempertajam posisi terhadap isu-isu kritis serta memperjelas tujuan dan strategi perjuangan. Dinamika ini dapat kita lihat, misalnya, dalam ketegangan antara LVC dan Koalisi Petani Asia (APC) maupun antara LVC dan Koalisi Internasional untuk Akses Tanah (ILC); bahkan, LVC sendiri lahir dari konflik serupa pada 1993 antara gerakan agraria dan PFS di Belanda (lihat Bab 2). Salah satu contoh nyata dinamika semacam ini adalah keputusan LVC untuk keluar dari koalisi global *Our World Is Not For Sale* (OWINFS, Dunia Kita Tidak Dijual). Koalisi ini berfokus pada isu-isu keadilan sosial terkait investasi dan perdagangan; keputusan LVC untuk menarik diri itu dilakukan secara terang-terangan menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO pada 2013 di Bali, yang kemudian menimbulkan perdebatan luas di kalangan aktivis keadilan sosial seantero dunia. Dalam pernyataan resminya, LVC menjelaskan alasan di balik keputusan itu:

Pernyataan “Putar Haluan WTO 2013: Pangan, Pekerjaan, dan Pembangunan Berkelanjutan yang Utama ...” tidak lagi mencerminkan prioritas gerakan sosial, khususnya *La Vía Campesina*. Pernyataan itu memang menggunakan bahasa yang patut dikagumi dalam menentang globalisasi yang dikendalikan korporasi, tetapi kemudian justru mengajukan berbagai tuntutan kepada WTO, yang terdengar

lebih seperti mitra negosiasi ketimbang gerakan masyarakat sipil kritis yang seharusnya berupaya keras mendesak tuntutan. Tuntutan kami lebih besar daripada sekadar mendapatkan ruang kebijakan dan perlakuan khusus di dalam WTO. Pernyataan tuntutan tersebut tidak hanya terlalu dangkal, tetapi juga memberi legitimasi bagi WTO. ... Kami bukan negosiator, dan kami tidak boleh dibatasi oleh apa yang dapat dan tidak dapat kami menuntut melalui perundingan itu. Kami adalah gerakan sosial, kami bekerja untuk mengubah dunia, dan perubahan itu tidak akan pernah tercapai jika kita tidak terus meningkatkan tekanan terhadap pemerintah serta menuntut perubahan lebih besar. Kita tidak boleh takut membayangkan dunia yang jauh lebih baik—dunia tanpa WTO, dunia yang berlandaskan Keadilan Ekonomi, yang menempatkan Kedaulatan Pangan di jantung perjuangannya, serta dunia yang menjalin hubungan dengan Ibu Pertiwi secara lebih hormat dan berkelanjutan. ... Hari ini, seruan kami adalah Tamatnya WTO. Kami menginginkan perubahan sistemik yang lebih mendalam, bukan sekadar reformasi atau putar haluan WTO. ... Sekarang waktunya bagi alternatif rakyat. (Vía Campesina, Desember 2013c)

Pernyataan LVC ini dengan lugas meneguhkan sikap politiknya yang radikal, identitasnya sebagai gerakan sosial, serta visinya yang utopis. Gagasan senada—bahwa “kita tidak boleh takut membayangkan dunia yang lebih baik”—juga mendasari penolakan LVC untuk bergabung ke dalam ILC, bekerjasama dengan Bank Dunia dalam isu pertanian, maupun untuk menjalin hubungan lain yang dapat melemahkan prinsip-prinsip pokoknya.

CATATAN

- 1 Pengecualian untuk Desmarais (2003), Edelman (2003), serta Borras dan Franco (2009).
- 2 Jauh lebih ironis lagi ketika pada 2009, pemimpin IFAP, Vashee, masih mewakili IFAP sebagai organisasi yang utuh dalam berbagai forum internasional, seperti KTT Iklim Kopenhagen (Vashee 2010) dan Forum Ekonomi Dunia di Davos (CNA 2009); padahal, dalam teks di sampul belakang buku autobiografinya, Vashee menyebutkan bahwa masa kepemimpinannya di IFAP berakhir pada 2008 (International Conference 2010). Pada 2003, Vashee turut mendirikan Konfederasi Serikat Petani Afrika Selatan (SACAU), jaringan regional yang mewadahi petani komersial besar, yang pada 2013 memiliki 17 organisasi anggota di 12 negara (International Conference 2010; SACAU 2013). Setelah IFAP bubar, Vashee kemudian menjabat sebagai presiden SACAU (International Conference 2010).
- 3 Namun, sebagaimana ditunjukkan Edelman (2003: 207), LVC sempat menjalin dialog singkat dengan Bank Dunia ketika koordinator umumnya, Rafael Alegría, berbicara di dalam sebuah forum Bank Dunia bertajuk “Strengthening Producer Organizations” (Memperkuat Organisasi Produsen), yang juga dihadiri perwakilan IFAP. Momen bersejarah ini telah dilupakan, jika bukan direka ulang, dan dokumen terkait (Vía Campesina 1999) tidak tersedia lagi di situs web LVC.
- 4 Untuk pembahasan lebih rinci tentang posisi ILC, lihat Borras, Franco, dan Wang (2013).
- 5 Untuk analisis CONTAG dan posisinya dalam gerakan agraria di Brasil, lihat Welch dan Sauer (2015).

BAB 4

Menghubungkan Ranah Internasional, Nasional, & Lokal dalam Gerakan Agraria Transnasional

Mewujudkan mimpi tentang solidaritas dan aksi transnasional di antara kaum tani dan pelaku usaha tani masih terus menjadi tantangan. Para pemimpin dan anggota gerakan-gerakan petani harus menyeimbangkan antara produksi pertanian mereka dan tuntutan aktivisme di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dan juga harus memutuskan ke mana mencurahkan waktu, energi, serta sumberdaya manusia dan materiel yang terbatas. Mereka juga perlu membangun aliansi dengan kelompok-kelompok di luar petani dalam berbagai kampanye politik, merawat perhatian media massa, dan menggalang dana dari lembaga-lembaga donor serta yayasan-yayasan (soal ini dibahas di Bab 5). Di sisi lain, mereka perlu menganalisis bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan, baik nasional maupun transnasional, bekerja, agar bisa menentukan titik-titik strategis untuk masuk dan terlibat. Mereka terdang menampilkan aksi-aksi langsung yang berani, selain harus membela para pendukung yang ditangkap, di pengadilan.

Masalah kepemimpinan juga memicu perdebatan sengit. Misalnya, bagaimana perempuan bisa memperkuat posisi di dalam organisasi yang secara tradisional sangat patriarkis, dan bagaimana hal ini memengaruhi politik serta dinamika internal gerakan agraria transnasional? Bagaimana organisasi-organisasi nasional yang tergabung dalam GAT—dan GAT itu sendiri—memastikan regenerasi kepemimpinan, menggantikan tokoh-tokoh gerakan yang secara historis umumnya laki-laki dengan aktivis-aktivis muda yang lebih beragam, serta bagaimana mereka akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk

kesinambungan program politik GAT dalam jangka panjang? Apa yang terjadi ketika para pemimpin gerakan mulai kehilangan koneksi atau persentuhan dengan basis rakyat pendukung mereka?

Keanggotaan dalam GAT juga kadang kontroversial. Kriteria seperti apa yang digunakan GAT untuk menerima organisasi lokal dan nasional sebagai anggota? Bagaimana komitmen beberapa GAT pada keberagaman bisa sejalan dengan kebutuhan akan prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama? Momen ketika organisasi lokal dan nasional bergabung ke dalam GAT juga turut membentuk arah gerakan di masa depan. Seperti apa ciri-ciri organisasi internal GAT yang bisa mendorong munculnya organisasi-organisasi “penjaga gerbang” (*gatekeeper*) dan bagaimana masalah-masalah yang timbul dari sini diatasi? Organisasi-organisasi yang bergabung dalam GAT berasal dari negara maju maupun berkembang, dan mengusung beragam kepentingan dan pandangan, dari buruh tunakisma hingga petani yang nisbi sejahtera. Apakah istilah umum seperti “kaum tani” atau “kaum pemilik negeri” cukup mampu menampung dan menyatukan kelompok-kelompok yang kadang saling bertentangan ini?

Para sarjana yang mengkaji aski kolektif sejak lama mencatat bahwa gerakan-gerakan sosial mengalami pasang surut, kadang mengikuti “siklus protes” yang lebih besar (Tarrow 1994). Bagaimana perubahan-perubahan ini memengaruhi GAT dan gerakan-gerakan yang tergabung di dalamnya? Sejauh mana siklus donor, selain siklus protes, menjadi peluang politik atau justru sumber kerentanan yang memengaruhi kebangkitan dan keruntuhan GAT? Dan ketika gerakan sosial menyuarakan tuntutan ke lembaga-lembaga berpengaruh, mereka pun bergumul dengan kerumitan politik representasi yang di sini dipahami dalam dua pengertian yang saling berkaitan: sebagai klaim *keterwakilan*, bahwa gerakan benar-benar mewakili basis sosial atau konstituen tertentu, dan juga sebagai praktik *mewakili gerakan itu sendiri* serta para pemimpinnya sebagai sosok yang memiliki ciri khas tertentu, terutama autentisi-

tas dan legitimasi (sehingga layak dipercaya untuk berbicara atas nama kelompok yang mereka wakili). Bahkan para pengamat yang simpatik berpendapat bahwa ketika gerakan mendaku mewakili—baik dalam pengertian pertama maupun kedua—gerakan itu sebenarnya tengah terlibat dalam praktik-praktik eksklusif sosial, karena tidak semua kepentingan atau konstituen dalam gerakan terwakili secara utuh, atau bahkan tidak terwakili sama sekali (Burnett dan Murphy 2014; Wolford 2010). Bab ini mengulas berbagai ketegangan dan tantangan semacam itu sebagaimana dialami oleh LVC dan organisasi-organisasi anggotanya, juga oleh GAT lain serta gerakan-gerakan di luar LVC.

MENYEIMBANGKAN BERBAGAI TUNTUTAN

“Ketika orang membayangkan markas besar sebuah gerakan internasional, biasanya yang terlintas ialah kota seperti Brussels, Paris, Jenewa, atau Washington, tapi pada prinsipnya kami menginginkan markas gerakan ini berada di negara Dunia Ketiga, bukan di negara maju.” Begitulah kata Rafael Alegría pada 2001, dari sebuah kantor mungil di Tegucigalpa, Honduras, yang menjadi sekretariat internasional LVC saat itu.¹ Seluruh operasional LVC kala itu hanya mengandalkan dua komputer, seorang staf kantor penuh-waktu, seorang sekretaris paruh-waktu yang menguasai dua bahasa, dan seorang manajer komunikasi multibahasa yang berbasis di Eropa, yang mengurus surat-menyurat elektronik dan hubungan dengan media. Kala itu Alegría sedang bersiap meninggalkan Kota Meksiko, di mana dua kegiatan akan berlangsung, yakni kongres Koordinator Organisasi Pedesaan Amerika Latin (CLOC) dan sebuah pertemuan persiapan untuk Forum Sosial Dunia (WSF) di Porto Alegre, Brasil. Saat menjabarkan visinya tentang LVC, Alegría menyesalkan bahwa, sebelum pergi, dia hampir tak punya waktu untuk mengunjungi koperasinya di desa dan memanen kubisnya yang jika dibiarkan akan membusuk. Begitu percakapan berakhir, seorang pemuda dengan wajah serius tergopoh mendatanginya, memohon Alegría agar

segera mengunjungi sebuah komunitas di desa lain yang berjarak dua jam perjalanan, untuk memberikan bantuan hukum kepada para petani yang terjerat kasus pelik sengketa tanah.

Kebingungan Alegría—bagaimana bisa sekaligus memanen kubis di rumah, memberi saran hukum di tempat lain di Honduras, dan mewakili LVC di luar negeri—menunjukkan betapa sulitnya menjembatani ranah aktivisme lokal, nasional, dan internasional, baik bagi sang individu aktivis maupun bagi gerakan. Mengutamakan tuntutan dari ranah aktivisme di berbagai tingkatan ini bisa berarti harus mengesampingkan kampanye penting yang sedang berlangsung di level lain. Globalisasi neoliberal, misalnya, kerap mendorong desentralisasi fungsi-fungsi negara di tingkat pusat, yang memaksa gerakan untuk beroperasi secara serentak di tingkat lokal dan internasional. Tuntutan yang saling bersaing ini memunculkan sejumlah persoalan: tentang profesionalisasi para pemimpin gerakan, bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan, dan bagaimana peran-peran tertentu di dalam organisasi dibagi. Di saat yang sama, para pemimpin gerakan yang menjadi terlalu profesional, sampai meninggalkan kerja pertaniannya, berisiko kehilangan legitimasi dari basis rakyat pendukung serta kehilangan autentisitas sebagai “petani” yang menjadi dasar moral dan politik mereka untuk bertindak sebagai perwakilan atau juru bicara gerakan tani.

MENYEBARKAN KHAZANAH PROTES & PRAKTIK GERAKAN

Di Pendahuluan, kami menyebutkan bahwa bagi organisasi-organisasi petani lokal dan nasional, aliansi transnasional kerap membuka akses atas sumberdaya pengetahuan maupun materiel, sekaligus membantu mereka mengenali peluang untuk melancarkan aksi politik yang efektif. Para anggota dan sekutu GAT sering bertukar cara-cara protes, informasi, dan pandangan tentang strategi. Mereka merancang kampanye bersama, berkolaborasi dalam penggalangan dana, dan saling bertukar informa-

si tentang bagaimana mengenali titik masuk dan calon pendukung dari lembaga-lembaga yang ingin mereka pengaruhi (lihat Bab 6).

Khazanah aksi protes berakar mendalam pada sejarah lokal dan nasional tertentu (Tilly 2002). Apakah para pemrotes memblokir jalan atau mengajukan petisi ke pemerintah, menyanyikan lagu atau berpawai dalam diam, membakar bus, atau melakukan aksi pembangkangan sipil nirkekerasan—semua ini adalah alat-alat dalam gerakan yang bervariasi antartempat, berubah dari waktu ke waktu, dan sering kali melibatkan proses saling meniru maupun inovasi. GAT—tempat berhimpunnya gerakan-gerakan dari berbagai belahan dunia—menjadi ladang subur bagi penyebaran dan penciptaan khazanah protes semacam ini. Rombongan demonstran yang berjalan atau berpawai dari satu tempat ke tempat lain, menyelenggarakan pertemuan, dan menghadapi politisi sudah menjadi ciri khas gerakan protes di India dan Amerika Selatan selama bertahun-tahun. Pada 1999, serombongan 400 petani India mengadakan perjalanan ke Eropa, memprotes korporasi transnasional dan perdagangan bebas serta mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan gerakan di Eropa (Pattenden 2005). Segera setelah petani India meninggalkan Eropa, José Bové dan Konfederasi Petani Prancis (*Confédération Paysanne*) membongkar kedai McDonald yang belum selesai dibangun—sebuah aksi yang mengingatkan pada pengepungan gerai Kentucky Fried Chicken di Bangalore oleh petani India tiga tahun sebelumnya (Edelman 2003).

“Penyebaran” khazanah protes lintas batas negara yang lainnya bisa kita jumpai di negara-negara yang sangat berbeda, seperti India, Brasil, Selandia Baru, Prancis, Jerman, Inggris, Swiss, Amerika Serikat, dan Filipina, di mana para aktivis—kadang bertautan dengan GAT—mencabut atau membakar tanaman rekayasa genetika (Baskaran dan Boden 2006; Kuntz 2012). Ketika pemerintah di berbagai penjuru dunia mulai mewajibkan petani menanam benih bersertifikasi dan mengkriminialisasi penggunaan benih nonkomersial, para petani meresponsnya dengan

memperkuat pertukaran benih antarpetani, baik secara lokal maupun transnasional (Badstue *et al.* 2007; Da Vià 2012; Vía Campesina 2013a). Ketika kepentingan perusahaan berusaha—meski akhirnya gagal—mematenkan zat aktif dalam pohon mimba (*Azadirachta indica*), yang telah digunakan oleh petani India selama berabad-abad sebagai pemberisih dan pestisida alami, gerakan tani di Asia Selatan mengirimkan benih mimba kepada kawan-kawan mereka di Amerika Tengah dan Karibia, antara lain untuk mempersulit klaim hak paten oleh pihak swasta.

Praktik-praktik simbolis dan perayaan juga menyebar luas. LVC, misalnya, mengadopsi praktik *místicas*—pertunjukan seremonial yang membuka dan menutup kegiatan, biasanya dengan musik dan teater bermuatan politik—dari MST dan gerakan sosial Brasil lainnya. Bandana hijau dan topi bisbol yang menjadi simbol LVC juga merupakan adaptasi dari syal dan topi merah khas MST. Pada konferensi internasional kedua LVC—yang berlangsung di Tlaxcala, Meksiko, pada 1996—tersiar kabar bahwa polisi militer Brasil telah membantai sembilan belas petani di Eldorado dos Carajás; insiden ini terjadi ketika para pendukung MST memblokir jalan raya untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan sengketa tanah (Vía Campesina 1996; Fernandes 2000). Para wartawan televisi yang terjebak dalam kemacetan akibat blokir itu merekam langsung pembunuhan tersebut, yang kemudian memicu kemarahan publik (Cadji 2000). Sejak saat itu, organisasi-organisasi anggota LVC di berbagai belahan dunia memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional setiap 17 April, dengan menggelar aksi demonstrasi dan berbagai bentuk protes lainnya.

Saban tahun, gerakan-gerakan di berbagai penjuru dunia juga memperingati sosok Lee Kyung-hae, seorang petani Korea yang—sambil memegang spanduk bertuliskan “WTO Membunuh Petani”—menusuk dirinya sendiri hingga tewas dalam aksi protes di luar pertemuan tingkat kementerian kelima WTO di Cancún pada 2003. Meski Lee adalah mantan presiden Federasi Petani Maju Korea yang secara politis berhaluan tengah dan tidak pernah menjadi anggota LVC, gerakan

transnasional ini tetap menganggap Lee sebagai martir karena aksi bunuh dirinya yang dramatis. Sejak itu, setiap 10 September diperingati sebagai “hari internasional perjuangan melawan WTO”. Para aktivis Korea dikenal sangat kreatif menciptakan bentuk-bentuk protes baru. Saat pertemuan tingkat menteri WTO pada 2005 di Hong Kong, ratusan pemrotes dari Serikat Petani Korea, yang berafiliasi dengan LVC, tiba-tiba mengenakan rompi pelampung oranye dan mencebur ke laut di pelabuhan untuk menerobos barisan polisi dan berenang menuju lokasi pertemuan. Hampir semuanya ditarik dari air dan langsung dipenjarakan, sehingga memicu kampanye internasional menuntut pembebasan mereka.

MENYEBARKAN & MEMBANGUN PENGETAHUAN PERTANIAN

GAT dan organisasi-organisasi yang tergabung di dalamnya tidak hanya makin aktif menyebarluaskan khazanah protes dan praktik-praktik simbolis lintas batas negara, tapi juga kian terlibat dalam pertukaran dan penembangan pengetahuan pertanian. Di Amerika Latin, gerakan Campesino a Campesino telah memelopori proses penyuluhan agroekologi antarpetani di Amerika Tengah sejak 1960-an dan 1970-an, yang kemudian menyebar ke Meksiko, Kuba, seluruh Amerika Latin, bahkan hingga ke belahan dunia lain (Altieri dan Toledo 2011; Boyer 2010; Bunch 1982; Holt-Giménez 2006; Martínez-Torres dan Rosset 2014). Banyak organisasi nasional telah lama terlibat dalam program-program pelatihan di berbagai bidang seperti agronomi, manajemen koperasi, standar kesehatan tanaman (fitosanitari), kesehatan masyarakat, hukum agraria, dan berbagai topik lainnya.

Model “universitas petani” juga makin berkembang. Pada 2005, gerakan MST di Brasil membuka Sekolah Florestan Fernandes, pusat pelatihan utama di berbagai bidang. Pada tahun yang sama, bersama LVC dan negara bagian Paraná, MST juga meresmikan Sekolah Agroekologi Amerika Latin (ELAA) (Capitani 2013). LVC dan pemerintah Ve-

nezuela mendirikan cabang sekolah tersebut di Barinas, yang dinamai Institut Universitas Agroekologi Amerika Latin “Paulo Freire” (IALA), meski setelah 2013, sekolah ini terjebak konflik internal: mahasiswa menuduh para pengelolanya “korupsi”, sedangkan pihak pengelola menuuduh balik mahasiswa sebagai “perusak” (IALAnoticias 2014). Universitas petani lainnya, sebagian besar didirikan oleh organisasi-organisasi nasional anggota GAT dan menerapkan model pendidikan yang sangat beragam, juga bergulir di antaranya di Argentina (Vía Campesina 2013b), Meksiko (García Jiménez 2011), dan Afrika Barat (GFF 2014).

DINAMIKA KEPEMIMPINAN

Dalam sejarahnya, hampir semua organisasi petani lokal dan nasional yang tergabung dalam GAT—dan GAT itu sendiri—didominasi kepemimpinan laki-laki, baik sebagian besar atau bahkan keseluruhan. Padahal, di banyak wilayah dunia, perempuanlah yang mengerjakan banyak atau bahkan sebagian besar kerja pertanian, dan mereka juga berkontribusi dalam ragam hal bagi rumah tangga di pedesaan. Ketimpangan ini mulai bergeser ketika perempuan dalam gerakan saling bertemu, berbagi pengalaman, dan kemudian memberi tekanan agar mendapat keterwakilan lebih besar dalam organisasi mereka maupun dalam GAT (Desmarais 2007: 161–181). Di beberapa organisasi nasional, seperti Serikat Petani Nasional (NFU) di Kanada, beberapa pos kepemimpinan tertentu sudah lama disediakan khusus bagi perempuan dan pemuda. Di tempat lain, terutama di Amerika Latin, desakan untuk meningkatkan keadilan gender dalam organisasi datang dari donor-donor Eropa, dari gerakan masyarakat adat dan masyarakat keturunan Afrika yang sudah lebih dulu memberi ruang kepemimpinan bagi perempuan, serta dari kelompok-kelompok regional seperti Koordinator Organisasi Pedesaan Amerika Latin (CLOC). Pada 2000, LVC memutuskan bahwa wilayah yang mengirimkan perwakilan ke Komite Koordinasi Internasional (ICC) harus menyertakan satu perempuan dan satu laki-laki. LVC juga mulai rutin menyelenggarakan pertemuan khusus perempuan sebelum

acara-acara besar internasional, sekaligus mengadakan pelatihan bagi laki-laki “supaya mereka lebih peka untuk menunjukkan penghormatan lebih besar bagi perempuan” (Vía Campesina 2009: 168). Pertemuan-pertemuan perempuan ini tidak hanya membahas persoalan gender dalam arti sempit, tapi juga isu-isu lain yang lebih luas. Proses ini turut memperkuat kepercayaan diri perempuan—banyak di antara mereka masih muda atau berasal dari masyarakat adat—untuk memasuki ruang-ruang kepemimpinan yang sebelumnya didominasi laki-laki, dan juga menyuarakan berbagai kepentingan baru.

Perhatian khusus juga dibutuhkan untuk melibatkan kaum muda dalam organisasi, terutama di posisi kepemimpinan. Di banyak negara, khususnya di Utara Global, usia rata-rata petani makin menua. Di Amerika Serikat, misalnya, pada 2007, 30 persen petani berusia 65 tahun ke atas (Doran 2013). Di pedesaan negara-negara seperti India, kekecewaan dan keputusan meluas; mayoritas petani di sana bahkan menyatakan lebih memilih meninggalkan pertanian, dan sejak 1990-an, ribuan petani melakukan bunuh diri—kebanyakan dengan menenggak pestisida—hingga menjadi berita utama di media massa (*Hindu Business Line* 2-14; Patel *et al.* 2012). Gerakan agraria, dengan demikian, tidak hanya menghadapi tantangan untuk melibatkan kaum muda di berbagai tingkatan organisasi, tetapi juga harus menghadapi kenyataan pahit tentang semangat yang makin mengendur, lilitan utang yang melumpuhkan, dan makin menuanya populasi yang terlibat dalam pertanian.

Para aktivis GAT sangat menyadari persoalan-persoalan ini. Namun, ada juga kecenderungan sebaliknya yang jadi penyeimbang, antara lain di Eropa, Amerika Utara, dan Karibia, di mana kaum muda, termasuk anak atau cucu dari keluarga petani, mulai “kembali” ke lahan; mereka biasanya memproduksi tanaman-tanaman bernilai tambah tinggi untuk pasar organik atau ceruk pasar lokal baru, dan bereksperimen dengan model pemasaran alternatif seperti pasar tani dan skema pertanian yang didukung komunitas (*community-supported agriculture*) (Hyde 2014).

Meski kelompok petani baru yang berhaluan budaya-tanding ini penting sebagai model alternatif berkelanjutan terhadap pertanian industrial dan untuk menjaga sabuk hijau yang mengitari kota-kota besar, jumlah mereka secara keseluruhan masih terbilang kecil. Beberapa di antara mereka ikut serta dalam gerakan agraria di tingkat lokal, nasional, maupun transnasional, meski sebagian besar pemuda dalam GAT berasal dari keluarga tani yang lebih konvensional.

Upaya-upaya GAT untuk melibatkan kaum muda sejalan dengan upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat partisipasi perempuan. La Via Campesina dan organisasi-organisasi anggotanya, misalnya, sudah sering menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pemuda, biasanya membarengi acara-acara besar lainnya. Namun demikian, piramida usia dalam gerakan-gerakan ini cenderung menyerupai piramida usia angkatan kerja di masyarakat asal mereka, dengan gerakan-gerakan di Utara Global cenderung lebih “beruban”, sementara di Selatan lebih muda, seiring dengan populasinya yang belum setua di Utara.

Tantangan utama bagi GAT adalah munculnya—atau memburuknya—jarak pemisah antara para pemimpin dan basis sosial organisasi mereka; jarak ini bisa terjadi ketika kegiatan-kegiatan transnasional lebih diutamakan ketimbang politik domestik, lokal, dan nasional. Di Amerika Tengah pada 1990-an, misalnya, para aktivis lokal mengeluhkan munculnya sosok “*jet set campesino*” (aktivis terbang), yaitu para pemimpin yang terus-menerus bepergian dari satu pertemuan atau seminar internasional ke pertemuan lain, dan nyaris tak punya waktu untuk mengurus organisasi basis mereka ataupun produksi pertanian mereka sendiri (Edelman 1998: 76). Dalam wawancara pada 2000, salah seorang yang mengaku sebagai aktivis terbang semacam itu mengakui:

Ketika seorang pemimpin berasal dari basis [lalu] menjadi birokrat dan menjauh dari basis, orang-orang akan bilang bahwa dia sudah

seperti layang-layang (*se papaloteō*), yang terbang jauh dan tinggi di langit, lalu tiba-tiba senarnya putus dan dia hilang begitu saja. (dikutip dalam Edelman 2005: 41)

Spesialisasi fungsi dalam organisasi, seperti diisyaratkan oleh gaya kepemimpinan semacam ini, kadang mengarah pada pemusatan pengetahuan kelembagaan dan ingatan kolektif, serta jaringan kontak pribadi, hanya pada segelintir individu. Sebagaimana beberapa organisasi bisa menjadi “penjaga gerbang”—yang bisa mempermudah atau justru menghalangi masuknya gerakan-gerakan lain ke dalam GAT (lihat Bab 2)—individu tertentu juga bisa muncul sebagai “penjaga gerbang” (Pattenden 2005). Tokoh-tokoh yang bercokol dan punya jaringan luas bisa menghambat proses regenerasi yang krusial dan kadang enggan menerima gagasan-gagasan segar.

Para pemimpin gerakan juga bisa kehilangan kepekaan pada jarak pemisah antara wacana gerakan dengan praktik maupun keyakinan rakyat pendukung. KRRS, misalnya, adalah salah satu gerakan awal di dunia yang mengambil sikap radikal menentang tanaman transgenik (GMO), tapi banyak pendukungnya (dan petani kecil lain di India) justru sangat bersemangat membudidayakan kapas Bt, varietas kapas GMO (Herring 2007; Pattenden 2005; Stone 2007). Hal serupa ditunjukkan oleh Jefferson Boyer (2010), yang memperlihatkan bagaimana petani di Honduras merasa gagasan atau istilah “ketahanan pangan” lebih dekat dan meyakinkan bagi mereka; secara harfiah, “*seguridad*” (keamanan/ketahanan) memberi kesan perlindungan dan kepastian lebih kuat bagi mereka yang hidup penuh kerentanan. Sementara itu, para pemimpin gerakan lebih memilih “kedaulatan pangan” dan justru mengkritik “ketahanan pangan” sebagai konsep teknokratik yang terlalu menekankan angka dan statistik, tanpa memedulikan bagaimana sebenarnya pangan diproduksi.

DUA MAKNA REPRESENTASI

Seperti disebutkan sebelumnya, “representasi” bisa dipahami dalam dua makna: sebagai klaim *keterwakilan*, bahwa gerakan benar-benar mewakili basis sosial atau konstituen tertentu, dan juga sebagai praktik *mewakili gerakan itu sendiri* serta para pemimpinnya sebagai sosok yang menjadi jelmaan tulen proyek politik petani. Dua makna “representasi” ini saling terkait erat dan sulit dipisahkan. Keduanya juga bisa berperan besar, misalnya, dalam membangun dan memperkuat legitimasi sebuah organisasi ketika berhadapan dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga-lembaga pengaturan transnasional dan nasional, gerakan sosial nonagraria, media, hingga anggota organisasi itu sendiri. Sebaliknya, klaim dan praktik perwakilan yang gagal meyakinkan pihak-pihak yang dituju justru bisa melemahkan gerakan, baik itu gerakan transnasional atau yang lain.

Keterwakilan

Hingga 2014, La Vía Campesina telah mencakup kurang lebih 164 organisasi dari 73 negara—angka-angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun—dan mendaku mewakili sekitar 200 juta petani. Klaim seperti inilah yang membuat media *The Guardian* di London menyebut LVC “bisa dibilang sebagai gerakan sosial terbesar di dunia” (Provost 2013). Pandangan senada memang cukup umum, baik di kalangan lembaga pengaturan internasional, di kalangan LSM dan organisasi masyarakat sipil lain yang berinteraksi dengan mereka, maupun di kalangan gerakan agraria itu sendiri; rasa percaya diri gerakan agraria atas kekuatan global mereka itulah yang menjadi sumber kebanggaan besar dan kadang disertai retorika yang memuji diri sendiri.

Namun, penting diingat bahwa, di tingkat nasional, tidak ada satu pun organisasi atau gabungan gerakan yang bisa benar-benar mewakili beragam kelompok dan kepentingan di suatu negara tertentu, kendati para aktivis kadang mendaku sebaliknya. Dua kasus ekstrem cukup memperkuat argumen ini: satu dari negara dengan anggota GAT yang

sangat lemah—Afrika Selatan—dan satu lagi dari negara dengan anggota nasional GAR yang sangat kuat—Brasil. Gerakan Rakyat Tunakisma (LPM) di Afrika Selatan adalah contoh “penggerak belakangan” dan tidak pernah berhasil meraih kekuatan keorganisasian dan politik yang signifikan (meski kerap mendapat kunjungan dan dukungan dari MST yang berupaya menularkan keberhasilan Gerakan Buruh Tunakisma Brasil ini). Pada 2004, LPM mendaku memiliki 100.000 anggota—yang didefinisikan secara longgar. Namun, sejumlah akademia yang dekat dengan gerakan ini mengakui bahwa “angka ... tersebut sulit diverifikasi dan mungkin tidak akurat. [Dan bahwa] klaim atas kekuatan jumlah tersebut merupakan strategi penting LPM untuk menarik perhatian publik” (Baletti, Johnson, dan Wolford 2008: 301). Beberapa tahun setelah para pemimpinnya melontarkan klaim atas keanggotaan besar itu, LPM nyaris menghilang. Benar saja, pada 2012, LPM terbilang sangat miskin; salah seorang pemimpinnya dari daerah pedesaan dekat Taman Nasional Limpopo—yang sering “mewakili Afrika Selatan” pada pertemuan-pertemuan internasional—mengaku bahwa komputer pun tidak ada, sehingga dia harus naik bus beberapa kilometer ke warung internet agar bisa melakukan komunikasi internasional.² Kesenjangan digital, yang sangat dirasakan banyak gerakan di masa awal internet (Edelman 2003), terus menjadi tantangan besar, terutama bagi organisasi tani yang kekurangan dana di daerah pedalaman. Meski menghadapi hambatan seperti ini, LPM tetap merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili rakyat miskin pedesaan Afrika Selatan dalam *La Vía Campesina*.

Di ujung spektrum yang lain, MST di Brasil sejauh ini adalah gerakan nasional terbesar dan secara politik paling solid dalam *La Vía Campesina*. MST disebut—dan mungkin memang benar—sebagai “salah satu gerakan sosial terbesar di dunia” (Seligmann 2008: 345). MST jelas mewakili rakyat miskin yang luar biasa banyak di Brasil, memiliki program-program pendidikan dan kesehatan yang luas, dan mendukung upaya-upaya kerjasama internasional yang telah membantu gerakan tani

di Afrika Selatan, Haiti, Indonesia, dan berbagai negara lain. Namun demikian, kemampuan MST untuk benar-benar mewakili seluruh rakyat miskin di pedesaan Brasil tetap terbatas. Pemimpin MST João Pedro Stédile, misalnya, bahkan mengakui:

Kami menciptakan bayangan yang jauh lebih besar dari apa yang kami miliki, dan karena itulah kami jadi terkenal. Sebenarnya, MST sebagai kekuatan terorganisir kelas pekerja di Brasil masih sangat kecil: bahkan untuk mengorganisir seluruh rakyat tunakisma yang jumlahnya empat juta orang saja kami belum mampu. Tapi karena tidak ada kelompok lain yang berjuang dan kami terus berjuang, jadi dinya MST bagaikan tim kecil sepakbola yang tiba-tiba bermain di Liga Utama! (Stédile 2007: 195–196)

Selain itu, bahkan para pengamat yang bersimpati pada MST mencatat bahwa gerakan ini masih memiliki keterbatasan dalam mewakili warga Afro-Brasil dan perempuan pedesaan, yang mana sebagian dari mereka bahkan memilih keluar dari MST dan membentuk organisasi baru (Stephen 1997; Rubin 2002). Ada juga catatan tentang bagaimana para tunakisma kerap berpindah-pindah antara perkemahan yang didukung MST dan perkemahan milik berbagai gerakan agraria lain yang lebih kecil, untuk mencari peluang paling menjanjikan dalam mengokupasi tanah (Rangel Loera 2010). Bisa dibilang, semua gerakan nasional lain dalam jaringan La Vía Campesina berada di antara dua kutub ekstrem ini—LPM di satu sisi dan MST di sisi lain—dalam hal kapasitas representasi. Klaim paling jauh yang bisa mereka buat ialah bahwa mereka mewakili *sebagian* dari konstituen yang mereka katakan sebagai basis.

Meski La Vía Campesina menyuarakan wacana dan cita-cita global, kehadirannya secara geografis sebenarnya sangat tidak merata. LVC tidak punya afiliasi di Tiongkok—negara tempat sepertiga petani dunia tinggal (Walker 2008)—dan di sebagian besar kawasan Timur Tengah dan

Afrika Utara. Kehadiran mereka di Afrika Sub-Sahara pun bisa dibilang terlambat, dan jumlah anggotanya di sana masih sedikit, sebagian karena sudah ada GAT lain yang bergerak dengan pendekatan serupa, seperti ROPPA (Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat), yang lebih dulu melakukan pengorganisasian di negara-negara berbahasa Prancis di sana. Di negara-negara bekas Uni Soviet, pengaruh GAT juga hampir tidak terasa sama sekali, meski di sana ada segelintir organisasi, seperti Krest'ianskii Front (Front Petani) di Rusia, yang menyuarakan keprihatinan seperti yang disuarakan La Vía Campesina (Visser, Mamonova, dan Spoor 2012).

GAT punya keterbatasan untuk memperluas jangkauan geografis karena, salah satunya, kecenderungan mereka mendefinisikan “petani” (*peasant*) atau “pelaku usaha tani” (*farmer*) secara sempit, yang justru menyingkirkan sebagian besar kelompok miskin pedesaan (buruh migran dan nelayan, misalnya). Selain itu, GAT juga bisa saja gagal “melihat” keberadaan gerakan-gerakan di wilayah yang asing bagi mereka, entah karena gerakan-gerakan itu tidak memenuhi kriteria mereka yang terbatas tentang apa yang layak disebut “gerakan”, atau karena bentuk aktivisme di wilayah tersebut—terutama di bawah rezim otoriter—tidak mewujud sebagai organisasi yang mapan, melainkan dalam bentuk perlawanan “sehari-hari”, “berbasis hukum negara”, atau “terselubung” (Scott 1985; O’Brien dan Li 2006; Malseed 2008).

Representasi “Kepetanian”

Penekanan tentang jumlah anggota dan basis pendukung biasanya tidak bisa dilepaskan dari klaim bahwa organisasi dan para pemimpinnya sungguh-sungguh mewakili sosok “petani” tulen. Tapi, di titik ini juga, penting untuk mengakui bahwa kenyataan yang harus dihadapi ternyata penuh kerumitan dan ketakjelasan. Klaim sebagai petani tulen ini bukan cuma soal bagaimana isu “dibingkai” atau bagaimana gerakan memanfaatkan momentum atau “peluang politik”, dua hal yang biasa dibahas dalam kajian gerakan sosial (Benford 1997). Alih-alih demikian,

klaim ini menyangkut bagaimana aktor gerakan—baik individu maupun kelompok—membentuk dan menampilkan diri sedemikian rupa (sebagai petani tulen), sehingga tampak meyakinkan dan bisa membangun pengaruh politik.

Gerakan tani menghadapi tantangan jauh lebih besar dalam proses saling terkait antara klaim keterwakilan dan penampilan diri, dibandingkan banyak gerakan lain di luar agraria. Di hampir semua tempat, kalangan elite cenderung merendahkan kaum miskin pedesaan, biasanya menggunakan kosakata penuh celaan untuk menyangkal kecerdasan, kejujuran, tampilan fisik, kebersihan, dan—yang ironis—kemampuan petani bekerja keras (Handy 2009). Namun demikian, pada saat yang sama, sosok petani juga sering digambarkan secara romantis dalam narasi nasionalis, sebagai simbol dari akar sejarah panjang, kemurnian etnis, nilai-nilai spiritual, dan pengorbanan tanpa pamrih. Meski pandangan yang saling bertentangan ini bisa dianggap sebagai disonansi kognitif kelas atas, keduanya sesungguhnya sama-sama menuntut agar petani memenuhi standar “kemurnian” yang tinggi. Bahasa penghinaan itu pun, pada dasarnya, juga merupakan bentuk kritik terhadap kegagalan petani untuk memenuhi gambaran romantis tersebut.

Ketika kelompok-kelompok berkuasa—tuan tanah besar, elite perkoatan, politisi, pakar media—berhadapan dengan gerakan petani, mereka kerap menunjukkan kekagetan dan pura-pura kecewa, karena “putra bumi” yang selama ini dianggap “sederhana” dan “bersetia pada tanah” itu tiba-tiba berani menyuarakan keluhan dan mengajukan tuntutan. Unsur-unsur yang membuat suara gerakan petani masa kini begitu kuat—kecakapan retorika, pengetahuan mereka soal hukum dan ekonomi, cara mereka menyuarakan keadilan dengan istilah abstrak—justru membuat para elite memandang bahwa para penyambung lidah kaum tani ini “tidak cocok” dengan ciri khas petani. Di mata elite, kemampuan seperti itu tidak sesuai dengan gambaran petani yang “asli”, “tulen”, dan *ndeso*. Untuk melawan pandangan elite ini, petani perlu menggunakan

khazanah protes yang inovatif dan memperkuat upaya mengukuhkan citra keaslian mereka di mata masyarakat luas.

Aliansi antar-gerakan tani lintas negara di berbagai belahan dunia pun memperlebar jurang antara stereotipe petani sebagai sosok rendah-an dan lugu di benak elite dengan kenyataan para aktivis tani yang tampil cerdas, terampil dalam politik, dan berpengalaman internasional. GAT masa kini memang dituntut memiliki pengetahuan yang sangat spesifik tentang perdagangan global, hak kekayaan intelektual, rekayasa genetika, kebijakan subsidi, serta aspek lingkungan dan kesehatan dalam pertanian. Sebagian isu ini juga penting dalam perjuangan di tingkat *nasional*; tapi, terutama ketika petani terorganisir menampilkan kecerdasan semacam itu di panggung internasional, mereka jadi makin jauh dari gambaran kepetanian yang “tulen” ala elite itu. Persoalan representasi ini menjadi kian rumit ketika GAT berinteraksi dengan LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain di luar pertanian, sebagaimana dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.

CATATAN

- 1 Wawancara Marc Edelman dengan Rafael Alegría, Tegucigalpa, Honduras, 2 Agustus 2001.
- 2 Wawancara Marc Edelman dengan pemimpin LPM, Jenewa, 2012.

BAB 5

“Bukan tentang Kami kalau Tanpa Kami”: Gerakan Agraria Transnasional, LSM, & Lembaga Donor

Kajian agraria punya sejarah panjang penuh perdebatan tentang solidaritas antara kaum tani dan sekutu dari luar. Rumusan Marxis klasik tentang “masalah agraria” secara umum membahas tentang keterkaitan, relasi, dan aliansi antara kaum tani dengan partai politik dan kelas-kelas lain (Hussain dan Tribe 1981). Kepustakaan Marxis belakangan juga mengupas persoalan serupa: siapakah sebenarnya kekuatan revolusioner yang paling bisa diandalkan? Eric Wolf (1969) mengajukan tesis tentang “petani menengah”, sementara Jeffrey Paige (1975) lebih mendukung kelas “proletariat pedesaan” (lihat Bab 2). Para revolusioner Marxis, terutama Mao Tse-tung, juga mengulik persoalan ini untuk keperluan strategi perjuangan. Sementara itu, kepustakaan tentang ekonomi moral menilik hubungan antara kaum tani dengan kelas dengan institusi-institusi lain, dan bagaimana hubungan ini membentuk politik petani serta hubungan patron-klien (Scott 1976). Karena itu, para akademika yang mengembangkan pendekatan ekonomi moral kemudian mengalihkan perhatian dari revolusi dan pemberontakan yang dramatis tapi jarang terjadi ke “bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari petani,” yang mencakup tidak hanya hal-hal yang sering dibahas—mulai dari “menyeret kaki, berpura-pura, kepatuhan palsu, mengutit, pura-pura tidak tahu, menjelek-jelekkan, membakar, [dan] sabotase ” (Scott 1985: 29)—melainkan secara umum hubungan kaum tani dengan para aktor di luar mereka, baik kawan maupun lawan (Scott 1990; Kerkvliet 2005, 2009).

Gagasan tentang “perlawanan yang berbasis hukum” dari Kevin O’Brien dan Lianjiang Li (2006; O’Brien 2013) menawarkan kerang-

ka lebih bernuansa untuk memahami hubungan orang-orang pedesaan dengan pihak luar di tempat-tempat yang kurang demokratis, seperti Tiongkok dewasa ini. Dari tradisi ekonomi neoklasik, Samuel Popkin (1979) juga mengulas hubungan kaum tani dengan para sekutu luar melalui pendekatan yang menggambarkan petani sebagai sosok rasional, mementingkan diri sendiri, dan selalu berhitung untung-rugi untuk menaksir risiko sebelum terlibat dalam aksi kolektif. Singkatnya, berbagai tradisi kajian agraria sepakat bahwa hubungan kaum tani dengan pihak-pihak luar menjadi kunci untuk memahami politik agraria. Tradisi-tradisi ini telah membahas aliansi antara petani dan buruh, serta antara gerakan agraria dan partai politik. Pembahasan kami tentang hubungan GAT dengan LSM dan lembaga donor berpijak pada tradisi keilmuan yang subur dalam kajian agraria kritis ini.

Selama tiga perempat pertama abad XX, partai politik merupakan salah satu aktor luar yang memainkan peran besar dalam kebangkitan, atau kejatuhan, gerakan-gerakan agraria radikal (misalnya, Komunis, Sosialis, dan Kristen Demokrat). Banyak perjuangan pembebasan nasional, antikolonial, dan/atau sosialis yang memperoleh dukungan kuat dari kaum tani, seperti di Meksiko, Tiongkok, Vietnam, Angola, dan Zimbabwe. Maka tidak mengherankan bila banyak kajian akademik tentang politik petani pada masa itu memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan seperti bagaimana kaum tani bisa menjadi revolusioner (Huizer 1972), atau bagian mana dari kaum tani yang paling revolusioner—persoalan yang memicu perdebatan antara pendekatan Wolf (1969) dan Paige (1975). Sebagian besar agenda politik nasional generasi ini bercorak statis dalam hal orientasi—diarahkan untuk merebut kekuasaan negara dan membangun suatu model pembangunan yang dikomando negara. Karena itu, pertarungan politik hampir selalu melibatkan konfrontasi dengan negara atau upaya untuk merebut kekuasaan negara. Dalam konteks inilah partai politik menjalankan berbagai fungsi bagi gerakan agraria: memberikan kepemimpinan politik dan ideologi, menjembatani gerakan agraria dengan gerakan-gerakan lain

(terutama serikat buruh), menyediakan dukungan logistik bagi pembentukan berbagai gerakan dan kampanye advokasi, serta melatih kader-kader pengorganisir dan intelektual. Pengalaman generasi gerakan petani pada masa itu menunjukkan bahwa kaum tani pada dasarnya tidak menolak aliansi atau kepemimpinan dari luar, melainkan lebih peduli pada *persyaratan* dari aliansi-aliansi itu (Fox 1993).

Era gerakan revolusioner bersenjata berbasis petani pada dasarnya berakhir tepat pada 1980-an, dengan kemenangan revolusi Sandinista 1979 di Nikaragua dan keberhasilan pasukan pembebasan Zimbabwe pada 1980. Hanya segelintir gerakan revolusioner bersenjata berbasis petani yang masih bertahan setelah itu, seperti gerakan yang masih aktif sebentar Sendero Luminoso (Shining Path) di Peru dan Tentara Revolusioner Kolombia (FARC), pemberontakan di Chiapas pada medio 1990-an, dan sejumlah kelompok Maois di Asia, terutama Asia Selatan.

Tamatnya era gerakan revolusioner bersenjata berbasis petani, atau setidaknya gerakan petani yang dipimpin partai politik, bukan berarti berakhirnya gerakan agraria militan. Sejak dasawarsa 1980-an, muncul jenis baru gerakan agraria yang memiliki banyak kesamaan dengan gerakan-gerakan sebelumnya (banyak di antara mereka sangat antikapitalis). Namun, jenis baru gerakan ini juga menandai sebuah titik balik dari masa lalu. Yang paling mencolok, banyak gerakan yang muncul sejak 1980-an dan sesudahnya menekankan pentingnya "otonomi" mereka, dan tidak lagi menerima posisi bawahan atau binaan dari partai politik, terutama partai-partai sosialis atau komunis yang bewatak "vertikalis" (Moyo dan Yeros 2005).

Dengan memudarnya pengaruh partai politik yang membarengi bangkitnya gerakan agraria militan, berarti beberapa fungsi penting yang sebelumnya dijalankan oleh partai mesti diambil alih oleh gerakan agraria itu sendiri atau pihak lain. Dan keduanya memang terjadi. Sejumlah gerakan agraria dengan pengaruh politik cukup kuat, yang berdiri sendiri dan tidak lagi terikat dengan partai politik besar, mengembangkan kerangka ideologis dan kepemimpinan mereka sendiri.

Banyak dari mereka menelurkan pemimpin-pemimpin karismatik dan macan panggung, yang kemudian oleh para pengkaji gerakan sosial transnasional disebut sebagai “intelektual tani baru” (Edelman 1997) atau “kosmopolitan yang membumi” (Tarrow 2005). Namun, tiga aspek penting lain dari praktik tradisional partai politik kurang mendapat tekanan sebesar sebelumnya. Pertama, “garis politik” yang ketat, “disiplin” partai, dan komitmen untuk membangun front bersama dengan gerakan kelas pekerja lain mulai memudar, terutama karena melemahnya sayap kiri ortodoks dan menurunnya militansi serikat buruh secara global. Kedua, partai-partai politik dulunya menyediakan kader-kader berdedikasi tinggi serta dukungan logistik bagi gerakan agraria. Dan ketiga, partai-partai politik umumnya mendesak adanya agenda lebih jelas untuk merebut kekuasaan negara.

LSM yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, bersama lembaga donor nonpemerintah, makin banyak mengambil peran yang dulu dijalankan partai politik, terutama setelah banyak gerakan agraria memilih menjauh dari partai politik. Mereka bahkan kerap menjadi aktor penting dalam pembentukan gerakan agraria transnasional yang mulai berkembang sejak saat itu. Beberapa orang di dalam LSM dan lembaga donor itu sebelumnya terlibat dalam jaringan global yang mendukung gerakan pembebasan nasional atau kelompok-kelompok solidaritas yang menjembatani jurang Selatan-Utara. Mereka pun merasakan kekecewaan dan kejengkelan terhadap partai politik, seperti yang juga dirasakan banyak gerakan agraria. Justru para aktor non-gerakan sosial dan non-partai politik inilah yang kemudian mengambil alih sebagian peran yang dulunya dijalankan partai politik.

Kalau politik agraria sebelum 1980-an cenderung berpusat pada persoalan hubungan antara gerakan petani dan partai politik, maka sejak 1980-an dan sesudahnya yang justru mencuat ialah tarik-ulur dan negosiasi intens soal hubungan antara gerakan petani dan LSM. Periode 1980-an juga merupakan masa awal kemunculan sebagian besar gerakan agraria kontemporer yang tidak lagi bernaung di bawah partai politik

(Hellman 1992; Putzel 1995). Pada masa itu pula mulai muncul praktik baru penyaluran dana bantuan resmi melalui agen-agen nonpemerintah di Utara Global. Argumen yang sering digunakan waktu itu ialah bahwa pemerintah (baik di Selatan maupun Utara) dinilai tidak berjalan efisien dan, terutama di Selatan, korup, dan bahwa LSM dianggap lebih "terampil" dalam memberikan layanan dan mampu mendayagunakan dana secara lebih baik. Karena itulah lembaga-lembaga kecil berbasis gereja di Eropa mulai tumbuh setelah menerima dana dari pemerintah mereka. Lembaga donor besar yang berhaluan nonsektarian, seperti Oxfam, memperluas jangkauan kerjanya, dan banyak LSM baru bermunculan—khususnya di Eropa Barat dan Amerika Utara—yang berlomba-lomba mengakses uang negara, yayasan, maupun sumbangan pribadi. Dalam konjungtur politik inilah hubungan antara LSM, lembaga donor, dan gerakan agraria mulai berkembang. Tiga dekade kemudian, hubungan ini tetap dinamis, meski tetap diwarnai ketegangan. Seperti hubungan yang dulu terjalin antara gerakan agraria dan partai politik, simpul LSM-donor-gerakan agraria juga kerap diwarnai hubungan "benci tapi cinta", yang secara politik penuh kontestasi dan terus-menerus dinegosiasikan. Salah satu cara yang berguna untuk memahami tablo yang rumit ini adalah dengan memusatkan perhatian pada dua aspek utama: (1) hubungan antara GAT dengan LSM, dan (2) hubungan antara GAT dengan lembaga donor nonpemerintah.

GAT & LSM

Yang kami maksud dengan LSM di sini ialah kelompok di luar negara yang secara umum mencerminkan keprihatinan yang diusung "gerakan keadilan global" dan berfokus pada isu-isu seputar "keadilan agraria". Kami menyadari bahwa definisi ini cukup sempit dan tidak mencakup keseluruhan jenis LSM yang sangat beragam, tetapi deskripsi minimalis semacam inilah yang kami anggap paling sesuai untuk keperluan buku ini. Kelompok-kelompok tersebut bisa berukuran besar maupun kecil, baik dari segi pendanaan maupun struktur organisasinya, dan dapat berbasis

di Utara maupun Selatan Global. Biasanya mereka sangat bergantung pada donor-donor lain di luar negara. Lingkup kerja mereka bisa lokal, nasional, atau internasional. Beberapa tergabung dalam federasi atau jaringan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa bukan LSM yang berasal dari basis rakyat, sementara yang lain memadukan ciri-ciri sebagai LSM dan sebagai gerakan sosial. Tujuan khusus mereka pun beragam, mulai dari pengorganisasian komunitas, membangun organisasi kelas pekerja, mendukung gerakan rakyat, hingga penelitian dan/atau advokasi kebijakan. Banyak LSM yang sesuai gambaran semacam ini mulai berdiri pada 1970-an dan setelahnya (Edwards dan Hulme 1995; Bebbington, Hickey, dan Mitlin 2008).

Sejumlah LSM internasional, dalam berbagai tingkat keterlibatan, telah mendampingi GAT mulai tahap pembentukan, perluasan, hingga konsolidasi. Kelompok-kelompok yang termasuk kategori ini antara lain Lembaga Kebijakan Pangan dan Pembangunan (Food First), Transnational Institute, Aksi Internasional untuk Sumberdaya Genetika (GRAIN), ETC Group, Jaringan Informasi dan Aksi untuk Kedaulatan Pangan (FIAN), dan Focus on the Global South.

LSM-LSM tersebut telah memberi sumbangsih besar dalam pengembangan GAT. Menganggap bahwa GAT lahir semata-mata dari upaya mandiri basis rakyat gerakan tani adalah romantisisme yang salah alamat. Asumsi semacam itu luput memahami secara utuh berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan materiel yang dihadapi kelas pekerja agraria dan kelompok-kelompok sosial pedesaan dalam membangun gerakan yang otonom dan melancarkan aksi kolektif. Sumbangsih LSM dalam proses pembentukan GAT dapat dilihat dalam berbagai bentuk.

Pertama, LSM membantu membangun gerakan di tempat-tempat yang gerakan agraria akar-rumputnya belum terbentuk, atau masih terlalu lokal dan terpencar. Banyak dari gerakan agraria subnasional ini kelak menjadi fondasi penting dalam pembangunan GAT. Misalnya, para aktivis agraria Indonesia pertama kali menjalin kontak dengan La Vía Campesina dalam majelis global LVC di Tlaxcala, Meksiko, pada

1996. Saat itu, perwakilan Indonesia terdiri atas para aktivis LSM, karena gerakan agraria akar-rumput di Indonesia masih dalam tahap awal, terpencar secara geografis, dan sebagian didampingi oleh LSM-LSM radikal. Henry Saragih, yang kemudian menjadi koordinator global LVC, saat itu bekerja di sebuah LSM bernama Yayasan Sintesa yang berbasis di Medan. Saragih dan kawan-kawannya, terilhami oleh pengalaman mereka di majelis LVC itu, memutuskan mempercepat proses pembentukan gerakan agraria nasional. Tak lama kemudian, Serikat Petani Indonesia (SPI) didirikan, dan LSM-LSM memainkan peran penting dalam mempertemukan berbagai gerakan lokal yang tersebar ke dalam satu federasi nasional. SPI pun kemudian dikenal luas secara internasional sebagai tuan rumah sekretariat global LVC. Bahkan setelah menjadi anggota kunci LVC, SPI tetap menjalin kerjasama erat dengan berbagai LSM. Ada yang fokus pada pengorganisasian rakyat, ada yang menggarap isu-isu hukum, dan ada pula yang bergerak dalam penelitian aksi. Sejarah SPI adalah contoh nyata tentang eratnya dan nyaris tak terpisahkannya hubungan LSM dengan gerakan agraria akar-rumput dalam pembentukan GAT (Bachriadi 2010).

Kisah SPI di Indonesia mirip dengan pengalaman LPM di Afrika Selatan. Tepat setelah berakhirnya rezim apartheid pada 1994, sempat ada masa singkat yang dipenuhi semangat dan optimisme untuk membangun gerakan agraria militan. Reforma pertanahan menjadi salah satu isu kunci dalam masa transisi kekuasaan nasional. Pada paruh kedua 1990-an, sebuah koalisi LSM yang cukup luas, Komite Nasional Reforma Agraria (National Land Committee [NLC]), memulai proses pembentukan organisasi agraria nasional yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Rakyat Tunakisma. Sebelumnya, LSM-LSM anggota NLC melakukan pengorganisasian masyarakat di berbagai daerah, karena saat itu hampir tidak ada organisasi gerakan agraria lokal yang mapan. Situasi politik transisi menuntut hadirnya sebuah gerakan agraria berskala nasional. NLC mempercepat proses pembentukan gerakan nasional dan menyambungkan prakarsa ini ke jaringan internasional LVC. Tapi

hasilnya kurang memuaskan: LPM tidak pernah berhasil membangun momentum politik yang kuat, juga tidak mampu menciptakan basis massa yang solid. NLC sendiri kemudian bubar (Greenberg 2004), dan tugas mendampingi LPM kemudian diambil alih oleh MST. Sebagai bagian dari upaya LVC untuk memperkuat LPM, MST mengerahkan para pengorganisir lapangan dari Brasil ke Afrika Selatan (Baletti, Johnson, dan Wolford 2008), tetapi hasilnya pun tidak sesuai harapan. Hingga kini, LPM masih ada, tapi secara keorganisasian kecil dan secara politik lemah. Kisah LPM dan SPI sama-sama menunjukkan betapa erat dan tak terpisahkannya LSM dan organisasi rakyat, tetapi hasil akhir serta arah perjalanan di Indonesia dan Afrika Selatan sangat berlainan.

Sumbangsiah kedua dari LSM kepada GAT adalah memfasilitasi aliran informasi transnasional dan pertukaran kader atau aktivis antarwilayah. Peran ini sangat penting terutama pada masa-masa awal pembentukan GAT, ketika teknologi informasi dan sarana transportasi belum semudah dan semurah sekarang. Di banyak wilayah dunia pada 1980-an dan awal 1990-an, LSM memiliki akses jauh lebih besar atas komputer dan teknologi komunikasi, dibandingkan gerakan agraria. Saat itu, kantor LSM umumnya sudah dilengkapi telepon, faksimile, pager, dan komputer—dan kemudian sambungan internet. Sedangkan sebagian besar organisasi gerakan agraria, bahkan yang sudah bisa menyewa kantor kecil sekalipun, masih sulit mengakses sarana komunikasi semacam itu. Saat ini, kebanyakan LSM memiliki dana untuk membiayai perjalanan internasional staf mereka, dan banyak pula yang membantu mengongkosi perjalanan aktivis gerakan agraria. Dampak dari akses atas sarana komunikasi ini sangat besar bagi perkembangan gerakan agraria. Seperti dicatat Deere dan Royce (2009: 9–10) dalam konteks Amerika Latin, akses atas internet dan “penyebaran pesat penggunaan ponsel ... sangat meningkatkan kapasitas organisasi pedesaan dalam memobilisasi anggota mereka secara cepat untuk menghadiri pertemuan, pawai, dan demonstrasi,” baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Sumbangsih penting ketiga dari LSM pada GAT adalah penelitian aksi yang mendukung kerja-kerja advokasi. Penelitian aksi terkait kebijakan perdagangan dan GATT (yang kemudian menjadi WTO) sebagian besar dilakukan oleh LSM-LSM penelitian; beberapa di antaranya Yayasan Internasional untuk Pemajuan Pedesaan (Rural Advancement Foundation International [RAFI]) yang berbasis di Kanada—kemudian berganti nama menjadi ETC Group—yang berfokus pada biologi sintetik dan rekayasa genetika; GRAIN di Barcelona yang memantau perusahaan agrobisnis internasional; Focus on the Global South yang ber Kantor pusat di Bangkok dan didirikan oleh Walden Bello, mantan direktur Food First yang berbasis di Oakland—yang pada paruh kedua 1990-an memberi dukungan penelitian kepada LVC terkait isu-isu perdagangan; serta Jaringan Penelitian dan Aksi untuk Reforma Agraria (LRAN) yang didirikan pada 2002 oleh sejumlah LSM dan dikoordinasikan oleh Peter Rosset setelah selesai menjabat direktur Food First, guna mendukung LVC dalam Kampanye Global untuk Reforma Agraria. Penelitian oleh Transnational Institute pimpinan Susan George, yang berbasis di Amsterdam, tentang bantuan internasional, politik pangan, dan kekuasaan korporasi juga turut memperkaya arah gerakan LVC.

Singkatnya, melemahnya pengaruh partai politik dalam gerakan agraria sejalan dengan meningkatnya internasionalisasi berbagai masalah agraria. Kedua gejala ini turut mendorong kemunculan LSM-LSM berorientasi agraria di berbagai belahan dunia. LSM-LSM itu pada gilirannya mengambil alih sebagian peran yang sebelumnya dimainkan partai politik, dan proses inilah yang berkontribusi besar dalam membangun keterhubungan transnasional antar-gerakan agraria.

GAT & LEMBAGA DONOR NONPEMERINTAH

Di bagian ini, kami memusatkan perhatian pada hubungan GAT dengan lembaga donor nonpemerintah, seperti Oxfam, ActionAid, ChristianAid, Misereor, dan Organisasi Antargereja untuk Kerjasama Pembangunan

(ICCO). Mereka bukanlah lembaga negara, meski menerima dana dari pemerintah. Untuk memudahkan, kami akan menyebut mereka sebagai “lembaga donor”.

Bangkitnya GAT dalam dua dekade terakhir beriringan dengan meluasnya apa yang disebut “kompleks ragam donor global”, suatu jaringan besar dan rumit yang tidak bisa diulas secara mendalam di buku ini. Sumbangsiah lembaga donor dalam membangun GAT mirip peran yang dimainkan LSM, meski ada beberapa perbedaan penting. Pertama, lembaga donor menyediakan dukungan pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk membangun gerakan agraria akar-rumput, sementara LSM mendukung gerakan tersebut. Dulunya fungsi ini sebagian besar dijalankan partai politik. Sejarah gerakan agraria masa kini, termasuk yang paling radikal, adalah kisah tentang aliran dana besar yang datang tiba-tiba dari lembaga donor yang umumnya berbasis di dan/atau dikoordinasikan dari Utara Global. Munculnya gerakan agraria lokal-nasional dan transnasional pada gilirannya turut mendorong meluasnya basis pendukung dan legitimasi politik bagi lembaga donor di Utara ini. Dengan kata lain, keduanya tumbuh dalam suatu hubungan timbal balik yang saling membentuk dan menguatkan. Namun, penting digarisbawahi maksud kami di sini bukan untuk menyatakan bahwa gerakan-gerakan agraria tersebut lahir karena adanya lembaga donor (bahwa keberadaan gerakan semata-mata bergantung pada ketersediaan dana). Hal ini sama sekali tidak berlaku untuk sebagian besar gerakan agraria radikal yang muncul pada masa ini, khususnya yang berafiliasi dengan LVC dan IPC. Yang kami tekankan ialah bahwa aliran dana yang cukup besar dari lembaga donor ini memberi sumbangsiah penting bagi penguatan organisasi dan mobilisasi massa oleh gerakan-gerakan agraria mutakhir.

Kedua, lembaga donor berperan besar dalam memperlancar arus informasi lintas negara dan mempertemukan para kader gerakan agraria dari berbagai belahan dunia. Ini merupakan langkah krusial. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an—masa-masa awal pembentukan ba-

nyak GAT—teknologi informasi dan komunikasi memang mulai jauh lebih mudah diakses, tetapi tetap saja masih jauh dari jangkauan banyak gerakan. Biaya untuk membeli mesin faksimile, membayar tagihan telepon, merekam video, dan memasang komputer dengan sambungan internet bisa sangat memberatkan. Demikian pula dengan perjalanan lintas negara yang membutuhkan dana besar. Gerakan-gerakan agraria yang tidak terikat pada partai politik tentu tidak punya sumberdaya tersebut. Lembaga donor pun menjadi pihak yang dermawan menyediakan sumberdaya penting semacam itu, kadang secara langsung ke gerakan agraria, kadang melalui perantara LSM. Dukungan semacam inilah yang memungkinkan terselenggaranya kongres pendirian LVC di Mons pada 1993; pertemuan bersejarah ini diselenggarakan dan didanai oleh sebuah LSM asal Belanda, Yayasan Paulo Freire (PFS). Salah satu tujuan utama PFS kala itu adalah menciptakan suatu wadah yang bisa menarik lebih banyak dana dari pemerintah negara-negara Eropa untuk mendukung organisasi-organisasi tani di Selatan Global.

Ketiga, lembaga-lembaga donor juga menjadi sumber utama pendanaan untuk kampanye-kampanye advokasi transnasional, yang selalu membutuhkan biaya besar. Salah satu momen penting dalam membangun koneksi transnasional antar-gerakan agraria adalah ketika puluhan aktivis agraria dan pemimpin LSM dari berbagai penjuru dunia dihadirkan pada perundingan GATT 1988 di Montreal. Pertemuan ini bukan sekadar simbolis, tapi strategis dan berpengaruh secara politis dalam jangka panjang. Namun, membawa delegasi sebanyak itu dari berbagai belahan dunia ke Kanada jelas membutuhkan biaya besar. Sama mahalnyanya dengan berbagai pertemuan besar yang diselenggarakan kemudian oleh LVC dan para sekutunya: di Belgia (1993), di Tlaxcala (1996), di Seattle (1999), di Cancún, Meksiko (2000), dan dalam pertemuan WSF setiap tahun. Tak diragukan lagi, semua ini adalah momen perjumpaan penting dan krusial bagi dinamika politik GAT.¹ Tapi semua itu juga membutuhkan sumberdaya keuangan sangat besar—dan, sekali lagi, lembaga donorlah yang ajeg menyediakannya. Sederhananya,

sebuah GAT yang berfungsi dengan baik nyaris mustahil dibayangkan tanpa sokongan dana dari lembaga donor, terutama karena banyak GAT umumnya merupakan gerakan berbasis kaum miskin yang tentu tidak mampu membiayai organisasi hanya dari iuran atau sumbangan anggota.

KETEGANGAN & PERTENTANGAN ANTARA GAT, LSM, & DONOR

Dalam wacana GAT, istilah “NGO” (LSM/ornop) sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada LSM perantara maupun lembaga donor nonpemerintah. Menyamakan dua entitas ini sebenarnya tidak membantu dalam memahami hubungan GAT dengan masing-masing pihak tersebut. Bagian ini menilik secara ringkas ketegangan antara GAT, LSM, dan lembaga donor.

LVC lahir dengan semangat anti-LSM yang cukup kuat. Koalisi petani Amerika Latin yang kini sudah bubar, ASOCODE, memainkan peran terdepan dalam mendirikan LVC dan dikenal luas sebagai pelopor kritik sistematis pertama dari GAT terhadap LSM. ASOCODE berupaya merebut kembali “suara” gerakan petani dan menegaskan bahwa kaum tani bisa menyuarakan kepentingan mereka sendiri tanpa harus melalui LSM. Wilson Campos, seorang aktivis asal Kosta Rika yang memimpin ASOCODE pada 1990-an dan menjadi salah satu pendiri LVC, pernah menyatakan: “Terlalu banyak LSM di Amerika tengah yang berbicara atas nama kaum tani. ... Selain itu, terlalu banyak uang yang dihaburkan untuk mendirikan semua organisasi tersebut dan menggaji staf mereka” (Biekart dan Jelsma 1994: 20). Campos menguraikan lebih lanjut: “Kami, kaum tani, bisa bersuara atas nama kami sendiri. Sudah terlalu banyak orang yang selama ini memanfaatkan kami, tanpa kami sendiri menyadari sepenuhnya” (Campos 1994: 215). Ironisnya, seperti yang kemudian diakui Campos sendiri, ASOCODE akhirnya berubah menjadi apa yang dulu mereka tolak: sebuah organisasi yang birokratis, mirip LSM, dengan banyak staf bergaji dan kantor pusat yang

mewah. Menjelang akhir 1990-an, ASOCODE bubar—sebagian karena limpahan dana berlebih dari lembaga-lembaga donor yang kelewat mengebuk.

Pengamatan berikut ini adalah tinjauan kritis atas sejumlah ketegangan dalam hubungan antara gerakan agraria di satu sisi dengan LSM dan lembaga donor di sisi lain. Pertama, ketegangan banyak dipicu oleh kecenderungan LSM dan lembaga donor yang mendaku mewakili suara petani dan gerakan agraria. Tak sedikit dari mereka yang menghadiri pertemuan internasional, perundingan dengan pemerintah, dan berbagai forum lainnya dengan mengatasnamakan kaum tani miskin. Dalam sejarahnya, LSM dan donor memang kerap menduduki kursi yang tersedia dalam forum internasional, karena belum cukup banyak gerakan agraria yang terorganisir secara memadai untuk bisa hadir secara langsung, selain kursi-kursi yang sebelumnya dialokasikan khusus untuk IFAP (dibahas di Bab 2). Awalnya ini tidak dianggap sebagai masalah. Di Filipina, misalnya, Gerakan petani Filipina (KMP) baru terbentuk pada 1985. Sebelum itu, pemimpin petani terkenal Felicisimo "Ka Memong" Patayan kerap mewakili kaum tani Filipina dalam berbagai forum dunia, tapi membawa nama organisasi LSM. Di Indonesia, sebelum SPI secara resmi berdiri sebagai gerakan nasional, Yayasan Sintesa—sebuah LSM di Medan yang diwakili Henry Saragih—menjadi pihak yang tampil dan duduk di kursi-kursi konferensi internasional. Di Afrika Selatan pada paruh kedua 1990-an, LSM anggota NLC memainkan peran serupa. Meski kehadiran LSM di lembaga-lembaga internasional ini semula tidak dipermasalahkan oleh para aktivis gerakan agraria, begitu gerakan-gerakan ini terkonsolidasi pada 1990-an, mereka akhirnya mendapati bahwa kursi dalam forum-forum internasional yang seharusnya diperuntukkan bagi utusan basis rakyat justru sudah tertutup bagi mereka. Banyak LSM dan lembaga donor yang menyadari perubahan situasi ini dan secara tepat memilih mundur demi memberi tempat bagi gerakan agraria. Namun sayangnya, tidak semua LSM dan lembaga donor bersikap demikian.

Beberapa LSM jelas ingin mempertahankan klaim mereka sebagai perwakilan dalam forum-forum internasional karena alasan politik. Beberapa meyakini bahwa mereka bisa berkontribusi lebih efektif dibandingkan para aktivis dari basis rakyat, dan beberapa lainnya tidak sepakat dengan arah politik gerakan sosial tertentu. Selain itu, mempertahankan kursi perwakilan di forum internasional juga menjadi semacam pembuktian kapasitas keorganisasian, yang pada gilirannya bisa mendatangkan keuntungan, seperti aliran dana atau peluang untuk memperluas pengaruh politik dan kelembagaan. Perseteruan awal yang tajam antara “LSM-gerakan agraria”—yang kelak membentuk LVC—dengan LSM Belanda PFS bisa dipahami, sebagiannya, melalui kacamata ini. PFS berpandangan bahwa semua gerakan agraria sebaiknya bergabung saja dengan IFAP, sebuah federasi yang cenderung konservatif secara politik. Sebagai bagian dari IFAP, mereka akan bekerja untuk merombak—bukan menolak—WTO, serta mengamankan dukungan pendanaan besar dari lembaga-lembaga bantuan pemerintah guna mendanai koperasi dan program-program serupa. Sebaliknya, para aktivis LVC mendorong program yang lebih radikal serta praktik perwakilan yang otonom.

Masalah kedua adalah kecenderungan LSM dan lembaga donor untuk menggunakan akses istimewa mereka atas pendanaan guna memengaruhi haluan ideologi dan bentuk organisasi gerakan agraria. LSM dan lembaga donor tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka mengusung prarasa ideologi, jaringan, dan agenda politik mereka sendiri. Ketika agenda-agenda itu sejalan atau beririsan dengan arah perjuangan gerakan agraria akar-rumput dan GAT, ketegangan politik cenderung minim. Namun, ketika terjadi perbedaan—apalagi pertentangan tajam—gesekan politik bisa sangat serius.

Ketiga, lembaga donor membiayai sebagian besar kampanye internasional GAT. Sebagian besar donor memilih tetap di balik layar, tetapi ada juga yang justru berusaha tampil menonjol demi meningkatkan pamor, misalnya untuk keperluan penggalangan dana. Untuk alasan tertentu,

beberapa lembaga bahkan menjalankan program advokasi sendiri. Hal ini pada dasarnya tidak selalu jadi masalah, terutama bila bingkai besar kampanye, analisis isu, dan tuntutan yang mereka usung sejalan dengan agenda GAT yang menjadi mitra mereka. Namun, masalah mulai muncul ketika bingkai besar kampanye dan tuntutan para donor ini justru bersaing—atau lebih parah lagi, bertentangan—dengan gerakan agraria akar-rumput.

Wacana tentang hubungan “gerakan agraria-LSM” dibangun atas sejumlah asumsi yang populer di kalangan aktivis gerakan sosial. Kami merangkum semua itu di sini secara singkat, dengan risiko terlalu menyederhanakan persoalan.² Pertama, para aktivis acap menegaskan bahwa hanya gerakan agraria—bukan LSM atau lembaga donor—yang sah mewakili kaum miskin pedesaan. Kedua, mereka berpendapat bahwa LSM dan lembaga donor dipimpin oleh profesional kelas menengah, sementara gerakan agraria dipimpin oleh kaum tani miskin. Ketiga, LSM dianggap birokratis dan tidak demokratis, sedangkan gerakan agraria dianggap nonbirokratis dan demokratis. Keempat, LSM punya dana, sedangkan gerakan tidak. Kelima, LSM bercorak paternalistik atau patron-klien, berkebalikan dengan gerakan agraria yang dianggap “horizontal” dan representatif. Keenam, LSM dinilai cenderung konservatif secara politik dan tidak melakukan aksi langsung, sedangkan gerakan agraria dianggap radikal dan mempraktikkan aksi langsung. Tidak semua elemen wacana ini selalu dikemukakan secara bersamaan atau terbuka. Dalam banyak kasus, argumen-argumen tersebut justru muncul secara terpisah dan tersirat.

Banyak gerakan keadilan global, aktivis, dan akademika radikal menerima begitu saja dikotomi antara GAT yang “baik” dan LSM atau lembaga donor yang “buruk”. Wacana anti-LSM bertebaran dalam kepustakaan akademik. James Petras dan Henry Veltmeyer (2001), misalnya, menyamaratakan semua LSM dan menyebut mereka sebagai “kelas komprador baru”. Lesley Gill (2000: 169) mengejek ketertarikan LSM pada “kelompok-kelompok eksotis yang sedang tren, seperti organisasi pe-

rempuan dan masyarakat adat.” Namun, kenyataannya jauh lebih rumit ketimbang yang digambarkan dalam oposisi biner yang terlalu menyederhanakan tersebut.

Masalah keterwakilan sangat bergantung pada konteks. Ketika ada gerakan agraria yang mampu mewakili basis rakyat, maka LSM dan lembaga donor memang harus menjelaskan banyak hal tentang diri mereka jika berkeras ingin berbicara atas nama kaum tani miskin. Tapi di tempat-tempat yang tidak ada gerakan agraria, LSM bisa berperan secara produktif, meski sifatnya sementara dan situasional.

Meskipun sebagian besar LSM dikelola oleh intelektual kelas menengah, ada juga LSM yang para stafnya merupakan anak-anak petani. Biasanya mereka bekerja sebagai staf lapangan yang terlibat langsung dengan masyarakat miskin pedesaan, membantu merumuskan isu dan menyusun tuntutan dalam proses membangun gerakan agraria. Latar belakang kelas mereka bisa dibilang memberi legitimasi atas klaim keterwakilan yang mereka buat, sekaligus menjadikan mereka pengorganisir yang berhasil. Sebaliknya, ada pula gerakan agraria—bahkan yang berasal dari GAT radikal—yang dipimpin oleh profesional kelas menengah. Salah satu contohnya Serikat Petani Karnataka (KRRS), anggota LVC di India (lihat Bab 2; Assadi 1994), meski contoh lain serupa juga banyak ditemukan di berbagai belahan dunia.

Tidak semua LSM bercorak birokratis dan tidak demokratis, dan tidak semua gerakan agraria bebas dari watak birokratis dan demokratis. Demikian juga, tidak semua LSM bergelimang dana, dan tidak semua gerakan agraria miskin. Seperti disebutkan sebelumnya, kelebihan dana justru kadang menjadi penyebab runtuhnya gerakan agraria, yang padahal sebenarnya bisa memberi harapan.

Selain itu, ada LSM yang tidak bersikap paternalistik, sementara beberapa gerakan agraria—terutama di tingkat kepemimpinan nasional yang elitis—justru menunjukkan kecenderungan itu. Ada juga LSM yang terlibat dalam aksi langsung radikal, sementara banyak gerakan agraria yang justru tidak melakukan hal serupa.

Pendek kata, perbedaan antara LSM dan gerakan agraria sebagian besar bersifat ideologis dan politis, bukan semata-mata soal bentuk organisasi. Karena itu, perbedaan-perbedaan itu sebaiknya tidak direduksi secara kasar menjadi pertentangan antara satu model organisasi dengan yang lain.

PERUBAHAN KOMPLEKS RAGAM DONOR GLOBAL & IMPLIKASINYA

Meningkatnya dukungan lembaga donor di Utara Global terhadap LSM yang berorientasi keadilan sosial dan GAT bukan semata-mata didorong oleh altruisme atau kepedulian murni. Kemitraan dengan LSM, gerakan agraria lokal-nasional, dan GAT justru memperkuat basis pendanaan lembaga donor itu sendiri. Lembaga donor dan gerakan agraria punya kepentingan bersama dalam menguatkan satu sama lain. Bagi lembaga donor, keberhasilan mitra gerakan menunjukkan keberhasilan mereka sendiri dan menjadi pembenar untuk menggalang pendanaan lanjutan. Bagi gerakan, donor menyediakan tidak hanya sumberdaya material, tetapi juga akses atas informasi, keahlian, serta legitimasi yang besar. Kedua belah pihak terjalin lebih erat daripada yang mereka sadari, atau daripada yang mereka akui. Mereka tumbuh dan menguat secara bersamaan. Namun, jika salah satu pihak melemah, dampaknya bisa melemahkan pihak lain juga—meski hal ini tidak selalu niscaya.

Persoalan agraria serta isu-isu lain yang berkaitan telah mengalir dana secara masif dan cepat ke lembaga-lembaga donor. Produksi pangan, perdagangan hasil pertanian, kelaparan dan malnutrisi di pedesaan, krisis lingkungan dan perubahan iklim, kemiskinan pedesaan, dan kehutanan menjadi sasaran utama program-program bantuan resmi serta prakarsa lembaga donor. Masalah-masalah inilah yang mengilhami munculnya gerakan agraria dan GAT, yang kemudian menarik perhatian para donor. Melemahnya serikat buruh militan tampaknya menggeser dana ke peruntukan yang berkaitan dengan berbagai prakarsa dan isu agraria. Singkatnya, gabungan persoalan agraria serta isu-isu terkait

yang makin mendesak dengan kemunculan gerakan agraria serta LSM yang dinamis di bidang ini telah memperbesar aliran dana dari donor nonpemerintah, yang sebagian besar berasal dari Utara Global.

Banyak lembaga donor bermula dari organisasi-organisasi kecil berbasis gereja. Karena menggalang dana dari jaringan gereja dan/atau komunitas, lembaga-lembaga ini boleh dibilang mandiri dalam menentukan isu-isu yang akan diangkat serta organisasi mitra—baik LSM maupun gerakan sosial—yang akan didukung. Namun, ketika tuntutan dari bawah menguat seiring bangkitnya LSM dan gerakan agraria, dana dari lembaga gereja ini cepat sekali menjadi tidak mencukupi. Pada dasawarsa 1980-an, saat neoliberalisme global makin menyergap, pemangkasan anggaran yang terjadi di banyak negara juga berdampak pada kompleks bantuan resmi. Privatisasi sektor bantuan membuat banyak dana bantuan dialihkan ke LSM, yang berarti menguatnya “LSMisasi” di sektor ini. Bantuan yang sebelumnya disalurkan secara bilateral antarnegara kini makin banyak mengalir melalui LSM-LSM Utara (misalnya, lembaga donor), yang mengantongi dana bantuan dalam jumlah besar untuk kemudian memecernya ke LSM-LSM perantara dan gerakan sosial di Selatan. Maksud tersuratnya adalah menggantikan peran negara yang dinilai tak efisien dan/atau korup (Edwards dan Hulme 1995). Lembaga donor kecil berbasis gereja pun menyaksikan skema penggalangan dana tradisional mereka tergantikan oleh aliran dana negara (publik) yang luar biasa besar. Dalam waktu singkat, daftar organisasi “mitra” dan “rekanan” mereka di Selatan Global ikut memanjang seiring melonjaknya dana kerjasama yang mereka kelola.

Negara-negara Eropa Utara merupakan pusat kompleks ragam donor global, dengan rasio bantuan pembangunan luar negeri (*overseas development assistance* [ODA]) terhadap pendapatan nasional bruto (PNB) tertinggi di dunia. Belanda, misalnya, dengan penduduk kurang dari 17 juta jiwa, menyalurkan dana bantuan pembangunan sebesar US\$5,6 miliar pada 2013, menempatkannya di urutan kedelapan di antara negara donor terbesar, yang semuanya (kecuali Norwegia) memiliki popu-

lasi jauh lebih besar. Menariknya, pada 2013, Belanda mengalami penurunan rasio ODA terhadap PNB untuk pertama kalinya, sejak 1947, di bawah 0,7 persen—ambang target yang sejak lama direkomendasikan PBB (OECD 2014). Tilikan lebih dekat atas kasus Belanda dapat memberi gambaran tentang berbagai peluang sekaligus kerentanan yang melekat dalam model kemitraan antara donor dan organisasi mitra, baik gerakan sosial maupun LSM di negara berkembang.

Dalam jaringan donor global, Program Pendanaan Bersama Belanda (*Dutch Co-Financing Program*) merupakan salah satu yang terbesar. Mekanisme formal pendanaan bersama dengan LSM sudah dijalankan sejak 1965, tetapi baru mulai berkembang pesat pada akhir 1970-an. Alokasi dana negara untuk ICCO, misalnya, meningkat enam kali lipat antara 1973 dan 1990 (Derksen dan Verhallen 2008: 224–225). Menjelang medio 1990-an, LSM dan lembaga donor nonpemerintah yang “tidak bergantung pada bantuan resmi untuk sebagian besar anggaran mereka” sekarang ini justru menjadi kasus langka (Edwards dan Hulme 1995: 5, penekanan sesuai sumber).

Sejak dasawarsa 1980-an, sebagian besar dana bantuan Belanda dikendalikan oleh segelintir lembaga donor yang dikenal luas sebagai “The Big Four” (Empat Besar): Novib (kemudian menjadi Oxfam-Novib), konsorsium Gereja Katolik yang sekarang dikenal sebagai Cordaid (sebelumnya Cebemo), Hivos, dan ICCO dari kalangan Protestan (de Groot 1998). Penting menyoroti Empat Besar ini, bukan hanya karena skala kerja mereka yang luas, tetapi juga karena mereka menyalurkan bantuan dalam jumlah besar kepada LSM-LSM radikal, gerakan-gerakan agraria lokal dan nasional, serta GAT. Pada 2007, proporsi pendanaan dan mekanisme alokasinya diubah, sehingga memungkinkan masuknya LSM-LSM Belanda skala kecil dan menengah dengan berbagai bidang kerja dan haluan politik yang lebih beragam.

Sistem baru yang diperkenalkan pada 2007 dinamakan MFS-1 (Skema Pendanaan Bersama), dengan siklus pendanaan tiga tahunan. Selama siklus pertama (2007–2010), Empat Besar memperoleh total dana men-

dekati €1,7 miliar—atau sekitar €577 juta per tahun (setara 80 persen dari total skema pendanaan bersama). Selama siklus kedua, yang berlangsung empat tahun (2011–2015), mereka menerima €1,5 miliar—atau sekitar €378 juta per tahun (71 persen dari subsidi yang diberikan). Total dana kerjasama pembangunan luar negeri Belanda—sebesar US\$5,6 miliar pada 2013 (OECD 2014)—sebenarnya jauh lebih besar daripada angka-angka tersebut, karena tidak semua bantuan disalurkan melalui Skema Pendanaan Bersama, dan lebih dari lima puluh lembaga donor skala kecil dan menengah juga menerima dana dari pemerintah (Minbuza 2009). Kementerian Luar Negeri Belanda dan berbagai kedutaan besar Belanda di seluruh dunia juga menyalurkan dana langsung kepada mitra mereka di negara-negara berkembang. Pendek kata, sejak 2007, sekitar setengah miliar dolar dana Belanda setiap tahun mengalir ke lembaga donor atau LSM yang bekerjasama dengan GAT berhaluan keadilan sosial. Ini bukan berarti bahwa GAT adalah satu-satunya mitra lembaga-lembaga donor tersebut, atau bahwa seluruh dana itu diberikan dalam bentuk hibah—sebagian besar juga digunakan untuk biaya administrasi—tapi angka itu menunjukkan skala sumberdaya yang berhasil diakses GAT. Jelas bahwa Skema Pendanaan Bersama Belanda jauh lebih besar dan kompleks ketimbang penggalangan dana sukarela skala kecil dari pintu ke pintu di perkotaan, seperti kampanye Prapaskah Katolik atau penggalangan dana akhir tahun oleh Food First yang menghadiahi penyumbang US\$100 dengan sebuah buku karya Eric Holt-Giménez.

Krisis keuangan pada 2008 serta menguatnya partai-partai konservatif di banyak negara donor memperkuat tekanan terhadap anggaran dana bantuan. Politisi yang skeptis menuntut penghematan anggaran dan meminta bukti bahwa uang dari pembayar pajak benar-benar berdampak positif. Di Belanda, siklus kedua Pendanaan Bersama (2011–2015) menandai transisi menuju sistem baru pendanaan kerjasama. Total alokasi dana per tahun turun sedikit, begitu juga porsi dana yang diterima oleh Empat Besar. Kelompok-kelompok yang lebih kecil, seperti Transnational Institute dan Friends of the Earth, harus mengajukan permo-

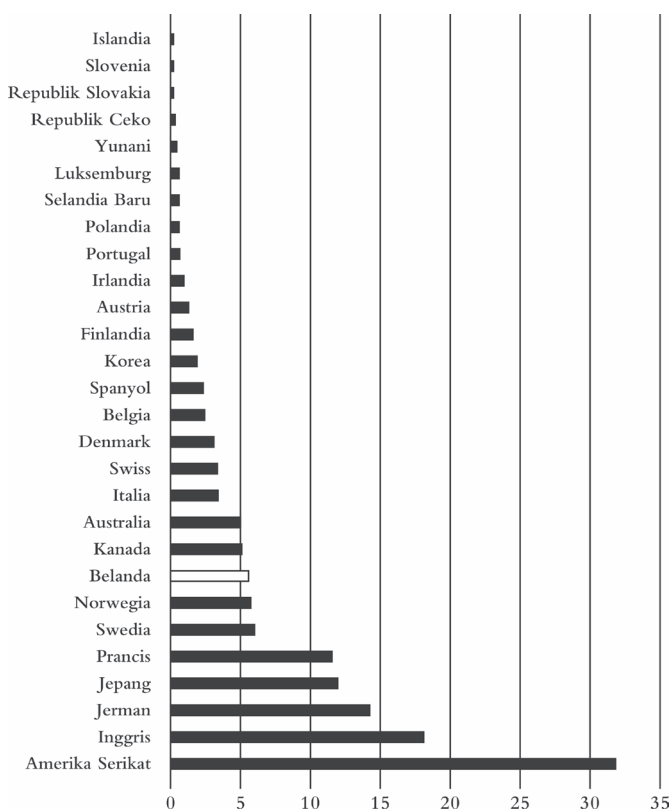
honor pendanaan berdasarkan klaster atau secara bersama-sama supaya bisa mengakses dana. Rancangan sistem pasca-2015 belum sepenuhnya jelas, tapi besar kemungkinan dana yang tersedia akan lebih sedikit dan disalurkan melalui mekanisme yang lebih berhaluan pasar, seperti tender berdasarkan proyek atau subkontrak, alih-alih pendanaan lembaga secara menyeluruh. Haluan baru yang tampaknya akan menjadi pedoman dalam pemilihan mitra dan penyaluran dana ialah "bisnis dan hak asasi manusia", satu versi dari pendekatan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Banyak LSM Belanda mulai menyesuaikan diri dengan haluan baru tersebut, yang menekankan proyek-proyek konkret dengan hasil yang terukur serta mudah dimengerti oleh para pembayar pajak Belanda (Derksen dan Verhallen 2008).

Belanda memang tercatat sebagai penyedia ODA terbesar kedelapan di dunia, dan menempati posisi keenam kalau dilihat dari persentase ODA-nya terhadap PNB-nya (lihat Gambar 5.1 dan 5.2). Namun, bagi analisis kami, arti penting Belanda jauh melampaui statistik tersebut. Lembaga-lembaga donor Belanda dan Jerman sudah lama menjadi pendukung utama gerakan-gerakan agraria radikal. Lebih dari itu, model pendanaan bersama yang diprakarsai Belanda pada 1960-an kemudian diadopsi, dengan sejumlah modifikasi, oleh banyak negara Eropa lainnya serta Kanada. Akhirnya, tekanan penghematan anggaran yang melanda sistem bantuan Belanda pun sama-sama dirasakan—bahkan mungkin lebih tajam—di negara-negara donor lainnya itu.

Mengapa pemerintah negara-negara Eropa Utara begitu dermawan dalam mendukung—meski secara tidak langsung—gerakan-gerakan radikal di Selatan Global? Buku ini tidak dimaksudkan untuk mengupas tuntas pertanyaan penting ini, tapi beberapa hipotesis pokok dapat disampaikan di sini. Merebaknya organisasi-organisasi masyarakat sipil di seluruh belahan dunia pada 1980-an dan 1990-an bertepatan dengan dua peristiwa besar: pertama, proses demokratisasi di sebagian besar kawasan Amerika Latin (dan beberapa kawasan lain), dan kedua, berakhirnya Perang Dingin. Amerika Serikat memang menjadi penyumbang

terbesar ODA, tetapi cenderung digunakan untuk mendukung mitra di negara-negara berkembang yang konservatif dan probisnis serta untuk mendesak pemilu bebas, reformasi hukum, privatisasi sektor publik, dan liberalisasi ekonomi. Di kawasan-kawasan seperti Amerika Tengah dan di Filipina pada 1980-an, pemerintah federal Amerika Serikat memandang gerakan-gerakan revolusioner semata-mata berakar pada “sub-

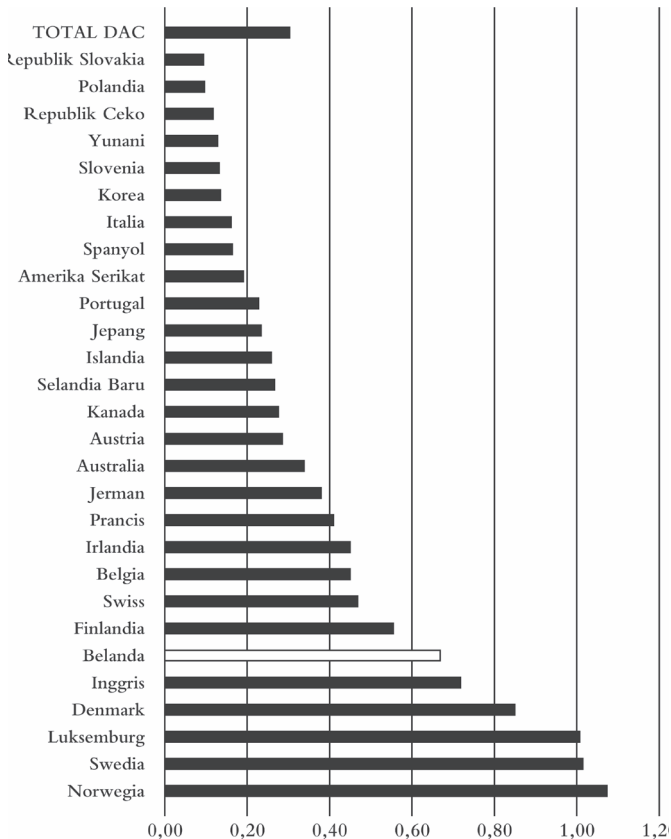
GAMBAR 5.1
ODA dalam Miliar US\$, 2013



Sumber: OECD (2014).

versi” komunis. Sebaliknya, para pembuat kebijakan di Eropa—terutama dari kalangan sosial demokrat di Spanyol, Skandinavia, Belanda, dan Jerman—melihat ketimpangan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan rezim otoriter sebagai penyebab utama keresahan sosial. Maka, di penghujung Perang Dingin, lahirlah dua proyek masyarakat sipil yang saling bersaing:

GAMBAR 5.2
ODA sebagai Persentase PNB, 2013



Sumber: OECD (2014).

satu dari Amerika Serikat yang intinya membekingi prakarsa-prakarsa sektor swasta, dan satu dari Eropa (serta Kanada) yang menekankan demokratisasi, pembangunan, dan stabilitas sosial melalui pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara menyerajah (Macdonald 1997). Pada tahun-tahun berikutnya, seiring bergesernya negara-negara Eropa dan Kanada ke arah politik kanan, pemahaman mereka tentang dana bantuan luar negeri pun kian sama, meski belum secara keseluruhan, dengan visi Amerika Serikat yang berorientasi pasar.

Dalam beberapa tahun mendatang, aliran dana dari lembaga donor nonpemerintah di Utara Global kemungkinan besar akan terus berlanjut, karena penyediaan bantuan pembangunan tetap memberi keuntungan politik bagi pemerintah negara-negara tersebut. Namun, besaran dan pola penyalurannya sudah berubah drastis. Ke depan, kemungkinan besar jumlah bantuan akan berkurang besar dan disalurkan dengan cara yang lebih kaku secara politik; makin sedikit hibah kelembagaan untuk mendukung operasional umum, dan kian banyak kontrak untuk program spesifik; makin kecil dana untuk gerakan perlawanan yang berhaluan politik, dan kian besar alokasi untuk prakarsa-prakarsa kemitraan publik-swasta.³

Tantangan tambahan lainnya adalah menajamnya permusuhan banyak pemerintah terhadap lembaga donor luar negeri dan mitra lokal mereka. Peraturan perundang-undangan yang membatasi akses organisasi masyarakat sipil terhadap dana dari luar kini makin umum berlaku. Daftar negara yang membatasi bantuan semacam ini cukup panjang dan beragam secara politik, di antaranya Rusia, India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Venezuela, Bolivia, Peru, Ekuador, Nikaragua, Honduras, Hungaria, Ethiopia, Zimbabwe, Kenya, Zambia, Uzbekistan, Yordania, Mesir, dan Aljazair (Carothers dan Brechenmacher 2014). Meski beberapa di antara negara tersebut memiliki gerakan petani yang kuat dan berafiliasi dengan GAT, banyak di antaranya tidak demikian; setidaknya, sebagian dari penyebaran GAT yang secara geografis tidak merata—sebagaimana dibahas di Bab 4—kemung-

kinan besar berkaitan dengan upaya sejumlah pemerintah untuk membatasi atau mempersulit pendanaan luar negeri bagi masyarakat sipil.

Dua dekade lalu, dalam konteks hubungan bantuan pembangunan dengan politik LSM seperti yang dianalisis di sini, Ian Smillie (1995: 160) menulis: "Ketika CIDA [Badan Pembangunan Internasional Kanada] bersin ... LSM-LSM Kanada langsung mendapat vitamin C." Dua puluh tahun kemudian, CIDA bukan sekadar bersin, tetapi mengalami serangan restrukturisasi akut, dengan gejala berupa pemotongan dana secara drastis, orientasi yang makin konservatif secara politik dan kurang fleksibel, serta makin tunduk pada kepentingan perdagangan dan urusan luar negeri pemerintah Kanada. Bagaimana hal ini berdampak pada LSM dan lembaga donor nonpemerintah di Kanada? Dampaknya dirasakan oleh berbagai lembaga, dari organisasi besar seperti Organisasi Katolik Kanada untuk Pembangunan dan Perdamaian (Canadian Catholic Organization for Development [CCODP]) hingga kelompok-kelompok radikal yang lebih kecil seperti Inter Pares, sebagian besar dari mereka bermitra dengan gerakan agraria radikal di berbagai penjuru dunia. Pertanyaannya kini, bagaimana efek domino dari pemotongan anggaran negara ini akan membentuk masa depan GAT?

Gerakan-gerakan tani dan GAT tidak serta-merta akan runtuh hanya karena kompleks ragam donor mengalami perombakan. Namun, surutnya aliran dana bantuan sangat mungkin akan melemahkan sejumlah gerakan tani di tingkat nasional, yang pada gilirannya akan berdampak pada GAT yang mereka ikuti. Dalam beberapa tahun terakhir, LVC telah kehilangan setidaknya tiga penyokong dana terbesar mereka.⁴ Mencari pendonor baru dan dukungan dana kelembagaan yang jumlahnya signifikan bukan perkara mudah. GAT besar lainnya, seperti IPC, bahkan belum pernah berhasil mendapatkan pendanaan kelembagaan secara ajeg. Bahkan IFAP yang secara politik lebih konservatif—sebagaimana dibahas di Bab 3—akhirnya ambruk akibat ditariknya dukungan secara mendadak oleh salah satu pendonor utama mereka. Meski demikian, dampak-dampak negatif ini bukan berarti tidak dapat diatasi. Ketika

gerakan-gerakan tani nasional dan GAT berpisah jalan dengan sekutu tradisional mereka (yakni partai politik), mereka justru ikut melahirkan alternatif baru berupa kemitraan dengan LSM dan kompleks ragam donor. Krisis pendanaan yang kini dirasakan bisa saja mengarah pada terciptanya alternatif-alternatif baru, aliansi baru, dan model pendanaan yang lebih kreatif, meski semua itu tentu akan datang bersama tantangan-tantangan besar dan berkelanjutan.

SIMPULAN: KETEGANGAN & SINERGI YANG MELAMPAUI BENTUK KEORGANISASIAN

GAT, LSM, dan lembaga donor tumbuh bersama dalam konteks sosial-budaya dan ekonomi-politik global yang sama. Mundurnya peran negara-bangsa, meski secara parsial, di tengah gempuran globalisasi neo-liberal membuka jalan bagi kebangkitan LSM dan kompleks ragam donor. Aliansi antara partai politik dan gerakan petani yang dominan sebelum 1980-an secara bertahap memudar di banyak wilayah dunia. Beberapa fungsi logistik dan politik yang sebelumnya diemban partai politik dalam kaitannya dengan gerakan agraria mulai diambil alih oleh LSM dan lembaga donor, dan hal ini turut mendorong kebangkitan GAT.

Kajian agraria klasik yang berfokus pada agensi kelas pekerja kerap mencatat bahwa kaum tani tidak khawatir untuk beraliansi dengan pihak luar (Thorner 1986). Justru karena kerap hidup dalam lingkungan yang terisolasi, mereka nyaris selalu membutuhkan sekutu dari luar untuk mengurangi risiko dalam aksi kolektif serta memperluas jangkauan politik mereka. Yang dikhawatirkan oleh kaum tani bukanlah aliansinya, melainkan berbagai ketentuan/persyaratan dalam aliansi. Sejarah aliansi petani dengan pihak luar, terutama partai politik, adalah sejarah negosiasi ulang dan perebutan makna yang tak pernah selesai. Hubungan kaum tani dengan LSM dan lembaga donor menunjukkan pola serupa. GAT radikal, terutama LVC dan IPC, menentang IFAP dan klaimnya sebagai satu-satunya pihak yang mewakili kaum tani. Dengan cara yang mirip, LVC dan IPC secara konsisten menegaskan otonomi

mereka dari para mitra dan pemberi dana, terutama terkait persoalan keterwakilan, sebagaimana dirangkum dengan apik dalam slogan mereka: "Bukan tentang kami kalau tanpa kami." Pertanyaan kuncinya sekarang ialah bagaimana GAT dapat menghadapi perubahan besar dalam kompleks ragam bantuan, dan bagaimana lembaga-lembaga donor akan merespons kehendak gerakan-gerakan agraria akan kemandirian dan desakan untuk mewakili diri sendiri.

CATATAN

- 1 Untuk menjaga agar organisasinya tetap berjalan secara minimal, LVC, misalnya, mesti melaksanakan kegiatan-kegiatan berbiaya tinggi: menggelar pertemuan global empat tahunan; mengadakan dua kali pertemuan tahunan ICC yang biasanya melibatkan sedikitnya dua puluh orang dari berbagai kawasan dunia; menyelenggarakan pertemuan rutin komisi-komisi tematik; serta melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia untuk menghadiri pertemuan, konferensi, dan kampanye advokasi tingkat global.
- 2 Bagian ini diambil sebagian dari Borras (2008).
- 3 Pentingnya dukungan pendanaan jangka panjang untuk biaya operasional dapat dilihat dari dampak filantropi konservatif di Amerika Serikat sejak 1980-an. Di sana, yayasan-yayasan konservatif memberi sokongan besar secara berkelanjutan kepada lembaga-lembaga wadah-pemikir (*think tank*) sayap kanan yang sangat berpengaruh. Sebaliknya, para lembaga donor progresif lebih memilih memberi dukungan berbasis program yang lebih sederhana bagi mitra mereka, sehingga mitra-mitra mereka tidak pernah mencapai tingkat pengaruh atau ketahanan ekonomi yang sebanding (Covington 2005).
- 4 Ini termasuk dua donor Belanda, Oxfam-Novib dan ICCO.

BAB 6

Gerakan Agraria Transnasional & Lembaga Antarpemerintah

Salah satu tema pokok dalam kajian agraria kritis adalah hubungan antara negara dan petani. Sejak lama, pedesaan dan kehidupan masyarakat tani (kepetanian) menjadi objek utama agenda pembangunan negara. Gerakan-gerakan tani pada gilirannya juga berupaya memengaruhi, mengubah, atau bahkan merebut kekuasaan negara. Berbagai karya klasik telah mengulas dinamika negara-petani ini, mulai dari pendekatan kelembagaan-historis seperti *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Asal-usul Sosial Kediktatoran dan Demokrasi) karya Barrington Moore Jr. (1966), hingga kajian-kajian lebih baru tentang Meksiko oleh Merilee Grindle (1986) dan Jonathan Fox (1993). Bahkan kajian tentang politik “sehari-hari” petani—seperti yang dilakukan James Scott (1976, 1985, 1990, 1998, 2009), Benedict Kerkvliet (2005), serta Kevin O’Brien dan Lianjiang Li (2006)—pada dasarnya juga berpusat pada hubungan antara negara dan petani. Isu ini juga menempati posisi penting dalam berbagai analisis mengenai konflik agraria masa kini: dari pemberontakan Zapatista di Chiapas pada 1995 (Harvey 1998) hingga reforma pertanahan jalur cepat pasca-2000 yang kontroversial di Zimbabwe (Cliffe *et al.* 2011), pembaruan pedesaan di Tiongkok (Yeh, O’Brien, dan Ye 2013), serta tarik-ulur antara Gerakan Pekerja Tunakisma (MST) dan pemerintah di Brasil (Wolford 2010).

Namun, di tengah menguatnya globalisasi neoliberal dan bangkitnya gerakan agraria transnasional, kita perlu memperluas cakupan analisis. Hubungan negara dengan pedesaan memang tetap penting, tetapi kini mesti dipahami dalam kaitannya dengan interaksi antara GAT dan lembaga-lembaga antarpemerintah. Sebaliknya, analisis tentang dinamika poli-

tik lembaga antarpemerintah juga perlu mempertimbangkan kepustakaan yang membahas gerakan agraria dan hubungan negara-petani. Tiga konsep penting yang akan membantu menjembatani kedua ranah ini adalah otonomi, kooptasi, dan akuntabilitas.

NEOLIBERALISME, NEGARA-BANGSA, & BANGKITNYA MASYARAKAT SIPIL

Selama tiga dasawarsa terakhir, negara-negara di Selatan—dan juga Utara—menghadapi berbagai tekanan. Globalisasi neoliberal cenderung merongrong kemampuan negara untuk mengatur sektor-sektor penting di tingkat nasional, sembari memperkuat peran lembaga-lembaga pengaturan internasional. Dalam situasi ini, banyak negara-bangsa terdorong melimpahkan sebagian kekuasaan politik, fiskal, dan administratif ke pemerintah daerah, seturut anjuran lembaga keuangan internasional yang mengampanyekan desentralisasi atas nama akuntabilitas, “pemberdayaan masyarakat”, serta pelayanan publik yang lebih murah dan efisien (World Bank 2003). Privatisasi berbagai fungsi sektor publik pun mengoyak jaring pengaman sosial, melemahkan legitimasi negara, dan memangkas kemampuan negara dalam mempergunakan strategi korporatis dan patronase guna memelihara dukungan rakyat (Fox 2001). Sementara itu, menjamurnya “surga keuangan/pajak” dan makin mudahnya aliran uang ke luar negeri juga menggerogoti fondasi fiskal negara, memaksa banyak pemerintah untuk menerima dengan berat hati berbagai tuntutan dari kuasa kepentingan sektor keuangan global (Henry 2012). Kendati demikian, pemerintah pusat tetap memegang peranan penting—meski dalam bentuk yang banyak berubah—baik dalam politik maupun ekonomi (Keohane dan Nye 2000: 12). Ketika negara secara bertahap menarik diri dari tanggung jawab tradisionalnya atas kelas pekerja agraria, dan gelombang privatisasi menyapu akses kaum miskin atas sumberdaya alam, kredit, layanan sosial, dan kebutuhan-kebutuhan dasar, maka makin banyak orang yang terpaksa berhadapan

langsung dengan kerasnya mekanisme pasar tanpa perlindungan yang memadai.

Perubahan medan global-lokal ini menghadirkan ancaman sekaligus peluang bagi penduduk pedesaan seantero dunia. Di satu sisi, desentralisasi negara mendorong gerakan-gerakan agraria untuk makin berakar secara lokal—sebagai respons terhadap desentralisasi negara serta “*elite capture*” (jeratan elite) yang kerap menyertainya. Di sisi lain, mereka juga terdorong untuk menginternasionalisasi advokasi kebijakan dan mobilisasi seiring meningkatnya pengaturan di tingkat global. Salah satu dampak dari penyetakan kompleks ini adalah munculnya gerakan-gerakan sosial agraria yang lebih horizontal dan “polisentris”, yang terus berupaya membangun struktur koordinasi guna menciptakan “integrasi vertikal”, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dinamika antara globalisasi versus desentralisasi yang tampak kontradiktif ini berpengaruh besar terhadap negara, yang akhirnya juga mengubah cara gerakan agraria berpolitik dan berorganisasi. Dari persimpangan inilah GAT kontemporer muncul dan berjuang untuk menggumuli bentuk-bentuk baru pengaturan supranasional.

Badan-badan pembangunan internasional dengan cepat menangkap kemunculan GAT sebagai peluang baru untuk membangun “kemitraan demi pembangunan”. Model pembangunan yang cukup baru ini menekankan hubungan kolaboratif antara lembaga pengaturan internasional dengan korporasi dan/atau masyarakat sipil (keduanya kini dikelompokkan dalam satu kategori baru nirkelas bernama “pemangku kepentingan”). Model “kemitraan” ini mulai melesat setelah KTT PBB tentang Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro pada 1992 (Bruno dan Karliner 2002). Dua tahun kemudian, laporan sebuah panel yang dipimpin mantan Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso mendorong perubahan dalam hal tata cara pengakuan organisasi masyarakat sipil di lingkungan PBB, sehingga membuka ruang lebih luas bagi kelompok-kelompok akar-rumput untuk terlibat (McKeon 2009; Willets 2006). Streets dan

Thomsen (2009: 8) merangkum dengan baik sejauh mana bentuk-bentuk kemitraan ini telah berkembang pesat (yang mencakup berbagai bentuk kerjasama, mulai dari penelitian bersama hingga proyek-proyek konkret):

Meski tidak ada data tingkat global tentang jumlah kemitraan yang ada sekarang, sejumlah bukti menunjukkan peningkatan, seperti laporan-laporan dari lembaga, bertambahnya entri dalam pangkalan data Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD)—dari 319 entri pada 2006 menjadi 344 pada 2009—serta makin banyaknya program kemitraan bilateral [FAO] sendiri mencatat lebih dari 830 bentuk kerjasama. ... Ada pula kecenderungan meningkatnya prakarsa ragam-pemangku-kepentingan (*multi-stakeholder*) secara global. Sekitar 400 kemitraan global teridentifikasi pada 2005 ... dibandingkan hanya 50 pada dasawarsa 1980-an. Bank Dunia saat ini terlibat dalam 125 Program Kemitraan Global dan 50 Program Kemitraan Regional ... UNDP terlibat dalam lebih dari 40 kemitraan ... sementara IFAD tercatat dalam ... 30 program.

Bagi lembaga internasional, membangun aliansi dengan kelompok masyarakat sipil bukanlah hal baru. Yang baru ialah menjalin hubungan dengan kelompok *transnasional*. Seperti dijelaskan Sauvinet-Bedouin, Nicholson, dan Tarazona (2005: 11): “Fenomena baru yang memengaruhi hubungan FAO dengan LSM dan OMS ialah mengkristalnya LSM/OMS menjadi gerakan dan jaringan gerakan sosial transnasional, wadah pemikir, dan jaringan kebijakan global.” Bagi FAO, menjalin kemitraan dengan GAT merupakan bagian dari mandatnya dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya tujuan ke-8: “membangun kemitraan global untuk pembangunan.” Namun, FAO juga berhati-hati; mereka mencatat bahwa gerakan-gerakan “ini adalah [kelompok] yang sedang berkembang dan mencakup berbagai organisasi yang merentang luas, mewakili beragam kelompok dan pandang-

an dalam masyarakat.” Karena itu, FAO menyerukan pentingnya memperhatikan “kemampuan nyata dari setiap OMS/LSM untuk benar-benar mewakili konstituen tertentu,” dan menekankan bahwa “ketika menjalin kemitraan dengan OMS/LSM, FAO perlu bersikap lebih terbuka dan inklusif. Semua ini makin penting mengingat FAO sangat dihargai oleh kelompok ini dalam perannya sebagai penengah yang jujur” (FAO 2006: 2–3).

Seiring meningkatnya peran lembaga-lembaga antarpemerintah dalam membimbing, mendanai, dan menjalankan berbagai kebijakan—termasuk perdagangan—yang berdampak pada sektor pertanian, lembaga-lembaga ini pun menjadi sasaran kampanye GAT. Sebagian aksi mereka bersifat konfrontatif “dari luar”, seperti upaya LVC dan gerakan-gerakan lain dalam menggagalkan pertemuan WTO. Namun, kampanye-kampanye lain memperlihatkan bahwa makin banyak gerakan militan mencari “jalan masuk” ke lembaga-lembaga antarpemerintah agar dapat memberi pengaruh “dari dalam” (organisasi-organisasi elite dan arus utama seperti IFAP, dan belakangan WFO, memang selalu berada “di dalam”). FAO—yang oleh banyak gerakan agraria dipandang tidak hanya sebagai “penengah yang jujur” tapi juga sebagai lembaga yang lebih lentur dan terbuka terhadap tekanan dibandingkan WTO—jelas menyadari adanya perbedaan penting antar-GAT, sebagaimana dibahas di bab-bab sebelumnya. Meski begitu, FAO tetap enggan untuk menyebut secara gamblang perbedaan-perbedaan tersebut, atau untuk menjelaskan mengapa hal itu penting.

Kampanye global LVC tentang isu-isu agraria utama telah turut membuka ruang baru yang khas bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan internasional. Di dalam dan melalui ruang ini, LVC mengolah dan merangkum beragam posisi serta perspektif dari organisasi-organisasi anggotanya, berinteraksi dengan para aktor di luar negara yang bekerja pada isu-isu agraria dan perdagangan global, serta menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga antarpemerintah. Ruang ini dapat dipahami sebagai hal “baru”, mengingat sebelumnya satu-

satunya kelompok yang hadir secara kelembagaan adalah LSM serta organisasi petani menengah dan kaya, yang sering mendaku bahwa mereka bertindak dan berbicara atas nama kaum tani miskin dan petani kecil. Ruang ini juga “khas” karena dibentuk, diisi, dan digunakan oleh—dan untuk—kaum tani miskin dan petani kecil.

Transformasi negara-bangsa dalam konteks globalisasi neoliberal telah membentuk ulang hubungan negara dengan masyarakat sipil dalam dua cara lain yang saling berkaitan. Jonathan Fox menggunakan metafora “balon yang ditekan” untuk menjelaskan salah satu persoalan pelik:

Dalam konteks kekuasaan yang terbagi antara pemerintah federal (pusat), negara bagian, dan lokal, serta para aktor internasional, organisasi masyarakat sipil menghadapi persoalan seperti balon—ketika ditekan di satu bagiannya, balon itu menggelembung di bagian lain. Artinya, ketika prakarsa advokasi berfokus pada tingkat atau cabang tertentu pemerintahan, maka akan mudah bagi satu pihak terkait untuk melempar tanggung jawab ke pihak lain. Ketika seseorang mengkritik lembaga pemerintah negara bagian, mereka dengan mudah menyalahkan pemerintah federal (pusat) di atasnya, atau pemerintah kota di bawahnya. Dilema bagi organisasi masyarakat sipil ini diperumit oleh minimnya transparansi di *semua* tingkat pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan “publik”. (Fox 2001: 2, cetak miring sesuai sumber)

Persoalan “balon yang ditekan” tidak hanya merupakan akibat, tetapi juga penyebab kepelikan kedua, yakni perlunya memberi tekanan secara serentak dan terus-menerus pada berbagai tingkat pemerintahan yang sangat beragam—satu konsekuensi dari dinamika internasionalisasi-desentralisasi yang diuraikan sebelumnya. Sebagian besar kekuatan organisasi masyarakat sipil global—baik yang bergerak di isu agraria maupun selain agraria—bersumber dari apa yang disebut Keck dan Sikkink dalam buku utama mereka *Activists Beyond Borders* (Aktivis Lin-

tas Batas) (1998: 12–13) sebagai “pola bumerang” (yang oleh penulis lain juga disebut sebagai “pergeseran arena” [van Rooy 2004: 20] atau “lompatan katak” [O’Brien *et al.* 2000: 61]). Artinya, gerakan-gerakan yang tidak bisa mencapai tujuan pada satu tingkat politik domestik harus mencoba memberi tekanan pada tingkatan lain dan mungkin mencari sekutu internasional untuk menekan pemerintah dalam negeri supaya mematuhi norma-norma internasional. Untuk terlibat dalam perjuangan pada berbagai tingkatan ini biasanya dibutuhkan sumberdaya materiel dan informasi yang luar biasa besar, termasuk—dan yang terpenting—pengetahuan tentang “titik masuk” kelembagaan yang tersedia dan di mana titik lemahnya.

Dalam pembahasan berikut ini, kami menelaah beberapa aspek dalam hubungan negara dengan GAT: ruang kelembagaan, sekutu, sasaran, dan lawan. Kami membahas secara ringkas strategi dan taktik GAT dalam menjalin hubungan dengan lembaga antarpemerintah tertentu, seperti Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) di bawah PBB, Forum Petani yang disponsori Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), dan Dewan HAM PBB (UNHRC), yang kini memberi perhatian makin besar pada hak-hak petani. Akhirnya, kami juga mengkaji apa yang dipertaruhkan dalam perbedaan cara berbagai GAT menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga antarpemerintah tersebut.

RUANG KELEMBAGAAN

“Ruang kelembagaan” adalah arena aturan-aturan formal dan informal yang membentuk perjumpaan antara para aktor supranegara, negara, dan bukan-negara. Di antara aktor bukan-negara ini termasuk GAT, LSM, OMS, dan lembaga donor nonpemerintah yang umumnya dikaitkan dengan wacana atau gerakan keadilan global (lihat Bab 2). Arena-arena ini adalah ruang politik, bukan sekadar ruang administratif atau teknis, dan punya arti penting bagi GAT. Pertanyaan “Siapa yang masuk, siapa yang tidak” dalam suatu ruang bisa berdampak besar terhadap siapa yang bisa memengaruhi kebijakan yang mana atau siapa yang bisa mengakses

sumberdaya apa dan seberapa besar dananya. Aneka ruang kelembagaan mungkin dapat dibedakan berdasarkan bagaimana dan mengapa ruang itu diciptakan, siapa yang diwakili di dalamnya, dan bagaimana mereka bisa masuk. Kami menunjuk pada tiga jenis ruang: (1) ruang yang dihadirkan, yakni ruang yang sudah ada sebelumnya tapi inisiatif yang memungkinkan masyarakat sipil untuk memasukinya berasal dari lembaga-lembaga antarpemerintah; (2) ruang yang dibuka karena desakan GAT untuk mendapatkan keterwakilan; dan (3) ruang yang baru diciptakan, sebagai hasil dari advokasi GAT, yang sebelumnya sama sekali tidak ada (lihat Gaventa dan Tandon 2010; lihat juga Fox 2005).

Beragam GAT menganggap ruang kelembagaan ini secara berlainan—baik dalam hal nilai politiknya maupun potensi strategisnya—dan pandangan mereka cenderung berganti-ganti dari waktu ke waktu seiring berubahnya struktur peluang politik yang lebih luas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa GAT punya empat cara pandang utama mengenai ruang-ruang ini. Pertama, mereka memandang ruang-ruang ini sebagai *arena pertukaran*. Ketika GAT diajak masuk ke dalam suatu ruang kelembagaan, itu bisa menjadi kesempatan sangat penting untuk *temu muka*—baik antaranggota dalam satu GAT maupun antar-GAT—yang sebelumnya sulit dilakukan secara politik maupun finansial. Tak jarang, forum utama (misalnya forum antarpemerintah) justru dianggap acara sampingan, sementara acara “paralel” atau sampingan yang menumpang pada forum itu justru menjadi momen paling krusial bagi sebagian aktor GAT. Perlu diingat bahwa proses menenun ruang-ruang kelembagaan bagi masyarakat sipil dimulai dari forum-forum paralel “pihak luar” yang menuntut untuk masuk ke dalam pertemuan-pertemuan tertutup antarpemerintah (Pianta 2001).

Kedua, arena-arena ini kadang menjadi *arena penting perebutan* arah kebijakan antarpemerintah yang berdampak luas terhadap kebijakan nasional maupun lokal. Contohnya perundingan WTO dan masa-masa awal pertemuan yang diperantarai Bank Dunia tentang reforma agraria berbasis pasar. Di dalam dan di sekitar arena-arena seperti inilah

GAT berinteraksi dengan sekutu dan lawan mereka. Ketiga, ruang-ruang ini bisa menjadi *konteks penting untuk memperoleh legitimasi* bagi kampanye GAT atau bagi anggota nasional mereka, terutama yang dipinggirkan atau ditindas di negara asalnya. Dengan demikian, kelompok petani yang pemimpinnya menerima ancaman pembunuhan atau yang diabaikan oleh kementerian perdagangan atau pertanian di negaranya bisa mendapatkan legitimasi dan perlindungan politik ketika diundang atau diberi akses ke ruang kelembagaan internasional seperti CFS PBB. Keempat, dan terakhir, ruang-ruang tersebut bisa menjadi tempat untuk mengidentifikasi sumber-sumber *pendanaan* bagi gerakan. Keempat perspektif ini saling tumpang tindih, dan arti penting masing-masing agenda bagi setiap GAT bisa berubah-ubah tergantung situasi dan konteks yang dihadapi.

Komite Ketahanan Pangan Dunia

CFS dulunya adalah salah satu komite yang lesu dalam sistem PBB—tidak banyak melakukan hal menarik dan tidak ada yang sungguh-sungguh peduli, termasuk GAT sendiri. Namun, pada 2006, setelah penyelenggaraan Konferensi Internasional untuk Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) yang dibiayai FAO, beberapa lembaga yang mencakup LVC, IPC, serta sekutu-sekutu mereka berusaha mendorong FAO supaya menjadikan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kegiatannya. Kemudian, pada 2008, harga pangan global melonjak, memicu geger pangan di puluhan negara. Media internasional menyoroti perampasan tanah sebagai penyebab utama lonjakan harga pangan. Selain memicu seruan akan perlunya intervensi formal PBB, situasi ini juga memperuncing perseteruan antara dua kekuatan: di satu sisi, upaya elite dan korporasi untuk membentuk ulang pengaturan global, dan di sisi lain, kampanye masyarakat sipil yang menuntut ruang partisipasi dalam lembaga-lembaga kunci, terutama CFS. Dalam konteks inilah CFS tiba-tiba menjadi arena politik yang sangat penting, setidaknya bagi GAT yang bekerja pada isu-isu sumberdaya alam, tanah, air,

dan kehutanan. Menanggapi tekanan akar-umput yang makin kuat, pada 2009, CFS mengambil langkah penting dengan memberi ruang bagi OMS yang hampir setara dengan ruang yang diberikan kepada perwakilan resmi pemerintah, termasuk hak untuk berbicara dalam sidang-sidang paripurna dan diskusi komite CFS (meski mereka tetap tidak punya hak suara). Namun, pada saat yang sama, CFS juga menciptakan Mekanisme Sektor Privat (*Private Sector Mechanism*), yang memberi wadah resmi bagi kepentingan korporasi.

Bagaimanapun juga, pembaruan CFS merupakan proses penting yang memberi legitimasi bagi banyak OMS (McKeon 2013; Brem-Wilson 2015). Reformasi ini juga berdampak besar terhadap FAO, karena mendorong lembaga-lembaga pengaturan lainnya, seperti Komite Perikanan, untuk mulai membuka diri terhadap partisipasi gerakan transnasional. Di CFS, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan GAT menuntut dan berhasil memperoleh peran dalam perundingan perjanjian internasional, terutama yang kemudian—pada 2012—dikenal sebagai “Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests” (Pedoman Sukarela untuk Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Tenurial Pertanahan, Perikanan, dan Kehutanan) (CFS 212; McKeon 2013; Seufert 2013). LVC, IPC, beberapa GAT lainnya, serta sekutu mereka mengirim utusan ke Roma dan secara aktif terlibat dalam diskusi bersama perwakilan pemerintah dan korporasi. Meski Pedoman Sukarela (yang biasa disebut “VGs”) bersifat tidak mengikat (atau yang disebut hukum lunak), GAT yang lebih radikal mendorong agar dokumen ini menjadi hukum yang mengikat; karena itu, mereka menolak penggunaan kata “*Voluntary*” (Sukarela) dan lebih memilih menyebutnya sebagai “*Tenure Guidelines*” (TGs, Pedoman Tenurial) saja.

Pedoman tersebut berpotensi menjadi payung kelembagaan bagi kampanye-kampanye politik yang digulirkan GAT serta anggotanya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional—meski pada saat yang sa-

ma juga bisa dimanfaatkan oleh korporasi seperti Coca-Cola yang mendapat banyak kritik atas praktik perampasan tanah dan air (Coca-Cola 2013; Franco, Mehta, dan Veldwisch 2013). Namun, bagaimana pedoman tersebut diterapkan di lapangan, bagaimana OMS bisa memanfaatkannya, dan dengan capaian seperti apa sangat tergantung pada perimbangan kekuasaan yang sebenarnya antara aktor negara dan bukan-negara yang saling bersaing dalam konteks tertentu.

Lembaga-lembaga bilateral dan multilateral kini makin banyak menyediakan sokongan penting untuk pelaksanaan pedoman tersebut secara global. Di tengah persaingan antar-GAT dalam mengakses sumberdaya keuangan, akan sangat penting untuk mencermati “siapa mendapatkan apa, bagaimana caranya, seberapa besar, dan untuk tujuan apa.” Pedoman Tenurial kemungkinan besar akan tetap diperdebatkan dengan sengit, karena pihak-pihak berkepentingan yang saling bersaing terus berupaya memengaruhi pemaknaan, penerapan, dan penggunaannya. Dalam proses ini, berbagai prinsip pengaturan yang relevan, seperti *free, prior, and informed consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa), akan menjadi tarik-ulur di antara para pelaku yang terlibat.¹

Forum Petani IFAD

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), sebuah badan khusus di dalam PBB, memiliki agenda dan rekam jejak proyek yang beragam, dengan fokus utama pada pengurangan kemiskinan di pedesaan dan peningkatan ketahanan pangan (jangan disamakan dengan IFAP, GAT yang konservatif). IFAD menjalankan peran ganda: sebagai lembaga donor dan pemberi pinjaman dana—biasanya untuk mendukung proyek-proyek lokal dalam skema pembiayaan bersama dengan pemerintah negara-negara anggota atau bank pembangunan tingkat kawasan—dan sebagai pembela kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Penekanan pada kemiskinan pedesaan serta peran ganda sebagai penyangga dana dan advokasi menjadikan IFAD sebagai rekan bicara bagi banyak GAT.

IFAD bergerak pada skala yang jauh lebih kecil dibanding FAO, tetapi program-programnya sangat beragam. Dokumen-dokumen IFAD menekankan “perannya sebagai ‘inkubator’ untuk mengembangkan dan menguji program-program inovatif bersama masyarakat miskin pedesaan” (IFAD 2006: 7). Menurut Rencana Strategis IFAD 2002–2006, tujuan pertamanya adalah “memperkuat kapasitas masyarakat miskin pedesaan dan organisasi-organisasi mereka, termasuk kapasitas mereka untuk memengaruhi lembaga, kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di pedesaan” (IFAD 2005: 8). Citra kelembagaan IFAD sebagai “salah satu lembaga multilateral yang progresif” (IFAD 2005: 12)—dengan kata kunci seperti “fleksibel”, “mendukung”, “inklusif”, “pluralistik”, dan “inovatif” yang kerap muncul dalam dokumen-dokumen resminya—sangat kontras dengan banyak badan PBB lainnya yang lebih besar, dan citra ini diwujudkan dalam komitmennya, yang agak tidak lazim, untuk setidaknya mendengarkan pandangan kaum tani dan petani kecil. IFAD bahkan menyebut bersedia membicarakan kebijakan-kebijakan yang secara politik sensitif, seperti reforma pertahanan, di saat sebagian besar pemerintah enggan menyentuhnya. Bersama FAO dan Program Pangan Dunia (World Food Program), IFAD merupakan bagian dari Sekretariat CFS dan berkomitmen untuk menjadi salah satu badan pelaksana kebijakan-kebijakan CFS. Meski demikian, pengaruh politik IFAD tetap lebih kecil dibanding lembaga-lembaga multilateral dan bilateral lainnya yang lebih besar (Hopkins, Carpano, dan Zilveti 2006; Kay 2006).

Sejak 2006, tiap dua tahun IFAD menggelar Forum Petani (Farmers’ Forum) bersamaan dengan pertemuan Dewan Tertinggi (Governing Council) IFAD. Gagasan awal forum ini datang dari jaringan ROPPA di Afrika Barat pada 2004. GAT lain yang menjadi pengusul termasuk LVC, IFAP, Forum Pekerja Perikanan Dunia (WFF), dan Forum Rakyat

Nelayan Dunia (WFFP). Forum ini bukan sekadar ajang temu rutin dua tahunan, melainkan berupaya menjadi sebuah proses berkelanjutan dari bawah (*bottom-up*), yang dimulai dengan konsultasi tingkat nasional yang diikuti pertemuan tingkat regional dan subregional. Proses ini dimaksudkan memberi masukan serta menjadi instrumen akuntabilitas atas pelaksanaan Dewan Tertinggi IFAD.

Forum Petani memiliki sejumlah karakteristik yang tidak biasa. Pertama, forum ini mencerminkan komitmen IFAD untuk memperluas kerjasama dan perencanaan bersama organisasi tani. Ini merupakan perubahan penting, mengingat sebelumnya IFAD hampir hanya bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga multilateral lainnya. Kedua, forum ini telah menjadi arena perumusan konsensus yang sebelumnya tak terbayangkan—meski sering kali hanya pada tingkat paling dasar—di antara GAT dengan orientasi yang sangat berlainan. Misalnya, LVC dan IFAP bisa mengeluarkan pernyataan dan rekomendasi bersama organisasi-organisasi lain yang beragam. Ketiga, GAT besar seperti LVC harus berbagi keterwakilan dalam badan-badan kepemimpinan Forum Petani dengan gerakan-gerakan yang kurang dikenal, lebih kecil, dan lebih baru, yang mewakili konstituen serta kecenderungan politik yang lain. Komite Pengarah Forum Petani 2014, misalnya, mencakup perwakilan dari LVC dan ROPPA, tetapi juga dari Perhimpunan Petani Asia untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan (Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development [AFA]), Konfederasi Produsen Berbasis Keluarga untuk Pasar Bersama Amerika Selatan (COPROFAM), Organisasi Petani Pan-Afrika (Pan-African Farmers' Organization [PAFO]),² serta dua forum nelayan, WFF dan WFFP. Terakhir, IFAD telah benar-benar menerima gagasan tentang “ruang kelembagaan” yang selama ini diperjuangkan organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan yang telah dibahas sebelumnya di bab ini. Bahkan IFAD secara terbuka menyatakan komitmennya untuk “menghormati organisasi-organisasi yang sudah ada serta menciptakan ruang-ruang baru jika diperlukan” (IFAD 2008: 2).

Dewan HAM PBB

Impian akan sebuah deklarasi atau konvensi PBB tentang hak asasi petani mulai terbentuk di Indonesia selama pergolakan “era reformasi”, yang mengantarkan jatuhnya rezim kediktatoran Soeharto pada 1998 (yang naik ke tampuk kekuasaan pada medio 1960-an setelah pembunuhan sekitar 500.000 kaum tani dan keturunan Tionghoa). Sejak dasawarsa 1990-an hingga puncaknya pada 2001, organisasi-organisasi agraria di Indonesia merumuskan deklarasi panjang tentang hak asasi petani yang spesifik terkait konteks Indonesia. Deklarasi ini mencakup pasal-pasal tentang hak atas tanah dan sumberdaya alam, serta hak atas kebebasan berserikat dan menyuarakan pendapat (Bachriadi 2010; Claeys 2013; Edelman 2014; Edelman dan James 2011; Lucas dan Warren 2003). LVC Asia menggunakan dokumen Indonesia sebagai acuan untuk menyusun rancangan deklarasi internasional hak asasi petani (Vía Campesina 2002). Pada 2001 juga, dalam sebuah pertemuan di Forum Sosial Dunia (WSF) di Brasil, terjadi perjumpaan antara petani Indonesia dan aktivis dari Pusat Kajian Eropa-Dunia Ketiga (CETIM), sebuah LSM yang berbasis di Jenewa, Swiss; pertemuan inilah yang mendorong LVC memasuki ruang baru pengaturan internasional.³ Kemudian, pada tahun itu pula, dengan dukungan CETIM, Henry Saragih—pemimpin LVC asal Indonesia—menyampaikan pernyataan yang mendukung konvensi hak asasi petani dalam perdebatan tentang “hak atas pembangunan” di Komisi HAM PBB, pendahulu Dewan HAM PBB (CETIM, WFDY, dan Vía Campesina 2001). Sejak itu, Saragih hampir setiap tahun datang ke Jenewa untuk melancarkan lobi di PBB, dengan selalu ditemani para aktivis LVC dari berbagai wilayah lain.

Selama bertahun-tahun, upaya lobi LVC di Jenewa tidak begitu membuahkan hasil. Namun, pada 2008, setahun setelah PBB mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan di tengah memburuknya krisis pangan dunia, LVC—bersama sejumlah LSM dan sekutu dari kalangan akademika—menyusun ulang naskah rancangan deklarasi hak asasi petani yang diajukan sebelumnya agar sesuai dengan

instrumen-instrumen hukum internasional yang sudah ada (Vía Campesina 2009). Meski begitu, draf baru ini tetap memuat tuntutan-tuntutan radikal, terutama terkait benih, pasar, dan apa yang disebut “hak untuk menolak” campur tangan dari luar di dalam “wilayah” petani.

Mulai 2010, proses di Dewan HAM PBB mengalami kemajuan pesat. Merespons krisis pangan dunia yang terus berlanjut, Komite Penasihat Dewan HAM PBB menyerahkan laporan pendahuluan tentang “diskriminasi dalam konteks hak atas pangan,” yang dalam lampirannya mencantumkan teks lengkap deklarasi hak asasi petani versi La Vía Campesina. Pada 2012, Komite Penasihat menyerahkan kajian akhirnya tentang penguatan hak asasi petani dan pekerja pedesaan lainnya; kajian ini juga dilengkapi lampiran berupa rancangan deklarasi hak-hak petani yang disusun Komite Penasihat sendiri—sebuah naskah yang sangat mirip dengan draf susunan LVC (UNHCR Advisory Committee 2012). Pada tahun yang sama, Dewan HAM PBB memberikan mandat pembentukan Kelompok Kerja Terbuka (Open-Ended Working Group [OEWG]) yang ditugasi merampungkan naskah deklarasi tersebut. OEWG menyelenggarakan sesi-sesi pembahasan pada 2013 dan 2015, yang diwarnai polarisasi tajam antara Selatan dan Utara Global. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa menolak proposal tersebut, terutama dengan alasan prosedural dan anggaran, sementara banyak negara berkembang menyambutnya antusias.

Perimbangan kekuatan di dalam Dewan HAM PBB menunjukkan bahwa, cepat atau lambat, petani dan rakyat pedesaan lainnya kemungkinan besar akan memiliki sebuah deklarasi PBB yang melindungi hak-hak mereka (yang pada akhirnya harus disahkan oleh Majelis Umum PBB di New York). Dokumen semacam itu tentu akan menarik banyak perhatian yang sangat dibutuhkan terhadap pelanggaran HAM yang masih terus terjadi di pedesaan. Namun, hingga buku ini ditulis, masih ada sejumlah pertanyaan penting yang belum terjawab. Apakah naskah akhir akan tetap memuat “garis merah” gerakan petani: hak atas tanah, air, dan benih; penghidupan yang layak dan bermartabat;

serta kedaulatan pangan? Apakah para aktivis petani dari berbagai belahan dunia yang telah turut serta menyusun draf awal akan terus merasa sebagai “pemilik” deklarasi ini? Beberapa GAT kecil di luar LVC, terutama jaringan Katolik FIMARC, sejak lama menyuarakan dukungan pada deklarasi ini dalam berbagai sesi Dewan HAM PBB. Yang terbaru, organisasi transnasional pekerja pedesaan (IUF), nelayan (WFFP), dan penggembala berpindah (WAMIP) juga ikut bergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang mendukungnya. Menyatukan kelompok-kelompok ini dan menyelaraskan tuntutan-tuntutan mereka dengan tuntutan kaum tani mungkin akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi mengingat kontradiksi antara pekerja pedesaan dan petani pemilik tanah yang mempekerjakan mereka, serta konflik yang masih berlangsung—khususnya di Afrika—antara penggembala berpindah dan petani menetap.

Akhirnya, apakah sebuah deklarasi yang tidak mengikat secara hukum dapat menjadi alat yang berguna untuk melindungi hak asasi petani di lapangan? Pengalaman masyarakat adat dengan UNDRIP menghembuskan angin segar, karena norma-norma internasional tersebut telah diadopsi ke dalam banyak sistem hukum nasional dan menjadi alat nyata bagi para pembela HAM. Namun, mereka yang menolak deklarasi ini berpendapat bahwa kategori “petani” jauh lebih beragam dan heterogen dibandingkan “masyarakat adat”, yang berpotensi membuat proses identifikasi siapa saja pemegang hak dalam deklarasi ini menjadi rumit dan penuh perdebatan.

Yang paling relevan dalam pembahasan buku ini ialah bahwa dengan terus memperjuangkan pengakuan hak-hak asasi petani di PBB—meski menghadapi banyak pertentangan—LVC dan para sekutunya terpaksa menjalin keterlibatan baru dengan lembaga-lembaga pengaturan internasional dan pemerintah nasional, sekaligus memperluas khazanah aksi mereka. Berbagai bentuk keterlibatan ini sangat berbeda dengan cara-cara yang mereka gunakan untuk masuk dan bekerja di CFS atau IFAD, maupun ketika mereka memprotes WTO atau terlibat dalam ne-

gosiasi seputar proyek Kajian Internasional tentang Pengetahuan, Ilmu, dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development)—sebuah analisis oleh sejumlah organisasi multilateral yang, mungkin mengejutkan, bermuara pada laporan sangat kritis terhadap pertanian industrial dan justru mendukung agroekologi (IAASTD 2009; Scoones 2009).

SEKUTU

Beberapa lembaga antarpemerintah, atau setidaknya individu dan kelompok tertentu di dalamnya, telah menjadi sekutu penting bagi GAT dan organisasi-organisasi anggotanya di tingkat nasional. Mereka menyediakan sumberdaya logistik yang sangat dibutuhkan serta memperluas jangkauan politik gerakan-gerakan agraria lintas batas negara dan kawasan. Namun, konsep sekutu dapat sangat berbeda dari satu GAT ke GAT lainnya, tergantung pada faktor ideologis maupun faktor-faktor lainnya. LVC dan IPC tidak punya banyak sekutu lembaga antarpemerintah. Meski begitu, ada segelintir tokoh berpengaruh di dalam lembaga-lembaga antarpemerintah yang, karena beberapa alasan, membela hak-hak LVC dan IPC untuk hadir dan terwakili dalam ruang-ruang kelembagaan internasional, dan bahkan kadang turut membantu mendorong pencapaian tujuan LVC dan IPC. Misalnya, beberapa aktor penting di markas besar FAO di Roma—terutama yang menangani kemitraan dengan gerakan agraria dan isu tenurial sumberdaya—selama ini menjadi sekutu yang cukup konsisten bagi LVC dan IPC. Aliansi ini bermula pada medio 1990-an, menjelang penyelenggaraan KTT Pangan Dunia 1996, dan terus berlanjut sepanjang proses negosiasi yang rumit dengan WTO, dalam proses reforma agraria ICARRD, hingga yang lebih baru dalam kerja-kerja di CFS, sebagaimana dibahas sebelumnya. Sejak dulu hingga sekarang, FAO memang menjadi—dan tetap merupakan—ruang kelembagaan terpenting sekaligus sekutu utama bagi LVC dan IPC. Hubungan ini makin menguat pada 2013, ketika

akademia asal Brasil José Graziano da Silva menjabat sebagai direktur jenderal FAO dan meresmikan persekutuan tersebut dalam suatu deklarasi kerjasama.⁴ “Kerjasama ini penting,” kata Graziano,

karena FAO menjalin persekutuan dengan suatu gerakan yang mewakili lebih dari 200 juta petani di seluruh dunia, dan kami bergabung ke dalam sebuah jaringan yang terus berinovasi di banyak lini untuk menegaskan hak atas pangan bagi semua orang. Seperti yang selalu saya katakan, dalam kerja bersama, yang penting bukanlah selalu sepakat dalam segala hal, melainkan memiliki tujuan yang sama, dan kami yakin bahwa petani skala kecil adalah bagian dari solusi untuk mengatasi kelaparan.

Koordinator Umum LVC Elizabeth Mpofu menanggapi:

Ini adalah perjalanan panjang, dan kami sangat gembira bisa berada di sini hari ini. La Vía Campesina memperjuangkan kedaulatan pangan dan pertanian agroekologis skala kecil, dan saya pikir kolaborasi yang dimulai hari ini akan membawa banyak perubahan. ... FAO akan mendukung partisipasi efektif La Vía Campesina dalam proses-proses politik di berbagai tingkatan, serta mendorong dialog dalam merancang inisiatif-inisiatif lokal yang berkelanjutan, program-program, dan intervensi-intervensi mendesak. Kemitraan ini didasarkan pada pertukaran pengetahuan, dialog, pengembangan kebijakan, serta kerjasama dalam kegiatan-kegiatan normatif.⁵ Kerjasama ini juga akan membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk soal tanah, benih, dan praktik-praktik agroekologi petani kecil. (FAO 2013)

Sekutu-sekutu penting LVC juga hadir di sejumlah lembaga antarpemerintah lainnya. Di Dewan HAM PBB, LVC mendapat dukungan dari beberapa negara anggota yang simpatik, seperti Bolivia, Ekuador,

Kuba, Venezuela, dan Afrika Selatan. Dua pelapor khusus pertama untuk hak atas pangan—yang ditunjuk sebagai ahli independen melalui “prosedur khusus” Dewan HAM PBB—adalah Jean Ziegler (2000–2008) dan Olivier de Schutter (2008–2014). Ziegler kemudian duduk di Komite Penasihat Dewan HAM PBB setelah menyelesaikan tugas sebagai pelapor khusus, dan berperan penting dalam mengawal Deklarasi Hak Asasi Petani versi LVC dari sebuah usulan gerakan sosial hingga akhirnya tercantum sebagai lampiran dalam dokumen resmi PBB. Demikian juga de Schutter, yang menjadi pendukung vokal LVC, kerap berbicara langsung dengan para aktivis LVC dan menulis berbagai laporan tentang topik-topik seperti agroekologi, bahan bakar nabati, keadilan gender, dan pengambilalihan tanah skala besar—tema-tema yang selaras dengan pandangan dan posisi LVC.

Gerakan tani, petani kecil, dan kaum tunakisma juga mulai membangun aliansi dengan Vatikan—suatu pembelokan arah yang mengejutkan, mengingat sejarah panjang hierarki Katolik yang bersekutu dengan kalangan elite konservatif pedesaan di Italia, Spanyol, Amerika Latin, dan berbagai negara lain. Pada 2013, Akademi Kepausan untuk Ilmu Sosial, bersama paus yang baru terpilih, Paus Fransiskus (Jorge Mario Bergoglio), mensponsori seminar bertajuk “The Emergence of the Socially Excluded” (Munculnya Kaum yang Tersingkirkan secara Sosial). Seminar ini melibatkan aktivis MST asal Brasil João Pedro Stédile dan Juan Grabois dari Argentina, pemimpin organisasi pekerja yang “tersingkirkan secara sosial”, seperti pemulung kardus dan buruh di pabrik-pabrik yang “diduduki kembali” setelah ditelantarkan para pemiliknya menyusul krisis ekonomi 2001 (Oliveira 2013). Setahun kemudian, Vatikan menjadi tuan rumah “World Meeting of Popular Movements” (Pertemuan Dunia Gerakan Rakyat) selama tiga hari, yang diikuti puluhan gerakan tani, petani kecil, dan tunakisma—banyak dari mereka adalah anggota LVC dan ROPPA—serta serikat buruh, LSM progresif, organisasi nelayan, warga miskin kota, dan masyarakat adat. Hanya sedikit organisasi Katolik yang turut serta, meski banyak

organisasi partisipan berasal dari negara-negara dengan sejarah Katolik yang kuat. Lebih dari seratus tamu undangan hadir dari berbagai penjurur, termasuk KRRS dari India yang berakar pada tradisi Hindu, Buruh Industri Sedunia (Industrial Workers of the World [IWW]) yang berhaluan anarko-sindikalis, serta organisasi tani dari Turki, Bulgaria, Senegal, Amerika Tengah, Korea, Palestina, dan banyak negara lainnya (León 2014). Meski tujuan tersurat pertemuan ini ialah memperkuat koordinasi antara organisasi rakyat dan gereja, jelas pula bahwa pertemuan ini memberi legitimasi tambahan bagi kedua belah pihak, baik gerakan sosial maupun Paus Fransiskus yang ‘retorika pro-kaum miskin’-nya kerap dipandang penuh curiga oleh kalangan konservatif dalam hirarki gereja.

GAT petani skala besar, seperti IFAP dan WFO, memiliki jenis sekutu yang sangat berbeda, yang mencakup Bank Dunia, WTO, dan IFAD. Koalisi Internasional untuk Akses Tanah (ILC), yang mempertemukan lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM, serta kelompok advokasi dan penelitian—banyak dari mereka berorientasi kuat pada pasar, seperti WWF—sangat terkait erat dengan IFAD dan Bank Dunia, selain menerima dukungan signifikan dari Bank Dunia maupun Komisi Eropa. Salah satu cara untuk memahami politik dari tiap GAT adalah dengan melihat siapa lembaga-lembaga antarpemerintah yang menjadi sekutu mereka—atau lawan mereka.

SASARAN & LAWAN

Bagi sebagian GAT, lembaga-lembaga antarpemerintah tertentu merupakan sasaran sekaligus lawan yang harus diberberkan dan dipermalukan secara publik karena mengusung kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan kelas pekerja agraria. Namun, bagi beberapa GAT lainnya, lembaga-lembaga yang sama justru bisa menjadi sekutu dan sumber dukungan. IFAP dan WFO, misalnya, menjalin hubungan hangat dengan WTO, lembaga yang justru menjadi momok bagi LVC serta

organisasi-organisasi gerakan di dalamnya. Bagi LVC, masalah pokoknya ialah neoliberalisme serta lembaga pengusung utamanya, seperti Bank Dunia dan IMF. Inilah yang menjadi latar belakang sikap konfrontatif LVC terhadap WTO terkait isu-isu perdagangan dan terhadap Bank Dunia terkait isu-isu reforma agraria.

Meski mengambil sikap konfrontatif dengan pendekatan “bongkar dan lawan” terhadap Bank Dunia, LVC pernah setidaknya sekali (pada 1999) ambil bagian dalam sebuah forum Bank Dunia (Vía Campesina 1999), sementara beberapa kelompok lain yang mencakup organisasi anggota LVC juga sempat mencoba untuk menuntut akuntabilitas Bank Dunia (Fox dan Brown 1998; Scholte 2002). Sebuah koalisi besar gerakan sosial pedesaan Forum Nasional Reforma Agraria di Brasil, misalnya, pernah dua kali menuntut Panel Inspeksi Bank Dunia agar memeriksa percobaan reforma agraria berbasis pasar di sana (lihat Fox 2003). Meski kedua permintaan itu ditolak karena alasan teknis, gerakan-gerakan di Brasil tetap berhasil menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya lembaga-lembaga internasional yang berkuasa untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab secara publik (Fox 2003: xi).

Penting untuk ditekankan bahwa lembaga-lembaga antarpemerintah besar global yang pernah diajak berhubungan oleh LVC, seperti FAO dan IFAD, sejatinya merupakan arena pertarungan, yang berisi beragam aktor. Di dalamnya sendiri terdapat banyak ketegangan, dan ketegangan antar-lembaga internasional juga selalu bergulir. Sekutu-sekutu gerakan sosial yang bekerja di dalam lembaga-lembaga ini kadang berada dalam situasi sulit secara politis akibat aktivitas advokasi mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama, ketegangan dan perpecahan di dalam maupun antara lembaga-lembaga ini justru membuka pintu masuk dan peluang politik bagi GAT radikal untuk menjalin aliansi dengan sebagian aktor di dalam. Dalam wawancara pada 2005 (beberapa tahun sebelum kemitraan FAO-LVC pada 2013 sebagaimana dibahas sebelumnya), seorang pejabat anonim FAO menyatakan:

[La Vía Campesina] di dalam FAO dipandang sebagai lembaga penting yang terorganisir dengan baik, yang sangat getol melakukan advokasi dalam mendukung reforma agraria. ... Namun, perlu dikatakan juga bahwa ada bagian-bagian FAO yang memilih mengabaikan [LVC] karena gaya advokasinya yang dianggap “terlalu keras”. Meski demikian, jika ada kemungkinan “kemitraan” [LVC] dengan FAO yang dibangun atas dasar tujuan bersama yang dapat diterima, maka masih ada ruang yang cukup leluasa untuk bergerak dan bekerja bersama. ... Terus terang saja, kesannya adalah bahwa [LVC] lebih dari sekadar melakukan lobi yang mendukung reforma agraria, melainkan kekuatan lobi anti-Bank Dunia. ... Tapi karena alasan kelembagaan, kami hampir tak mungkin mengkritisi lembaga “saudara”, dan makin keras kritiknya [LVC terhadap Bank Dunia], makin sedikit “pilihan” yang kami punya untuk bermanuver. (Rosset dan Martinez-Torres 2005: Appendix 5)

PERPECAHAN, PERBEDAAN, & HUBUNGAN GAT DENGAN LEMBAGA ANTARPEMERINTAH

Para praktisi pembangunan dan kalangan akademik kerap mengira bahwa lambannya reformasi disebabkan oleh kurangnya “koherensi” di antara para birokrat dalam suatu lembaga, atau antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Anggapan ini memang ada benarnya. Namun, perpecahan dan perbedaan di kalangan pembuat kebijakan maupun antarlembaga juga dapat membuka jalan bagi terbentuknya aliansi-aliansi baru dan melahirkan perubahan. Ketika lembaga-lembaga antarpemerintah yang berpengaruh mencapai suatu konsensus, biasanya konsensusnya konservatif. Sebaliknya, ketika tidak tercapai konsensus dan “koherensi”, lembaga-lembaga ini cenderung menjadi lebih terbuka dan bisa ditembus.

GAT radikal menggunakan khazanah taktik aksi yang kompleks untuk memanfaatkan perpecahan tersebut, mulai dari siasat “mengungkap dan memermalukan” untuk mengisolasi pihak lawan, hingga

berkolaborasi dengan berbagai sekutu demi meraih manfaat yang saling menguntungkan. Dalam berurusan dengan lembaga-lembaga antarpemerintah, LVC dan IPC secara cerdas memadukan aksi-aksi militan “bongkar dan lawan” dengan taktik negosiasi serta kolaborasi kritis. Kolaborasi kritis cenderung paling efektif bila disertai tekanan dan mobilisasi dari luar. LVC menyatakan bahwa “untuk menciptakan dampak yang berarti, kita harus ... menjalankan aksi dan mobilisasi secara terkoordinasi di tingkat global. ... Mobilisasi tetap menjadi strategi utama kami” (Via Campesina 2004: 48). IPC dan APC juga sama-sama menempatkan mobilisasi sebagai elemen utama dalam protes-protes mereka, sementara GAT yang mewakili petani skala besar, seperti IFAP, WFO, dan ILC, lebih memilih menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga antarpemerintah dan menjalin kerjasama dari “dalam”. Cara yang sangat kontras antara GAT radikal (seperti LVC dan IPC) dan GAT petani skala besar (seperti IFAP, WFO, dan ILC) dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga antarpemerintah tidak semata-mata mencerminkan persaingan antar-aktor kelembagaan, melainkan lebih mencerminkan basis kelas dan pandangan ideologis yang sangat berlainan di antara mereka.

Kekuatan strategi “kolaborasi dengan tekanan” yang digunakan GAT dapat digambarkan dengan membandingkan kampanye-kampanye yang menggunakan pendekatan ini dengan strategi lain yang semata bekerja dari “dalam” lembaga-lembaga antarpemerintah. Dalam banyak kesempatan, LVC menggunakan strategi dan taktik “luar-dalam” untuk mendorong lembaga-lembaga antarpemerintah agar memberi konsesi. Sambil terlibat “di dalam” ruang-ruang kelembagaan, LVC tetap menegaskan pentingnya menjaga otonomi agar dapat memberi tekanan “dari luar” dan melakukan mobilisasi. Pendekatan ganda ini dapat menghasilkan konsesi yang lebih berarti dibandingkan jika hanya mengandalkan bekerja “di dalam” atau “dari luar”. Dalam Konferensi Internasional untuk Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) yang disponsori FAO di Brasil pada 2006, IPC, LVC, serta para pendukung mereka di Brasil mengorganisir acara Forum

Pertanahan, Wilayah, dan Martabat Kemanusiaan (Land, Territory and Dignity) di luar konferensi, sembari pada saat yang sama memberi tekanan dari dalam untuk menuntut kehadiran masyarakat sipil secara lebih permanen di dalam FAO serta mendorong pembaruan mendasar di bidang agraria, perikanan, ladang penggembalaan, dan kehutanan yang berpihak pada rakyat miskin. Diterimanya banyak tuntutan IPC dan LVC dalam laporan akhir ICARRD serta dorongan menuju pelibatan unsur masyarakat sipil secara lebih permanen di dalam FAO menunjukkan bahwa pendekatan “luar-dalam” cukup berhasil (ICARRD 2006).

Ketika pembaruan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) PBB pada 2009 membuka ruang partisipasi masyarakat sipil yang lebih luas, IPC, LVC, dan berbagai gerakan lainnya memilih untuk tidak lagi memberi tekanan “dari luar”, melainkan lebih banyak bekerja di dalam melalui Mekanisme Masyarakat Sipil (*Civil Society Mechanism*) yang baru dibentuk oleh CFS. Meski pengesahan Panduan Tenurial (sebagaimana dibahas sebelumnya) oleh CFS dapat dianggap sebagai kemenangan bagi gerakan agraria, prinsip-prinsip tentang “investasi pertanian yang bertanggung jawab” (RAI) yang mengikutinya, yang dimaksudkan untuk mengatur praktik perampasan tanah, justru dipandang lemah dan mengecewakan—terutama karena besarnya pengaruh para aktor agrobisnis dan korporasi yang terwakili dalam Mekanisme Sektor Swastanya CFS. Mekanisme Masyarakat Sipil maupun Mekanisme Sektor Swasta sama-sama diposisikan sebagai “pemangku kepentingan”, tetapi dalam kondisi tidak adanya tekanan terus-menerus dari luar, pihak swasta justru lebih berhasil ketimbang masyarakat sipil dalam memengaruhi isi prinsip-prinsip RAI agar mencerminkan kepentingan mereka.

SIMPULAN

Ruang kelembagaan bukanlah permainan menang-kalah (*zero-sum game*), melainkan lebih sebagai proses saling menguntungkan (*positive-sum process*). Makin banyak aktor masyarakat sipil yang mendapat tem-

pat di dalam lembaga-lembaga antarpemerintah, makin terbuka pula peluang masuk bagi kelompok-kelompok baru, sekaligus memperluas, memperdalam, dan mendemokratisasi proses perumusan kebijakan global. Akan tetapi, perumusan kebijakan pembangunan internasional bukanlah arena yang netral secara politis. Arena ini telah lebih dulu diduduki dan dibentuk oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bersaing—berdasar pada agenda nasional, kelas, profesi, ideologi, agenda sektoral, maupun kepentingan korporasi. Dengan masuknya LVC dan IPC, ruang-ruang kelembagaan ini pun menjadi tempat pertemuan di antara gerakan-gerakan anggota GAT dan antara sektor-sektor masyarakat sipil agraris maupun nonagraris. Ketegangan di ruang-ruang ini sebagian besar bersumber dari perbedaan latar belakang kelas, basis sosial, ideologi, haluan politik, dan susunan kelembagaan dari berbagai GAT dan jaringan yang terlibat. Para aktor yang saling berinteraksi di arena ini datang dengan tingkat kekuatan politik yang tidak setara—terutama ketika kepentingan sektor swasta diberi ruang sama besar dengan masyarakat sipil, atau bahkan dianggap bagian dari masyarakat sipil itu sendiri. Tantangan utama bagi gerakan sosial ialah bagaimana bisa berpartisipasi di dalam sambil tetap menjaga otonomi yang cukup agar tetap bisa memberi tekanan dari luar.

CATATAN

- 1 Tentang topik ini, lihat Borras, Franco, dan Wang (2013). Untuk pembahasan kritis atas FPIC (padiatapa), lihat Franco (2014).
- 2 PAFO, yang didirikan pada 2010, menyatukan lima kelompok regional dengan orientasi yang sangat beragam: Jaringan Organisasi Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat (ROPPA), Federasi Petani Afrika Timur, Wahana Regional Organisasi Petani Afrika Tengah (PROPAC), Serikat Petani Maghreb, dan Konfederasi Serikat Petani Afrika Selatan (SACAU). Yang disebut terakhir ini, sekutu IFAP dan kini WFO, mewakili petani komersial skala besar, sementara dukungan ROPPA terutama berasal dari produsen skala kecil.
- 3 Wawancara Marc Edelman dengan Florian Rochat, CETIM, 7 Maret 2012, Jenewa, Swiss.
- 4 Namun, pada saat yang hampir bersamaan, FAO juga meresmikan aliansi serupa dengan organisasi-organisasi yang kurang radikal seperti Oxfam dan ActionAid.
- 5 “Kegiatan-kegiatan normatif” merujuk pada penyusunan norma atau hukum internasional. Olivier de Schutter menyatakan: “Apa yang kita lihat dari CFS ialah kemunculan pengaturan global jenis baru, di mana [organisasi-organisasi masyarakat sipil] menjadi tandem penyusun hukum internasional bersama pemerintah dan lembaga lembaga internasional” (Wijeratna 2012: 5).

BAB 7

Tantangan

Gerakan-gerakan agraria transnasional yang muncul pada 1980-an dan menguat pada 1990-an telah mencatat pencapaian luar biasa. Di bab-bab sebelumnya, kami menelaah sejumlah keberhasilan dan pengaruh mereka. Yang paling penting, GAT berhasil merajut jaringan antarorganisasi dari kelompok-kelompok masyarakat pedesaan paling terpinggirkan dan tertindas di berbagai wilayah dunia, melampaui sekat-sekat negara-bangsa, bahasa, ras, etnis, agama, generasi, dan gender. Lebih dari itu, mereka juga membangun aliansi lintas-kelas dan lintas-sektor dengan berlandaskan kepentingan bersama. Seperti yang dibahas di Bab 3 dan 4, *La Vía Campesina* (LVC) dan Komite Perencanaan Internasional (IPC) untuk Kedaulatan Pangan termasuk di antara gerakan sosial transnasional terbesar yang ada saat ini.

GAT radikal telah berhasil merebut ruang dalam lembaga-lembaga pengaturan internasional yang sebelumnya nyaris tuli terhadap suara kaum tani dan petani kecil. Di Bab 6, kami menyelidik bagaimana GAT hadir dalam berbagai forum penting seperti Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) PBB, Forum Petani IFAD, dan Dewan HAM PBB. GAT radikal juga berkali-kali menantang lembaga-lembaga internasional lain—terutama Bank Dunia dan WTO—yang mereka anggap tidak demokratis, kolot, dan merugikan kepentingan kaum tani. GAT berhasil meletakkan kembali reforma agraria ke dalam agenda pembangunan internasional sejak 1990-an dan seterusnya, sekaligus menghidupkan kembali program-program distribusi tanah di beberapa wilayah dunia. Mereka telah bergerak melawan korporasi yang mendorong penggunaan benih hasil rekayasa genetika (GMO) serta membunyikan alarm tentang praktik perampasan tanah dan air yang terjadi di berbagai tempat di

dunia. GAT juga berperan besar dalam menyebarluaskan model produksi berbasis agroekologi serta menciptakan model-model baru pendidikan rakyat, baik melalui program pertukaran pengetahuan antarpetani secara horizontal maupun kampus-kampus petani (lihat Bab 4). Mereka telah belajar sekaligus mengajarkan cara memilih, membiakkan, melestarikan, dan menyebarkan benih-benih yang diperlukan untuk produksi pangan mereka sendiri. Segenap proses ini telah memperkokoh barisan aktivis yang makin membesar, tangguh, dan cakap—sering kali kosmopolitan—yang bergerak dalam *mística*, semangat kolektif dalam perjuangan bersama. Bagi gerakan tani tingkat nasional dan lokal, keterlibatan dalam GAT kerap membantu memperkuat organisasi mereka; sementara di tempat-tempat di mana pelanggaran HAM terus terjadi dan perjuangan petani dikriminalisasi, afiliasi dengan GAT juga memberi perlindungan bagi para pemimpin dan pendukung mereka dari represi. GAT telah berperan penting dalam menyadarkan gerakan-gerakan sosial nonagraris akan dampak masalah agraria terhadap keadilan pangan, keadilan gender, HAM, keadilan iklim, dan lingkungan.

Semua capaian luar biasa ini tentu patut dirayakan, tapi tidak boleh menutup mata kita pada berbagai tantangan besar yang masih membayangi—banyak di antaranya sudah disinggung di bagian-bagian sebelumnya buku ini. Di sini kami akan merangkum sebagiannya. Beberapa di antaranya berkaitan dengan perimbangan yang rapuh antara aksi politik “di dalam” dan “di luar” lembaga-lembaga kunci, dan—dalam arti yang lebih luas—antara strategi mobilisasi dan politik kelembagaan yang konvensional (lihat Bab 6).

Gerakan-gerakan sosial yang berhasil, terutama di negara dengan sistem politik demokratis liberal, kadang mengalami pelemahan ketika tuntutan mereka mulai diakomodasi melalui saluran politik formal, biasanya partai politik. Gerakan reforma pertanahan adalah salah satu contohnya yang khas. Dalam banyak kasus, para pemimpin petani terpilih menjadi anggota legislatif, sembari tetap melanjutkan kepemimpinan di dalam organisasi rakyat. Situasi semacam ini juga bisa terjadi di negara

yang tampak demokratis di permukaan, tapi sesungguhnya masih otoriter (seperti Honduras). Dalam situasi tertentu, hal ini tidak selalu melemahkan gerakan, bahkan kadang justru menghasilkan sinergi positif. Namun demikian, tetap muncul persoalan penting tentang bagaimana menyeimbangkan berbagai bentuk perjuangan yang berbeda: apakah sumberdaya politik sebaiknya dicurahkan untuk membangun gerakan dan memperkuat mobilisasi rakyat, atau justru diarahkan untuk bekerja dari dalam pemerintahan; dan bagaimana berhubungan dengan sekutu-sekutu di dalam negara sambil tetap menjaga keterwakilan basis massa gerakan. Aliansi antara negara dan gerakan selalu diliputi ketegangan. Bahkan ketika pemerintah mendaku sebagai bagian dari dan untuk gerakan sosial, seperti pemerintahan Evo Morales di Bolivia, hubungan dengan organisasi tani, masyarakat adat, dan lingkungan yang progresif tetap sering diwarnai permusuhan.

Hubungan erat GAT dan sekutu mereka dengan kalangan LSM juga menghadirkan persoalan tersendiri. Seperti yang kami singgung di Pendahuluan dan Bab 6, batas antara gerakan sosial—termasuk GAT—dan LSM kadang jauh lebih kabur daripada yang diakui oleh masing-masing pihak. Sebutan-sebutan umum seperti “masyarakat sipil” dan “pemangku kepentingan” justru memperparah kekaburan ini, karena menyatukan pelaku-pelaku yang sebenarnya berbeda ke dalam satu kategori analitis yang menyamarkan perbedaan mendasar di antara mereka. GAT radikal seperti LVC sejak awal menegaskan bahwa mereka mempertahankan otonomi dari LSM, juga hak mereka untuk berbicara atas nama mereka sendiri, bukan diwakili pihak lain. Namun, kenyataannya, beberapa aktivis kunci LVC justru bukan berasal dari kalangan petani, melainkan dari LSM radikal; sementara beberapa organisasi anggota LVC masih diwakili oleh intelektual-aktivis yang punya rekam jejak panjang di “sektor ketiga” (di luar negara dan pasar) dan hanya sementara atau baru-baru ini saja bersentuhan dengan pertanian. Gejala “birokratisasi” tidak hanya melanda lembaga-lembaga kerjasama internasional, tetapi juga merembes ke dalam gerakan sosial, dan kadang turut berperan dalam kehancuran

curan GAT, seperti yang terjadi pada ASOCODE di Amerika Tengah (lihat Bab 5). Namun, pada akhirnya, gerakan sosial tetap butuh sekutu bukan-negara untuk memperluas jangkauan kerja pengorganisasian dan mobilisasinya; di tengah nyaris absennya partai politik dalam kehidupan gerakan agraria masa kini, beberapa LSM telah mengambil peran pengganti ini. Hubungan ini sejak awal bukan hanya dicirikan dengan sinergi, tapi juga sarat ketegangan—dan mungkin akan tetap begitu ke depannya.

Hal lain yang berkaitan erat dengan hubungan antara gerakan rakyat dan LSM, yang secara politik diperlukan tapi dipertentangkan, ialah pendanaan. Kalangan cendekiawan maupun aktivis GAT umumnya enggan membicarakan secara terbuka isu sensitif terkait siapa sebenarnya yang mengongkosi semua seminar internasional, mobilisasi massa, dan berbagai kegiatan gerakan sosial. Sebelumnya kami menunjukkan beberapa kasus runtuhnya GAT akibat kekurangan dana (IFAP) maupun justru karena kelebihan dana (ASOCODE). Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ini, antara lain, adalah pentingnya menemukan keseimbangan antara kebutuhan, tujuan, kapasitas organisasi, dan dana dari luar, serta upaya untuk memberagamkan sumber dana agar tidak terlalu bergantung pada segelintir donor; ketergantungan semacam itu bisa sangat riskan bila sewaktu-waktu terjadi pemangkasan bantuan secara mendadak. Kami juga telah mencatat perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam skema kerjasama pembangunan Eropa, yang bisa berdampak serius terhadap pendanaan GAT. Ketika para donor beralih dari dukungan kelembagaan jangka panjang ke skema tender dan hibah berbasis proyek, GAT dan organisasi-organisasi anggotanya harus menyesuaikan praktik keorganisasian internal mereka—termasuk kemungkinan mengurangi beberapa kegiatan internasional, aksi-aksi politik terbuka, dan mobilisasi massa.

Telaah-telaah atas gerakan sosial transnasional kadang mengandung asumsi yang tidak disadari: bahwa gerakan yang berskala transnasional pasti lebih kuat dibanding yang berskala nasional, dan bahwa begitu

sebuah gerakan melampaui batas negara, maka ia tidak punya jalan untuk kembali ke tingkat nasional. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa anggapan yang searah ini tidak bisa dipertahankan. Ada kalanya organisasi nasional memutuskan keluar dari GAT, atau justru diminta atau didesak untuk keluar. Ada juga yang tetap menjadi anggota GAT, tapi sengaja disisihkan dari proses pengambilan keputusan inti. Ada banyak alasan di balik dinamika ini. Dalam kasus LVC, misalnya, beberapa organisasi keluar karena perbedaan ideologi (UNAG di Nikaragua dan Solidarnosc di Polandia), karena ingin fokus pada perjuangan nasional ketimbang kerja transnasional (UPANACIONAL di Kosta Rika), atau karena konflik internal (COCOCH di Honduras). Tantangan untuk menjaga koalisi yang rapuh semacam ini selalu ada, bahkan ketika tidak ada organisasi yang benar-benar keluar. Ini merupakan bawaan dari karakter lintas kelas dan multikelas sebagian besar GAT, juga dari penggunaan kategori identitas yang inklusif (seperti “kaum pemilik negeri”) yang berpotensi menyatukan sektor-sektor berbeda tapi sekaligus bisa menutupi perbedaan dan kontradiksi di antara mereka. Situasi ini juga berkaitan dengan fenomena “penjaga gerbang”, sebagaimana dibahas di Bab 2 dan 4, di mana sejumlah anggota awal GAT justru menghalangi partisipasi organisasi lain dari wilayah yang sama. Di sisi lain, kehadiran organisasi-organisasi yang lemah atau bahkan “fiktif” dalam GAT bisa membuat para anggota koalisi merasa berlebihan atas kekuatan gerakan secara keseluruhan, dan pada akhirnya bisa merusak kredibilitas gerakan itu sendiri di mata mitra politik maupun masyarakat luas. Terbatasnya pengaruh GAT secara nyata juga terlihat dari absennya GAT di wilayah-wilayah luas di dunia—Tiongkok, Rusia, dan Afrika Utara. Selain itu, makin banyaknya negara yang membatasi pendanaan luar negeri untuk LSM dan gerakan sosial turut mempersempit ruang gerak GAT untuk memperluas jangkauan.

Ada jarak yang luar biasa besar—secara geografis, budaya, maupun bahasa—antara arena-arena internasional tempat GAT menggerakkan aksi atau mencoba bekerja “di dalam” dan wilayah-wilayah pedesaan yang

menjadi basis sosial organisasi-organisasi di dalamnya. Menjembatani kesenjangan antara tuntutan dan visi GAT dengan praktik nyata rakyat yang mereka wakili ialah perjuangan yang harus terus dijalani. Misalnya, LVC beserta sekutunya menyerukan “kedaulatan pangan”, sedangkan di lapangan, sebagian basis mereka di Honduras justru lebih cocok dengan konsep “ketahanan pangan”. GAT dan gerakan-gerakan nasional mengancam GMO, tapi di sisi lain beberapa anggota akar-rumput mereka tetap menanam kapas Bt di India atau kedelai transgenik di Brasil selatan (lihat Bab 4). Di beberapa kawasan, seperti Asia Tenggara, perbedaan bahasa menjadi tantangan nyata dalam membangun GAT yang dinamis di tingkat kawasan. Gerakan lokal dan nasional dituntut untuk terus menjaga agar anggota mereka terinformasikan, tertarik, dan merasa memiliki keterikatan dengan GAT yang mereka ikuti. Hatta, mereka mesti merotasi kepemimpinan di antara arena internasional, nasional, dan lokal serta mendidik generasi baru aktivis. Jika diperbandingkan, kepelikan para petani-aktivis dalam mengelola usaha tani kecil sembari terlibat dalam kegiatan internasional membuat kerja-ragam-satu-waktu (*multitasking*) yang biasa dikeluhkan para profesional perkotaan tampak tak berarti.

Perubahan pola demografi dan struktur agraria sangat memengaruhi konteks pergerakan GAT. Laju urbanisasi, populasi petani yang menua, kesulitan yang dihadapi pemuda dalam mengakses tanah, serta hilangnya lahan-lahan tani skala kecil (GRAIN 2014), semuanya berpotensi melemahkan semangat aktivisme agraria. Perubahan lingkungan akibat krisis iklim juga memperdalam kerentanan dan merongrong daya tahan masyarakat tani, sekalipun GAT seperti LVC mendapuk pertanian rakyat sebagai sarana penting untuk “mendinginkan bumi” (Vía Campesina 2009). Ledakan ekonomi, seperti di Brasil pada awal 2000-an, bisa menurunkan daya tarik gerakan agraria militan; mereka yang ikut aksi pendudukan tanah, misalnya, kemudian lebih memilih tinggal di permukiman yang sudah ada untuk menerima layanan dari pemerintah (Fabrini 2015), atau mencari kerja yang nyaman ke kota, daripada berkemah di bawah terpal di tanah pendudukan. Sementara itu, perang si-

pil, kekerasan geng, dan krisis ekonomi—seperti yang terjadi di Amerika Tengah, Kolombia, Suriah, Filipina, dan Afrika Sub-Sahara—mendorong para petani untuk mencari “jalan keluar” melalui migrasi massal ketimbang “bersuara” dan berjuang di tanah leluhur mereka.

GAT seperti LVC dan IPC untuk Kedaulatan Pangan, yang mengambil posisi radikal terhadap isu-isu mendasar seperti antikapitalisme dan menyodorkan alternatif yang masuk akal seperti “kedaulatan pangan”, bukanlah gerakan sosial yang secara politis paling populer, sejauh para aktor lain baik negara dan bukan-negara diperhitungkan. Justru mereka merupakan koalisi gerakan sosial yang paling minim pendanaan. Sementara itu, jaringan internasional yang ideologinya konservatif dan secara politis cenderung moderat terus mendapatkan akses atas sumberdaya besar, hingga memungkinkan mereka menyebarluaskan gagasan “menang-menang” (*win-win*) sebagai solusi yang mereka tawarkan untuk masalah global, antara lain melalui kemitraan dengan Bank Dunia dan WTO. Barangkali sebagian tantangan tersulit yang dihadapi LVC dan IPC ialah bagaimana mereka dapat menata ulang posisi politik, membangun aliansi strategis lebih luas di tingkat global, dan mendapatkan dukungan logistik yang lebih kuat, tanpa mengorbankan komitmen dan akar prinsip mereka yang radikal.

Pada akhirnya, kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki korporasi, beserta model-model pertanian industrial yang mereka usung dan dengan lembaga pengaturan internasional yang mendukungnya, cukup menggentarkan. Benturan antara dua model pertanian, sebagaimana disebut oleh beberapa pendukung LVC (Martinez-Torres dan Rosset 2010)—produksi monokultur skala besar yang seragam secara genetik dan bergantung pada bahan kimia sintetik versus produksi agroekologis skala kecil yang beragam—adalah pertarungan yang sangat timpang. Tentu tidak semua petani adalah penjaga lingkungan, tapi banyak di antara mereka yang menjalankan peran itu, dan kini mereka menghadapi serangan bertubi-tubi dari beragam aspek sistem pertanian industrial: mulai dari kontaminasi pada plasma nutfah tanaman (benih), pen-

cemaran tanah dan air, pengusiran dari tanah, penundukan melalui sistem pertanian kontrak, tekanan dari rentenir dan tengkulak, hingga kriminalisasi terhadap gerakan mereka. Bahkan para ahli arus-utama makin mengakui bahwa model pertanian industrial tidak berkelanjutan dalam jangka panjang (IAASTD 2009), dan bahwa industri pangan justru membunuh konsumennya sendiri, dengan ongkos sangat mahal yang harus dibayar oleh masyarakat dan lingkungan (Bittman 2014). Justu karena parahnya krisis dan kontradiksi yang membayangi inilah—ditambah kekuatan dan kecerdikan organisasi-organisasi yang mendaku mewakili hampir setengah umat manusia—solusi-solusi yang disodorkan GAT kemungkinan besar bakal makin menonjol dalam agenda pembangunan dan keadilan sosial dunia.

PUSTAKA

- ACWW. 2012. "The Associated Country Women of the World." <http://www.acww.org.uk/>.
- AGARWAL, B. 2015. "The Power of Numbers in Gender Dynamics: Illustrations from Community Forestry Groups." *The Journal of Peasant Studies* 42(1): 1–20.
- AGBIOWORLD. 2010. AgBioView Archives, 30 November. http://www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive&newsid=3028.
- AKRAM-LODHI, A.H. dan C. KAY. 2010. "Surveying the Agrarian Question (Part 1): Unearthing Foundations, Exploring Diversity." *The Journal of Peasant Studies* 37(1): 177–202.
- AKRAM-LODHI, A.H. dan C. KAY. 2010. "Surveying the Agrarian Question (Part 1): Unearthing Foundations, Exploring Diversity." *The Journal of Peasant Studies* 37(1): 177–202.
- ALFORDE, N. 2013. "The White International: Anatomy of a Transnational Radical Revisionist Plot in Central Europe after World War I." Disertasi. West Yorkshire (Inggris): University of Bradford.
- ALONSO-FRADEJAS, A., S.M. BORRAS JR., T. HOLMES, E. HOLT-GIMÉNEZ, dan M.J. ROBBINS. 2015. "Food Sovereignty: Convergence and Contradictions, Conditions and Challenges." *Third World Quarterly* 36(3): 431–448.
- ALTIERI, M.A. dan V.M. TOLEDO. 2011. "The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants." *The Journal of Peasant Studies* 38(3): 587–612.
- ANHEIER, H. dan N. THEMUDO. 2002. "Organizational Forms of Global Civil Society: Implications of Going Global." Dalam *Global*

- Civil Society 2002*, disunting oleh M. GLASIUS, M. KALDOR, dan H. ANHEIER, 191–216. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- APC (ASIAN PEASANT COALITION). 2014. “The Asian Peasant Coalition (APC).” <http://www.asianpeasant.org/content/asian-peasant-coalition-apc>.
- ASSADI, M. 1994. “‘Khadi Curtain’, ‘Weak Capitalism’ and ‘Operation Ryot’: Some Ambiguities in Farmers’ Discourse, Karnataka and Maharashtra 1980–93.” *The Journal of Peasant Studies* 21(3–4): 212–227.
- BACHRIADI, D. 2010. “Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements in Indonesia Post-1965.” Disertasi. Adelaide (Australia): University of Flinders.
- BADSTUE, L.B., M.R. BELLON, J. BERTHAUD, A. RAMÍREZ, D. FLORES, dan XÓCHITL JUÁREZ. 2007. “The Dynamics of Farmers’ Maize Seed Supply Practices in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico.” *World Development* 35(9): 1579–1593.
- BALETTI, B., T. JOHNSON, dan W. WOLFORD. 2008. “‘Late Mobilization’: Transnational Peasant Networks and Grassroots Organizing in Brazil and South Africa.” *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 161–179.
- BARKER, C. 2014. “Class Struggle and Social Movements.” Dalam *Marxism and Social Movements*, disunting oleh C. BARKER, L. COX, J. KRINSKY, dan A.G. NILSEN, 39–61. Chicago (Amerika Serikat): Haymarket Books.
- BARTRA, A. dan G. OTERO. 2005. “Contesting Neoliberal Globalism and NAFTA in Rural Mexico: From State Corporatism to the Political-Cultural Formation of the Peasantry?” *Journal of Latino/Latin American Studies* 1(4).
- BASKARAN, A. dan R. BODEN. 2006. “Globalization and the Commodification of Science.” Dalam *Globalization, Inequality, and the Commodification of Life and Well-Being*, disunting MAMMO MUCHIE dan LI XING, 42–72. London (Inggris): Adonis & Abbey.

- BEBBINGTON, A., S. HICKEY, dan D. MITLIN, penyunting. 2008. *Can NGOs Make a Difference? The Challenge of Development Alternatives*. London (Inggris): Zed.
- BECK, U. 2004. "Cosmopolitical Realism: On the Distinction between Cosmopolitanism in Philosophy and the Social Sciences." *Global Networks* 4(2): 131–156.
- BELL, J.D. 1977. *Peasants in Power: Aleksander Stamboliyski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899–1923*. Princeton (Amerika Serikat): Princeton University Press.
- BENFORD, R.D. 1997. "An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective." *Sociological Inquiry* 67(4): 409–430.
- BERNSTEIN, H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- _____. 2019. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress.
- BIEKART, K. dan M. JELSMA, penyunting. 1994. *Peasants Beyond Protest in Central America*. Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.
- BIONDICH, M. 2000. *Stjepan Radić, the Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904–1928*. Toronto (Kanada): University of Toronto Press.
- BITTMAN, M. 2014. "Parasites, Killing Their Host: The Food Industry's Solution to Obesity." *The New York Times* 18 Juni.
- BLOKLAND, C. 1992. *Participación campesina en el desarrollo económico: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua durante la revolución sandinista*. Doetinchem (Belanda): Paulo Freire Stichting.
- BOAS, T.C. dan J. GANS–MORSE. 2009. "Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan." *Studies in Comparative International Development* 44(2): 137–161.
- BOÉRI, J. 2012. "Translation/Interpreting Politics and Praxis: The Impact of Political Principles on Babels' Interpreting Practice." *The Translator* 18(2): 269–290.

- BORRAS, S.M. 2004. "La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement." *TNI Briefing Paper Series* 2004/6. Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.
- _____. 2008. "Revisiting the Agrarian Movement–NGO Solidarity Discourse." *Dialectical Anthropology* 32(3): 203–209.
- _____. 2008. "La Vía Campesina and Its Global Campaign for Agrarian Reform." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 258–289.
- BORRAS, S.M., J. FRANCO, dan C. WANG. 2013. "The Challenge of Global Governance of Land Grabbing: Changing International Agricultural Context and Competing Political Views and Strategies." *Globalizations* 10(1): 161–179.
- BORRAS, S.M. dan J.C. FRANCO. 2009. "Transnational Agrarian Movements Struggling for Land and Citizenship Rights." *IDS Working Papers Series* 323.
- BORRAS, S.M., M. EDELMAN, dan C. KAY. 2008. "Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 169–204.
- BOYER, J. 2010. "Food Security, Food Sovereignty, and Local Challenges for Transnational Agrarian Movements: The Honduras Case." *The Journal of Peasant Studies* 37(2): 319–351.
- BRAUDEL, F. 1982. *The Wheels of Commerce, Volume 2: Civilization and Capitalism 15th–18th Century*. New York (Amerika Serikat): Harper & Row.
- BREM-WILSON, J. 2015. "Towards Food Sovereignty: Interrogating Peasant Voice in the United Nations Committee on World Food Security." *The Journal of Peasant Studies* 42(1): 1–23.
- BRENT, Z.W., C.M. SCHIAVONI, dan A. ALONSO-FRADEJAS. 2015. "Contextualising Food Sovereignty: The Politics of Convergence among Movements in the USA." *Third World Quarterly* 36(3): 618–635.

- BRUNO, K. dan J. KARLINER. 2002. *Earthsummit.biz: The Corporate Takeover of Sustainable Development*. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.
- BUIJTENHUIJS, R. 2000. "Peasant Wars in Africa: Gone with the Wind?" Dalam *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America*, disunting oleh D. BRYCESON, C. KAY, dan J. MOOIJ, 112–122. London (Inggris): Intermediate Technology Publications.
- BUNCH, R. 1982. *Two Ears of Corn: A Guide to People-Centered Agricultural Improvement*. Oklahoma City (Amerika Serikat): World Neighbors.
- BUNN, R. 2011. "Weeding through the WWOOF Network: The Social Economy of Volunteer Tourism on Organic Farms in the Okanagan Valley." Tesis. Okanagan (Kanada): University of British Columbia.
- BURNETT, K. dan S. MURPHY. 2014. "What Place for International Trade in Food Sovereignty?" *The Journal of Peasant Studies* 41(6): 1065–1084.
- CABARRÚS, C.R. 1983. *Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*. Meksiko: Ediciones de la Casa Chata.
- CADJI, ANNE-LAURE. 2000. "Brazil's Landless Find Their Voice." *NACLA Report on the Americas* 33(5): 30–35.
- CALHOUN, C. 1993. "'New Social Movements' of the Early Nineteenth Century." *Social Science History* 17(3): 385–427.
- CAMPOS, W. 1994. "We Don't Need All Those NGOs: Interview with Wilson Campos." Dalam *Peasants Beyond Protest in Central America*, disunting oleh KEES BIEKART dan MARTIN JELSMA. Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.
- CAPITANI, R. 2013. "ELAA forma terceira turma de tecnólogos em agroecologia." 30 Oktober. <http://escolalatinamericanadeagroecologia.blogspot.com/>.

- CAROTHERS, T. dan S. BRECHENMACHER. 2014. *Closing Space: Democracy and Human Rights Support under Fire*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): Carnegie Endowment for International Peace.
- CARR, E.H. 1964. *A History of Soviet Russia: Socialism in One Country 1924–1926*. Volume 3. New York (Amerika Serikat): Macmillan.
- CASTELS, M. 2012. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- CETIM, WFDY, dan VIA CAMPESINA. 2001. “The Opening of the Agricultural Markets and Their Consequences for the Peasants of the South.” Jenewa (Swiss): CETIM Centre Europe-Tiers Monde.
- CFS (COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY AND NUTRITION). 2012. “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.” Roma (Italia): FAO. <http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>.
- CHANG, H.-J. dan I. GRABEL. 2004. *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- CISSOKHO, M. 2008. *Nous sommes notre remède*. Bonneville (Prancis): GRAD-ROPPA.
- CISSOKHO, M. 2011. *God Is Not a Peasant*. Bonneville (Prancis): Precence Africaine et Grad.
- CLAEYS, P. 2013. “From Food Sovereignty to Peasants’ Rights: An Overview of Via Campesina’s Struggle for New Human Rights.” Dalam *La Via Campesina’s Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*. Jakarta: Via Campesina. <http://viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/EN-02.pdf>.
- CLIFFE, L., J. ALEXANDER, B. COUSINS, dan R. GAIDZANWA, penyunting. 2011. “Fast-Track Land Reform in Zimbabwe.” *The Journal of Peasant Studies* 38(5): Special Issue.

- CNA (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL). 2009.
 “IFAP em Davos: Presidente Ajay Vashee coloca Agricultores na Agenda.” Canal do Produtor Notícias CNA, 11 Februari. <http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/ifap-em-davos-presidente-ajay-vasheecoloca-agricultores-na-agenda>.
- COCA-COLA. 2013. “The Coca-Cola Company Commitment: Land Rights and Sugar.” http://assets.coca-colacompany.com/6b/65/7f0d386040fcb_4872fa136f05c5c/proposal-to-oxfam-on-land-tenure-and-sugar.pdf.
- COHEN, S.F. 1975. *Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938*. New York (Amerika Serikat): Vintage Books.
- COLBY, F.M., penyunting. 1922. *The New International Year Book: A Compendium of the World's Progress for the Year 1921*. New York (Amerika Serikat): Dodd, Mead and Company.
- COVINGTON, S. 2005. “Moving Public Policy to the Right: The Strategic Philanthropy of Conservative Foundations.” Dalam *Foundations for Social Change: Critical Perspectives on Philanthropy and Popular Movements*, disunting oleh DANIEL FABER dan DEBORAH MCCARTHY. Lanham (Amerika Serikat): Rowman & Littlefield.
- DA VIA, E. 2012. “Seed Diversity, Farmers’ Rights, and the Politics of Re-Peasantization.” *International Journal of the Sociology of Agriculture & Food* 19(2): 229–242.
- DAVIES, C. Tanpa tahun. “The Women’s Institute: A Modern Voice for Women.” <http://www.womens-institute.co.uk/memb-history/shtml>.
- DE GROOT, K. 1998. “Holanda.” Dalam *La cooperación de las sociedades civiles de la Unión Europea con América Latina*, disunting oleh CHRISTIAN FRERES. Madrid (Spanyol): AIETI.
- DEERE, C.D. dan F. ROYCE. 2009. “Introduction: The Rise and Impact of National and Transnational Rural Social Movements in Latin America.” Dalam *Rural Social Movements in Latin America*:

- Organizing for Sustainable Livelihoods*, disunting oleh CARMEN DIANA DEERE dan FREDERICK S. ROYCE. Gainesville (Amerika Serikat): University Press of Florida.
- DELLA PORTA, D., penyunting. *The Global Justice Movement: Cross-National and Transnational Perspectives*. Boulder (Amerika Serikat): Paradigm Publishers.
- DERKSEN, H. dan P. VERHALLEN. 2008. "Reinventing International NGOs: A View From the Dutch Co-Financing System." Dalam *Can NGOs Make a Difference? The Challenge of Development Alternatives*, disunting oleh ANTHONY BEBBINGTON, SAMUEL HICKEY, dan DIANA MITLIN. London (Inggris): Zed Books.
- DESMARAIS, A. 2003. "The WTO... Will Meet Somewhere, Sometime. And We Will Be There!" Ottawa (Kanada): North-South Institute.
- _____. 2007. *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Halifax (Kanada) dan London (Inggris): Fernwood Publishing dan Pluto Press.
- DORAN, T. 2013. "Study Puts Aging Farmer Population in Perspective." *AgriNews* 26 November. <http://agrinews-pubs.com/Content/Farm-Family-Life/Farm-Family-Life/Article/Study-puts--aging-farmerpopulation--in-perspective-/10/8/8911>.
- DORNER, P. 1992. *Latin American Land Reforms in Theory and Practice: A Retrospective Analysis*. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.
- DUDGEON, D. 1961. *Pennies for Friendship: The Autobiography of an Active Octogenarian; A Pioneer of ACWW*. London (Inggris): Gwenlyn Evans Caernarvon.
- DURANTY, W. 1920. "Accord in Balkans Takes Wider Scope." *New York Times* 27 Agustus.
- EDELMAN, M. 1997. "'Campesinos' and 'Técnicos': New Peasant Intellectuals in Central American Politics." Dalam *Knowing Your Place: Rural Identity and Cultural Hierarchy*, disunting oleh BARBARA

- CHING dan GERALD W. CREED. New York (Amerika Serikat): Routledge.
- _____. 1998. "Transnational Peasant Politics in Central America." *Latin American Research Review* 33(3): 49–86.
- _____. 2003. "Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks." Dalam *Global Civil Society 2003*, disunting oleh M. KALDOR, H. ANHEIER, dan M. GLASIUS, 185–220. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- _____. 2005. "When Networks Don't Work: The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America." Dalam *Social Movements: An Anthropological Reader*, disunting oleh JUNE C. NASH. Malden (Amerika Serikat): Blackwell.
- _____. 2008. "Transnational Organizing in Agrarian Central America: Histories, Challenges, Prospects." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3).
- _____. 2014. "Linking the Rights of Peasants to the Right to Food in the United Nations." *Law, Culture and the Humanities* 10(2): 196–211.
- EDELMAN, M. dan C. JAMES. 2011. "Peasants' Rights and the UN System: Quixotic Struggle? Or Emancipatory Idea Whose Time Has Come?" *The Journal of Peasant Studies* 38(1): 81–108.
- EDELMAN, M., T. WEIS, A. BAVISKAR, S.M. BORRAS JR., E. HOLT-GIMENEZ, D. KANDIYOTI, dan W. WOLFORD. 2014. "Introduction: Critical Perspectives on Food Sovereignty." *The Journal of Peasant Studies* 41(6): 911–931.
- EDWARDS, M. dan D. HULME. 1995. "NGO Performance and Accountability: Introduction and Overview." Dalam *Non-Governmental Organisations — Performance and Accountability*, disunting oleh MICHAEL EDWARDS dan DAVID HULME. London (Inggris): Earthscan.
- ESTEVA, G. 1983. *The Struggle for Rural Mexico*. South Hadley, Massachusetts (Amerika Serikat): Bergin & Garvey.

- FABRINI, J.E. 2015. "Sem-Terra: da centralidade da luta pela terra à luta por políticas públicas." *Boletim Dataluta* 86.
- FAO. 2006. "Evaluation Brief 4: Evaluation of fao's Cross-organizational Strategy on Broadening Partnerships and Alliances." Roma (Italia): FAO.
- _____. 2008. "The State of Food and Agriculture 2008: Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities." Roma (Italia): Food and Agriculture Organization (FAO). <http://www.fao.org/docrep/011/i0100e/i0100e00.htm>.
- _____. 2013. "FAO Will Cooperate with La Via Campesina, the Largest Movement of Small-Scale Food Producers in the World." 4 Oktober. <http://www.fao.org/news/story/en/item/201824/icode/>.
- _____. 2013. "Faostat Database." <http://faostat3.fao.org/home/E>.
- FEDER, E. 1978. "Campesinistas y descampesinistas. Tres enfoques divergentes (no incompatibles) sobre la destrucción del campesinado." *Comercio Exterior* [Meksiko] 28(1).
- FERNANDES, B.M. 2000. *A formação do mst no Brasil*. Petrópolis (Brasil): Editora Vozes.
- FFRENCH-DAVIS, R. 2003. *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. Santiago (Cile): J.C. Sáez.
- FIMARC. 2014a. "International Federation of Rural Adult Catholic Movements." <http://www.fimarc.org/Ingles/Bienvenida%28I%29.htm>.
- _____. 2014b. "FIMARC World Assembly – Volkersberg – Germany – May 2014." <http://www.fimarc.org/Ingles/Datos%202014%20I/FIMARC%20Res%20Eng-FINAL.pdf>.
- FOX, J. 1993. *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.
- _____. 2001. "Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society Policy Advocacy." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 30(3): 616–627.

- _____. 2003. "Framing the Inspection Panel." Dalam *Demanding Accountability: Civil-Society Claims and the World Bank Inspection Panel*, disunting oleh DANA CLARK, JONATHAN FOX, dan KAY TREACLE. Lanham (Amerika Serikat): Rowman & Littlefield.
- _____. 2005. "Unpacking Transnational Citizenship." *Annual Review of Political Science* 8: 171–201.
- _____. 2009. "Coalitions and Networks." Dalam *International Encyclopedia of Civil Society*, disunting oleh H.K. ANHEIER, S. TOEPLER, dan R. LIST, 486–492. New York (Amerika Serikat): Springer.
- FOX, J. dan L.D. BROWN, penyunting. 1998. *The Struggle for Accountability: The World Bank, NGOs and Grassroots Movements*. Cambridge (Amerika Serikat): MIT Press.
- FRANCO, J. 2014. "Reclaiming Free Prior and Informed Consent (FPIC) in the Context of Global Land Grabs." Amsterdam (Belanda): Transnational Institute. www.tni.org/files/download/reclaiming_fpic_0.pdf.
- FRANCO, J., L. MEHTA, dan G.J. VELDWSICH. 2013. "The Global Politics of Water Grabbing." *Third World Quarterly* 34(9): 1751–1675.
- FRANKE, R.W. dan B.H. CHASIN. 1980. *Seeds of Famine: Ecological Destruction and the Development Dilemma in the West African Sahel*. Montclair, New Jersey (Amerika Serikat): Allanheld Osmun.
- FRASER, N. 2003. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation." Dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ditulis oleh N. FRASER dan A. HONNETH (diterjemahkan oleh J. GALB, J. INGRAM, dan C. WILKE), 7–109. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat):Verso.
- GARCÍA JIMÉNEZ, P. 2011. "La Universidad Campesina: Una hazaña que comienza." *La Jornada* 20 Agustus. <http://www.jornada.unam.mx/2011/08/20/hazana.html>.

- GAVENTA, J. dan R. TANDON. 2010. *Globalising Citizens: New Dynamics of Inclusion and Exclusion*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- GFF. 2014. "1ère édition de l'Université Paysanne du roppa." Global Forum on Agricultural Research. <http://www.egfar.org/fr/news/imported/1re-dition-de-luniversit-paysanne-du-roppa>.
- GIANARIS, N.V. 1996. *Geopolitical and Economic Changes in the Balkan Countries*. Westport, Connecticut (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Praeger.
- GILL, L. 2000. *Tètering on the Rim: Global Restructuring, Daily Life, and the Armed Retreat of the Bolivian State*. New York (Amerika Serikat): Columbia University Press.
- GRAIN. 2014. "Hungry for Land: Small Farmers Feed the World with Less than a Quarter of All Farmland." 28 Mei. <http://www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland>.
- GREENBERG, S. 2004. "The Landless People's Movement and the Failure of Post-apartheid Land Reform." Durban (Afrika Selatan): University of KwaZulu-Natal.
- GRINDLE, M. 1986. *State and Countryside: Development Policy and Agrarian Politics in Latin America*. Baltimore (Amerika Serikat): Johns Hopkins University Press.
- GUPTA, A. 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.
- HALL, R. 2012. "The Next Great Trek? South African Commercial Farmers Move North." *The of Peasant Studies* 39(3-4): 823-843.
- HANDY, J. 2009. "'Almost Idiotic Wretchedness': A Long History of Blaming Peasants." *The Journal of Peasant Studies* 36(2): 325-344.
- HARVEY, N. 1998. *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.
- HELLEINER, E. 1994. "From Bretton Woods to Global Finance: A World Turned Upside Down." Dalam *Political Economy and the Changing*

- Global Order*, disunting oleh R. STUBBS dan G.R.D. UNDERHILL, 163–189. New York (Amerika Serikat): St. Martin's Press.
- HELLER, C. 2013. *Food Solidarity: French Farmers and the Fight against Industrial Agriculture and Genetically Modified Crops*. Durham, North Carolina (Amerika Serikat): Duke University Press.
- HELLMAN, J.A. 1992. "The Study of New Social Movements in Latin America and the Question of Autonomy." Dalam *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*, disunting oleh ARTURO ESCOBAR dan SONIA. ALVAREZ. Boulder (Amerika Serikat): Westview Press.
- HENRY, J.S. 2012. *The Price of Offshore Revisited: New Estimates for "Missing" Global Private Wealth, Income, Inequality, and Lost Taxes*. Chesham (Inggris): Tax Justice Network.
- HERRING, R.J. 2007. "Stealth Seeds: Bioproperty, Biosafety, Biopolitics." *Journal of Development Studies* 43(1): 130–157.
- HETLAND, G. dan J. GOODWIN. 2014. "The Strange Disappearance of Capitalism from Social Movement Studies." Dalam *Marxism and Social Movements*, disunting oleh C. BARKER, L. COX, J. KRINSKY, dan A.G. NILSEN, 82–102. Chicago (Amerika Serikat): Haymarket Books.
- HEWITT DE ALCÁNTARA, C. 1976. *Modernizing Mexican Agriculture: Socioeconomic Implications of Technological Change, 1940–1970*. Jenewa (Swiss): United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD).
- HINDU BUSINESS LINE. 2014. "Blaming Poor Returns, 61% Farmers Ready to Quit and Take up City Jobs: Survey." *The Hindu Business Line* 11 Maret. <http://www.thehindubusinessline.com/economy/blamingpoor-returns-61-farmers-ready-to-quit-and-take-up-city-jobs-survey/article5774306.ece>.
- HOLT-GIMÉNEZ, E. 2006. *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland (Amerika Serikat): Food First Books.

- HOLT-GIMÉNEZ, E. dan A. SHATTUCK. 2011. "Food Crises, Food Regimes and Food Movements: Rumbblings of Reform or Tides of Transformation?" *The Journal of Peasant Studies* 38(1): 109–144.
- HONDURAS LABORAL. 2010. "Directivos golpistas del cococh en Honduras se toman por asalto esa organización campesina." <http://www.honduraslaboral.org/article/directivos-golpistas-del-cococh-en-hondurasse-tom/>.
- HOPKINS, R., F. CARPANO, dan V. ZILVETI. 2006. "Securing Access to Land to Reduce Rural Poverty: The Experience of IFAD in Latin America and the Caribbean." Makalah dipresentasikan pada International Conference on Land, Poverty, Social Justice and Development, Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda, 12–14 Januari.
- HOWARD, P.H. 2009. "Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996–2008." *Sustainability* 1(4): 1266–1287.
- HUIZER, G. 1972. *The Revolutionary Potential of Peasants in Latin America*. Lexington (Amerika Serikat): Lexington Books.
- HUSSAIN, A. dan K. TRIBE. 1981. *Marxism and the Agrarian Question, Volume 1, German Social Democracy and the Peasantry 1890–1907*. Atlantic Highlands (Amerika Serikat): Humanities Press.
- HYDE, A.R.P. 2014. "Post-Corporate Capitalism? Counter-Culture and Hegemony in the Hudson River Valley." Tesis. New York (Amerika Serikat): Hunter College, City University of New York.
- IAASTD. 2009. *Agriculture at a Crossroads: Global Report*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development & Island Press.
- IALANOTICIAS. 2014. "El iala Paulo Freire auspicia juntamente con Alcaldía de oposición certámenes de Belleza en Barinas. Ni Maquillajes ni Incoherencias. Paulo Freire se respeta." 17 November. <https://web.archive.org/web/20150301161733/>

- <http://ialanoticias.blogspot.com/2014/11/el-iala-paulo-freire-auspicia.html>.
- ICA dan IFAP. 1967. *Cooperation in the European Market Economies*. Bombay (India): Asia Publishing House.
- ICARRD. 2006. "Report of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development." Porto Alegre (Brasil). http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/ICARRD_final_report_En.pdf.
- IFAD. 2005. "Towards a Farmers' Forum at ifad's Governing Council". 14 Februari. <http://www.ifad.org/events/gc/29/farmer/report.pdf>.
- _____. 2006. "Innovation Challenges for the Rural Poor." Issues Paper GC 29/L.13. <http://www.ifad.org/events/gc/29/panel/e/GC29-L-13.pdf>.
- _____. 2008. "Report of the Global Meeting of the Farmers' Forum." http://www.ifad.org/farmer/2008/report2008_web.pdf.
- IFAP. 2009. "About IFAP." ifap.org/en/about/aboutifap.html.
- _____. 1952. "FAO Position on International Commodity Problems." *IFAP News* 1(1).
- _____. 1957. *The First Ten Years of the International Federation of Agricultural Producers*. Paris (Prancis) dan Washington (Amerika Serikat): International Federation of Agricultural Producers (IFAP).
- INTERNATIONAL CONFERENCE. 2010. "Ajay Vashee — Speaker Profile." Prosiding Konferensi Internasional "Animal Welfare Education: Everyone Is Responsible," Brussels, 1–2 Oktober. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/docs/2021012009_conf_global_trade_farm_animal_wel_speaker_profile_ajay_vashee.pdf.
- JACKSON, G.D., JR. 1966. *Comintern and Peasant in East Europe, 1919–1930*. New York (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Columbia University Press.

- JUNTA DIRECTIVA NACIONAL AUTÉNTICA DEL COCOCH. 2010. “La verdadera realidad de los golpistas del cococh en Honduras, golpe de estado social al cococh.” <http://cococh.blogspot.ch/2010/03/replica-decomunicado.html>.
- JURIS, J.S. dan A. KHASNABISH, penyunting. 2013. *Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography, and the Political*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- KAY, C. 2006. “Rural Poverty and Development Strategies in Latin America.” *Journal of Agrarian Change* 6(4): 455–508.
- _____. 2008. “Reflections on Latin American Rural Studies in the Neoliberal Globalization Period: A New Rurality?” *Development & Change* 39(6): 915–943.
- KECK, M.E. dan K. SIKKINK. 1998. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Cornell University Press.
- KEOHANE, R. dan JOSEPH S. NYE, JR. 2000. “Introduction.” Dalam *Governance for the 21st Century*, disunting JOSEPH S. NYE, JR. dan JOHN D. DONAHUE. Washington, D.C. (Amerika Serikat): Brookings Institution.
- KERKVLiet, B. 2005. *The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.
- _____. 2009. “Everyday Politics in Peasant Societies (and Ours).” *The Journal of Peasant Studies* 39(1): 227–243.
- KOHLI, A. 2009. “Nationalist versus Dependent Capitalist Development: Alternate Pathways of Asia and Latin America in a Globalized World.” *Studies in Comparative International Development* 44(4): 386–410.
- KUNTZ, M. 2012. “Destruction of Public and Governmental Experiments of gmo in Europe.” *GM Crops & Food* 3(4): 258–264.
- LANDSBERGER, H.A. dan C.N. HEWITT. 1970. “Ten Sources of Weakness and Cleavage in Latin American Peasant Movements.” Dalam

- Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*, disunting oleh R. STAVENHAGEN, 559–583. Garden City (Amerika Serikat): Anchor Books.
- LECOMTE, B. 2008. “Les trois étapes de la construction d’un mouvement paysan en Afrique de l’Ouest.” Dalam *Défis agricoles africains*, disunting oleh JEAN-CLAUDE DEVÈZE, 119–135. Paris (Prancis): Karthala.
- LENIN, V.I. 1964 [1899]. *The Development of Capitalism in Russia*, Collected Works. Volume 3. Edisi keempat. Moskow (Rusia): Progress Publishers.
- LEÓN, O. 2014. “World-Wide Popular Movements to Meet with the Pope.” ALAI, América Latina en Movimiento, 25 Oktober. <http://alainet.org/active/78291>.
- LONDON TIMES. 1946a. “Conference of World Farmers: Supporting the F.A.O.” 20 Mei.
- LONDON TIMES. 1946b. “Marketing of Food.” 30 Mei.
- LUCAS, A. dan C. WARREN. 2003. “The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia.” *Indonesia* 76: 87–126.
- MACDONALD, L. 1997. *Supporting Civil Society: The Political Role of Non-Governmental Organizations in Central America*. New York (Amerika Serikat): St. Martin’s Press.
- MALSEED, K. 2008. “Where There Is No Movement: Local Resistance and the Potential for Solidarity.” *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 489–514.
- MARTINEZ-TORRES, M.E. dan P. ROSSET. 2010. “La Vía Campesina: The Birth and Evolution of a Transnational Social Movement.” *The Journal of Peasant Studies* 37(1): 149–175.
- . 2014. “Diálogo de saberes in La Vía Campesina: Food Sovereignty and Agroecology.” *The Journal of Peasant Studies* 41(6): 979–997.
- MCADAM, D. 1995. “‘Initiator’ and ‘Spin-Off’ Movements: Diffusion Processes in Protest Cycles.” Dalam *Repertoires and Cycles of*

- Collective Action*, disunting oleh M. TRAUGOTT, 217–239. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- MCKEON, N. 2009. *The United Nations and Civil Society Legitimizing Global Governance: Whose Voice?* London (Inggris): Zed Books.
- _____. 2013. “‘One Does Not Sell the Land Upon Which the People Walk’: Land Grabbing, Transnational Rural Social Movements, and Global Governance.” *Globalizations* 10(1): 105–122.
- MCMICHAEL, P. 2009. “A Food Regime Genealogy.” *The Journal of Peasant Studies* 36(1): 139–169.
- _____. 2008. “Peasants Make Their Own History, But Not Just as They Please ...” *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 205–228.
- MCNABB, M. dan L. NEABEL. 2001. “Manitoba Women’s Institute Educational Program.” <http://www.gov.mb.ca/agriculture/organizations/wi/mwi09s01.html>.
- MEIER, M. 1958. *ACWW 1929–1959*. London (Inggris): Associated Country Women of the World (ACWW).
- MINBUZA. 2009. “Maatgesneden Monitoring ‘Het Verhaal achter de cijfers’: Beperktebeleidsdoorrichting Medefinancieringsstelsel 2007–2010.” Den Haag (Belanda): Minbuza.
- MOGHADAM, V.M. 2012. “Global Social Movements and Transnational Advocacy.” Dalam *The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology*, disunting oleh E. AMENTA, K. NASH, dan A. SCOTT, 408–420. West Sussex (Inggris): Wiley-Blackwell.
- MONSALVE, S. 2013. “The Human Rights Framework in Contemporary Agrarian Struggles.” *The Journal of Peasant Studies* 40(1): 239–290.
- MOORE, B. JR. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Modern World*. Boston (Amerika Serikat): Beacon Press.
- MOSS, J.W. dan C.B. LASS. 1988. “A History of Farmers Institutes.” *Agricultural History* 62(2): 150–163.

- MOYO, S. dan P. YEROS, penyunting. 2005. *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. London (Inggris): Zed Books.
- O'BRIEN, K. 2013. "Rightful Resistance Revisited." *The Journal of Peasant Studies* 40(6): 1051-1062.
- O'BRIEN, K. dan L. LI. 2006. *Rightful Resistance in Rural China*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- O'BRIEN, R., A.M. GOETZ, J.A. SCHOLTE, dan M. WILLIAMS. 2000. *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- OECD. 2014. "Aid to Developing Countries Rebounds in 2013 to Reach an All-Time High." OECD Newsroom. <http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm>.
- OLIVEIRA, D. 2013. "Papa e mst: Stédile e Papa Francisco conversaram sobre o quê?" Roma. <https://www.youtube.com/watch?v=vP8tuPcY5bY>.
- PAIGE, J. 1975. *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York (Amerika Serikat): Free Press.
- PARÉ, L. 1972. *El Plan Puebla: Una revolución verde que está muy verde*. Jenewa (Swiss): United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD).
- PATEL, R. 2009. "Food Sovereignty." *The Journal of Peasant Studies* 36(3): 663-706.
- PATEL, V., C. RAMASUNDARAHETTIGE, L. VIJAYAKUMAR, J.S. THAKUR, V. GAJALAKSHMI, G. GURURAJ, W. SURAWEEERA, dan PRABHAT JHA. 2012. "Suicide Mortality in India: A Nationally Representative Survey." *The Lancet* 379(9834): 2343-2351.

- PATTENDEN, J. 2005. "Trickle-Down Solidarity, Globalisation and Dynamics of Social Transformation in a South Indian Village." *Economic and Political Weekly* 40(19): 1975–1985.
- PETRAS, J. dan H. VELTMEYER. 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*. London (Inggris): Zed Books.
- PIANTA, M. 2001. "Parallel Summits of Global Civil Society." Dalam *Global Civil Society 2001*, disunting oleh HELMUT ANHEIER, MARLIES GLASIUS, dan MARY KALDOR, 169–194. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- PONTIFICAL COUNCIL FOR THE LAITY. 2014. "International Federation of Rural Catholic Movements." <http://www.laici.va/content/laici/en/sezioni/associazioni/reperitorio/associazione-rurale-cattolica-internazionale.html>.
- POPKIN, S. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.
- PROVOST, C. 2013. "La Vía Campesina Celebrates 20 Years of Standing Up for Food Sovereignty." *The Guardian* 17 Juni. <http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/jun/17/la-viacampesina-food-sovereignty>.
- PUNDEFF, M. 1992. "Bulgaria." Dalam *The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century*, disunting oleh JOSEPH HELD, 65–118. New York (Amerika Serikat): Columbia University Press.
- PUTZEL, J. 1995. "Managing the 'Main Force': The Communist Party and the Peasantry in the Philippines." *The Journal of Peasant Studies* 22(4): 645–671.
- QUINN-JUDGE, S. 2003. *Ho Chi Minh: The Missing Years*. London (Inggris): Hurst & Company.
- RANGEL LOERA, NASHIEL. 2010. "'Encampment Time': An Anthropological Analysis of the Land Occupations in Brazil." *The Journal of Peasant Studies* 37(2): 285–318.

- RATNER, B.D., B. ÅSGÅRD, dan E.H. ALLISON. 2014. "Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform." *Global Environmental Change* 27: 120–130.
- ROBBINS, M.J. 2015. "Exploring the 'Localisation' Dimension of Food Sovereignty." *Third World Quarterly* 36(3): 449–468.
- ROSEBERRY, W. 1993. "Beyond the Agrarian Question in Latin America." Dalam *Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and the Capitalist World System in Africa and Latin America*, disunting oleh F. COOPER, A.F. ISAACMAN, F.E. MALLON, W. ROSEBERRY, dan S.J. STERN. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.
- ROSSET, P. 2013. "Re-thinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Vía Campesina." *The Journal of Peasant Studies* 40(4): 721–775.
- ROSSET, P. dan M.E. MARTÍNEZ-TORRES. 2005. "Participatory Evaluation of La Vía Campesina." Oslo (Norwegia): Norwegian Development Fund. <http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/reviews-from-organisations/publication?key=117349>.
- RUBIN, J.W. 2002. "From Che to Marcos: The Changing Grassroots Left in Latin America." *Dissent* 49(3). <https://www.dissentmagazine.org/article/from-che-to-marcos>.
- RUPP, L.J. 1997. *Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement*. Princeton, New Jersey (Amerika Serikat): Princeton University Press.
- SACAU. 2013. "Annual Report 2013." Pretoria (Afrika Selatan): South African Confederation of Agricultural Unions (SACAU). http://www.sacau.org/wp-content/uploads/2014/04/sacau-version-3d_custom_version.pdf.
- SACHS, J.D. 1999. "Sachs Denounces IMF and HIPC; Calls for Debt Write Off, IMF to Get Out." Testimony for the House Committee on Banking and Financial Services, Hearing on Debt Reduction, 15 Juni. <http://lists.essential.org/stop-imf/msg00144.html>.

- SANTOS, B.D.S. 2006. *The Rise of the Global Left: The World Social Forum and Beyond*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- SAUVINET-BEDOUIIN, R., N. NICHOLSON, dan C. TARAZONA. 2005. "Evaluation of fao's Cross-Organizational Strategy Broadening Partnership and Alliances." Roma (Italia): FAO.
- SCHIAVONI, C. 2009. "The Global Struggle for Food Sovereignty: From Nyéléni to New York." *The Journal of Peasant Studies* 36(3): 663–706.
- SCHOLTE, J.A.. 2002. "Civil Society and Democracy in Global Governance." Dalam *The Global Governance Reader*, disunting oleh RORDEN WILKINSON, 322–340. London (Inggris): Routledge.
- SCOONES, I. 2009. "The Politics of Global Assessments: The Case of the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)." *The Journal of Peasant Studies* 36(3): 547–571.
- _____. penyunting. 2010. *Zimbabwe's Land Reform: Myths and Realities*. Martlesham, Suffolk (Inggris): James Currey.
- SCOTT, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- _____. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- _____. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- _____. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- _____. 2009. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

- SEARCHINGER, T. dan R. HEIMLICH. 2015. *Avoiding Bioenergy Competition for Food Crops and Land*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): World Resources Institute (WRI).
- SELIGMANN, L.J. 2008. "Agrarian Reform and Peasant Studies: The Peruvian Case." Dalam *A Companion to Latin American Anthropology*, disunting oleh DEBORAH POOLE, 325–351. Malden (Amerika Serikat): Blackwell.
- SEN, A. 2000. *Development as Freedom*. New York (Amerika Serikat): Alfred A. Knopf.
- SEUFERT, P. 2013. "The FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests." *Globalizations* 10(1): 181–186.
- SHANIN, T. 1972. *The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society, Russia 1910–1925*. Oxford (Inggris): Clarendon Press.
- _____. 1990. *Defining Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*. Oxford (Inggris): Blackwell.
- _____. 2009. "Chayanov's Treble Death and Tenuous Resurrection: An Essay about Understanding, about Roots of Plausibility and about Rural Russia." *The Journal of Peasant Studies* 36(1): 83–101.
- SHATTUCK, A., C.M. SCHIAVONI, dan Z. VANGELDER. 2015. "Translating the Politics of Food Sovereignty: Digging into Contradictions, Uncovering New Dimensions." *Globalizations* 12(4): 421–433.
- SIMPSON, B.R. 2008. *Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960–1968*. Stanford (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- SINHA, S. 2012. "Transnationality and the Indian Fishworkers' Movement, 1960s–2000." *Journal of Agrarian Change* 12(2 dan 3): 364–389.
- SMILLIE, I. 1995. "Painting Canadian Roses Red." Dalam *Non-Governmental Organisations: Performance and Accountability*,

- disunting oleh MICHAEL EDWARDS dan DAVID HULME. London (Inggris): Earthscan.
- SMITH, J. dan H. JOHNSTON, penyunting. 2002. *Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements*. Lanham (Amerika Serikat): Rowman & Littlefield.
- SOROS, G. 2002. *On Globalization*. New York (Amerika Serikat): Public Affairs.
- STÉDILE, J.P. 2007. "The Class Struggles in Brazil: The Perspective of the MST." Diwawancara oleh Atilio Boron. Dalam *Global Flashpoints: Reactions to Imperialism and Neoliberalism, Socialist Register 2008*, disunting oleh LEO PANITCH dan COLINS LEYS, 193–216. London (Inggris): Merlin Press.
- STEPHEN, L. 1997. *Women and Social Movements in Latin America: Power from Below*. Austin (Amerika Serikat): University of Texas Press.
- STIGLITZ, J.E. 2002. *Globalization and its Discontents*. New York (Amerika Serikat) dan London (Inggris): W.W. Norton.
- STONE, G.D. 2007. "Agricultural Deskillling and the Spread of Genetically Modified Cotton in Warangal." *Current Anthropology* 48(1): 67–103.
- STREETS, J. dan K. THOMSEN. 2009. "Global Landscape: A Review of International Partnership Trends." Berlin (Jerman): Global Public Policy Institute.
- TARROW, S. 1994. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- _____. 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- THIESENHUSEN, W.C. 1995. *Broken Promises: Agrarian Reform and the Latin American Campesino*. Boulder (Amerika Serikat): Westview Press.
- THORNER, D. 1986 [1966]. "Chayanov's Concept of Peasant Economy." Dalam *The Theory of Peasant Economy*, ditulis oleh A.V. CHAYANOV. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.

- TILLY, C. 1986. *The Contentious French*. Cambridge (Amerika Serikat): The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. 2002. *Stories, Identities, and Political Change*. Lanham (Amerika Serikat): Rowman & Littlefield.
- _____. 1984. "Social Movements and National Politics." Dalam *Statemaking and Social Movements*, disunting oleh C. BRIGHT dan S. HARDING. Ann Arbor (Amerika Serikat): University of Michigan Press.
- TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS. 2010. Jugement du 04 Novembre 2010, Ouverture d'un liquidation judiciaire Regime General, Procedures Collectives No. RG 10/13970 Affaire: Federation Internationale des Producteurs Agricoles. Paris.
- TSING, A.L. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton (Amerika Serikat) dan Oxford (Inggris): Princeton University Press.
- UNHRC ADVISORY COMMITTEE. 2012. "Final Study of the Human Rights Council Advisory Committee on the Advancement of the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas A/HRC/AC/8/6." http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/docs/session8/A.HRC.AC.8.6_en.doc.
- UPTON, C. 2014. "The New Politics of Pastoralism: Identity, Justice and Global Activism." *Geoforum* 54: 207–216.
- VAN DER PLOEG, J.D. 2008. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London (Inggris) dan Sterling (Amerika Serikat): Earthscan.
- _____. 2013. *Peasants and the Art of Farming: A Chayanovian Manifesto*. Halifax dan Winnipeg (Kanada): Fernwood.
- VAN ROOY, A. 2004. *The Global Legitimacy Game: Civil Society, Globalization, and Protest*. New York (Amerika Serikat): Palgrave Macmillan.

- VASHEE, AJAY. 2010. "Moving on from Copenhagen." *New Agriculturist* Januari. <http://www.new-ag.info/en/view/point.php?a=1040>.
- VÍA CAMPESINA. 1996. "La Vía Campesina: Proceedings from the II International Conference of the Vía Campesina, Tlaxcala, Mexico, April 18–21, 1996." Brussels (Belgia): NCOS Publications.
- _____. 1999. "Vía Campesina Sets Out Important Positions at World Bank Events." *Vía Campesina Newsletter* 4 Agustus. http://ns.sdnhon.org.hk/miembros/via/carta4_en.htm.
- _____. 2002. *Peasant rights-Droits paysans-Derechos campesinos*. Jakarta: Vía Campesina. http://www.viacampesina.org/main_en/images/stories/pdf/peasant-rights-en.pdf.
- _____. 2004. "Debate on Our Political Positions and Lines of Actions: Issues proposed by the icc-Vía Campesina for regional and national discussion in preparation for the IV Conference." Dalam IV International Vía Campesina Conference: Themes and Issues for Discussion.
- _____. 2009. "Women: Gender Equity in La Vía Campesina." Dalam *La Vía Campesina Policy Documents. 5th Conference, Mozambique, 16th to 23rd October, 2008*. Jakarta: Vía Campesina. <http://viacampesina.org/downloads/pdf/policydocuments/POLICYDOCUMENTS-EN-FINAL.pdf>.
- _____. 2011. "The International Peasant's Voice." <http://viacampesina.org/en/index.php/organisation-mainmenu-44/what-is-la-via-campesinamainmenu-45/1002-the-international-peasants-voice27>.
- _____. 2012. *Las campesinas y los campesinos de La Vía Campesina dicen: ¡Basta de violencia contra las mujeres!* Brasília (Brasil): Secretaría Operativa de La Vía Campesina Sudamérica.
- _____. 2013. "La Vía Campesina Demands an End to the WTO: Peasants Believe that the WTO Cannot Be Reformed or Turned Around." 6 Desember. <http://www.viacampesina.org/en/index>.

- php/actionsand-events-mainmenu-26/10-years-of-wto-is-enough-mainmenu35/1538-la-via-campesina-demands-an-end-to-the-wto-peasants-believe-that-the-wto-cannot-be-reformed-or-turned-around.
- _____. 2013a. "La Vía Campesina: Our Seeds, Our Future." Notebook La Vía Campesina. Jakarta: La Vía Campesina.
- _____. 2013b. "La Vía Campesina Demands an End to the WTO: Peasants Believe that the WTO Cannot Be Reformed or Turned Around." 6 Desember. <http://www.viacampesina.org/en/index.php/actions-and-eventsmainmenu-26/10-years-of-wto-is-enough-mainmenu-35/1538-lavia-campesina-demands-an-end-to-the-wto-peasants-believe-that-thewto-cannot-be-reformed-or-turned-around>.
- VILAR, P. 1998. "Reflections on the Notion of 'Peasant Economy.'" *Review* (Fernand Braudel Center) 21(2): 151–189.
- VISSER, O., N. MAMONOVA, dan M. SPOOR. 2012. "Oligarchs, Megafarms and Land Reserves: Understanding Land Grabbing in Russia." *The Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 899–931.
- VON BÜLOW, M. 2010. *Building Transnational Networks: Civil Society and the Politics of Trade in the Americas*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- WADE, R.H. 2003. "What Strategies Are Viable for Developing Countries Today? The World Trade Organization and the Shrinking of 'Development Space'." *Review of International Political Economy* 10(4): 621–644.
- WALKER, K.L.M. 2008. "From Covert to Overt: Everyday Peasant Politics in China and the Implications for Transnational Agrarian Movements." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 462–488.
- WELCH, C.A. dan S. SAUER. 2015. "Rural Unions and the Struggle for Land in Brazil." *The Journal of Peasant Studies* 42(6): 1109–1135.
- WESTERN PRODUCER. 2011. "International Federation of Agricultural Producers Collapses." *Western Producer* 2 Maret. <http://www>.

- producer.com/daily/international-federation-of-agricultural-producers-collapses/.
- WFO. 2014. "World Farmers' Organisation — About Us." <http://www.wfo-oma.com/about-wfo.html>.
- WHITE, B. 2011. "Who Will Own the Countryside? Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming." Den Haag (Belanda): Institute of Social Studies (ISS).
- WIEBE, N. 2013. "Women of La Vía Campesina: Creating and Occupying our Rightful Spaces." Dalam *La Vía Campesina's Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*. Jakarta: La Vía Campesina.
- WIJERATNA, A. 2012. "The Committee on World Food Security (CFS): A Guide for Civil Society." Roma (Italia): Civil Society Mechanism. http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/1/csm_cfsguide_finalapr2012.pdf.
- WILLETTTS, P. 2006. "The Cardoso Report on the UN and Civil Society: Functionalism, Global Corporatism, or Global Democracy?" *Global Governance* 12(3): 305–324.
- WOLF, E.R. 1966. *Peasants*. Englewood Cliffs (Amerika Serikat): Prentice-Hall.
- _____. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York (Amerika Serikat), Evanston (Amerika Serikat), dan London (Inggris): Harper & Row.
- WOLFORD, W. 2010. "Participatory Democracy by Default: Land Reform, Social Movements and the State in Brazil." *The Journal of Peasant Studies* 37(1): 91–109.
- _____. 2010. *This Land Is Ours Now: Social Mobilization and the Meanings of Land in Brazil*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.
- WORLD BANK–IEG (INDEPENDENT EVALUATION GROUP). 2008. "The International Land Coalition." Washington, D.C. (Amerika Serikat): World Bank–Independent Evaluation Group (IEG).

- WORLD BANK. 2003. *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): The World Bank.
- YAMAMOTO, D. dan A.K. ENGELSTED. 2014. "World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in the United States: Locations and Motivations of Volunteer Tourism Host Farms." *Journal of Sustainable Tourism* 22(6): 964–982.
- YEH, E., K. O'BRIEN, dan JINGZHONG YE, penyunting. 2013. "Rural Politics in Contemporary China." *The Journal of Peasant Studies* 40(6): 915–928.

INDEKS

A

- Aberdeen, Ishbel Gordon 15
- abolisionisme, gerakan 15
- ActionAid 125, 170
- Activists Beyond Borders*, buku 150
- ACWW (Persatuan Perempuan Desa Sedunia) 14, 15, 16
- adivasi 55, 68
- AFA (Perhimpunan Petani Asia untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan) 157
- AFASA (Asosiasi Petani Afrika di Afrika Selatan) 77
- Afrika 24, 26, 27, 28, 35, 39, 51, 85, 160, 177
- Afrika Barat 106, 156
- ROPFA 28
- Afrika Selatan 13, 51, 53, 59, 68, 76, 77, 84, 85, 111, 112, 123, 124, 129, 163
- Afrika Utara 113, 175
- Agarwal, Bina 60
- agraria
- kajian 3, 35, 41, 61, 88, 117, 118, 142, 145
 - masalah 3, 4, 117
 - partai 16, 17, 18, 19, 21, 22
 - populisme 41, 42, 63, 64, 65, 87
 - reforma 1, 32, 33, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 68, 76, 82, 83, 88, 89, 153, 161, 165, 166, 171
- AgriSa (Rumah Petani Afrika Selatan) 77, 84, 85
- Agriterra 68, 75
- Agroekologi 79, 105, 106, 161, 162, 163, 172
- Akademi Kepausan untuk Ilmu Sosial 163
- aksi kolektif/bersama 4, 5, 33, 100, 118, 122, 142
- Alegria, Rafael 53, 68, 97, 101, 102, 116
- aliansi/sekutu 7, 52, 78, 85, 94, 117, 118, 119, 142, 148, 162, 163, 165, 166, 170, 173
- kelas 8, 65–67, 87, 93, 94, 117, 171, 175
- transnasional 3, 13, 39, 150, 161, 177
- Aljazair 44, 140
- Alliance for Progress 32
- Amerika
- Biro Pertanian 71
 - Latin 24, 31, 32, 42, 91, 105, 106, 124, 137, 163
 - Serikat 30, 32, 37, 51, 57, 72, 103, 107, 137, 138, 140, 144, 159
 - Tengah 3, 11, 13, 19, 27, 39, 55, 91, 104, 105, 138, 164, 174, 177
 - Utara 13, 36, 51, 68, 71, 107, 121
- ANACH (Serikat Petani Nasional Honduras) 68
- anarkis 38, 63, 64, 164
- Angola 118
- ANPF (Federasi Petani Seluruh Nepal) 90, 91
- APC (Koalisi Petani Asia) 45, 65, 70, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 167
- Argentina 77, 106, 163
- Asia 24
- Macan 32
 - Selatan 53, 54, 60, 65, 90, 92, 104, 119
 - Tenggara 3, 31, 39, 176
- ASOCODE (Asosiasi Organisasi Tani Amerika Tengah untuk Kerjasama dan Pembangunan) 11, 27, 55, 128, 129, 174
- ATC (Asosiasi Pekerja Tani Pedesaan) 56, 68

Austria 17, 18

B

Babels 40

bahan bakar nabati (BBN) 4, 73, 85, 163

Bangladesh 53, 64, 90, 91, 140

Bank Dunia 28, 29, 30, 36, 38, 50, 52, 66,
73, 82, 83, 85, 86, 96, 97, 148, 152, 164,
165, 166, 171

Barker, Colin 8

Belanda 17, 68, 75, 127, 130, 135, 136,
137, 138

Belgia 15, 24, 59, 71, 127

Bello, Walden 125

benih 30, 31, 37, 38, 39, 41, 48, 57, 87,
103, 104, 159, 162, 171, 172, 177
korporasi/perusahaan 1, 38

Big Four (Empat Besar), lembaga donor
135, 136, 137

Biro Agraria Internasional 18, 21

BKF (Federasi Petani Bangladesh) 64,
90, 91

BKS (Serikat Perempuan Tani Bangladesh)
90, 91

BKU (Serikat Petani India) 57, 92

Bolivia 32, 35, 162, 173
revolusi 32

Bové, José 103

Boyer, Jefferson 105, 109

Brasil 3, 39, 51, 52, 53, 57, 59, 66, 68, 88,
91, 97, 101, 104, 105, 111, 112, 124, 145,
147, 158, 162, 163, 165, 167, 176

Braudel, Fernand 42

Bretton Woods, sistem 29, 36

Bukharin, Nikolai 20

Bulgaria 16, 17, 18, 164

Burkina Faso 28

Burma 35

buruh, gerakan 7, 8, 56, 57, 59, 65, 89,
100, 113, 118, 119, 120, 133, 163

C

campesinistas 42, 43

Campesino a Campesino (Petani ke
Petani), gerakan 13, 105

Campos, Wilson 128

Cancún 104, 127

Cardoso, Fernando Henrique 147

CCODP (Organisasi Katolik Kanada
untuk Pembangunan dan Perdamaian)
141

Cekoslowakia 16, 17, 21

CENESTA (Pusat Pembangunan
Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup)
78

CETIM (Pusat Kajian Eropa-Dunia
Ketiga) 158

CFA (Federasi Pertanian Kanada) 71, 73

CFS (Komite Ketahanan Pangan Dunia),
PBB 81, 151, 153, 154, 156, 160, 161,
168, 170, 171

CFU (Serikat Petani Komersial),
Zimbabwe 77

Chayanov, A.V. 4, 42, 43, 44, 48, 61

Chiapas 119, 145

ChristianAid 125

CIDA (Badan Pembangunan Internasional
Kanada) 141

Cile 13, 37

CILSS (Komite Antarnegara untuk
Penanggulangan Kekeringan di Sahel)
27

CLOC (Koordinator Organisasi Pedesaan
Amerika Latin) 60, 101, 106

Club du Sahel 27, 28

CNA (Konfederasi Pertanian dan
Pernakan Brasil) 97

CNCR (Dewan Nasional untuk
Kerjasama Rakyat Pedesaan), Senegal
66

CNTC (Sentral Pekerja Pedesaan
Nasional), Honduras 68

COATI (Kolektif Swakelola Teknologi
Penerjemahan Lisan) 40

Coca-Cola 155

- COCOCH (Dewan Koordinasi Organisasi Petani Honduras) 53, 68, 175
- CONAMPRO (Koordinator Nasional Petani Kecil dan Menengah Guatemala) 11
- Confédération Paysanne (Konfederasi Petani Prancis) 103
- CONTAG (Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian), Brasil 88, 97
- COPA (Komite Organisasi Pertanian Profesional Uni Eropa) 71, 77
- COPROFAM (Konfederasi Produsen Berbasis Keluarga untuk Pasar Bersama Amerika Selatan) 157
- Cordaid 135
- Cornell, Universitas 16
- CPE (Koordinasi Petani Eropa) 56, 72
- Crocevia 78
- CSD (Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB) 148
- D**
- Dalit 55, 68, 89, 90
- da Silva, José Graziano 162
- Deere, Carmen Diana 60, 124
- Deklarasi Hak Asasi Petani dan Pekerja Pedesaan Lainnya 25, 158, 159
- descampesinistas* 42, 43
- de Schutter, Olivier 163, 170
- desentralisasi 102, 146, 147, 150
- Dewan HAM PBB 151, 158, 159, 160, 162, 163, 171
- dewan komoditas 33, 34, 50, 55
- diferensiasi
- antar-GAT 69, 70, 88
 - debat seputarnya 41
 - debat seputarnya di Amerika Latin 42
 - debat seputarnya di Meksiko 42
 - debat seputarnya di Rusia 41, 42, 43
 - di dalam GAT 71
 - petani 41, 42, 46, 48, 61, 88
 - kelas 31, 46, 48, 61, 71
- dumping 34
- E**
- ECOWAS (Kelompok Ekonomi Afrika Barat) 27
- ECVC (Koordinasi Vía Campesina Eropa) 77
- ekonomi moral 117
- ekonomi-politik 8, 86
- Ekuador 57, 140, 162
- ELAA (Sekolah Agroekologi Amerika Latin), Brasil 105
- Eldorado dos Carajás 104
- Eropa 3, 5, 13, 16, 21, 22–25, 27, 29, 37, 38, 39, 42, 51, 56, 57, 59, 68, 71, 72, 77, 85, 101, 103, 106, 107, 121, 127, 134, 137, 139, 158, 159, 174
- Komisi 85
- Uni 37, 159
- ETC Group (Kelompok Kajian dan Advokasi tentang Erosi, Teknologi, dan Konsentrasi Kekuasaan), Kanada 122, 125
- Ethiopia 141
- etnis 8, 43, 58, 59, 63, 67, 78, 114, 171
- F**
- FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) 2, 21, 22, 23, 73, 74, 81, 85, 148, 149, 153, 154, 156, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 170
- FARC (Tentara Revolusioner Kolombia) 35, 119
- Federasi Petani Maju Korea 104
- FIAN (Jaringan Informasi dan Aksi untuk Kedaulatan Pangan) 52, 122
- Filipina 13, 31, 35, 47, 53, 57, 58, 89, 90, 103, 129, 138, 177
- FIMARC (Federasi Internasional Gerakan Umat Katolik Pedesaan) 24, 25, 26, 79, 87, 160
- Finlandia 21
- Florestan Fernandes, Sekolah 105

Focus on the Global South 52, 122, 125
 Food First (Lembaga Kebijakan Pangan dan Pembangunan) 122, 125, 136
 Forum Nasional Reforma Agraria, Brasil 165
 Forum Petani (Farmers' Forum) 155, 156, 157, 171
 Fox, Jonathan 145, 150
 FPIC (padiatapa) 155, 170
 Freire, Paulo 68
 Friends of the Earth 137

G

G-7 38
 gandum 31, 35, 39
 GAT (gerakan agraria transnasional)
 jejak sejarahnya 14
 kebangkitannya 3, 8, 22, 23, 36, 55, 58, 72, 93, 94, 100, 119, 122, 126, 126–127, 133, 142, 145, 146, 147, 171
 keruntuhannya 6, 9, 20, 22, 24, 74, 76, 95, 108–109, 129, 132, 141, 173–174
 masalah bahasa 39, 40, 171, 175
 GATT (Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan) 34, 36, 71, 125, 127
 Gaventa, John 82, 152
 GCAR (Kampanye Global untuk Reforma Agraria) 52, 53
 gender 1, 8, 16, 41, 43, 58, 59, 60, 63, 67, 70, 78, 106, 107, 163, 171, 172
 generasi 8, 14, 26, 29, 42–44, 58, 61–63, 67, 78, 118, 119, 171, 176
 George, Susan 125
 gerakan sosial 3, 4, 5, 6, 8, 10, 45, 63, 70, 73, 81, 94, 110, 111, 113, 130, 134, 135, 147, 164, 169, 173–175
 baru 14
 diferensiasi ideologisnya 63, 64
 fiktif 9
 “lama” dan “baru” 5
 teori tentangnya 6–9
 transnasional 6, 7
 Gereja Katolik 24, 87, 135, 136, 163, 164

Gill, Lesley 131
 globalisasi 3, 7, 8, 13, 14, 80, 95, 142, 146, 147, 150
 GMO (organisme rekayasa genetika) 54, 57, 73, 83, 84, 103, 109, 115, 125, 171, 176
 Grabois, Juan 163
 GRAIN (Aksi Internasional untuk Sumberdaya Genetika), Spanyol 122, 125, 176
 Green International 3, 16, 18, 21, 22, 40
 Grindle, Merilee 145
Guardian, media 110
 Guinea Bissau 28

H

Haiti 112
 hak asasi manusia (HAM) 35, 76, 86, 139, 159, 160, 172
 hak atas tanah 1, 63, 158, 159
 Hari Perjuangan Petani Internasional 104
 Heim, Georg 18
 Himpunan Pengusaha Tani Nasional Inggris 22
 HIPC (negara-negara miskin yang paling banyak berutang) 38
 HIVOS (Institut Humanis untuk Kerjasama dengan Negara-Negara Berkembang), Belanda 135
 Ho Chi Minh 19, 20
 Holt-Giménez, Eric 13, 93, 105, 136
 Honduras 53, 68, 101, 102, 109, 116, 140, 173, 175, 176
 Hong Kong 105
 Hungaria 17, 18, 19, 140

I

IAASTD (Kajian Internasional tentang Pengetahuan, Sains, dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan) 161, 178
 IALA (Institut Universitas Agroekologi Amerika Latin “Paulo Freire”) 106

INDEKS

- ICA (Komisi Pertanian Internasional), Paris 21, 22, 23, 40
- ICARRD (Konferensi Internasional untuk Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan) 81, 82, 153, 161, 167, 168
- ICC (Komite Koordinasi Internasional Vía Campesina) 59, 60, 106, 144
- ICCO (Organisasi Antargereja untuk Kerjasama Pembangunan), Belanda xv, xxxi, 126, 135, 144
- ICSF (Kolektif Internasional untuk Penguatan Pekerja Perikanan), India dan Belgia 78
- ICW (Dewan Perempuan Internasional) 15
- identitas, politik 5, 8, 39, 41, 43, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 69–72, 78, 80, 82, 87, 94, 175
- identitas agama 24, 44, 58, 59, 70, 171
- IFAD (Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian) 85, 148, 151, 155–157, 160, 164, 165, 171
- IFAP (Federasi Internasional Produsen Pertanian) 22–24, 40, 43, 45, 55, 56, 57, 69, 71–77, 80–85, 88, 89, 97, 129, 130, 141, 142, 149, 155–157, 164, 167, 170, 174
- IFC (Korporasi Keuangan Internasional) 83
- IFIS (lembaga keuangan internasional) 27, 85, 86, 87, 164
- IIA (Institut Pertanian Internasional), Roma 20–23
- ILC (Koalisi Internasional untuk Akses Tanah) 69, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 164, 167
- IMF (Dana Moneter Internasional) 29, 36, 73, 165
- India 30, 31, 39, 51, 53, 54, 57, 60, 65, 89, 90, 92, 103, 104, 107, 109, 132, 140, 164, 176
- Indonesia 11, 13, 37, 53, 90, 112, 122–124, 129, 140, 158
- industrialisasi substitusi impor 30
- Inggris 22, 23, 25, 26, 29, 36, 103
- Institut Agraria Internasional, Moskow 20
- Institut Perempuan 15
- Institut Petani (Farmers' Institute) 15
- intelektual tani baru 120
- Inter Pares 141
- IPC (Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan) 25, 69, 78–82, 87–89, 126, 141, 142, 153, 154, 161, 167–169, 171, 177
- Italia 78, 163
- IUF (Serikat Pekerja Internasional untuk Sektor Pangan, Pertanian, Hotel, Restoran, Katering, Tembakau, dan Sektor Terkait) 79, 88, 160
- IWW (Buruh Industri Sedunia) 164
- J**
- jagung 31, 34, 39
- jaringan 11
- Jepang 19, 26, 32, 51
- Jerman 15, 19, 103, 137, 138
- jet set campesino* 108
- Jubilee 2000, gerakan 38
- K**
- Kamboja 35, 140
- Kampanye Global untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan 60
- Kanada 15, 23, 25, 30, 37, 38, 39, 47, 51, 65, 68, 71, 72, 106, 125, 127, 137, 140
- kapas 27, 84, 109, 176
- kapitalisme 4, 8, 42, 43, 62, 83, 87
- Karibia 79, 91, 104, 107
- Katayama, Sen 19
- kaum pemilik negeri 66, 77, 100
- kaum tani/petani
- definisinya 1, 112, 160
- hak-haknya 25, 158–160
- kajian 35, 43–44

- kaya 8, 44, 47–51, 55–57, 65, 71, 72, 77, 81, 92, 150
 dan Marxisme 38
 masa kini 6, 7
 menengah 41–44, 47, 48, 50, 51–53, 55, 61, 62, 65, 72, 87, 92–94, 117
 miskin 41, 42, 44, 46, 47–51, 54, 62, 65, 77, 129, 131, 132, 150
 organisasi/serikat 6, 20, 29, 33, 102, 111, 164
 pandangan elite atasnya 7
 partai politiknya 3
 pendidikan lebih tinggi 7
 potensi revolusioner 43, 44
 sebagai aktor menyebarkan 2, 35
 tunakisma/tak bertanah 8, 39, 41, 46, 51, 52, 54, 56–59, 63, 80, 82, 84, 89, 100, 111, 112, 163
 universitas/kampus 105–106
 Kautsky, Karl 4
 keadilan global, gerakan 5, 7, 69, 121, 131, 151
 keanekaragaman hayati 31, 76, 87
 Keck, Margaret E. 6, 40, 46, 150
 kelas 8, 39, 41–43, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 70, 94, 131
 aliansi/multikelas 8, 65, 67, 87, 93, 94, 117, 171, 175
 analisis 57, 63, 65, 77, 147
 dan gender 8, 59, 67, 70
 dan ras/etnisitas 58
 diferensiasi 31, 41, 42, 44, 46, 48, 71, 88
 menengah 32, 72, 85, 131
 politik 5, 41, 42, 51, 54–56, 58, 62–66, 69–73, 76–78, 80–84, 86, 93, 167
 kemitraan 30, 73, 140, 147–149, 161, 162, 165–167, 177
 Kentucky Fried Chicken (KFC) 103
 Kenya 140
 Kerkvliet, Benedict 145
 Keynesian, kebijakan 29, 36
 Keynes, John Maynard 29
 KMP (Gerakan Petani Filipina) 89, 91, 129
 KMT (Kuomintang/Partai Nasionalis Tiongkok) 20
 koalisi 11
 Kolombia 35, 59, 91, 119, 177
 komunis(me) 14, 17–20, 22, 31, 32, 40, 118, 119, 139
 Bulgaria 17
 Komintern 18, 19, 20
 Kongo 85
 Korea Selatan 26, 32, 37, 51, 104, 105, 164
 korporasi/perusahaan multinasional/transnasional 54, 87, 89, 95, 103, 125, 137, 147, 154–155, 168, 169, 171, 177
 Krest'ianskii Front (Front Petani) 113
 Krestintern (Red Peasant International) 16, 19–21
 KRRS (Serikat Petani Karnataka), India 53–55, 57, 65, 92, 109, 132, 164
 KTT Lingkungan 147
 KTT Pangan Dunia 80, 81, 161
 Kuba 105, 163
 revolusi 32, 35
 kulaks 19, 44, 47
L
 Laur, Ernst 21, 22
 Lee Kyung-hae 104
 lembaga antarpemerintah 2, 39, 72, 73, 85, 86, 145, 146, 149–153, 157, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 177
 lembaga donor 27, 39, 56, 59, 86, 99, 100, 106, 117, 118, 120, 121, 122, 125–137, 140–144, 151, 155, 174
 Lenin, V.I. 4, 43, 44, 47
 Liberia 28, 35
 Liga Bangsa-Bangsa 16, 21, 23
 Li, Lianjiang 117, 145
 lingkungan 1, 7, 16, 23, 38, 41, 64, 70, 74, 78, 173

- LPM (Gerakan Rakyat Tunakisma), Afrika Selatan 53, 77, 84, 111, 112, 116, 123, 124
- LRAN (Jaringan Penelitian dan Aksi untuk Reforma Agraria) 52, 125
- LMS/ornop 2, 6, 27, 39, 45, 56, 68, 71, 75, 82, 85–87, 110, 115, 117–135, 141, 142, 148–151, 158, 163, 164, 173–175 dan gerakan petani 7
- LTO (Asosiasi Pertanian dan Hortikultura), Belanda 77
- LVC (La Vía Campesina) 3, 5, 9, 11, 13, 24, 25, 28, 40, 41, 43, 45, 46, 51–57, 59, 60, 63–69, 70–79, 80, 89, 91–97, 101, 102, 104–106, 110, 112, 122, 123–128, 130, 132, 142, 143, 144, 149, 153, 154, 156–159, 160–169, 171, 173, 175, 176, 177
- M**
- Maharashtra 55, 92
- Makedonia 17, 18
- Malaya 35
- Malaysia 15, 89, 140
- Mali 28
- Maois 63–65, 91, 119
- Mao Tse-tung 20, 117
- Marxis(me) 38, 41, 42, 44, 63–65, 88, 91, 93, 117
- masyarakat adat/asli 24, 39, 51, 68, 78, 83, 88, 89, 106, 107, 132, 158, 160, 163, 173
- masyarakat sipil (OMS) 7, 28, 73, 96, 137, 139, 140, 141, 146–154, 157, 160, 168, 170, 173
- McDonald 103
- MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) 148
- Mečřř, Karel 21, 22
- Meksiko 13, 19, 30, 31, 32, 42, 44, 51, 59, 65, 68, 91, 101, 104, 105, 106, 118, 122, 127, 145
revolusi 30, 32, 44
- Melin, Jules 40
- Mesir 140
- migran/pendatang 39, 52, 57, 58, 59, 76, 89, 113, 177
- MIJARC (Gerakan Internasional Pemuda Katolik Pertanian dan Pedesaan) 24
- Misereor 125
- mística* 104, 172
- MLAR (reforma agraria berbasis pasar) 52, 53
- Mobilization*, jurnal 8
- MOCASE (Gerakan Petani Santiago del Estero), Argentina 77
- Mongolia 90
- Moore, Barrington, Jr. 145
- Morales, Evo 173
- Mozambik 59
- Mpofu, Elizabeth 53, 162
- MST (Gerakan Pekerja Tunakisma), Brasil 3, 39, 53, 66, 88, 104, 105, 111, 112, 124, 145, 163
- Mulroney, Brian 37
- N**
- NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara) 36
- Namibia 59
- Nanjundaswamy, M.D. 55
- nasionalisme metodologis 5
- NAV (Serikat Petani Tanaman Pangan), Belanda 77
- nelayan 11, 24, 39, 51, 78, 79, 80, 89, 113, 157, 160, 163
- neoliberalisme 7, 14, 29, 36–38, 72, 80, 102, 134, 142, 145, 146, 150, 165
definisinya 37, 38
evolusinya 38
pertanian 37
Konsensus Washington 38
- Nepal 53, 90, 91, 140
- NFFC (Koalisi Nasional Pertanian Keluarga), Amerika Serikat 72
- NFU (Serikat Petani Nasional), Kanada 39, 59, 65, 72, 106

- Nicholson, Paul 56, 148
 Nigeria 28
 Nikaragua 13, 55, 56, 68, 119, 140, 175
 NLC (Komite Nasional Reforma Agraria), Afrika Selatan 123, 124, 129
 Nyéléni 28
- O**
 O'Brien, Kevin 117, 145
 ODA (bantuan luar negeri untuk pembangunan) 134, 135, 137–139
 OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) 135, 136, 138, 139
 okupasi/pendudukan tanah 3, 73, 112, 176
 OWINFS (Our World Is Not For Sale) 95
 Oxfam (Novib) 121, 125, 135, 144, 170
- P**
 padi 31, 47
 PAFO (Organisasi Petani Pan-Afrika) 157, 170
 Paige, Jeffrey 117, 118
 Pakistan 31, 89
 Palestina 164
 PAN-AP (Jaringan Antipestisida Asia dan Pasifik) 89, 91
 pangan
 harga 49, 50, 73, 74, 81, 85, 153
 kedaulatan 1, 25, 26, 28, 69, 76, 78, 80, 81, 89, 93–96, 109, 160, 162, 171, 176, 177
 ketahanan 76, 78, 81, 109, 151, 153, 155, 168, 171, 176
 krisis 2008 2, 4, 73, 158, 159
 partai politik 3, 16, 17, 23, 33, 34, 66, 72, 117–121, 125, 126, 127, 142, 143, 172, 174
 organisasi petani 33
 Patayan, Felicísimo “Ka Memong” 129
 Paus Fransiskus (Jorge Mario Bergoglio) 163, 164
 PBB 16, 21, 25, 29, 73, 135, 148, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 168, 171
 Dewan HAM 151, 158–160, 162, 163, 171
 FAO 21, 22, 23, 73, 81, 85, 148, 149, 153, 154, 156, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 170
 IFAD 85, 148, 151, 155, 156, 157
 Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) 81, 151, 153, 154, 156, 160, 161, 168, 170, 171
 KTT Lingkungan 147
 KTT Pangan Dunia 78, 80, 81, 161
 Program Pangan Dunia 156
Peasant Wars of the Twentieth Century, buku 44
 pedesaan baru 62
 peluang politik 5, 6
 pemangku kepentingan 147, 168, 173
 pembangunan berkelanjutan 78, 148
 peneliti yang terlibat dalam gerakan (*engaged researcher*) 45
 penjaga gerbang 52, 54, 100, 109, 175
 penyesuaian struktural ekonomi 28, 34, 36, 38
 perampasan 85, 87
 perampasan tanah 4, 25, 74, 85, 86, 153, 155, 168, 171
 Perang Dingin 32, 138
 Perang Dunia II 13, 16, 22, 23, 28, 29, 32
 perdagangan, pengaturan/perjanjian 1, 28, 34, 36, 37, 41, 55, 73, 76, 95, 103, 115, 125, 149
 perdagangan adil 25
 perempuan, organisasi 14–16, 60, 79, 89, 90, 99, 106, 107, 112, 131
 perjuangan pembebasan nasional 13, 118, 120
 perlawanan sehari-hari 113, 117, 145
 pertanian industri 2, 4, 25, 38, 93, 108, 161, 177, 178

- pertanian yang didukung komunitas
(*community-supported agriculture*) 107
- Peru 119, 141
- perubahan iklim 1, 4, 57, 62, 74, 76, 89,
133, 176
- petani/pelaku usaha tani
kaya/sejahtera 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55,
56, 57, 62, 65, 71, 72, 74, 77, 81, 84,
85, 92, 100, 150, 170
kecil 51, 72, 76, 77, 93, 150, 162
komersial 8
menengah 48, 51, 53, 55, 61, 62, 72,
76, 150
miskin 47, 48, 49, 62, 77
- peternak/penggembala/pastoral 27, 39,
51, 59, 62, 78, 80, 83, 89, 160
- Petras, James 131
- PFS (Yayasan Paulo Freire) 56, 68, 71, 75,
95, 127, 130
- Pinochet, Augusto 37
- PKT (Partai Komunis Tiongkok) 20
- pluriactivity* (kerja majemuk) 62
- pola bumerang 151
- Polandia 16, 17, 19, 175
- Popkin, Samuel 118
- populasi/penduduk 1, 2, 107, 176
pedesaan 2, 107, 147, 176
petani di dunia 1, 2
- populisme 14, 41, 42, 63–65, 87
- Portugal 24, 35
- Prancis 21, 28, 30, 40, 74, 75, 103
- Program Pangan Dunia 156
- PROPAC (Wahana Regional Organisasi
Petani Afrika Tengah) 170
- protes
khazanah/strategi 3, 70, 73, 102, 103,
105, 115, 160, 166, 167
siklus 9, 100
- Punta del Este, pertemuan 32
- R**
- Radić, Stjepan 19
- RAFI (Yayasan Internasional untuk
Pemajuan Pedesaan) 125
- RAI (investasi pertanian yang bertanggung
jawab) 78, 168
- ras 8, 43, 58, 70, 72, 75, 171
- Reagan, Ronald 37
- REDD+ (Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan) 62
- Rede Social 52
- representasi/keterwakilan/perwakilan 55,
65, 69, 76, 81, 82, 100–101, 110, 112,
113, 115, 129, 130, 131, 132, 143, 152,
157
- revolusi 19, 30–32, 35, 42–44, 117–119,
138
- revolusi hijau 30–32
- Rhodesia, *lihat* Zimbabwe
- Rockefeller, Yayasan 21, 30
- ROPFA (Jaringan Organisasi Petani dan
Produsen Pertanian Afrika Barat) 26,
28, 66, 79, 113, 156, 157, 163, 170
- Rosset, Peter 105, 125
- Royce, Frederick S. 60, 124
- ruang dan tempat 62
- Rumania 15, 16, 18, 21
- Rusia 113, 140, 175
Chayanov 43
Front Petani 113
Lenin 47
revolusi 42
- Rwanda 35
- S**
- SAAU (Himpunan Pertanian Afrika
Selatan) 84
- SACAU (Konfederasi Serikat Petani
Afrika Selatan) 97, 170
- Sahel 26–28
Platform Petani 27
- Sandinista 55, 56
revolusi 119
- Saragih, Henry 123, 129, 158

- Sauvinet-Bedouin, Rachel 148
 Scott, James C. 145
 Seattle, Battle of 7, 127
 Selandia Baru 25, 103
 Selatan Global 4, 23, 28, 51, 70, 134, 137, 146, 159
 Sendero Luminoso 119
 Senegal (CNCR) 66, 164
 Serikat Petani Korea 105
 Shattuck, Annie 93, 94
 Shetkari Sanghatana, gerakan 55
 Sierra Leone 28
 Sikkink, Kathryn 6, 38, 46, 150
 Sintesa, Yayasan 123, 129
 Smillie, Ian 141
Social Movement Studies, buku 8, 191
Social Origins of Dictatorship and Democracy, buku 145
 SOC (Serikat Pekerja Pedesaan), Andalusia 64
 Soeharto 37, 158
 solidaritas, jaringan 13, 35, 120
 Solidarnosc 175
 sosial demokrat 38, 139
 sosialisme 44
 Spanyol 38, 64, 139, 163
 SPI (Serikat Petani Indonesia) 11, 123, 124, 129
 SRA (Masyarakat Pedesaan Argentina) 77
 Sri Lanka 89, 90, 92, 140
 Stalin, Joseph 19, 20, 48
 Stamboliyski, Aleksander 17, 18
 Stédile, João Pedro 112, 163
 surga keuangan/pajak 146
 Swedia 15
 Swiss 18, 103
 Serikat Petani Swiss 21
 Suriah 177
- T**
 Taiwan 32, 37
 Tandon, Rajesh 82
 Tarrow, Sidney 5
- teologi pembebasan 24
 teritori 82, 83
 Thatcher, Margaret 36
 tiga puluh tahun kejayaan 28, 36
 Tilly, Charles 4
 Timur Tengah 24, 112
 Tiongkok 20, 112, 118, 140, 145, 175
 revolusi 20, 35, 44
 Tlaxcala 59
 Transnational Institute 122, 125, 136
 Trotskyis 63
 Tsing, Anna 70, 95
 Turki 164
- U**
 UNAG (Serikat Petani dan Peternak Nasional), Nikaragua 55, 56, 175
 UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) 158, 160
 Uni Soviet 18, 19, 20, 48
 Kebijakan Ekonomi Baru 19
 kolektivisasi pertanian 19
 UPANACIONAL (Serikat Petani Kecil dan Menengah), Kosta Rika 175
 urbanisasi 1, 7, 176
 Utara Global 7, 23, 27, 54, 62, 70, 107, 108, 159
 Uzbekistan 140
- V**
 Vashee, Ajay 75, 76, 84, 97
 Vatikan 24, 163
 Veltmeyer, Henry 131
 Venezuela 105, 140, 163
 vertikal 34, 119
 Vietnam 20, 35, 44, 118
Voluntary Guidelines (Pedoman Sukarela) 81, 154, 155, 168
 von Bülow, Marisa 11
- W**
 WAMIP (Aliansi Masyarakat Adat dan Penggembala Berpindah Sedunia) 39

Watt, Madge 15
 WFF (Forum Pekerja Perikanan Dunia)
 39, 79, 81, 156, 157
 WFFP (Forum Rakyat Nelayan Dunia)
 39, 79, 157
 WFO (Organisasi Petani Dunia) 69, 71,
 76, 77, 80, 82–85, 88, 89, 149, 164, 167,
 170
 White, Ben 61
 White International 17, 18
 Wiebe, Nattie 59
 Wilkinson, Jack 73, 75
 Wolf, Eric R. 44, 117, 118
 WSF (Forum Sosial Dunia) 95, 101, 127,
 158
 WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) 3,
 7, 28, 34, 36, 39, 57, 81, 83, 95, 96, 104,
 105, 125, 130, 149, 152, 160, 161, 164,
 165, 171, 177
 WWF (World Wildlife Fund) 85, 164
 WWOOF (Wahana Pertanian Organik
 Sedunia)
 25, 26

Y

Yordania 140
 Yugoslavia 18, 19
 Yunani 21

Z

Zambia 72, 75, 84, 140
 ZANU (Persatuan Nasional Afrika
 Zimbabwe) 35
 Ziegler, Jean 163
 Zimbabwe 35, 53, 59, 68, 77, 118, 119,
 140, 145
 Zimba, Jervis 83
 ZIMSOFF (Forum Petani Organik
 Zimbabwe) 53, 77
 ZNFU (Serikat Petani Nasional Zambia)
 84

Di buku *Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional* ini, Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr. menyajikan sebuah tinjauan mutakhir nan canggih atas kajian gerakan agraria transnasional (GAT), sejarah panjang GAT sejak awal abad XX hingga masa kini, serta sebuah panduan analitis yang tajam untuk penelitian GAT.

Edelman dan Borras tidak hanya menyuguhkan informasi terperinci tentang beragam gerakan agraria transnasional yang sedikit kita pahami, tetapi juga menelusuri akar-akar domestik dari banyak gerakan itu, menelaah komposisi kewilayahan, kelas, dan ideologi masing-masing gerakan, hubungan mereka dengan LSM maupun lembaga internasional, serta strategi mereka menghadapi neoliberalisme global.

*Sidney Tarrow, Cornell University,
penulis The New Transnasional Activism*

Buku ini menyuguhkan pandangan yang luas tentang GAT, memetakan dilema dan kekuatan mereka serta jalur-jalur yang menjanjikan untuk mereka tempuh, menantang intuisi kita dan memantik kita untuk berpikir kritis.

Sofía Monsalve Suárez, FIAN International

Edelman dan Borras menyoroti persoalan-persoalan pokok terkait beragam organisasi gerakan, LSM, lembaga donor, gelanggang politik, klaim-klaim representasi, perubahan pola bantuan pembangunan, serta arena politik kaum tani yang berlapis dan terus bergeser. Sebuah sumbangsih yang sangat berarti, dan seharusnya dibaca oleh akademisi maupun praktisi.

*Margaret Keck, Johns Hopkins University,
penulis (bersama Kathryn Sikkink) Activists Beyond Borders*






International
Institute of
Social Studies



COHD 人文与发展学院
College of Humanities and Development Studies (COHD)



 INSISTPress
 @insistpress
 @insistpress

ISBN: 978-623-6179-34-5 (PDF)

